



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

TAHUN 2025



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.

- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD tahun 2025;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbangda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappelitbangda kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 12



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 12 TAHUN 2024
 TANGGAL : 22 JULI 2024
 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-26
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-39
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-87
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-91
2.2.1 Evaluasi RKPD Sampai Dengan Akhir Tahun 2023	II-92
2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	II-105
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-110
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-110
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-113
2.4 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's	II-115
2.4.1 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-115
2.4.2 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar	II-117
2.4.3 Capaian Indikator Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal ..	II-118
2.4.4 Peran Para Pihak Dalam TPB/SDG's	II-119
2.5 Isu Strategis.....	II-120
2.5.1 Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah.....	II-120
2.5.2 Isu Strategis Nasional.....	II-122
2.5.3 Isu Strategis Propinsi.....	II-122

BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1		Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1		Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025.....	III-1
3.1.2		Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	III-3
3.1.3		Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	III-4
3.2		Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-7
3.2.1		Kinerja Pelaksanaan APBD	III-7
3.2.2		Neraca Daerah.....	III-13
3.2.3		Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-15
3.2.4		Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025.....	III-21
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1		Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2		Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-5
4.3		Program Pembangunan Daerah dan Alokasi Anggaran Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-9
4.4		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025.....	IV-17
4.5		Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-23
4.6		Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai Perencanaan Pembangunan Berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial).....	IV-32
4.7		Pelaksanaan Inovasi	IV-34
4.8		Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	IV-35
4.9		Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-51
4.10		Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK.....	IV-57
4.11		Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-72
4.12		Pelaksanaan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	IV-86
4.13		Pelaksanaan Kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-90
4.14		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Prioritas	IV-94
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1		Indikator Kinerja Makro	VI-1
6.2		Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.3		Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-3
BAB VII	:	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Nama Gunung, Lokasi dan Tingginya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-3
Tabel 2.2	Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-3
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-4
Tabel 2.4	Nama, Lokasi dan Panjang Sungai	II-5
Tabel 2.5	Kategori Curah Hujan Menurut BMKG	II-6
Tabel 2.6	Jumlah Curah Hujan per bulan tahun 2022	II-6
Tabel 2.7	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-7
Tabel 2.8	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-8
Tabel 2.9	Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-9
Tabel 2.10	Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-9
Tabel 2.11	Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-10
Tabel 2.12	Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-10
Tabel 2.13	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	II-11
Tabel 2.14	Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-12
Tabel 2.15	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-12
Tabel 2.16	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-12
Tabel 2.17	Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-13
Tabel 2.18	Indeks Daya Dukung per Kecamatan	II-14
Tabel 2.19	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-16
Tabel 2.20	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-16
Tabel 2.21	Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-16
Tabel 2.22	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-17
Tabel 2.23	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-17
Tabel 2.24	Nilai Produksi Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-17
Tabel 2.25	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-18
Tabel 2.26	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-19
Tabel 2.27	Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-22
Tabel 2.28	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014 - 2023	II-24
Tabel 2.29	Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2023	II-25
Tabel 2.30	Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-25
Tabel 2.31	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pertumbuhannya Periode 2019-2023	II-28
Tabel 2.32	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dan Distribusinya Periode 2019-2023	II-28
Tabel 2.33	PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)	II-29
Tabel 2.34	PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)	II-29
Tabel 2.35	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2019 – 2023	II-30
Tabel 2.36	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2019 – 2023	II-30
Tabel 2.37	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023	II-31
Tabel 2.38	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-31

Tabel 2.39	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-31
Tabel 2.40	Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumbar Tahun 2019-2023	II-32
Tabel 2.41	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-32
Tabel 2.42	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019–2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-33
Tabel 2.43	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019–2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional	II-33
Tabel 2.44	Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.45	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.46	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.47	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	II-35
Tabel 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2019-2023	II-36
Tabel 2.49	Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-37
Tabel 2.50	Penduduk Usia Kerja (PUK) Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-37
Tabel 2.51	Angkatan Kerja (AK) Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-37
Tabel 2.52	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019 -2023	II-37
Tabel 2.53	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-37
Tabel 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023	II-38
Tabel 2.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi tahun 2019-2023	II-38
Tabel 2.56	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2019-2023	II-38
Tabel 2.57	Produktivitas Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023	II-38
Tabel 2.58	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-39
Tabel 2.59	Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-42
Tabel 2.60	Capaian APS 7-12 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-42
Tabel 2.61	Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-42
Tabel 2.62	Jumlah Sekolah Menurut Jenis nya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2.63	Persentase Penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tingkat partisipasi Sekolah dan jenis kelamin Tahun 2023	II-43
Tabel 2.64	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-43
Tabel 2.65	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2029-2023	II-44
Tabel 2.66	Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	II-44
Tabel 2.67	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2023	II-45
Tabel 2.68	Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-46
Tabel 2.69	Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-47
Tabel 2.70	Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-48
Tabel 2.71	Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2.72	Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023	II-51

Tabel 2.73	Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2.74	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota	II-56
Tabel 2.75	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-57
Tabel 2.76	Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2.77	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2023	II-58
Tabel 2.78	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	II-58
Tabel 2.79	Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-58
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-59
Tabel 2.81	Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-60
Tabel 2.82	Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-60
Tabel 2.83	Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-61
Tabel 2.84	Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-61
Tabel 2.85	Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-62
Tabel 2.86	Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-62
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-63
Tabel 2.88	Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-63
Tabel 2.89	Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-64
Tabel 2.90	Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-65
Tabel 2.91	Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-65
Tabel 2.92	Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2.93	Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-66
Tabel 2.94	Status Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023	II-67
Tabel 2.95	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-67
Tabel 2.96	Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-68
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-69
Tabel 2.98	Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	II-69
Tabel 2.99	Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-70
Tabel 2.100	Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-71
Tabel 2.101	Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-72
Tabel 2.102	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-72
Tabel 2.103	Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-73
Tabel 2.104	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-73
Tabel 2.105	Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2023	II-74
Tabel 2.106	Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-74
Tabel 2.107	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-74

	Tahun 2023	
Tabel 2.108	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-75
Tabel 2.109	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-76
Tabel 2.110	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-76
Tabel 2.111	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Tahun 2023	II-76
Tabel 2.112	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-77
Tabel 2.113	Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-78
Tabel 2.114	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-78
Tabel 2.115	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB Tahun 2023	II-79
Tabel 2.116	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-79
Tabel 2.117	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.118	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-80
Tabel 2.119	Nilai Produksi Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 – 2022	II-80
Tabel 2.120	Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2022	II-81
Tabel 2.121	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2.122	Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2.123	Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.124	Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 2.125	Jumlah TPQ, MDTA dan Surau serta jumlah murid tahun 2023	II-82
Tabel 2.126	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.127	APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-83
Tabel 2.128	Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023	II-84
Tabel 2.129	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-84
Tabel 2.130	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-85
Tabel 2.131	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-85
Tabel 2.132	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-86
Tabel 2.133	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-87
Tabel 2.134	Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-87
Tabel 2.135	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2019 -2023	II-88
Tabel 2.136	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.137	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-89
Tabel 2.138	Angka Kriminalitas Per 100.000 penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.139	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang	II-90

	Ditamatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	
Tabel 2.140	Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-91
Tabel 2.141	Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD dan APBD Tahun 2023	II-93
Tabel 2.142	Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD	II-96
Tabel 2.143	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Urusan pada Perubahan RKPD Tahun 2023	II-97
Tabel 2.144	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-103
Tabel 2.145	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Tahun 2021-2024	II-104
Tabel 2.146	Evaluasi Capaian IKU Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	II-106
Tabel 2.147	Ketercapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDG's) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-116
Tabel 2.148	Capaian Indikator TPB/SDG's pada Pilar Sosial	II-117
Tabel 2.149	Capaian Indikator TPB/SDG's pada Pilar Ekonomi	II-117
Tabel 2.150	Capaian Indikator TPB/SDG's pada Pilar Lingkungan	II-118
Tabel 2.151	Capaian Indikator TPB/SDG's pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	II-118
Tabel 2.152	Capaian Indikator TPB/SDG's Kabupaten Lima Puluh Kota pada Berdasarkan SPM	II-118
Tabel 2.153	Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDG's	II-119
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-3
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	III-7
Tabel 3.3	Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (%)	III-10
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019-2023	III-10
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2019-2023	III-11
Tabel 3.6	Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-11
Tabel 3.7	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-12
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Sesuai PP 12 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (Rp. juta)	III-13
Tabel 3.9	Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-14
Tabel 3.10	Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	III-15
Tabel 3.11	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026	III-17
Tabel 3.12	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026	III-20
Tabel 3.13	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2022-2026	III-21
Tabel 3.14	Kapasitas Fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	III-22
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025	III-26
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah VISI: Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	IV-2
Tabel 4.2	Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-5
Tabel 4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-5
Tabel 4.4	Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah	IV-7
Tabel 4.5	Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026	IV-9
Tabel 4.6	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi	IV-17
Tabel 4.7	Arah Kebijakan Pembangunan	IV-19
Tabel 4.8	Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Penanganan Kemiskinan	IV-37
Tabel 4.9	Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	IV-51
Tabel 4.10	Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK pada Perangkat Daerah	IV-60
Tabel 4.11	Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK pada Kecamatan	IV-66
Tabel 4.12	Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kabupaten Layak	IV-72

	Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	
Tabel 4.13	Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	IV-90
Tabel 4.14	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-94
Tabel 5.1	Perkembangan Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD Tahun 2020 - 2024	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	V-6
Tabel 5.3	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	V-8
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2024 - 2026	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Sasaran Tahun 2022-2024	VI-2
Tabel 6.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota	VI-3

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (KM ²)	II-2
Grafik 2.2	Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-13
Grafik 2.3	Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-15
Grafik 2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-26
Grafik 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-27
Grafik 2.6	Perkembangan IPG Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023	II-35
Grafik 2.7	Perkembangan IDG Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023	II-36
Grafik 2.8	APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-39
Grafik 2.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-40
Grafik 2.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-40
Grafik 2.11	Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-41
Grafik 2.12	Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-41
Grafik 2.13	Trend Data Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Hasil Survei	II-47
Grafik 2.14	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-48
Grafik 2.15	Angka Kematian Balita dari Tahun 2019 - 2023 Di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-49
Grafik 2.16	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019-2023 Di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-49
Grafik 2.17	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023	II-51
Grafik 2.18	Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2019 – 2023	II-53
Grafik 2.19	Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2019 – 2023	II-53
Grafik 2.20	Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2019 – 2023	II-54
Grafik 2.21	Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2019 – 2023	II-54
Grafik 2.22	Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2019 – 2023	II-55
Grafik 2.23	Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-56
Grafik 2.24	Capaian SPM Seluruh Bidang Kab/Kota Se-Sumatera Barat 2022	II-60
Grafik 2.25	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-71
Grafik 2.26	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-78
Grafik 2.27	Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-86
Grafik 2.28	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-89
Grafik 3.1	Target Pertumbuhan Ekonomi Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD (%)	III-4
Grafik 3.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)	III-7
Grafik 3.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (Rp. juta)	III-9
Grafik 3.4	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (%)	III-9

Grafik 3.5	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-13
Grafik 4.1	IDM Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan I-2
Gambar 1.2	Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025 I-2
Gambar 1.3	Proses Penyusunan RKPD tahun 2025 I-3
Gambar 1.4	Tampilan awal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah RI I-5
Gambar 1.5	Keterkaitan Antar Dokumen I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota II-2
Gambar 2.2	Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota II-4
Gambar 2.3	Peta Jaringan Perairan Kabupaten Lima Puluh Kota II-5
Gambar 2.4	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana II-20
Gambar 2.5	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDG's terhadap Target Nasional II-116
Gambar 2.6	Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar Pembangunan II-117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25 Tahun 2004). Perencanaan itu sendiri terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, yang prosesnya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun, baik untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki Dokumen RPJPD untuk periode 2005-2025, dan Dokumen RPJMD untuk Periode 2021-2026, serta segera akan memiliki Dokumen RKPD Tahun 2025.

RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 (RKPD 2025) ini merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan tahun ke 3 dari RPJMD Tahun 2021-2026. Substansi standarnya sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, di antaranya memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Di samping substansi standar sebagaimana tersebut di atas, RKPD 2025 ini juga berisi hal-hal yang dianggap menjadi isu-isu dominan yang berkembang di masyarakat ataupun arahan prioritas dari pemerintah pusat, seperti prevelansi stunting, pengarusutamaan gender, Standar Pelayanan Minimal, dan hal yang terkait dengan inovasi daerah, serta beberapa hal lain.

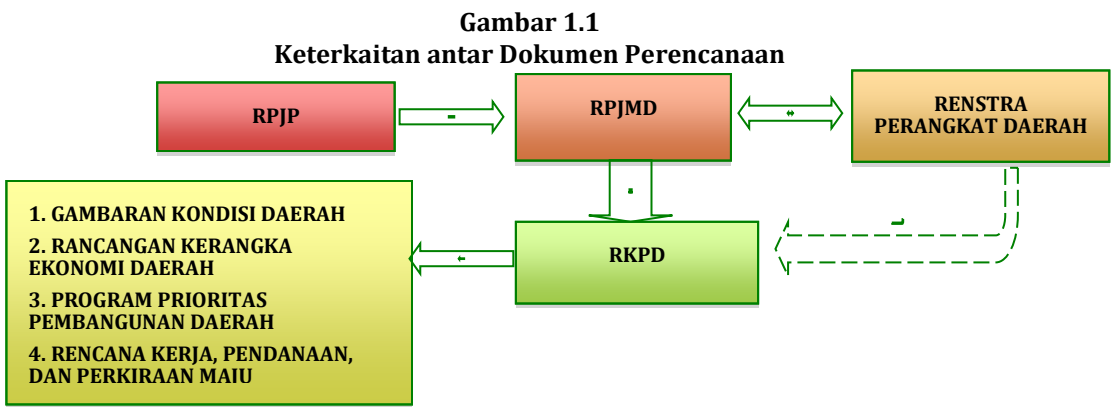
Selanjutnya berkenaan dengan stunting, berdasarkan capaian di tahun 2023, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 8,72%, dimana capaian ini berada di bawah target pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, yaitu sebesar 5,29%. Hal ini disebabkan oleh perubahan perhitungan dari pemerintah pusat untuk capaian pada tahun 2023, dimana lebih besar jumlah anak yang termasuk stunting dibandingkan formula ketika penetapan target, diharapkan penurunan prevalensi stunting Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya dapat memenuhi target.

Adapun terkait dengan inovasi, hal ini dipandang penting secara nasional yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap riset dan Inovasi di Indonesia. Pada tahun 2023 capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 631 (inovatif) dengan target sebesar 1.000 (inovatif), artinya target belum tercapai dan ini menjadi pemicu untuk peningkatan upaya dalam meningkatkan indeks ini. Untuk pemahaman kita bersama, inovasi ini merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan suatu proses dengan mengenalkan dan menerapkan produk atau prosedur yang baru, dimana tujuannya adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Mencermati capaian indeks inovasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 tersebut, ini mengindikasikan agar diperlukan upaya yang lebih keras, agar inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tumbuh dan berkembang lebih banyak. Mengingat cakupan inovasi yang luas, dimana tidak hanya di tatanan pelaksanaan, inovasi memungkinkan juga diterapkan di ranah perencanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan, sehingga bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

RKPD 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2025, yang disusun sebagai penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026, dimana dalam penyusunannya harus menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD. Di samping itu, RKPD 2025 ini

juga harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (RKPD Provinsi 2025), Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025), dan Program Strategis Nasional. Mempedomani RKPD Provinsi 2025 dimaksudkan untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi. Sementara itu, terkait dengan mempedomani RKP 2024 dan program strategis nasional bermakna penyelarasan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP dan program strategis nasional Tahun 2025.

Penyusunan RKPD 2025 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, keterkaitan ini tidak hanya terhadap Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, tetapi juga berkait dengan RPJPD Tahun 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana periode perencanaannya ini mengikuti periode RPJMD, yaitu 2021-2026. Sebagai implementasi dari Renstra Perangkat Daerah ini, masing-masing perangkat daerah akan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah ini menjadi substansi dari RKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

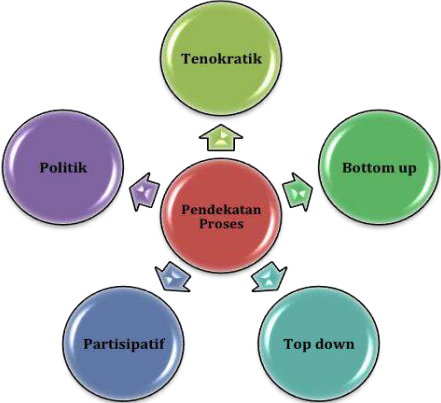


Penyusunan RKPD menggunakan pendekatan proses dan pendekatan substansi, yang diuraikan sebagaimana berikut:

a. Pendekatan Proses

Pendekatan proses terdiri atas pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Pendekatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2
Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025



Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam hal menerima masukan dan saran terhadap RKPD tahun 2025. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, yang tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen RKPD 2025.

Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025. Pendekatan *bottom up*

dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nagari dan Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Terkait dengan Musrenbang Nagari untuk masukan RKPd tahun 2025 telah dilaksanakan oleh 79 nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023.

b. Pendekatan Substansi

Pendekatan substansi ini merupakan pendekatan dengan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan tematik merupakan pendekatan terhadap tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan pendekatan holistik adalah penjabaran tematik dari tema pembangunan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berupa rangkaian kegiatan. Pendekatan integratif merupakan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pemerintah daerah dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya pendekatan spasial adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsi lokasi harus berkaitan satu sama lain dan adanya keterkaitan antara wilayah.

Berkenaan dengan tahapan dan proses penyusunan RKPd tahun 2025, dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017, secara ringkas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.3
Proses Penyusunan RKPd tahun 2025



Uraian dari rangkaian proses penyusunan RKPd tersebut disampaikan dengan tahapan sebagaimana berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPd

Persiapan penyusunan RKPd terdiri dari Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPd; Orientasi mengenai RKPd; Penyusunan agenda kerja tim penyusun; Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahapan persiapan penyusunan ini dititikberatkan kepada menyiapkan semua kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen, baik berupa sumber daya manusianya, maupun data dan informasi, bahkan juga terhadap persiapan pengetahuan sumber daya manusianya itu sendiri.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPd

Penyusunan rancangan awal RKPd dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana yaitu pada bulan Desember 2022. Rancangan awal RKPd kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, rancangan awal RKPd provinsi, RKP, dan program strategis nasional, serta pedoman penyusunan RKPd.

Rancangan awal RKPd merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPd berisi substansi yang mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi daerah.
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah.
- c. analisis kapasitas riil keuangan daerah.
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD.
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD.
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional.
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- j. perumusan program prioritas pembangunan daerah.
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

Forum ini adalah membahas rancangan awal RKPD bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal.

Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan proses untuk membahas rancangan awal tersebut bersama dengan melibatkan, DPRD dan para pemangku kepentingan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapelitbang dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada konsultasi publik. Masukan dan saran tersebut menjadi masukan terhadap penyempurnaan rancangan awal RKPD. Forum Konsultasi Publik RKPD 2025 sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.

4. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan setelah forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2025. Musrenbang RKPD di kecamatan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah berupa forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah tahunan di kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari. Forum ini merupakan lanjutan dari Musrenbang di tingkat Desa/Nagari dimana nagari menyampaikan prioritas rencana pembangunan masing-masing nagari ke tingkat kecamatan untuk di Musrenbangkan. Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/nagari, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud mencakup : a.) Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/nagari yang tertuang dalam daftar usulan desa/nagari yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan, b.) Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/nagari, c.) Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD. Berita acara kesepakatan tersebut dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten. Musrenbang RKPD di kecamatan sudah dilaksanakan pada 22-26 April 2024.

5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk RKPD tahun 2025 difasilitasi oleh Bapelitbang dengan narasumber atau pemateri adalah masing-masing kepala Perangkat Daerah. Adapun peserta dari forum ini adalah Perangkat daerah dan unsur stakeholder terkait lainnya. Hasil forum ini sebagai bahan masukan dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Forum Perangkat Daerah pembahasan Renja PD ini telah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebanyak 42 OPD pada tanggal 2-8 Mei 2023.

6. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD yang didasarkan kepada: a.) Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan b.) Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Rancangan RKPD ini sebagai bahan untuk Musrenbang RKPD kabupaten. Rancangan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut : a.) pendahuluan; b.) gambaran umum kondisi daerah; c.) kerangka ekonomi dan keuangan daerah; d.) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e.) rencana kerja dan pendanaan daerah; f.) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan g.) penutup.

Rancangan RKPD tahun 2025 disampaikan oleh kepala Bapelitbang ke Bupati Lima Puluh Kota untuk mendapat persetujuan sebagai bahan Musrenbang RKPD tahun 2025. Setelah memperoleh persetujuan dari Bupati, maka dilaksanakanlah Musrenbang RKPD tahun 2025.

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang ini dilaksanakan oleh Bappeda/Bapelitbang dengan peserta antara lain Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Musrenbang RKPd kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPd kabupaten. Pembahasan Rancangan RKPd tersebut, dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, menyepakati prioritas pembangunan Daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan nagari yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil Musrenbang RKPd kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPd kabupaten. Namun karena beberapa hal maka pelaksanaan Musrenbang RKPd Kabupaten terselenggara pada 28 Mei 2024.

8. Penyusunan Rancangan Akhir RKPd

Rancangan akhir RKPd merupakan penyempurnaan rancangan RKPd berdasarkan hasil musrenbang RKPd Kabupaten, musrenbang RKPd provinsi dan musrenbangnas RKP. Rancangan akhir ini selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPd.

9. Penetapan RKPd

Penetapan RKPd merupakan rumusan rancangan akhir RKPd yang dijadikan menjadi suatu kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPd Provinsi ditetapkan.

Sebagai upaya memudahkan penyusunan dan pendekatan perencanaan tahun 2025, maka diterapkan sistem informasi melalui *Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI)*. Sistem ini menerjemahkan proses penyusunan RKPd dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Penggunaan aplikasi dimulai dari tingkat nagari, kecamatan, DPRD dan Perangkat Daerah dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai akun masing-masing terhadap penerapan aplikasi SIPD tersebut. Masing-masing dari unsur tersebut mempunyai operator masing-masing yang dilatih dan dibimbing oleh Perangkat Daerah terkait. Bentuk dan tampilan dari sistem informasi SIPD ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.4
Tampilan awal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah RI



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPd Tahun 2025 ini di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1); dan
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 39).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

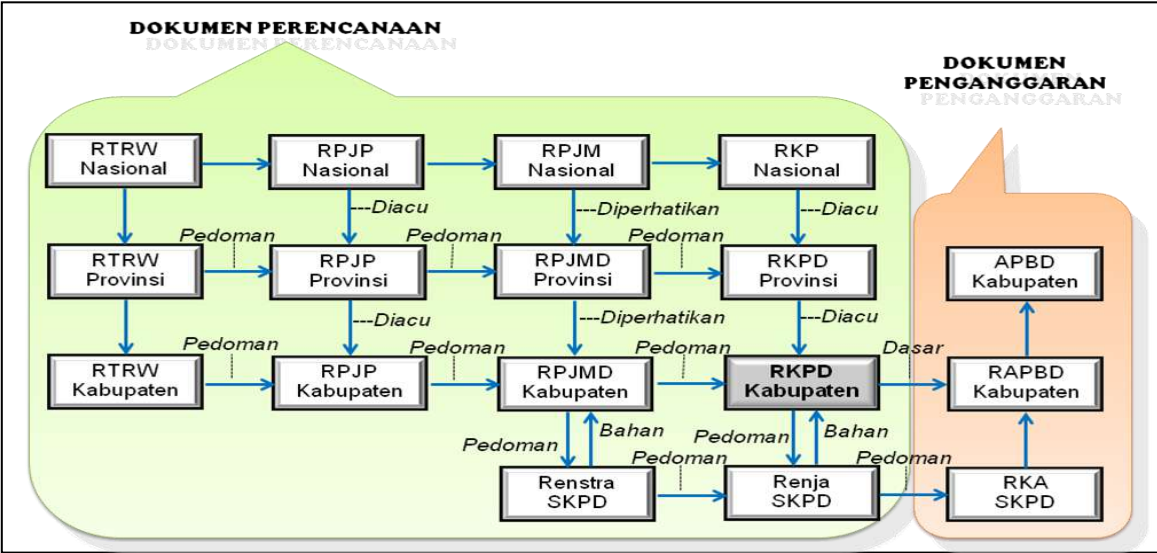
RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya tersebut adalah antara lain dengan dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, KUA, PPAS dan APBD.

Adapun keterkaitan dan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya adalah:

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mempedomani RTRW, RPJPD, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mengacu kepada RKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mengacu juga kepada RKP dan RPJM Nasional.
3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan masukan dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya disusun dengan memperhatikan usulan-usulan dari Musrenbang RKPD di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (Nagari, Kecamatan, Kabupaten).
4. RKPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5. RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan selanjutnya juga menjadi dasar dalam keseluruhan proses penyusunan APBD Tahun 2025, termasuk dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Gambar di bawah ini menunjukkan alur keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah, tahunan serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Gambar 1.5
Keterkaitan Antar Dokumen



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 ini adalah agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan. RKPD dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab I **Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

Bab II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memuat (1) Kondisi umum, (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 dan evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD tahun 2021-2026, (3) permasalahan pembangunan daerah, (4) Isu strategis.

Bab III **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun 2025.

Bab IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025, yang didasarkan kondisi kekinian.

Bab V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada RPJMD.

Bab VII **Penutup**

Merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"BT-100°50'47,80"BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 Ha. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, 2 Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

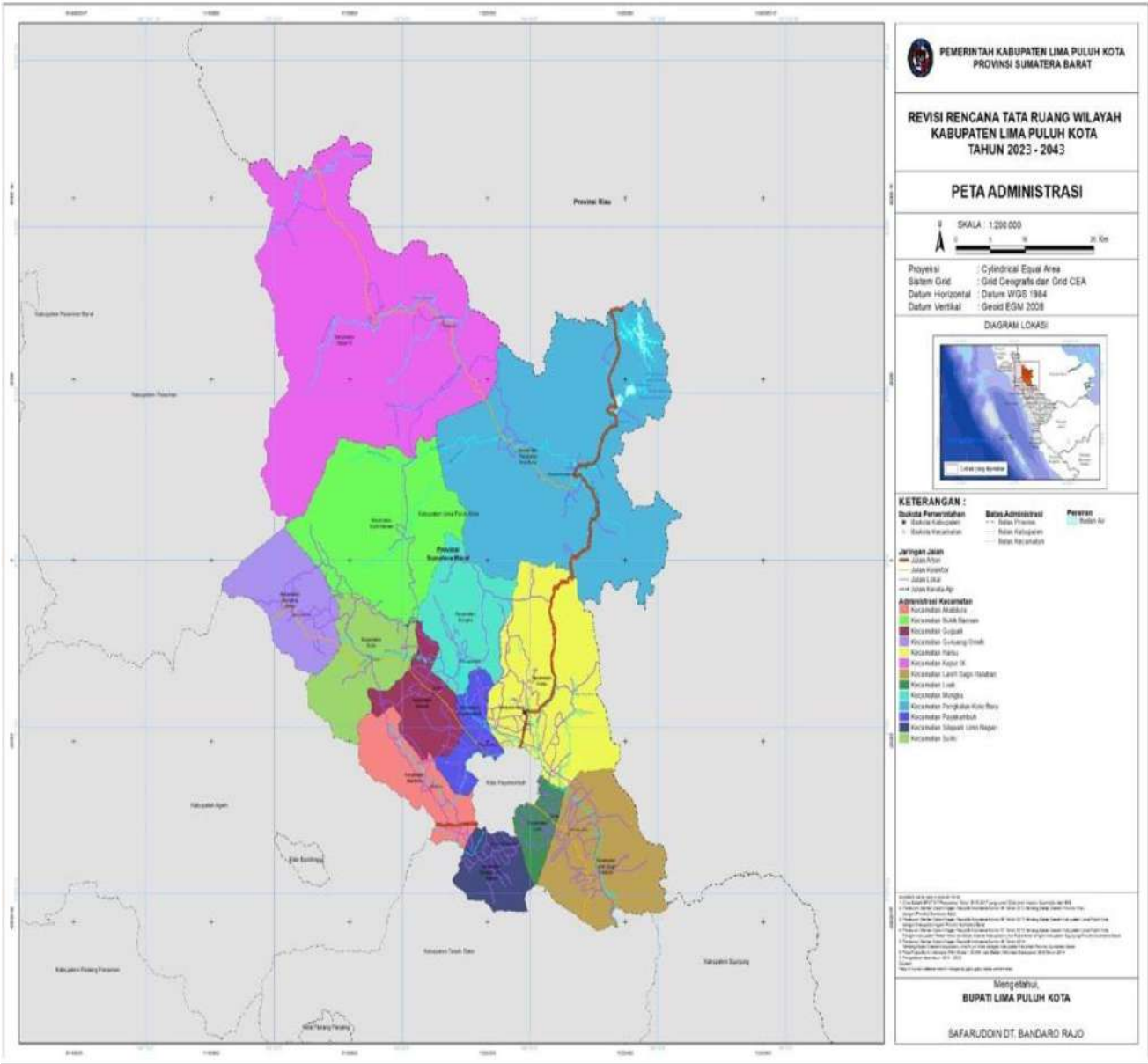
Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, terutama sektor pariwisata, karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang indah dan banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Dari sektor pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, memiliki akses yang tidak sulit dijangkau sehingga bisa menjadi *supplier* bagi Provinsi tetangga. Hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi. Luas kawasan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 126.284 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 44.339 hektar berada di seluruh kecamatan.
- Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 12.960 hektar berada di seluruh kecamatan.
- Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 68.773 hektar berada di seluruh kecamatan.
- Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 212 hektar berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak.

Adapun kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 18.259 hektar berada di seluruh kecamatan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara administratif dibagi menjadi 13 kecamatan, 79 Nagari, dan 425 Jorong, dimana Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar berikut:

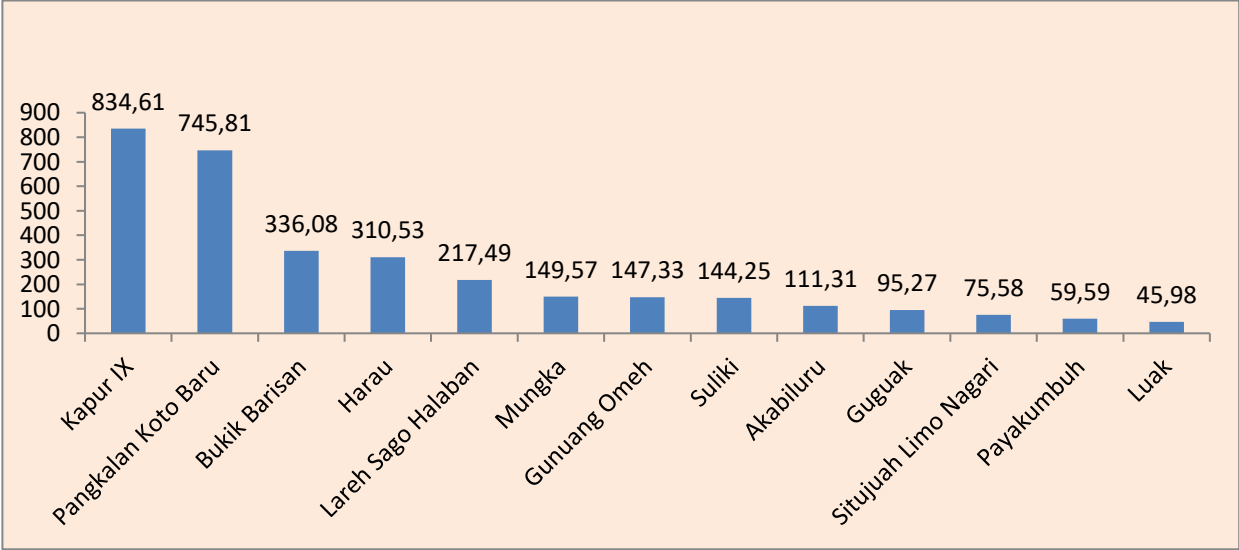
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Jika ditinjau dari luasan wilayah dari masing-masing kecamatan, maka dari 13 kecamatan yang ada tersebut, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 Km² atau 25,50 % dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km² atau 1,40 % dari luas kabupaten, secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (KM²)



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

b. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggul dan dialiri oleh 17 buah sungai dengan rincian sebagai berikut. Nama gunung beserta lokasi dan tingginya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Gunung	Lokasi	Tinggi
1	Gunuang Sago	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari	2.261 m
2	Gunung Bungsu	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka	1.253 m
3	Gunung Sanggul	Kecamatan Harau	1.495 m

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan klasifikasi lereng dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi lereng, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40% dan >40%, dimana rincian dari klasifikasi lereng tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha)				Jumlah
		0-5 %	5-15%	15-40%	> 40%	
1	Gunuang Omeh	2.661,18	3.600,42	3.913,50	5.478,90	15.654,00
2	Suliki	3.902,79	0,00	896,00	4.792,90	9.591,69
3	Bukik Barisan	5.001,40	6.767,60	7.355,00	10.297,00	29.421,00
4	Guguak	1.999,00	2.048,00	2.655,00	3.716,49	10.418,49
5	Mungka	2.387,16	0,00	3.082,00	2.931,60	8.400,76
6	Payakumbuh	686,00	0,00	5.228,00	1.690,99	7.604,99
7	Akabiluru	1.508,16	2.262,24	2.356,50	3.299,10	9.426,00
8	Luak	956,00	1.424,00	2.443,00	2.158,80	6.981,80
9	Situjuah Limo Nagari	1.186,00	0,00	5.217,00	1.737,00	8.140,00
10	Lareh Sago Halaban	6.317,60	0,00	10.041,00	4.657,00	21.015,60
11	Harau	7.085,60	1.422,00	10.420,00	14.588,00	33.515,60
12	Pangkalan Koto Baru	11.392,96	27.039,00	39.570,00	24.922,10	102.924,06
13	Kapur IX	11.573,77	17.360,64	18.084,00	25.317,60	72.336,01
Jumlah		56.657,62	61.923,90	111.261,00	105.587,48	335.430,00

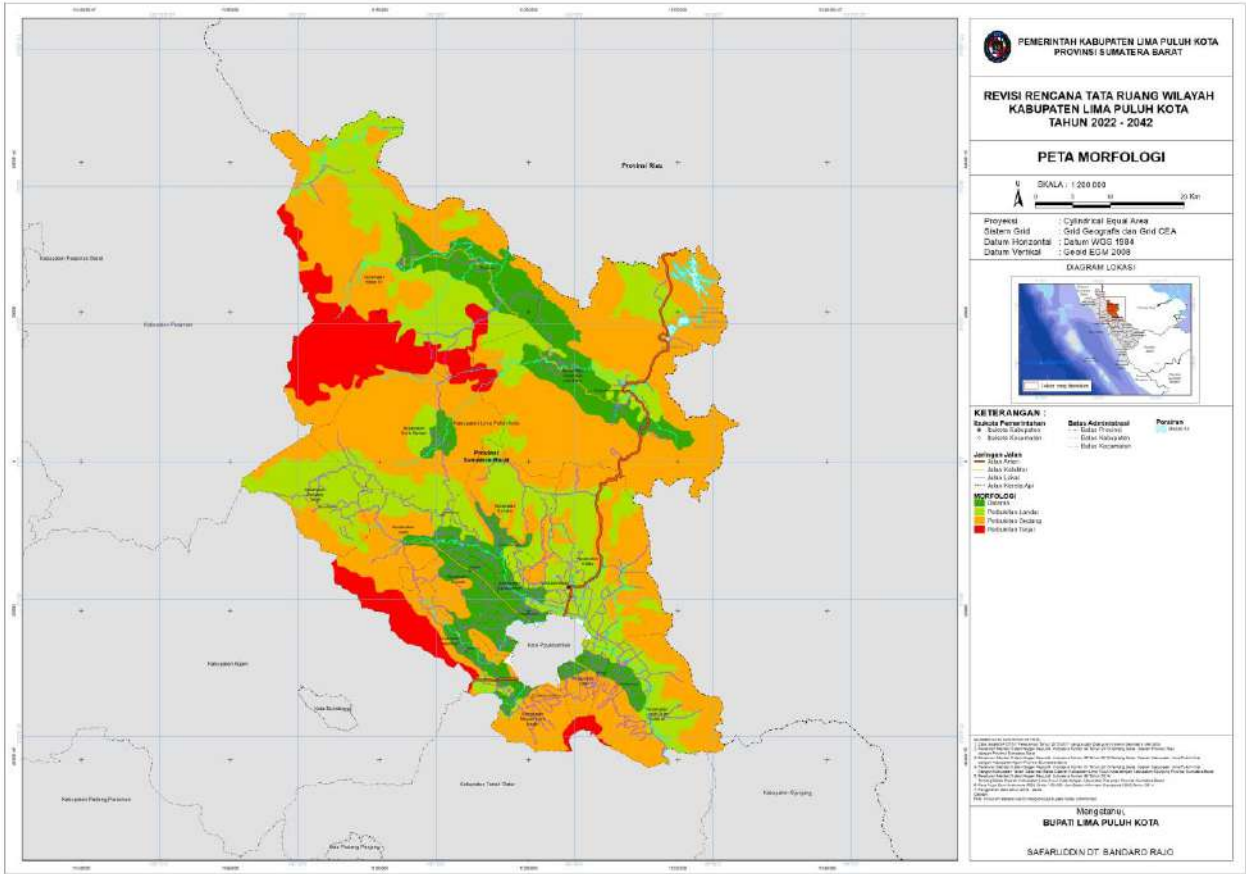
Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

c. Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari “*Volcanic Arc*” tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur *faulting system* (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan-Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banja Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (*joint*) yaitu berupa Kekar Silang (*shear joint*) dan kekar Tarik (*tension joint*). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada Busur Magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara Pulau Sumatera, terus ke Pulau Jawa sampai ke sebelah Timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2042 Kabupaten Lima Puluh Kota

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

d. Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata *hydro* (air) dan *logia* (ilmu), yang bermakna Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal/permukaan (*freatik*). Salah satu air tanah dangkal/permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini diadopsi dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai (WS) yang berada di Kabupaten Lima Puluh teakreditasiKota adalah termasuk ke dalam WS Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai WS Strategis Nasional.

WS lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, DAS Indragiri, DAS Rokan dan DAS Masang Kiri. Luas empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa WS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub DAS Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat antara lain terdiri atas: Batang Mahat, Batang Kampar, Batang

Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenang, adapun Sub DAS Sinamar antara lain terdiri atas: Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2024 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

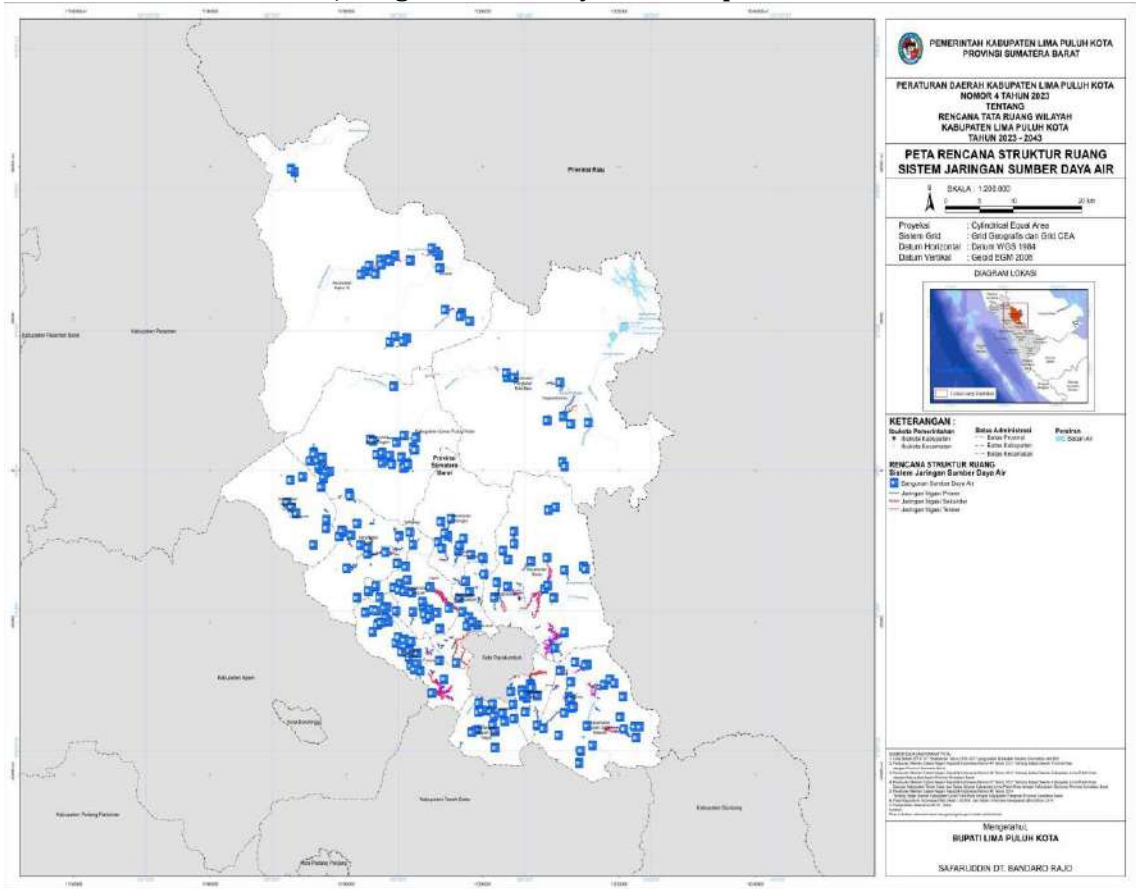
Tabel 2.4
Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (KM)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenang	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Jaringan sumber daya air di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

e. **Klimatologi**

Curah Hujan (dengan satuan mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Kategori Curah Hujan Menurut BMKG

No	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	0 – 100	Rendah
2	100-300	Menengah
3	300-500	Tinggi
4	> 500	Sangat Tinggi

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023

Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman, di 5 titik pengamatan, yakni Suliki, Guguak, Luhak, Pangkalan dan Tanjung Pati. Curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi di titik pengamatan Pangkalan dan Muaro Paiti dengan curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi sebesar 274,17 mm di Pangkalan dan paling rendah 139,67 mm di Suliki.

Curah hujan rata- rata tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Jumlah Curah Hujan per Bulan Tahun 2022

No	Titik Pengamatan	Jumlah Curah Hujan per bulan (mm)												Total	Rata-rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Suliki	87	112	95	218	92	284	95	165	139	158	169	62	1676	139,67
2	Guguak	196	165	96	313	38	268	65	217	196	280	109	146	2089	174,08
3	Luhak	134	196	98	333	90	199	110	143	114	261	133	163	1974	164,50
4	Pangkalan	262	249	249	340	123	199	161	544	198	428	249	288	3290	274,17
5	Tanjung Pati	126	265	219	217	122	237	48	261	97	370	143	160	2265	188,75

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023

Data curah hujan bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi BMKG Padang Pariaman di 5 titik pengamatan, termasuk dalam kategori rendah sampai tinggi. Puncak tertinggi curah hujan rata-rata bulanan terjadi pada bulan Oktober, dengan rincian: di titik pengamatan Suliki (158 mm), Guguak (280 mm), Luhak (261 mm), Pangkalan (428 mm) dan Tanjung Pati (370 mm). Terendah pada bulan Mei, dengan rincian di titik pengamatan Suliki (92 mm), Guguak (38 mm), Luhak (90 mm), Pangkalan (123 mm) dan Tanjung Pati (122 mm).

f. **Penggunaan Lahan**

Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu yang dikatakan sebagai kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang, serta kawasan rawan banjir. Dan kawasan lindung lainnya seperti taman burung, cagar biosfir, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Sementara itu, yang termasuk kawasan budi daya adalah kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria kawasan sebagaimana di atas, maka untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dikelompokkan penggunaan lahan ke dalam 4 jenis penggunaan lahan, yaitu:

- a) hutan lindung
- b) hutan suaka alam dan wisata
- c) hutan produksi
- d) areal penggunaan lain

Adapun rincian dari guna lahan berdasarkan 4 jenis kelompok guna lahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	2023	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung*	114.667	34,19
2	Hutan Suaka Alam & Wisata*	20.673	6,16
3	Hutan Produksi*	32.805	9,78
	a. Hutan Produksi Tetap	4.962	1,48
	b. Hutan Produksi Terbatas	20.127	6,00
	c. Hutan Dapat dikonversi	7.716	2,30
4	Areal Penggunaan Lain	167.285	49,87
	I. Lahan Basah	25.591	7,63
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090	4,20
	b. Sawah Irigasi tak Produktif	6.641	1,98
	c. Sawah Non Irigasi	1.555	0,46
	d. Rawa	171	0,05
	e. Kolam/Tebat/Embung	1.320	0,39
	f. Waduk/Danau	1.814	0,54
	II. Lahan Kering	141.694	42,24
	a. Perkebunan	40.250	12,00
	b. Permukiman/Pekarangan	9.140	2,72
	c. Industri	171	0,05
	d. Pertambangan	395	0,12
	e. Lahan Terlantar/Semak Belukar	54.825	16,34
	f. Penggunaan Lain	36.913	11,00
	Jumlah	335.430	100

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah Lahan Terlantar/Semak Belukar 54.825 Ha (32,77%) dan penggunaan lahan yang terkecil adalah Rawa dan Industri dengan luas yang sama 171 Ha (0,10%).

2.1.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertanian ini meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan pariwisata tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan pada pencapaian Misi ke-2 yaitu Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional dan Misi ke-5 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan memperhatikan potensi yang ada di nagari-nagari pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata.

Kawasan tanaman pangan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan budi daya pertanian berlahan basah merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Luas kawasan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan lebih kurang seluas 44.339 ha berada di seluruh kecamatan. Adapun proporsi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 13,5% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Perwilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada. Pengembangan kawasan hortikultura akan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas kawasan lebih kurang 12.960 Ha. Adapun proporsi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 4,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan yang direncanakan memiliki luas 68.773 Ha, kawasan peruntukan perkebunan bisa dikembangkan di seluruh kecamatan. Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanaman gambir, coklat, kopi, karet, kelapa dan lainnya. Perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat cukup bervariasi. Adapun proporsi Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 21,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh seluas 212 Ha yang berfungsi sebagai tempat pusat penghasil sapi bibit unggul nasional. Pengeloan BPTU-HPT menjadi wewenang pemerintah pusat. BPTU-HPT Padang Mangateh terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Adapun proporsi Kawasan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,1% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong adanya kerja sama antar nagari yang memiliki potensi unggulan yang sama yang berada di dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan perdesaan.

a. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk.

Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabuputen Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu komoditi yang dijadikan sebagai produk unggulan daerah adalah jeruk, satu yang telah diberi label adalah Jesigo (Jeruk Siam Gunuang Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh dan sekitarnya. Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditi pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditi utama. Komoditi utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan sub sektor hortikultura, yang komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta sub sektor perkebunan dengan komoditi utamanya berupa gambir, kakao dan sawit.

Perkembangan luas panen dan produksi komoditi pertanian tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Jenis data	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produksi (ton)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	56.920	237.028	30.791	134.375	52.351	232.018,75	50.577	228.015,60	50.839	228.523
2	Jagung	6.836	41.353,9	6.678	39.290	6.220	43.351,01	6.884	50.277,78	8.614	63.180
3	Jeruk	959,15	39.593	965,27	58.193	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	23.867,99
4	Cabe Besar	764	17.058	789	19.819	1.045	8.814,1	1.048,75	10.498,28	909,95	9.470,07
5	Manggis	825	10.412	974,45	20.981	1.210,79	29.815,3	1.239,31	26.818,4	188,40	816

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi atas 5 jenis komoditi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.065	2.067	8.288	4,01
2	Suliki	2.366	2.372	11.216	4,73
3	Bukik Barisan	4.360	4.308	15.515	3,60
4	Guguak	5.090	5.074	21.080	4,15
5	Mungka	2.093	2.069	9.698	4,69
6	Payakumbuh	4.775	4.787	22.529	4,71
7	Akabiluru	4.128	4.177	19.624	4,70
8	Luak	3.520	3.476	16.372	4,71
9	Situjuah Limo Nagari	4.626	4.702	22.127	4,71
10	Lareh Sago Halaban	6.180	6.938	32.813	4,73
11	Harau	9.248	9.372	44.195	4,72
12	Pangkalan	610	610	2.135	3,50
13	Kapur IX	453	887	2.933	3,31
Jumlah	2023	49.514	50.839	228.523,90	4,50

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2023, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,50 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk serta permodalan.

Untuk sebaran komoditi jagung terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilihat dari sebaran lahan dan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, luas panen paling luas serta produksi terbanyak terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,33 ton/Ha, dengan produktivitas tertinggi di Kecamatan Lareh Sago Halaban (8,68 ton/Ha) dan Payakumbuh (7,75 ton/ha). Sebaran lahan dan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen Tua (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)	Panen Muda
1	Gunuang Omeh	60	61	290,50	4,76	-
2	Suliki	255	289	2.113,80	7,31	-
3	Bukik Barisan	91	102	563,04	5,52	-
4	Guguak	1.521	1.496	11.561,00	7,73	11
5	Mungka	753	748	5.062,20	6,77	-
6	Payakumbuh	803	766	5.933,60	7,75	41
7	Akabiluru	301	301	2.546,20	6,03	19
8	Luak	721,4	863,4	5.554,00	6,43	-
9	Situjuah Limo Nagari	590	615	4.502,70	7,32	-
10	Lareh Sago Halaban	1.855,5	1.986	17.239,00	8,68	-
11	Harau	1.146	1.116	7.567,60	6,78	44
12	Pangkalan Koto Baru	7,75	21,75	54,38	2,50	-
13	Kapur IX	149	128	192,00	1,50	-
Kab. Lima Puluh Kota		8.253,7	8.614	63.180,02	7,33	115

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dengan begitu beragamnya tingkat produktivitas komoditi ini, kiranya peluang untuk meningkatkan produksi jagung ini dapat dilakukan tidak hanya dari sisi perluasan lahan tapi juga bisa dari sisi optimalisasi produktivitas. Peningkatan produksi jagung adalah hal mesti untuk dilakukan, mengingat saat ini kebutuhan jagung untuk peternak ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota saja masih belum terpenuhi.

Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian.

b. Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Pada tahun 2023, produksi perkebunan gambir adalah sebesar 16.780,94 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia. Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.338,50 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 558,50 Ha, produktif seluas 16.708 Ha serta rusak seluas 72 Ha. Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	374	0	374	299,65
2	Akabiluru	0	0	0	0	0
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	6	120	0	126	60,10
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	160	685	25	870	122,59
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	150	774	0	924	1.036,0
9	Suliki	10	147	0	157	138,97
10	Bukik Barisan	42,50	2.625	0	2 667,50	2.700,64
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	145,0	7 618	0	7.763	4.523,10
13	Pangkalan Koto Baru	45,0	4 365	47	4.457	7.899,89
Jumlah 2023		558,50	16.708	72	17.338,50	16.780,94
2022		615,5	16.692	228	17.535,5	7.776,42
2021		624,5	16.623	300	17.547,5	7.836,14
2020		618	15.764	320	16.702	7.827
2019		695	15.764	115	16.574	6.802

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katechine dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta.

Untuk produksi perkebunan kakao, pada Tahun 2023 adalah sebesar 844,95 ton, turun dibandingkan tahun 2022 dengan produksi sebesar 1.590,41 ton. Luas perkebunan kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 4.109,75 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 565,75 Ha, produktif seluas 3.144,00 Ha serta rusak seluas 400 Ha. Luas dan produksi Kakao pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	70,00	378,00	0,00	448,00	509,64
2	Akabiluru	8,00	1.175,00	2,00	1.185,00	48,95
3	Luak	13,75	37,00	0,00	50,75	6,72
4	Lareh Sago Halaban	78,00	51,00	0,00	129,00	7,80
5	Situjuah Limo Nagari	38,00	148,00	114,00	300,00	19,16
6	Harau	45,00	45,00	5,00	95,00	21,98
7	Guguak	6,00	364,00	5,00	375,00	39,17
8	Mungka	44,00	75,00	0,00	119,00	5,36
9	Suliki	103,00	186,00	40,00	329,00	65,87
10	Bukik Barisan	40,00	535,00	0,00	575,00	100,90

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
11	Gunuang Omeh	25,00	16,00	0,00	41,00	11,00
12	Kapur IX	92,00	49,00	5,00	146,00	3,20
13	Pangkalan Koto Baru	3,00	85,00	229,00	317,00	5,20
Jumlah 2023		565,75	3.144,00	400,00	4.109,75	844,95
2022		630	3.292	605	4.527	1.590,41
2021		738	3.099	2.272	6.109	1.774
2020		728	3.352	2.805	6.885	1.767
2019		2.285	4.570	1.439	8.294	4.090

Sumber: Sumber Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Komoditi perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 75 Ha bertambah menjadi 3.422 Ha di tahun 2023. Akan tetapi dari segi produksi, terjadi penurunan dari 9.375,37 ton di tahun 2022 menjadi 6.354,12 ton di tahun 2023. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	0	0	0	0
2	Akabiluru	0	4	0	4	1,12
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	3	14	0	17	9,60
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	0	54	5	59	7,58
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	0	0	0	0	0
9	Suliki	0	0	0	0	0
10	Bukik Barisan	0	6	0	6	16,72
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	359	196	0	555	192
13	Pangkalan Koto Baru	250	2.486	45	2.781	6.126,60
Jumlah 2023		612	2.760	50	3.422	6.354,12
2022		541	2.759	47	3.347	9.375,37
2021		198	2.738	76	3.012	8.725,86
2020		181	2.724	57	2.962	7.714

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

c. Sektor Peternakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/ RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosisitem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Perternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simenthal	Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau Kec. Situjuah Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuah Limo Nagari
5.	Ternak – Kakao	Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komiditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras pedaging, telur ayam ras petelur, telur burung puyuh dan susu kerbau. Komoditi yang mengalami penurunan adalah daging sapi potong, daging ayam ras petelur, daging itik, daging burung puyuh, telur itik dan susu sapi perah. Perkembangan jumlah produksi daging, telur dan susu tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging Sapi Potong	1.091.904,00	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00
2	Daging Kerbau	151.318,75	143.152,35	195.830,53	197.247,88	196.776,00
3	Daging Kambing	75.599,56	70.154,28	33.624,76	35.232,12	35.800,00
4	Daging Ayam Buras	422.327,00	475.293,28	498.979,71	509.609,18	526.235,00
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.442.618,00	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00
6	Daging Ayam Ras Pedaging	17.549.234,00	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00
7	Daging Itik	82.176,00	85.396,42	84.059,89	82.290,60	111.658,00
8	Daging Burung Puyuh	82.176,00	67.323,76	137.238,20	69.851,98	69.856,00
9	Telur Ayam Buras	223.342,74	247.098,50	259.412,75	264.938,34	273.583,00
10	Telur Ayam Ras Petelur	57.418.459,41	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00
11	Telur Itik	767.259,34	797.323,68	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00
12	Telur Burung Puyuh	754.015,62	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00
13	Susu Sapi Perah	53.550,00	64.260,00	18.783,56	14.353,95	14.354,00
14	Susu Kerbau	123.285,00	99.920,00	88.430,00	90.402,58	90.423,00

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Terhadap produksi ternak pada tahun 2023, komoditi yang mengalami penambahan populasi adalah sapi, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan burung puyuh. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Komoditi	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	42.708	45.071	48.451	51.030	52.561
2	Kerbau	12.329	9.992	8.843	9.040	9.042

No.	Jenis PHMS	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Avian Influenza	-	-	-	3 Kasus	5 kasus

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kasus rabies pada tahun 2023 sebesar 152 kasus, lebih banyak 54 kasus dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 juga terdapat 1 kasus positif Seticimia Epiizootica dan Avian Influenza sebanyak 5 kasus. Sedangkan untuk Jembrana tidak ada kasus karena terlaksananya vaksin dengan baik dan maksimal. Dari kasus rabies pada 2023, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan sebanyak 24 ekor positif rabies.

Kawasan peternakan harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung diantara aspek ketersediaan hijauan pakan ternak dan limbah dari hasil peternakan tersebut. Adapun daya dukung wilayah terhadap kawasan peternakan tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersediaan potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan Indek Daya Dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukkan status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahar dkk, 1991) sedangkan daya dukung potensial adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Indeks Daya Dukung per Kecamatan

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	2,6	7.988,0	3.088,7	3.503,5	2.616,8	886,7
2	Akabiluru	2,7	9.837,6	3.581,6	4.314,7	2.862	1.452,7
3	Luak	0,4	7.051,3	16.481,9	3,092,7	7.216,5	4.123,8
4	Lareh Sago Halaban	1,1	13.734,5	12.356,5	6.023,9	8.974,5	2.950,6
6	Harau	2,4	17.250,0	7.159,3	7.568,8	5.025,8	2.543
5	Situjuah Limo Nagari	2,2	6.310,2	2.876,6	2.767,6	4.001,3	1.233,7
7	Guguak	1,9	13.792,4	7.353,6	6.049,3	3273	2.776,3
8	Mungka	3,0	6.244,3	2.079,4	2.738,7	1.067,3	1.665,4
9	Suliki	2,6	8.961,4	3.431,2	3.930,5	1.073,3	2.857,2
10	Bukik Barisan	2,2	13.806,9	6.328,3	6055,7	2.784	3.271,7
11	Gunuang Omeh	5,2	8.472,4	1.635,3	3.716,0	732,8	2.983,2
12	Kapur IX	9,4	15.927,4	1.701,6	6.985,7	840	6145,7
13	Pangkalan Koto Baru	7,5	11.305,7	1.502,0	4.958,7	975,8	3982,9
	Total	2,7	140.682,10	69.576,00	53.654,40	41.443,10	17,173,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

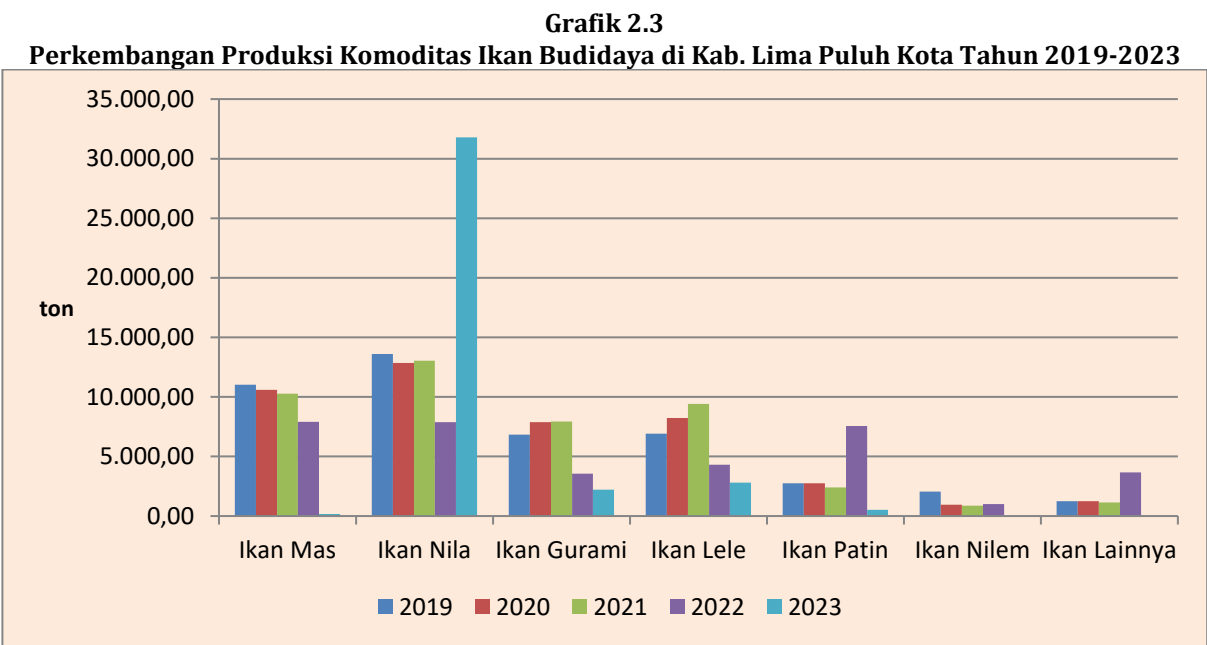
Pada data di atas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 53.654,40 ST, dengan status aman dengan IDD nya mencapai nilai 2,7. Secara keseluruhan Kabupaten Lima Puluh Kota masih mampu menambah kapasitas sebesar 17.173,40 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu pada kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago halaban (1.1) dan Kecamatan Guguak (1,9).

d. Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen.

- a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 598 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN).
 - 1) Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2023 tercatat produksi budidaya pembesaran yang terdiri dari :
 - ✓ Pada tahun 2023, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 37.536,30 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 35.897,40 ton, maka terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 1.638,90 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 29.984,99 ton selama tahun 2023 dengan rata-rata produksi 0,31 ton/ha, sementara produksi yang paling kecil terdapat di

- Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang hanya sebesar 9,10 ton, dengan rata-rata produksi 102,50 ton/ha.
- ✓ Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2023 adalah sebesar 70,15 ton dengan produksi rata-rata adalah 0,02 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari dan Harau. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Akabiluru yaitu 39,10 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Akabiluru sebanyak 11,40 ton.
 - b. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunung Omeh, serta BBI Tarantang. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 78.790.850 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (5.567.300), Gurami (19.902.000), Nila (17.444.950), Lele (35.784.600) dan Nilem (92.000). Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.545,96 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (381,47 ton), Kapiék (353,75 ton), Baung (581,64 ton dan lainnya (2.229,10 ton).
- Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Komoditi ikan budidaya yang tinggi jumlah produksinya adalah ikan Nila, menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2013 dan pada tahun 2023 meningkat cukup tinggi. Produksi komoditas perikanan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di atas. Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Sejak tahun 2019 sampai saat ini, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh perikanan budidaya kolam. Pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya kolam sebesar 37.536,30 ton. Berikutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari penangkapan ikan perairan umum. Pada tahun 2023 produksi penangkapan ikan perairan umum mengalami peningkatan, dari 3.296,24 ton pada tahun 2022 menjadi 3.545,95 pada tahun 2023. Selanjutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari perikanan budidaya sawah. Produksi perikanan budidaya sawah cenderung mengalami penurunan, dari 127,50 ton pada tahun 2022 menjadi 70,15 ton pada tahun 2023. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Potensi Perikanan yang tersebar di 13 kecamatan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya pembesaran, pembenihan, penangkapan di perairan umum dan pengolahan/pasca panen dan pemasaran. Pada saat ini kegiatan perikanan ini sudah didukung oleh 725 kelompok kelembagaan perikanan yang terdiri dari 607 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 29 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar), 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 74 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas). Jumlah kelembagaan perikanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.19

Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ikan mas	11.017,95	10.582,59	7.905,11	7.905,11	168,75
2	Ikan nila	13.594,77	12.847,67	7.878,07	7.878,07	31.793,69
3	Ikan gurami	6.831,05	7.880,60	3.556,73	3.556,73	2.227,57
4	Ikan lele	6.907,40	8.239,31	4.320,71	4.320,71	2.811,51
5	Ikan patin	2.759,14	2.765,41	7.551,87	7.551,87	533,18
6	Ikan nilem	2.064,10	953,39	1.017,22	1.017,22	0,30
7	Ikan lainnya	1.238,50	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1,30
Jumlah		44.412,91	44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.20

Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Produksi Perikanan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Budi daya sawah (ton)	713,47	187	168,95	127,50	70,15
2	Perikanan Budidaya kolam (ton)	43.381,38	43.996,27	44.610,25	35.897,40	37.536,30
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	3.801,69	3.412,02	2.829,12	3.296,24	3.545,95

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.21

Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelembagaan				Jumlah Total
		Pokdakan	Poklahsar	KUB	Pokmaswas	
1	Harau	85	8	-	15	108
2	Akabiluru	51	1	-	6	58
3	Luak	48	2	-	0	50
4	Lareh Sago Halaban	65	-	-	4	69
5	Payakumbuh	51	4	-	3	58
6	Pangkalan Koto Baru	37	6	12	4	59
7	Kapur IX	54	-	3	13	70
8	Situjuah Limo Nagari	23	2	-	3	28
9	Bukik Barisan	34	-	-	8	42
10	Guguak	59	3	-	2	64
11	Suliki	27	1	-	8	36
12	Gunuang Omeh	20	1	-	3	24
13	Mungka	53	1	-	5	59
	Jumlah	607	29	15	74	725

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

e. Sektor Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2019-2023, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah peningkatan aktivitas produksi dan pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang bergeser ke sektor industri.

Konstribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Dari sisi jumlah industri formal, unit usaha dan nilai produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada Tabel 2.23.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2.22
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,23	6,36	6,49	6,47	6,51

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.23
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Pangan	2.533	937	1.270	267	917
2	Industri Sandang dan Kulit	414	100	281	80	39
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.383	5.892	6.010	38	52
4	Industri Logam dan Elektronika	9	48	77	36	38
5	Industri Kerajinan	277	203	223	15	11
Jumlah		7.616	7.180	7.861	436	1.057

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.24
Nilai Produksi Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Industri	Produksi (Rp.000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Pangan	3.750.330.299	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450	61.916.338
2	Industri Sandang dan Kulit	75.677.364.500	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300	2.226.400
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	73.990.184.000	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552	29.287.800
4	Industri Logam dan Elektronika	1.113.400.000	7.485,515	11.545,515	1.899.500	1.829.800
5	Industri Kerajinan	166.375.951	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000	614.500
Jumlah		153.697.654.750	371.121.829,82	371.132.344,62	1.873.708.802	95.874.838

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

f. Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda.

Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang–Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini merupakan anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru. Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX , Gunuang Omeh dan Situjuah Limo Nagari.

Terkait daya tarik wisata, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam sebanyak 104, daya tarik wisata budaya sebanyak 84 dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Uraian atas 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin dan Home Stay Echo. Data kunjungan wisata selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Peningkatan kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan parasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, didapatkan bahwa kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk dibenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut, antara lain adalah :

1. menjadikan kawasan Lembah Harau sebagai kawasan Geopark;
2. menumbuhkan objek-objek wisata baru melalui potensi nagari;
3. meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah;
4. mengoptimalkan promosi pariwisata;

- 5. meningkatkan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi;
- 6. mengembangkan daerah tujuan wisata yang belum optimal; dan
- 7. melakukan inovasi untuk pengembangan pariwisata daerah.

Tabel 2.26
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Destinasi Wisata	2019		2020		2021		2022		2023	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Lembah Harau	6.833	377.204	602	379.325	-	237.241	105	270.737	-	281.366
2.	Kapalo Banda	162	121.420	10	130.894	-	279.981	-	233.196	42	266.748
3.	Batang Tabik	135	126.913	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244
4.	Rumah Gadang S.Beringin	186	11.246	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868
	Jumlah	7.316	636.783	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.226

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tujuan menetapkan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Sehingga perlu dilakukan hal berikut ini:

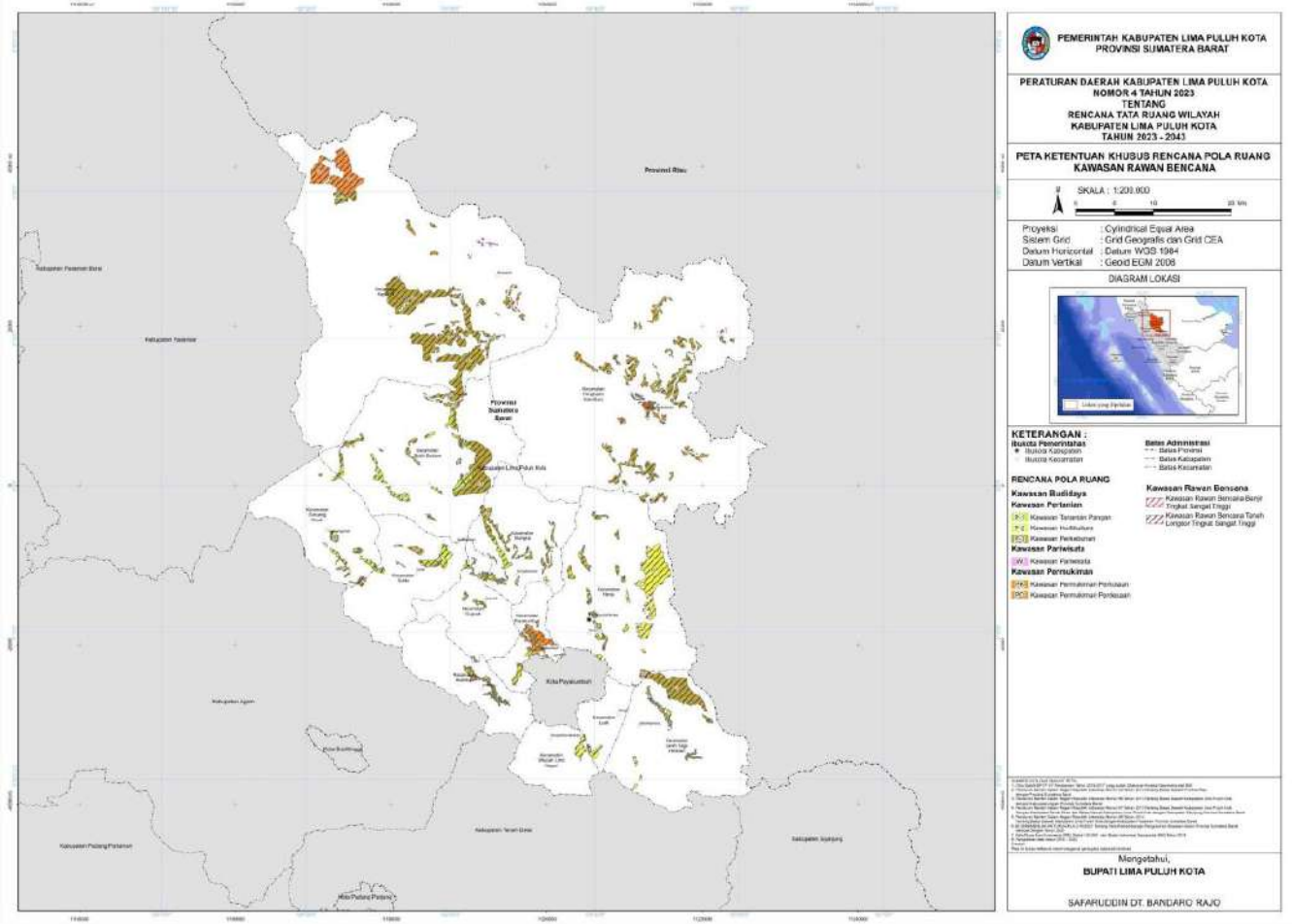
- 1. Penetapan kawasan rawan bencana banjir;
- 2. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana; dan
- 3. Pengaturan lahan daerah hulu.

Arahan penetapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam;
- 2. Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana; dan
- 3. Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, gempa dan lain-lain) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung.

Berikut disajikan peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 2.4
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Ada beberapa bencana alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah *“The Sumatra fault system, Indonesia”* Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunung Omeh, Harau dan Bukik Barisan. Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain: 1) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan. Untuk tahun 2021, di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi bencana alam gempa bumi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Tahun 2022 bencana alam gempa bumi terjadi di Kecamatan Gunung Omeh, Kapur IX, Bukik Barisan dan Situjuh Limo Nagari.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing Basin Batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan Basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor di antaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan, yang biasanya terjadi pada jalan yang pada sisi kiri dan kanannya terdapat areal perkebunan rakyat.

Di jalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi, daerah rawan longsor adalah di Jorong Ikan banyak dan Jorong Sungai Mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat Nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang, jalur jalan yang rawan longsor adalah di Jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka. Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX, longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru serta Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur di Kecamatan Kapur IX.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor terdapat lebih kurang pada 50 titik. Setiap tahunnya longsor terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang gelincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada.

Untuk tahun 2022, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi Nagari Galugua, Koto Lamo, Pandam Gadang, Situjuah Banda Dalam, Andaleh, Kubang dan Koto Tinggi.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Peristiwa bencana alam banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 terjadi di Nagari Galugua, Koto Bangun dan Sungai Balantiak.

d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “Angin Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kerawanan. Kawasan yang dikatakan sebagai kawasan yang tidak rawan bahaya adalah kawasan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut, dalam hal ini ada di Kecamatan Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh dan Mungka. Kawasan yang rawan bahaya adalah kawasan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir, yaitu di Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru dan Akabiliru, sedangkan kawasan yang sangat rawan bahaya adalah kawasan dengan terjadinya peristiwa angin ribut lebih dari 2 kali dan mempunyai dampak yang paling besar, yaitu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban. Bencana alam angin puting beliung pada tahun 2022 terjadi di 19 Nagari dan angin kencang terjadi di 7 nagari.

e. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perKayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Data bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27
Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Lokasi	Jenis Bencana
1.	Nagari Sarilamak Nagari Jorong Kandang Lamo Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	Nagari Gurun Jorong Balai Tinggi Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	Nagari Sungai Kamuyang Jorong Madang Kodok Kec. Luak	Kebakaran Hutan dan Lahan
4.	Nagari Gurun Jorong Balai Tinggi Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
5.	Nagari Harau Kec. Harau	Angin Kencang
6.	Nagari Suayan Jorong Suayan Soriak Kec. Akabiluru	Longsor
7.	Nagari Koto tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
8.	Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan	Longsor
9.	Nagari Taram Kecamatan Harau	Karhutla
10.	Nagari Taram Kecamatan Harau	Karhutla
11.	Nagari Sitanang Jorong Sungai Ipuah Kec. Lareh Sago Halaban	Orang Hanyut
12.	Kecamatan Kapur IX, Bukit Barisan, Harau, Mungka, Guguak, Pangkalan Koto Baru, dan Gunuang Omeh	Banjir dan Longsor
13.	Jorong Padang Jopang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak	Angin Kencang
14.	Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau	Longsor
15.	Nagari Tarantang, Kecamatan Harau	Angin Kencang
16.	Nagari Sitanang Jorong Sungai Ipuah Kec. Lareh Sago Halaban	Banjir Bandang
17.	Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Angin Kencang
18.	Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru	Longsor
19.	Nagari Andiang, Kecamatan Suliki	Angin Kencang
20.	Nagari Tungka, Kec. Situjuah Limo Nagari	Longsor
21.	Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Longsor
22.	Nagari Mungo Kec. Luak	Angin Kencang
23.	Jorong Parak Baru, Nagari Taram Kec. Harau	Karhutla
24.	Nagari Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru	Karhutla
25.	Nagari Harau Kec. Harau	Karhutla
26.	Nagari Gunung Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Angin Kencang
27.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Banjir dan Longsor
28.	Nagari Bukik Sikumpa, Kec. Lareh Sago Halaban	Banjir Bandang dan Air Bah
29.	Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban	Longsor
30.	Nagari Tanjuang Bungo, Kec. Suliki	Longsor

No.	Lokasi	Jenis Bencana
31.	Nagari Batuhampa, Kec. Akabiluru	Longsor
32.	Nagari Sei. Beringin, Kec. Payakumbuh	Longsor
33.	Nagari Talang Maur Kec. Mungka	Longsor
34.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Banjir
35.	Jor. Lubuak Omeh Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
36.	Jor. Banja Ronah Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
37.	Nagari Tarantang Kecamatan Harau	Banjir
38.	Nagari Sarilamak Kecamatan Harau	Banjir
39.	Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau	Banjir
40.	Nagari Taram Kecamatan Harau	Banjir
41.	Nagari Harau Kecamatan Harau	Banjir
42.	Nagari Simp. Kapuak Kecamatan Mungka	Banjir
43.	Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka	Banjir
44.	Nagari Sei. Antuan Kecamatan Mungka	Banjir
45.	Nagari Andaleh Kecamatan Luak	Banjir
46.	Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Banjir
47.	Nagari Harau Jor. Hulu Aie Kec. Harau	Longsor
48.	Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari	Longsor
49.	Nagari Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Longsor
50.	Nagari Sei. Naniang Kecamatan Bukit Barisan	Longsor
51.	Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan	Longsor
52.	Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan	Longsor
53.	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
54.	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
55.	Nagari Tarantang	Banjir
56.	Nagari Harau	Banjir
57.	Nagari Pangkalan	Banjir
58.	Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
59.	Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan	Longsor
60.	Nagari Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
61.	Nagari Koto Alam	Longsor
62.	Nagari Galugua	Banjir

No.	Lokasi	Jenis Bencana
63.	Nagari Koto Tengah, Kec. Bukik Barisan	Longsor
64.	Nagari Koto tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Banjir
65.	Nagari Tarantang	Banjir
66.	Nagari Harau	Banjir
67.	Nagari Pangkalan	Banjir
68.	Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
69.	Nagari Muaro Paiti	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

2.1.1.2 Demografi

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa sensus penduduk dilaksanakan paling sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota terus bertambah dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 396.427 jiwa, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dibanding jumlah perempuan, yaitu 198.680 jiwa dan perempuan sebanyak 197.747 jiwa. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014 - 2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2014	181.206	184.183	365.389	1,05
2015	183.079	185.906	368.985	0,98
2016	184.995	187.573	372.568	0,97
2017	186.821	189.251	376.072	0,94
2018	188.472	191.042	379.514	0,91
2019	190.298	192.519	382.817	0,87
2020*	191.736	191.789	383.525	0,18

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2021	192.857	192.777	385.634	0,55
2022	194.292	194.083	388.375	0,71
2023	198.680	197.747	396.427	1,21

Ket: 2020 merupakan hasil SP 2020
2021 merupakan hasil sensus penduduk interm 2020-2023
Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2015-2024

Secara tabel, jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	39.102	19.659	19.443	5.586
2	Akabiluru	7	29.685	14.922	14.763	4.241
3	Luak	4	29.103	14.352	14.751	7.276
4	Lareh Sago Halaban	8	39.881	20.071	19.810	4.985
5	Situjuah Limo Nagari	5	24.331	12.190	12.141	4.866
6	Harau	11	58.564	29.577	28.987	5.324
7	Guguak	5	36.627	18.209	18.418	7.325
8	Mungka	5	27.767	13.748	14.019	5.553
9	Suliki	6	15.148	7.489	7.659	2.525
10	Bukik Barisan	5	23.270	11.505	11.765	4.654
11	Gunuang Omeh	3	14.559	7.275	7.284	4.853
12	Kapur IX	7	28.533	14.397	14.136	4.076
13	Pangkalan Koto Baru	6	29.857	15.286	14.571	4.976
	Jumlah	79	396.427	198.680	197.747	5.018

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2023 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (58.564 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.559 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.325 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.525 jiwa).
Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.
Selanjutnya hal yang cukup penting dibahas dalam bidang kependudukan adalah tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yang bersumber dari BPS adalah 116 jiwa per km². Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan per Km ²
1	Payakumbuh	39.102	59,59	656
2	Akabiluru	29.685	111,31	267
3	Luak	29.103	45,98	633
4	Lareh Sago Halaban	39.881	217,49	183
5	Situjuah Limo Nagari	24.331	75,58	322
6	Harau	58.564	310,53	189
7	Guguak	36.627	95,27	384
8	Mungka	27.767	149,57	186
9	Suliki	15.148	144,25	105
10	Bukik Barisan	23.270	336,08	69
11	Gunuang Omeh	14.559	147,33	99
12	Kapur IX	28.533	834,61	34

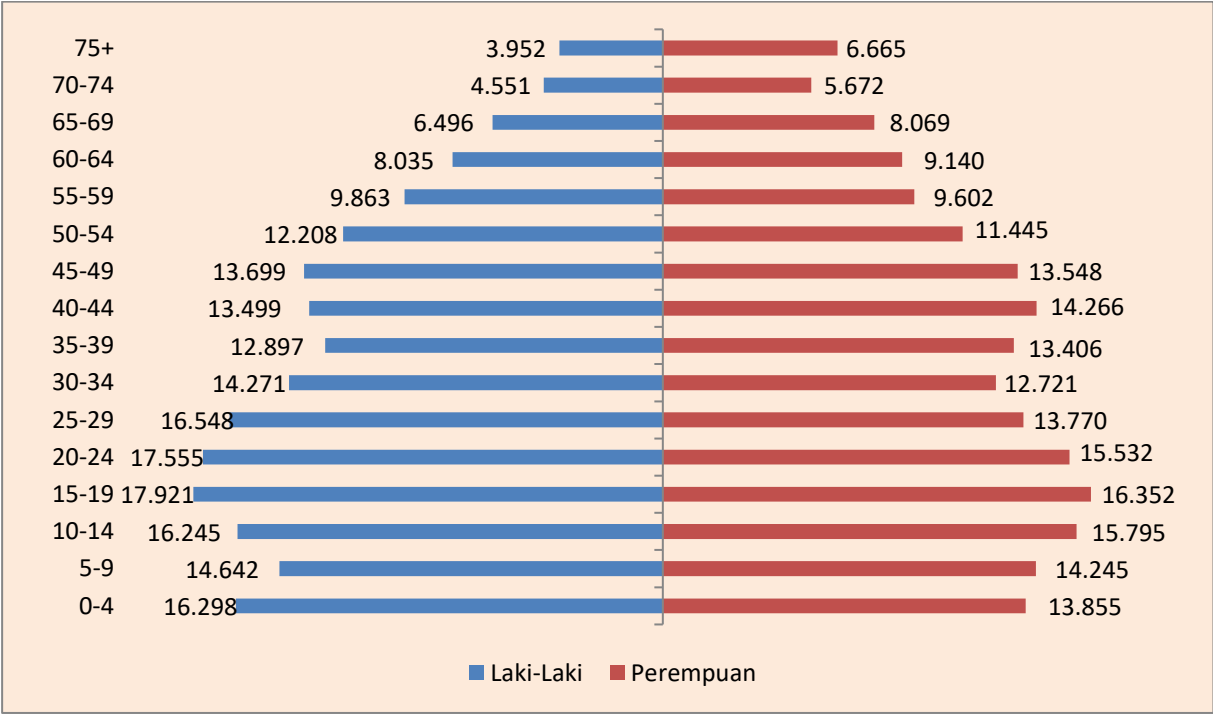
NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan per Km ²
13	Pangkalan Koto Baru	29.857	745,81	40
Jumlah / Rata-rata		396.427	3.273,40	121

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suiki. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah.

Karakteristik penduduk yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur, atau sering juga disebut komposisi penduduk menurut umur. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih.

Grafik 2.4
Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Dari piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 yang bersumber dari BPS, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk umur 15-19 tahun paling banyak di Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah. Sementara itu distribusi penduduk serta kepadatannya tidak merata antar kecamatan disebabkan akibat konsentrasi pemukiman, aktivitas sosial ekonomi serta aktivitas sosial budaya masyarakat.

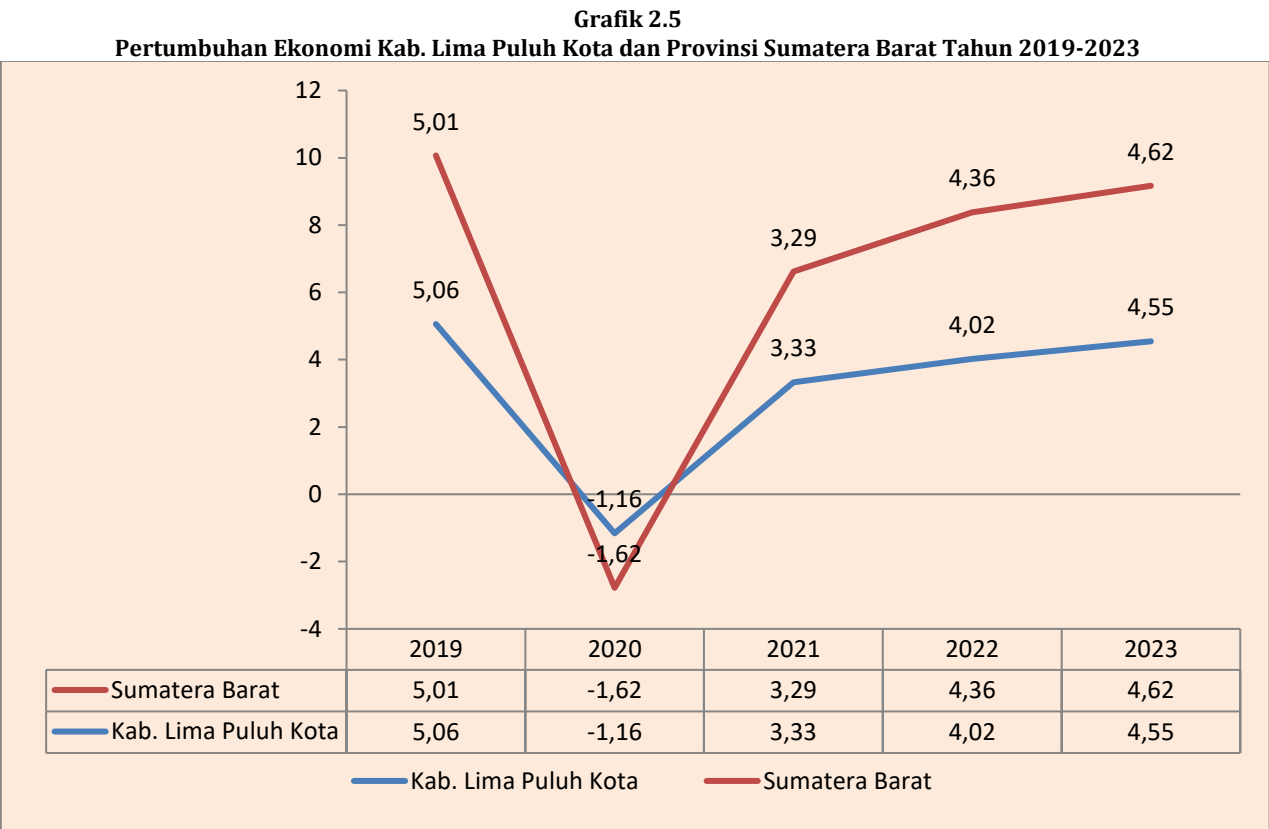
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 a. Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Lima Puluh Kota dari tahun 2019 ke tahun 2023 sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akan tetapi semakin membaik dari tahun ke tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai bergerak positif dari tahun 2020. Dimana pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,16 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di bawah Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik di bawah.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 11.890.131,59 juta rupiah tahun 2022 menjadi 12.430.827,97 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pertumbuhan sekitar 4,55 persen. Pertumbuhan positif PDRB ini disebabkan oleh mulai naiknya produksi di beberapa lapangan usaha.

Sampai tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,05%), Informasi dan Komunikasi (7,69%), Jasa Lainnya (7,71%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,01%), dan Jasa Perusahaan (6,49%). Secara lengkap nilai dan laju pertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat dari Tabel 2.31. Untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah yang mesti diperhatikan adalah lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah tersebut karena jika melakukan investasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar maka akan lebih besar pengaruhnya terhadap nilai PDRB jika dibandingkan berinvestasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi kecil. Nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp. 19.604.196,10 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.703,590 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 17.900.605,78 juta rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh naiknya produksi di semua sektor lapangan usaha.

Sampai tahun 2023, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (31,08 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (15,61 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (10,57 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (8,05 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (6,47 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,51 persen) dan Informasi dan komunikasi (6,19 persen). Nilai sektor ekonomi dan distribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku dilihat pada Tabel 2.32.

Dari data dan informasi yang diberikan dapat dilihat bahwa persentase kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menurun diikuti dengan pertumbuhan lapangan usaha lain. Hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkan pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang terkait dengan pertanian, peternakan dan perikanan yang berkontribusi terhadap lapangan usaha ini. Di samping itu, penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi masih rendah.

Tabel 2.31
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pertumbuhannya
Periode 2019-2023

Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.627.499,78	2,2	3.635.371,37	0,22	3.711.039,08	2,08	3.821.581,03	2,98	3.953.381,79	3,45
B Pertambangan dan Penggalian	855.610,00	3,16	837.299,80	-2,14	861.895,55	2,94	914.843,08	6,14	946.463,51	3,46
C Industri Pengolahan	811.718,30	0,08	795.494,80	-2	819.052,85	2,96	837.356,64	2,23	875.449,23	4,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.853,08	3,65	1.727,27	-6,79	1.779,39	3,02	1.856,01	4,31	1.934,93	4,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.448,65	4,06	3.573,62	3,62	3.783,14	5,86	4.028,76	6,49	4.195,64	4,14
F Konstruksi	576.507,07	7,85	545.559,045	-5,37	565.694,55	3,69	579.915,84	2,51	616.695,73	6,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.754.972,44	7,43	1.747.641,03	-0,42	1.801.521,30	3,08	1.903.928,50	5,68	2.008.695,14	5,50
H Transportasi dan Pergudangan	1.207.400,99	9,3	1.093.136,56	-9,46	1.143.778,91	4,63	1.186.646,36	3,75	1.256.209,82	5,86
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.685,02	6,41	63.130,22	-10,7	68.626,02	8,71	77.610,40	13,09	83.861,35	8,05
J Informasi dan Komunikasi	693.219,28	9,42	746.881,02	7,74	801.440,18	7,30	853.140,82	6,45	918.771,89	7,69
K Jasa Keuangan dan Asuransi	174.524,54	2,73	175.242,55	0,41	190.739,40	8,84	199.573,63	4,63	204.592,97	2,52
L Real Estat	128.414,00	5,19	128.472,23	0,05	131.658,92	2,48	139.006,09	5,58	147.989,39	6,46
M,N Jasa Perusahaan	3.415,68	6,57	3.221,18	-5,69	3.262,30	1,28	3.499,69	7,28	3.726,89	6,49
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	637.024,58	6,73	631.755,80	-0,83	642.937,87	1,77	636.446,89	-1,01	644.985,09	1,34
P Jasa Pendidikan	328.613,00	8,38	344.062,49	4,7	352.010,47	2,31	372.416,52	5,80	379.378,10	1,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169.892,46	8,82	181.746,75	6,98	192.527,89	5,93	201.229,34	4,52	215.339,19	7,01
R,S,T,U Jasa lainnya	147.624,00	9,94	128.000,62	-13,3	139.060,54	8,64	157.052,01	12,94	169.157,30	7,71
Produk Domestik Regional Bruto	11.192.422,88	5,06	11.062.316,76	-1,16	11.430.808,39	3,33	11.890.131,59	4,02	12.430.827,97	4,55

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.32
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dan Distribusinya
Periode 2019-2023

Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.232.148,80	33,49	5.162.289,31	33,22	5.208.998,64	32,19	5.628.648,21	31,44	6.093.022,90	31,08
B Pertambangan dan Penggalian	1.277.022,22	8,17	1.258.458,83	8,10	1.310.807,18	8,10	1.447.519,73	8,09	1.577.819,24	8,05
C Industri Pengolahan	973.286,14	6,23	987.902,39	6,36	1.050.711,01	6,49	1.158.764,28	6,47	1.276.437,26	6,51
D Pengadaan Listrik dan Gas	2.729,96	0,02	2.577,75	0,02	2.676,38	0,02	2.822,10	0,02	3.003,23	0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.379,79	0,03	4.543,26	0,03	4.911,38	0,03	5.478,11	0,03	5.912,93	0,03
F Konstruksi	828.385,36	5,30	821.960,68	5,29	875.363,49	5,41	967.250,43	5,40	1.074.055,13	5,48
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.337.507,12	14,96	2.305.423,69	14,83	2.371.561,79	14,66	2.756.109,28	15,40	3.060.022,89	15,61
H Transportasi dan Pergudangan	1.671.298,40	10,70	1.541.444,55	9,92	1.631.271,26	10,08	1.833.569,97	10,24	2.072.691,82	10,57

Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121.650,02	0,78	110.362,39	0,71	122.954,24	0,76	143.550,08	0,80	159.311,55	0,81
J Informasi dan Komunikasi	840.567,94	5,38	904.092,58	5,82	976.727,93	6,04	1.103.198,86	6,16	1.214.406,07	6,19
K Jasa Keuangan dan Asuransi	257.746,59	1,65	263.291,80	1,69	295.568,68	1,83	328.594,30	1,84	342.314,04	1,75
L Real Estat	178.677,00	1,14	180.974,62	1,16	187.920,02	1,16	206.542,74	1,15	230.302,84	1,17
M,N Jasa Perusahaan	4.948,39	0,03	4.710,44	0,03	4.788,01	0,03	5.249,88	0,03	5.935,66	0,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	910.648,45	5,83	982.826,57	6,32	1.063.345,63	6,57	1.110.560,93	6,20	1.175.158,05	5,99
P Jasa Pendidikan	516.705,00	3,31	543.521,55	3,50	563.663,68	3,48	624.008,71	3,49	664.630,55	3,39
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.112,23	1,51	259.993,88	1,67	283.201,65	1,75	308.803,33	1,73	346.774,90	1,77
R,S,T,U Jasa lainnya	231.527,00	1,48	207.126,54	1,33	228.002,46	1,41	269.934,84	1,51	302.397,02	1,54
Produk Domestik Regional Bruto	15.625.340,42	100	15.541.500,82	100	16.182.473,43	100	17.900.605,78	100	19.604.196,10	100

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

b. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33
PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi
Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	40.605,55	40.594,76	41.809,89	46.091,44	49.452,22
Sumatera Barat (Provinsi)	44.885,51	43.825,66	45.218,16	50.264,02	54.326,76

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tren nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan. Walaupun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku meningkat kembali pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Di antara 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor yang paling mempengaruhi kenaikan PDRB per kapita ADHB adalah sektor pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pada sektor pertanian antara lain yaitu harga komoditas dan produksi. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita ADHB Provinsi Sumatera Barat, PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah PDRB per kapita ADHB Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya terhadap PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34
PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi
Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	29.085,73	28.895,03	29.533,39	30.620,64	31.357,17
SUMATERA BARAT (Provinsi)	31.427,29	30.696,21	31.264,98	32.166,90	33.188,21

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun dan sebagai gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan jumlah penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mempertimbangkan penyesuaian untuk perubahan inflasi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren PDRB per kapita atas dasar harga konstan selaras dengan tren PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga konstan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB per kapita (ADHK) tercatat sebesar 30,62 juta rupiah dan naik pada tahun 2023 sebesar 31,36 juta rupiah. Sama dengan PDRB per kapita ADHB, di antara 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor yang paling mempengaruhi kenaikan PDRB per kapita ADHK adalah sektor pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pada sektor pertanian antara lain yaitu harga komoditas dan produksi. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah rata-rata tingkat kemakmuran masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.35
Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi
Tahun 2019 – 2023

Daerah	Garis Kemiskinan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	403.030,00	451.295,00	475.123,00	504.670,00	553.068,00
Provinsi Sumatera Barat	503.652,00	544.315,00	568.703,00	610.941,00	667.925,00

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Semenjak tahun 2019-2023, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya garis kemiskinan, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan
Nasional (ribu jiwa) Tahun 2019 – 2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	26,64	26,43	28,51	26,00	27,02
Sumatera Barat	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.160,00	25.900,00

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari tabel di atas jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebanyak 27.020 jiwa, naik jika dibandingkan tahun 2019. Untuk pencapaian di tahun 2023, jumlah penduduk miskin belum tercapai, karena capaian berada di atas target yaitu 26.710 jiwa.

Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebesar 6,80%, turun sebesar 0,17% dari tahun 2019. Untuk target di tahun 2023 adalah 6,77%, sehingga target tidak tercapai di tahun 2023.

Adapun perbandingan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 di Provinsi dan Nasional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Nasional dan di atas Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan program-program yang pro masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 2.37
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Di samping jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1,07 lebih tinggi dari Provinsi yang P1 nya 0,82 dan lebih rendah dari Nasional yang P1 nya adalah 1,53. Di sini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi dan lebih pendek dibandingkan dengan Nasional. Di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu dilakukan usaha yang lebih banyak agar masyarakat miskin bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Daerah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	0,51	0,78	1,21	0,92	1,07
Provinsi	0,94	0,92	1,04	0,80	0,82
Nasional	1,55	1,61	1,67	1,56	1,53

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,24 lebih rendah dari P2 Nasional sebesar 0,38 dan lebih besar dari Provinsi sebesar 0,18. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari pada Nasional tapi tidak lebih baik dari Provinsi. Hal ini dapt dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Daerah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	0,07	0,14	0,3	0,24	0,24
Provinsi	0,21	0,2	0,24	0,16	0,18
Nasional	0,38	0,38	0,42	0,38	0,38

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat bernilai sama dengan tahun 2022.

d. Indeks Gini

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat pemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung
- 40 % Menengah : kelompok menengah
- 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Dalam rentang tahun 2019-2023, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,044. Di sisi lain, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun terakhir merupakan yang terendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 adalah yang paling merata di Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 tercatat sebesar 0,194. Dengan nilai 0,194 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun selalu lebih kecil dari nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.40
Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Barat	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280
Kab.Lima Puluh Kota	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

e. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, di samping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2019-2023 ketersediaan pangan utama beras selalu melebihi jumlah kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Tahun	Produksi Beras (ton/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton)
2019	154.232,00	382.817	41.995,025	112.236,975
2020	148.711,00	383.525	42.072,693	106.638,307
2021	164.145,00	385.634	42.304,05	121.840.950
2022	133.971,00	388.375	40.067,00	93.904,00
2023	126.877,00	396.427	47.498,00	73.465,00

Catt : Konsumsi = 109,7 Kg/Kap/Tahun

Sumber : Dinas pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Terhadap pangan ini, walaupun cadangan pangan masih terkendali namun yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan pangan itu sendiri. Pemanfaatan dan konsumsi pangan masih belum betul-betul diperhatikan oleh masyarakat dan hal ini berakibat kepada Kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat terjadinya berbagai penyakit di masyarakat dengan pola konsumsi yang tidak tepat dan juga terjadinya gangguan gizi pada balita dan anak seperti terjadinya gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini tidak terlepas dari masih belum optimalnya pemerintah dalam pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pola konsumsi dan pengawasan terhadap pangan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019–2023 masih berada pada posisi sedang yaitu berada pada angka 69,67 sampai dengan 72,05. Perkembangan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019–2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,67	70,82	71,03	71,64	72,05
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,7	72,74	72,79	73,03	73,25
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,28	13,29	13,30	13,40	13,41
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,98	7,99	8,07	8,08	8,12
Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rp/org /th)	9.842,-	9.596,-	9.668,-	10.035	10.285

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari tabel di atas, IPM dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama kurun waktu lima tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan begitu juga dengan dimensi kesehatan (angka harapan hidup) dan dimensi ekonomi (pengeluaran perkapita disesuaikan). Jika dibandingkan dengan IPM 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahun 2023, maka Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat ke 15. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan IPM ini. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama kurun lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019–2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	69,67	70,82	71,03	71,64	72,05
SUMATERA BARAT	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64
NASIONAL	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (still living children) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi.

Pada komponen angka angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Angka Harapan Hidup selama lima tahun terakhir (2019-2023) secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup nasional, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Angka Harapan Hidup Provinsi dan nasional disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.44
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	69,70	72,74	72,79	73,03	73,25
SUMATERA BARAT	69,31	73,50	73,60	73,88	74,14
NASIONAL	71,34	73,37	73,46	73,70	73,93

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari tabel di atas, tidak ada peningkatan terhadap angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota selama rentang tahun 2019-2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 8,12 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 8,12 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 masih berada di bawah provinsi dan nasional dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	7,98	7,99	8,07	8,08	8,12
SUMATERA BARAT	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28
NASIONAL	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

3. Harapan Lama sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah di asumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota selama rentang tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13-14 tahun atau hanya sampai pada diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat perbandingan Angka Harapan Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi, maka angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	13,28	13,29	13,30	13,40	13,41
SUMATERA BARAT	14,01	14,02	14,09	14,10	14,11
NASIONAL	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Bila dibandingkan antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023, masih ada selisih sebesar 5,29 tahun, artinya masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

4. **Pengeluaran Perkapita Disesuaikan**

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin baiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Selama rentang tahun 2019-2023, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.285 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.285.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	9.842	9.596	9.668	10.035	10.285
SUMATERA BARAT	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
INDONESIA	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

b. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

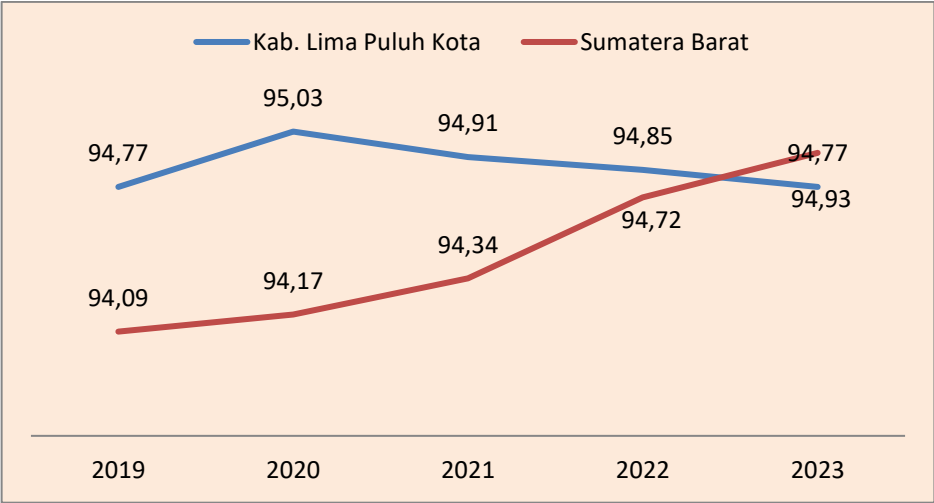
Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki- laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan baik di rumah tangga, pekerjaan, kultur dan negara. Untuk itu perlu adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Angka IPG ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai program- program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dengan angka IPM. Namun IPM belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Dengan IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki- laki dan perempuan dapat dijelaskan. Semakin tinggi rasio IPG, maka semakin rendah gap kemampuan laki-laki dan perempuan, begitu juga sebaliknya.

Perkembangan IPG Kabupaten Lima Puluh Kota secara tren berfluktuasi sejak tahun 2019-2023. Dari angka IPG Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 94,93 artinya kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki- laki dan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah semakin rendah atau 5,07. Dibandingkan dengan IPG Provinsi Sumatera Barat, IPG Kabupaten Lima Puluh Kota masih di atas IPG Provinsi kecuali pada tahun 2023. Perkembangan IPG dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 2.6
Perkembangan IPG Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

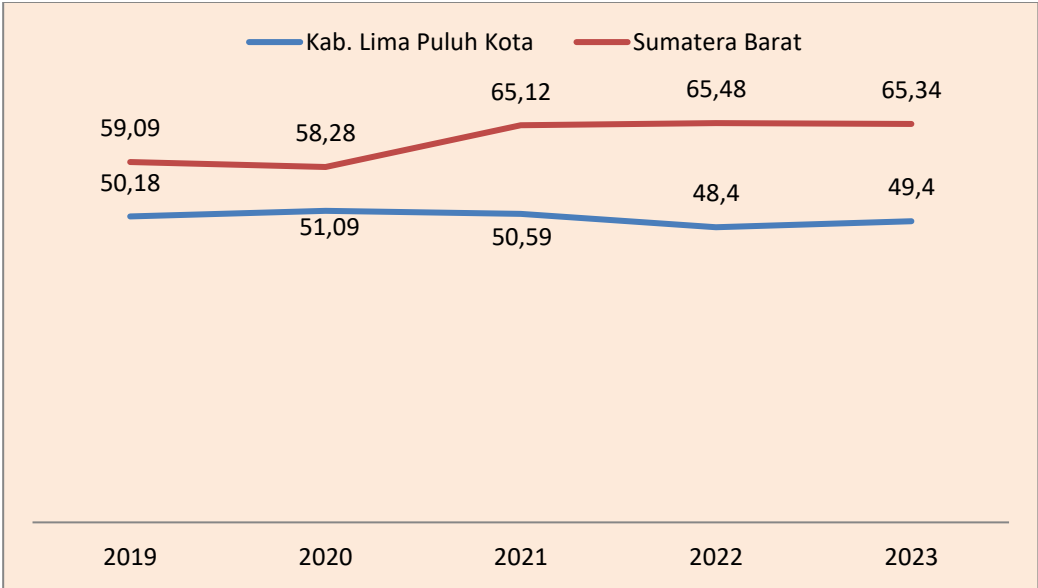
c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), ada juga ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki- laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indeks ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

IDG memberikan gambaran tentang besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. IDG diukur berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi dan sumbangan pendapatan. IDG ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum pencapaian peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, komponen/ indikator yang berkontribusi terhadap capaian peranan perempuan, dan disparitas peranan perempuan antar wilayah (provinsi dan kabupaten/ kota).

Tren IDG Kabupaten dari tahun 2019-2023 berfluktuasi, yakni 50,18 di tahun 2019 menjadi 49,4 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju arah yang lebih baik, sehingga peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya. Untuk IDG Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya masih di bawah IDG Provinsi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.7
Perkembangan IDG Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 selalu termasuk ke dalam 5 Kabupaten /Kota dengan TPT terendah di Sumatera Barat. Apabila dirinci lagi, pada tahun 2019-2021 merupakan yang terendah di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja memanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi. Secara lebih rinci, perbandingan TPT Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TPT Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.48
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki (orang)	2.922	2.956	1.686	4.487	5.074
Perempuan (orang)	1..616	3.292	2.940	3.587	3.688
Jumlah	4.538	6.248	4.626	8.074	8.762

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

Di samping pengangguran terbuka, juga dapat digambarkan Penduduk Usia Kerja (PUK) yang berusia 15 tahun ke atas. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 PUK perempuan lebih besar dari PUK laki-laki. Data tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Penduduk Usia Kerja (PUK) Berusia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki (orang)	134.426	139.290	141.756	142.911	151.896
Perempuan (orang)	139.862	144.524	146.316	148.070	153.405
Jumlah	273.423	283.814	288.072	290.981	305.301

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, AK Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh laki-laki dan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.51
Angkatan Kerja (AK) Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki (org)	115.869	118.093	119.378	122.490	127.486
Perempuan (org)	83.557	88.277	86.101	94.399	94.267
Jumlah	199.426	206.370	205.479	216.889	221.753

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, TPAK Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.52
Persentase Angkatan Kerja Terhadap Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Laki- Laki	60,89	61,59	61,90	63,04	64,17
Perempuan	43,40	46,03	44,66	48,64	47,67
Jumlah	52,09	53,81	53,28	55,85	55,94

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami kenaikan tetapi kenaikan yang belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan kerja	199.426	206.370	205,479	216.889	221.753

Jumlah penduduk	382.817	383.525	385.634	388.375	396.427
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	52,09	53,81	53,28	55,85	55,94

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2019-2023 juga mengalami peningkatan namun belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki (%)	82,96	84,78	84,21	85,71	83,93
Perempuan (%)	59,98	61,08	58,85	63,75	61,45
Jumlah	72,94	72,71	71,33	74,54	72,63

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di atas TPAK Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019-2023. TPAK Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Lima Puluh Kota	72,94	72,71	71,33	74,54	72,63
Provinsi Sumatera Barat	67,88	69,01	67,72	69,30	69,61

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

f. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Terhadap rasio penduduk yang bekerja, selama kurun waktu tahun 2019-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata berada di atas 96 persen. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.56
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kabupaten Lima Puluh Kota Selama Kurun Waktu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk yang bekerja	194.888	200.122	200.853	208.815	212.991
Angkatan kerja	199.426	206.370	205.479	216.889	221.753
Rasio Penduduk yang Bekerja	97,72	96,97	97,75	96,28	96,05

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

g. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Selama kurun waktu 2019-2023, produktivitas kerja dan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Produktivitas kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023

No.	Uraiana	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHK (Rp. Juta)	11.192.422,88	11.062.316,76	11.430.808,39	11.890.131,59	12.430.827,97
2	Jumlah pekerja (penduduk umur>15 tahun) yang bekerja	194.888	200.122	200.853	208.815	212.991
3	Produktivitas kerja (Rp.juta)	57,43	55,28	56,91	56,94	58,36
4	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%)	3,21	-3,75	2,95	0,05	2,49

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2024

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dari tabel di bawah terlihat bahwa jumlah klub olah raga di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 433 klub. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Festival seni dan budaya terus dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya di tahun 2020 yang tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari tahun 2019 dari 76 situs menjadi 110 situs di tahun 2023. Perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2019-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Klub Olahraga	433	433	433	433	433
2.	Jumlah group kesenian	122	275	220	268	290
3.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	0	1	1	3
4.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	76	95	110	110	110

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2019-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum masih ada yang belum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

2.1.3.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

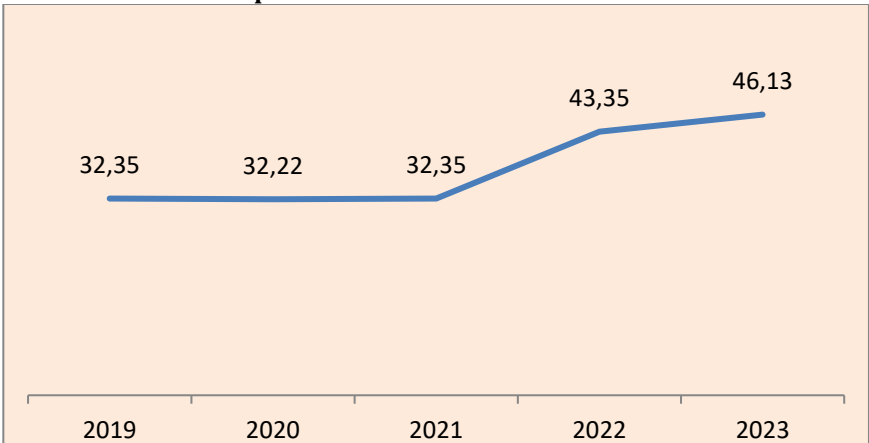
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Untuk APK PAUD, maka kelompok umur yang disasar adalah anak usia 3-6 tahun, sehingga untuk APK PAUD ini sendiri merupakan rasio jumlah siswa PAUD terhadap jumlah anak usia 3-6 tahun, berdasarkan data yang ada, maka berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019–2023.

Grafik 2.8
APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

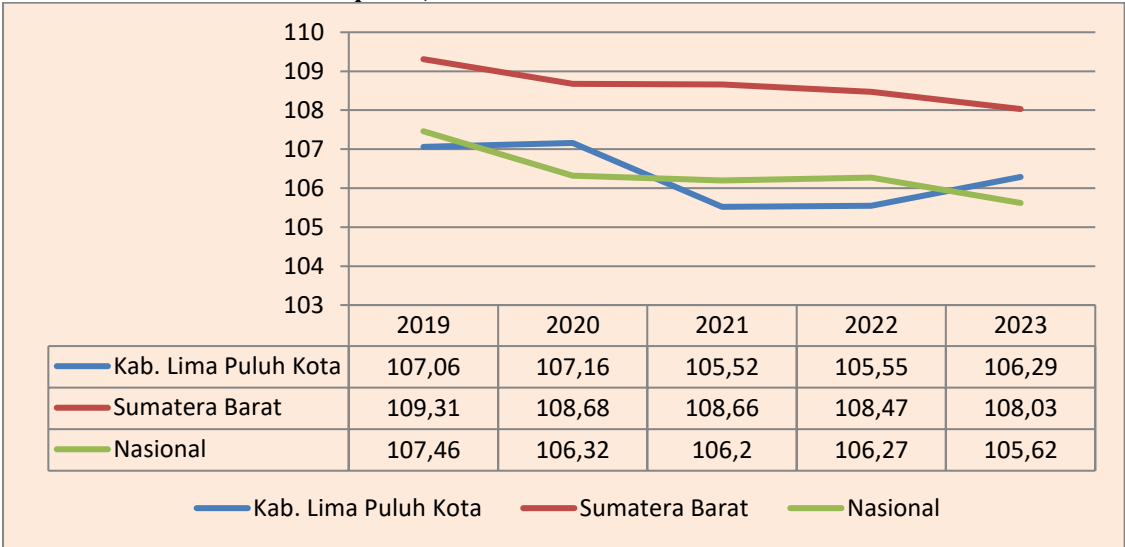


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Bila dilihat dari nilai persentasenya, maka angka 46,13 pada tahun 2023 masih cukup rendah, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, dimana saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota baru memiliki 1 buah TK negeri dan berlokasi di Kecamatan Harau sementara sisanya merupakan TK yang dikelola oleh yayasan atau berstatus swasta.

Hal ini menjadi salah satu pemicu rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK swasta yang biayanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan TK Negeri. Di samping itu tidak semua TK swasta ini mudah diakses oleh masyarakat mengingat jumlah TK swasta ini pun belum seimbang dengan jumlah anak usia sekolah PAUD. Faktor lain yang memicu masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak di usia PAUD adalah tidak adanya kebijakan yang tegas terkait pentingnya pendidikan PAUD. Untuk itu ke depan beberapa upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang kewajiban pendidikan 1 tahun Pra Sekolah Dasar, aturan 1 jorong 1 PAUD serta aturan yang mendorong perubahan status TK Yayasan menjadi TK Negeri.

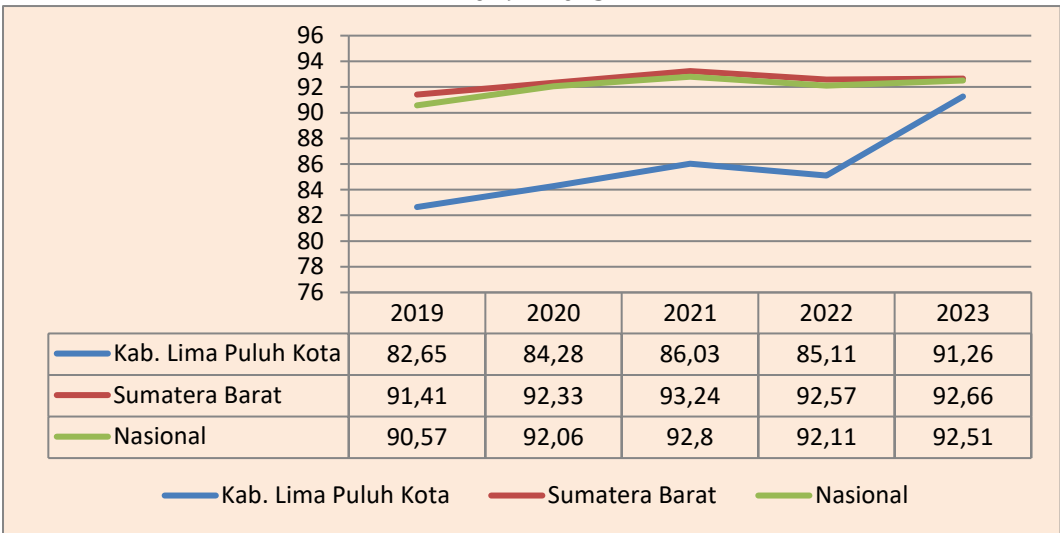
Grafik 2.9
Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019 sampai tahun 2023 berfluktuasi, dengan tren meningkat pada kurun 2021-2023. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di usia 7-12 tahun sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya.

Grafik 2.10
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

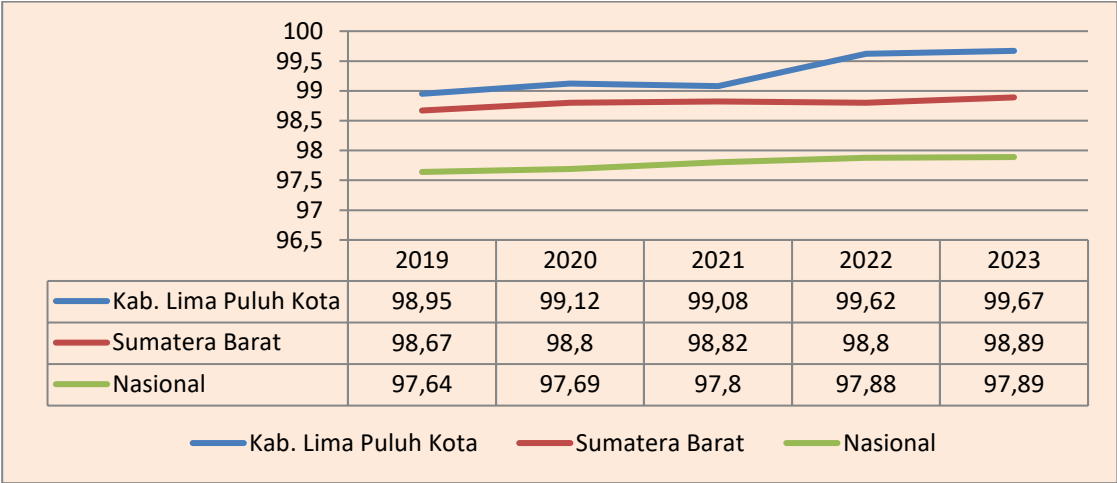
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019 sampai tahun 2023 relatif meningkat. APK 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 91,26. Meskipun

demikian, tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

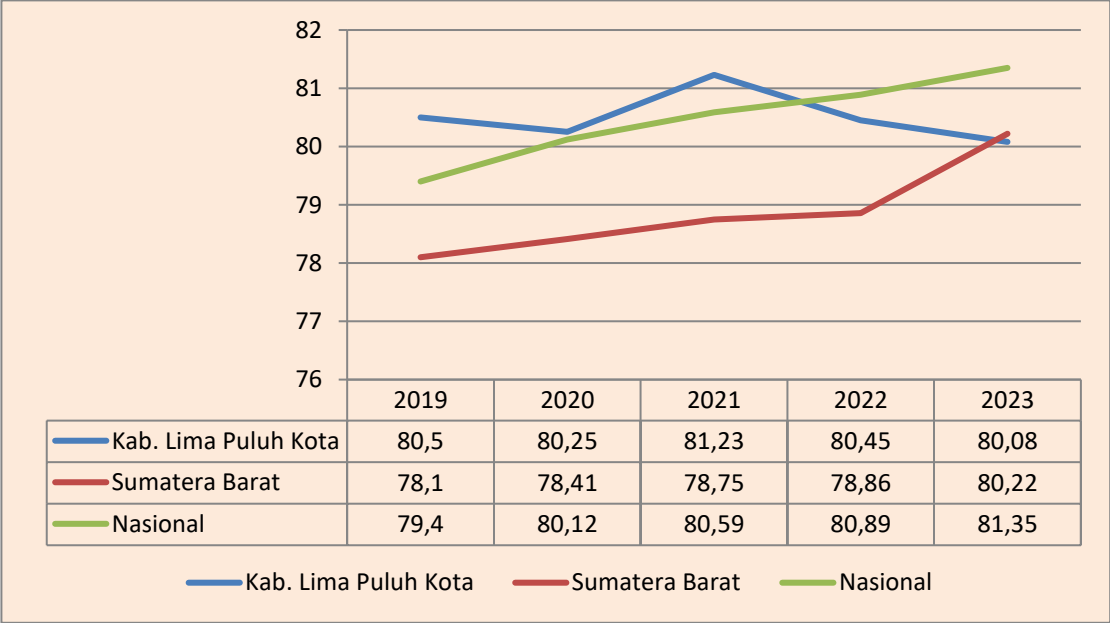
Grafik 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir selalu berada di atas Provinsi dan nasional. APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 menunjukkan angka 99,67 persen, artinya sekitar 99,67 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/ sederajat. Dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2019, APM 7-12 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan sebesar 0,73%.

Grafik 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Pada grafik di atas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 menurun dari tahun 2022. APM 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 80,08 artinya hanya 80,08% penduduk kabupaten lima puluh kota usia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ sederajat. Dibandingkan dengan capaian APM 13-15 Tahun Provinsi dan Nasional, APM 13-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 masih di bawah capaian APM 13-15 Tahun Provinsi dan Nasional.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat tingkat perkembangan pendidikan kabupaten Lima Puluh kota dapat digambarkan dengan Persentase Angka partisipasi Sekolah (APS), Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada

masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan indikator SPM urusan pendidikan, Angka partisipasi Sekolah (APS) dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu APS 5-6 tahun, APS 7-15 tahun dan APS 7-18 tahun kesetaraan.

1) APS 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan. Capaian APS 5-6 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59 Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	
TAHUN	CAPAIAN APS
2022	80,25 (Sedang)
2023	49,32 (Rendah)

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 5-6 tahun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. APS 5-6 tahun pada tahun 2022 sebesar 80,25 (sedang) dan di tahun 2023 sebesar 49,32 (rendah). Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami penurunan sebesar 30,93 dimana di tahun 2023 jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di PAUD/TK jauh berkurang dibandingkan tahun 2022.

2) APS 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan. Capaian APS 7-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60 Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	
TAHUN	CAPAIAN APS
2022	99,32 (Tinggi)
2023	99,56 (Tinggi)

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-15 tahun dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. APS 7-15 tahun pada tahun 2022 sebesar 99,32 (tinggi) dan di tahun 2023 sebesar 99,56 (tinggi). Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,24 dimana hampir semua anak usia 7-15 tahun sedang belajar di pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3) APS 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan diperoleh jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Capaian APS 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61 Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	
TAHUN	CAPAIAN APS
2022	28,55 (Rendah)
2023	30,52 (Rendah)

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-18 tahun kesetaraan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. APS 7-18 tahun kesetaraan pada tahun 2022 sebesar 28,55 (rendah) dan di tahun 2023 sebesar 30,52 (rendah). Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,97 dimana masih banyak warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. **Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah**

Dengan mengetahui rasio ketersediaan sekolah baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah, maka akan diketahui tingkat kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk baik di usia pendidikan dasar maupun menengah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah dengan jumlah penduduk pada usia pendidikan dasar maupun menengah dalam 10.000 penduduk.

Jumlah sekolah di kabupaten lima puluh kota dari tahun 2019-2023 cenderung terus bertambah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.62
Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Jenis Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
TK	224	223	247	259	265
SD/ Sederajat	378	378	381	382	382
SMP/ Sederajat	83	84	84	87	88
SMA/ Sederajat	34	34	33	33	38
D1 s/d Universitas	1	1	1	1	1

Sumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

e. **Angka Pendidikan Yang Ditamatkan**

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan, berikut dapat digambarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan atau Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 15 tahun ke atas.

Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun, sekitar 13,37 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan dasar, 5,97 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan 5,94 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan mencapai 3,66 persen dan penduduk yang tidak lagi sekolah sebesar 71,06 persen.

Tabel 2.63
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas
menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	2,54	4,76	3,66
2	Masih sekolah SD	13,23	13,50	13,37
3	Masih sekolah SMP	7,20	4,77	5,97
4	Masih sekolah ≥ SMA	5,66	6,22	5,94
5	Tidak sekolah lagi	71,73	70,76	71,06
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, apabila dikelompokkan lebih fokus kepada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, maka terdapat sebanyak 128.652 jiwa belum menamatkan SD/ sederajat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Pria	Wanita	
Tidak/Belum Sekolah	31.425	28.945	60.370
Belum Tamat SD/ sederajat	66.246	62.406	128.652
Tamat SD/ sederajat	33.104	30.898	64.002
SLTP/ sederajat	22.802	23.754	46.556

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Pria	Wanita	
Tidak/Belum Sekolah	31.425	28.945	60.370
Belum Tamat SD/ sederajat	66.246	62.406	128.652
Tamat SD/ sederajat	33.104	30.898	64.002
SLTP/ sederajat	22.802	23.754	46.556
SMA/ sederajat	35.256	36.002	71.258
Diploma I/II	373	1.108	1.481
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	2.160	3.660	5.820
Diploma IV/ Strata I	6.462	12.305	18.767
Strata II	344	414	758
Strata III	11	8	19
Jumlah	198.193	199.500	397.683

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Semester II Tahun 2023

Jika dilihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD semakin menurun. Hal ini mmengindikasikan bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota semaki meningkat. Sementara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/ sederajat dan jenjang SMP/ sederajat mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tingkat Pendidikan	Tahun														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Tidak Punya Ijazah SD	26,39	24,69	25,53	20,34	21,84	21,11	15,71	21,12	18,48	15,65	18,27	16,99	14,91	20,89	17,94
SD/ sederajat	21,95	24,22	23,11	28,37	23,85	26,06	27,20	19,56	23,29	26,40	23,13	24,73	26,36	27,74	24,53
SMP/ sederajat	24,57	22,03	23,28	21,64	19,49	20,54	25,32	20,50	22,85	24,80	20,47	22,59	22,30	19,12	20,69
SMA/ sederajat	21,07	20,24	20,65	24,37	25,79	25,08	23,64	25,73	24,71	33,14	38,12	35,69	36,44	37,24	36,84
Diploma I/II/III	2,54	1,74	2,13	1,27	1,15	1,22	1,69	2,44	2,07						
Diploma IV/S1/S2/S3	3,47	7,09	5,31	4,01	7,88	5,99	6,44	10,67	8,61						
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

f. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Tabel 2.66
 Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PKBM	24
2.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.226
3.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah di layani/ diintervensi	1.068
4.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata	725

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata sebanyak 725 orang. Jumlah ini dapat saja makin bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih baik. Di samping itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Nagari, masih ada penduduk sasaran yang belum terlayani karena jarak PKBM dari tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau, disamping tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang masih cukup rendah.

- g. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**
- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar merupakan persentase atas jumlah anak usia 7-12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar terhadap jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan.
- Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, pada tahun 2023 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 84,63%, artinya anak usia 7-12 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SD sederajat baru sebesar 84,63%.
- h. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama**
- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama merupakan persentase atas jumlah anak usia 13-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten bersangkutan.
- Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, pada tahun 2023 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 48,23%, artinya anak usia 13-15 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SMP sederajat baru sebesar 48,23%.
- i. Merdeka Belajar**
- Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi dan Ujian Nasional (UN).
- Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa dan anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
- Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.
- Mengenai ujian UN, penyelenggaraannya akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Terkait dengan kemampuan literasi maupun numerasi tingkat SD dan SMP, terdapat 4 indikator yang digunakan dan untuk pencapaian serta target di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2023 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 2.67
Rata Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD dan SMP
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Capaian		
		2021	2022	2023
1	Rata Rata Kemampuan Literasi SD	65,92%	68,84%	75,06%
2	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD	32,71%	48,31%	62,40%
3	Rata Rata Kemampuan Literasi SMP	64,60%	68,08%	77,25%
4	Rata Rata Kemampuan Numerasi SMP	38,99%	41,71%	68,26%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Rata rata literasi dan numerasi baik SD maupun SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, literasi SD sebesar 75,06%, artinya tingkat Literasi pada jenjang pendidikan SD telah mencapai kompetensi minimum. Kemudian Rata rata numerasi SD di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah 62,40%, artinya tingkat numerasi pada jenjang pendidikan SD belum mencapai kompetensi minimum. Rata rata literasi SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah 77,25%, artinya tingkat Literasi pada jenjang pendidikan SMP telah mencapai kompetensi minimum dan Rata rata numerasi SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah 68,26%, artinya tingkat numerasi pada jenjang pendidikan SMP belum mencapai kompetensi minimum.

2.1.3.1.2. **Urusan Wajib Kesehatan**

a. **Status Gizi Balita**

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Dan BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi di atas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO.

Perkembangan persentase *Balita Kurus* dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami tren meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Sedangkan tren persentase Balita Pendek menurun dari tahun 2019 sampai 2023 mengakami fluktuasi. Jumlah balita gizi kurang, pendek dan kurus dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan. Perkembangan balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.68
Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
2019	1.895	7,82%	2.643	10,90%	998	4,12%
2020	1.865	7,84%	1.973	8,30%	1.161	4,88%
2021	2.029	8,58%	1.975	8,36%	1.030	4,36%
2022	2.263	9,53%	2.050	8,63%	1.074	4,52%
2023	1.050	4,57%	2.004	8,72%	1.050	4,57%

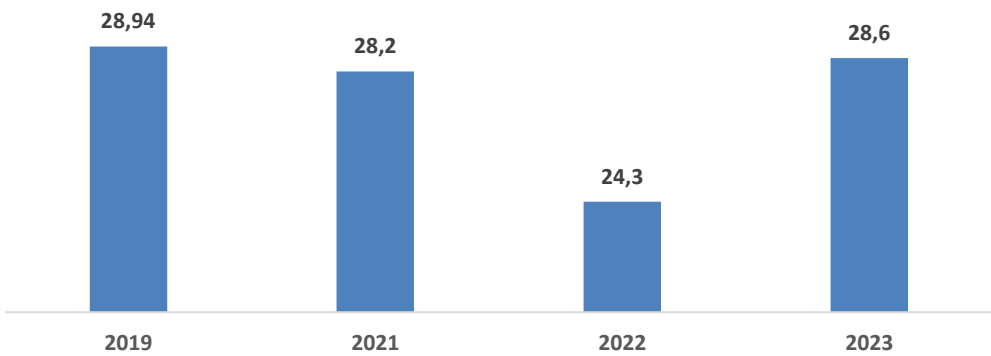
Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah

b. **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan energi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama dan terjadinya infeksi berulang. Kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK, yaitu sejak dalam kandungan hingga setelah anak lahir dan stunting ini baru terlihat saat anak berumur dua tahun.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. *Trend* data prevalensi stunting Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil SSGI dan SKI disajikan sebagai berikut.

Grafik 2.13
Trend Data Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Hasil Survei
Prevalensi Stunting



Sumber : SSGI, Tahun 2019, 2021, 2022
SKI, Tahun 2023

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2019, 2021 dan 2022, angka prevalensi stunting Kabupaten Lima Puluh Kota menurun dengan capaian sebesar 24,3% pada tahun 2022. Meskipun demikian, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi sebesar 28,6%.

Sementara itu, angka prevalensi *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), memiliki angka berbeda, dimana untuk tahun 2023, angka Prevalensi Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota hanya pada angka 8,72%. Dengan demikian, angka ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu pada angka 8,64%. Lebih lengkapnya terkait angka Prevalensi Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan e-PPGBM dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Balita Ditimbang	Prevalensi <i>Stunting</i>
1.	2019	24.242	10,9
2.	2020	23.674	8,29
3.	2021	20.399	8,36
4.	2022	19.774	8,64
5.	2023	25.291*	8,72

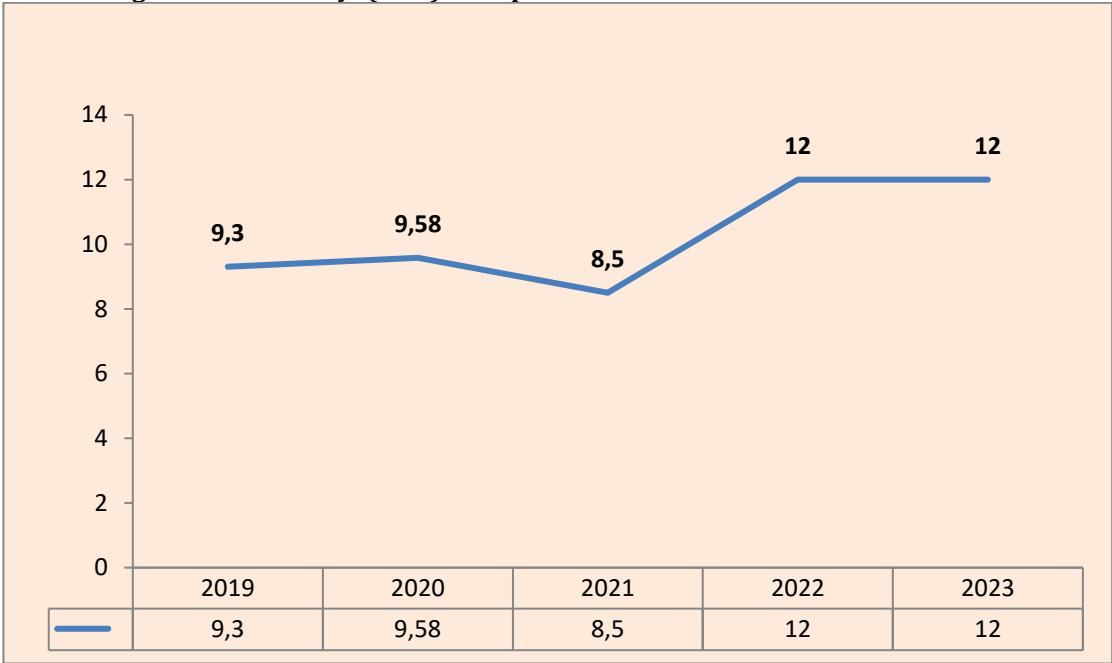
*Jumlah balita merupakan jumlah sasaran real
Sumber: e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Penggunaan sumber-sumber data di atas perlu dilakukan mengingat fungsi dari masing-masing data yang dihasilkan bagi pembangunan daerah. Terkait dengan digunakannya data e-PPGBM sebagai acuan dalam penanganan stunting, sudah sesuai dengan batasan kewenangan Kabupaten.

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.14
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Walaupun terjadi fluktuasi Angka Kematian Bayi dari tahun 2019 ke 2023, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk baik dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 sebesar 12 sudah berada di bawah target nasional tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya.

Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023

Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Berat Badan Lahir Rendah	7	16	15	16	16
Asfiksia	15	11	5	9	8
Kelainan Bawaan	6	3	3	5	8
Pneumonia	3	2	1	5	3
Diare	0	1	2	1	0
Lain-lain	26	27	24	28	28
Total	60	60	50	64	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

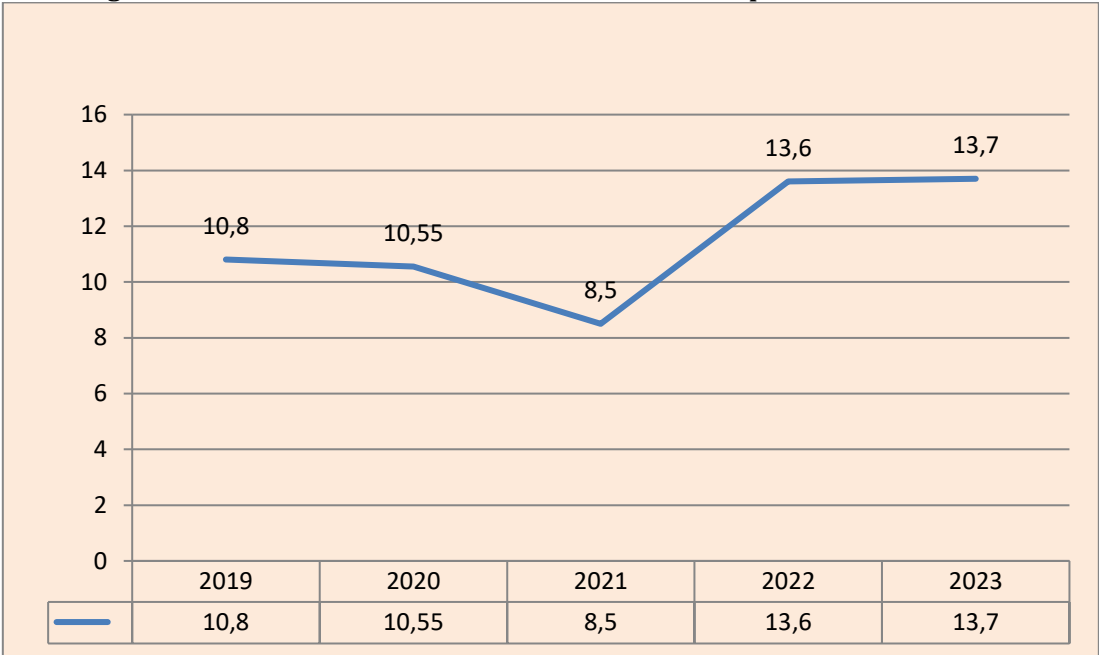
Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas, kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir mencapai angka terendah pada tahun 2021 sebesar 50. Pada tahun 2023, kematian bayi tercatat sebanyak 63 dengan kategori penyebab terbanyak Lain-lain diikuti oleh kategori Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

d. Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15
Angka Kematian Balita dari Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota



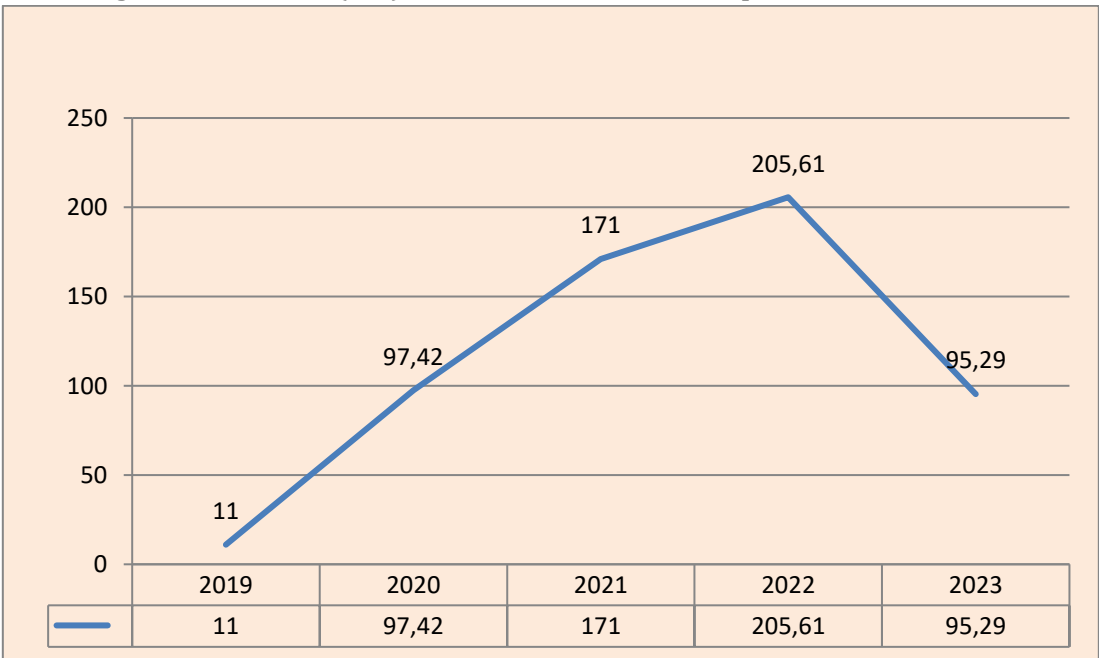
Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Balita sejak tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan tren yang meningkat, dari 10,8 di tahun 2019 menjadi 13,7 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk penurunan pemeliharaan kesehatan terhadap balita walau belum terlalu signifikan.

e. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota sempat meningkat pada tahun 2019-2022 namun menurun pada tahun 2023. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Tidak adanya peningkatan kapasitas petugas kesehatan baik di puskesmas serta ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mampu

pertolongan persalinan sesuai standar (puskesmas PONED) di tahun 2022 juga berpengaruh terhadap peningkatan AKI di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/obat kontrasepsi pasca persalinan.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan

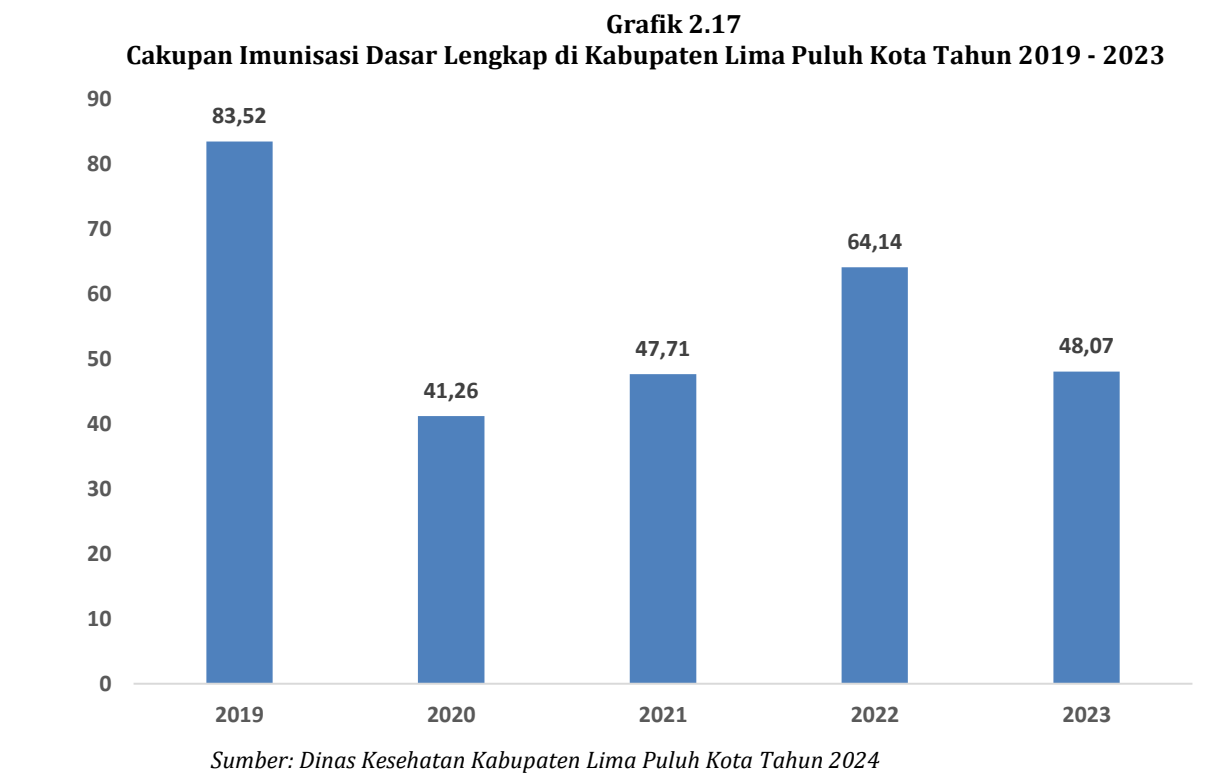
Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, dimana pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Perkembangan persentase bayi yang diimunisasi per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2019 - 2023

Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	82,4	44,1	48,3	46,2	55,30
Akabiluru	Batuhampar	86,8	60,5	94,6	53,1	40,70
	Piladang	84,4	52,3	42,4	86,7	83,80
Luak	Mungo	77,7	35,2	37,8	40,8	37,60
Lareh Sago Halaban	Halaban	84,6	46,7	38,4	86,2	45,80
	Pakan Raba'a	74,4	24,3	21,8	77,4	61,60
Situjuah Limo Nagari	Situjuah	73,6	17,8	17,3	50,7	47,90
Harau	Taram	91,6	56,8	85	74,6	63,00
	Tanjung Pati	87	51,6	49,7	90,0	52,40
Guguak	Dangung-Dangung	81,4	42,3	51,7	92,9	33,30
	Padang Kandis	88,7	21,7	19	55,2	37,30
Mungka	Mungka	80,8	31,2	33,3	47,0	47,50
Suliki	Suliki	83,3	20,7	26,4	34,8	30,30
Bukik Barisan	Maek	84,4	34,6	28,8	30,2	25,70
	Baruah Gunuang	83,7	33,6	52,3	48,9	39,10
	Banja Laweh	75,2	59,5	85,5	82,2	31,10
Gunuang Omeh	Koto Tinggi	84	5,9	6,7	20,0	37,20
Kapur IX	Muaro Paiti	88,2	50,3	35,5	81,9	59,80
	Sialang	87,3	32,9	35,1	87,6	54,70
Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	83,7	39,6	47,4	84,3	45,20
	Rimbo Data	83,8	70,9	89,5	73,6	65,30
	Gunuang Malintang	90,4	75,2	103,2	52,4	63,40

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan grafik di atas, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan cakupan tertinggi pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dimana hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan imunisasi akibat adanya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan kembali. Data terakhir menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2023 sebesar 48,07%. Bila dikaitkan dengan target pencapaian RPJMN 2024 sebesar 90%, maka perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencapai target tersebut.

g. Cakupan kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.72
Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023

Jaminan Kesehatan Nasional	2019	2020	2021	2022	2023
PBI APBN	163.150	185.574	166.247	174.328	162.547
PBI APBD	36.161	36.705	25.050	24.262	40.757
Penerima Upah	28.756	52.082	29.310	30.845	37.145
Mandiri	11.223	41.309	8.016	9.201	11.262
Jumlah	239.290	315.670	228.623	238.636	251.711

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 meningkat kembali dengan jumlah kepesertaan sebanyak 251.711 pada tahun 2023.

No.	Tahun	Jumlah penduduk sasaran	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Cakupan Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	2019	382.817	239.290	62,51
2	2020	383.525	315.670	82,31
3	2021	385.634	228.623	59,28
4	2022	388.375	238.636	61,44
5	2023	396.427	251.711	63,49

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024

Sampai tahun 2023, cakupan penduduk peserta JKN Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 63,49 persen, naik jika dibandingkan tahun 2019.

h. Rasio Daya Tampung RS Rujukan

Rasio daya tampung RS rujukan merupakan persentase atas jumlah daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk kabupaten.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023, untuk tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Rasio 0,025%. Artinya dari total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 397.683 (data dari Disdukcapil), yang mampu ditampung di RS Rujukan hanya sebanyak 101 orang.

i. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi merupakan persentase atas jumlah RS Rujukan yang terakreditasi terhadap jumlah RS Rujukan di Kabupaten

Sampai dengan Tahun 2023, dari 1 RS Rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mendapatkan akreditasi, artinya secara persentase RS Rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 100%.

j. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar atas jumlah orang yang berumur 15-59 tahun di kabupaten.

Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2023 di kabupaten lima Puluh Kota baru berada pada angka 12,4%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15-59 tahun, baru 12 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

k. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar terhadap jumlah warga negara usia 60 tahun di kabupaten.

Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 57,2%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah 57 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

l. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap jumlah penderita DM di kabupaten.

Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2023 di kabupaten lima Puluh Kota berada pada angka 90,7%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah 90 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

m. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar terhadap jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 58,1%, artinya dari 100 orang dengan resiko terinfeksi HIV, baru 58 orang yang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

2.1.3.1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

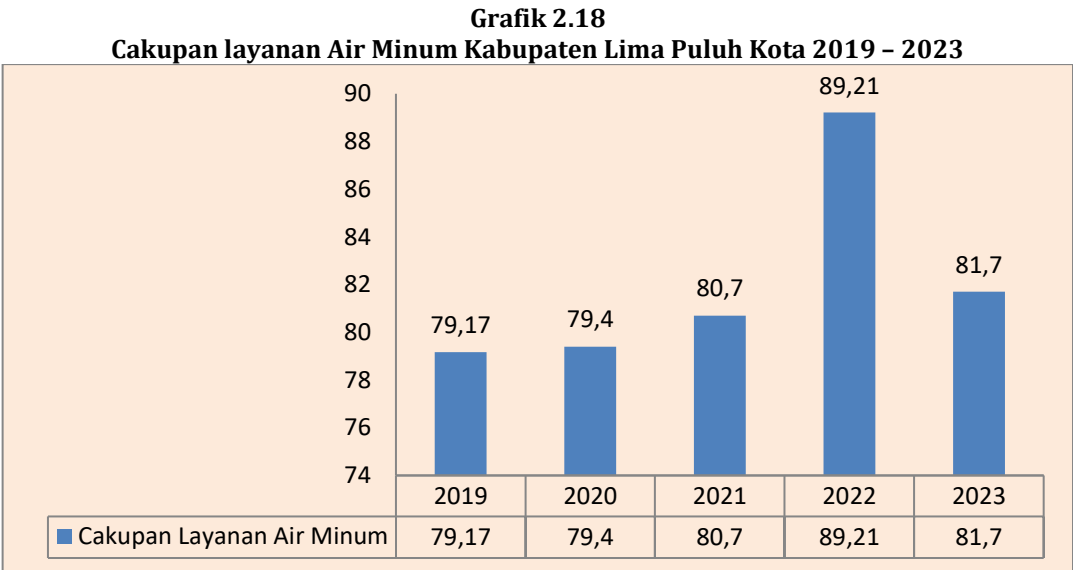
Program unggulan yang tertuang dalam dokumen perencanaan merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dimana salah satunya adalah penataan dan pembangunan pembenahan IKK Sarilamak. Pada tahun 2021 kegiatan yang direalisasikan untuk penataan dan

pembangunan IKK adalah pengamanan tebing dan pembangunan drainase yang bertujuan untuk mengendalikan genangan dan banjir yang sering terjadi di kawasan IKK Sarilamak.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemetaan kondisi jalan Protokol IKK Sarilamak dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kompleks perkantoran Bupati Sarilamak. Pemetaan kondisi jalan protokol atau dua lajur kawasan IKK Sarilamak diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertujuan untuk melihat kondisi eksisting dan menghitung biaya pembebasan lahan sebagai dampak dari kegiatan pembangunan jalan 2 lajur IKK.

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM. Untuk gambaran cakupan layanan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

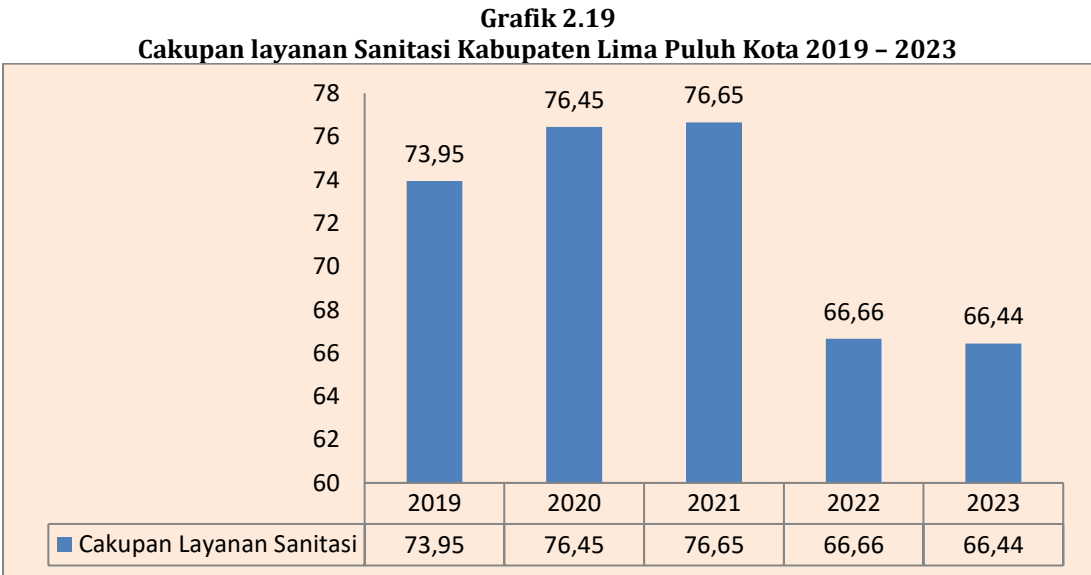


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan pada kurun tahun 2019-2022 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023.

b. Persentase Penduduk/Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Terhadap cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

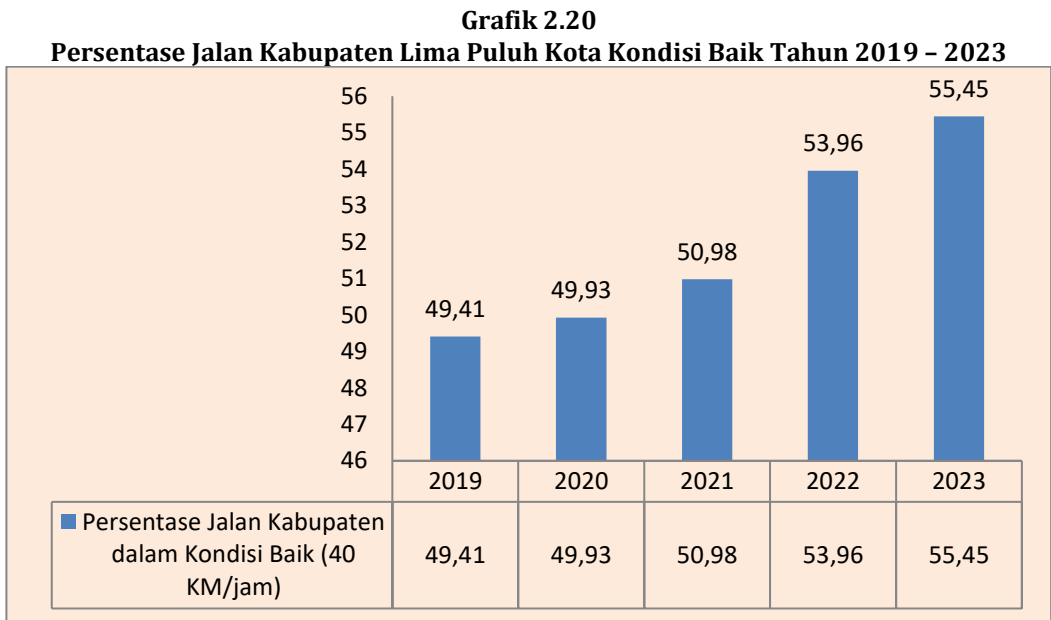
Sama dengan air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan

ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah 66,44%. Hal ini berarti terjadi penurunan dari tahun 2022 yang memiliki capaian sebesar 66,66%.

c. Kondisi Jalan Kabupaten

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang jalan, dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Ada 2 indikator yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan jalan, yaitu persentase Jalan Kabupaten kondisi baik dan tingkat kemantapan Jalan Kabupaten.

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



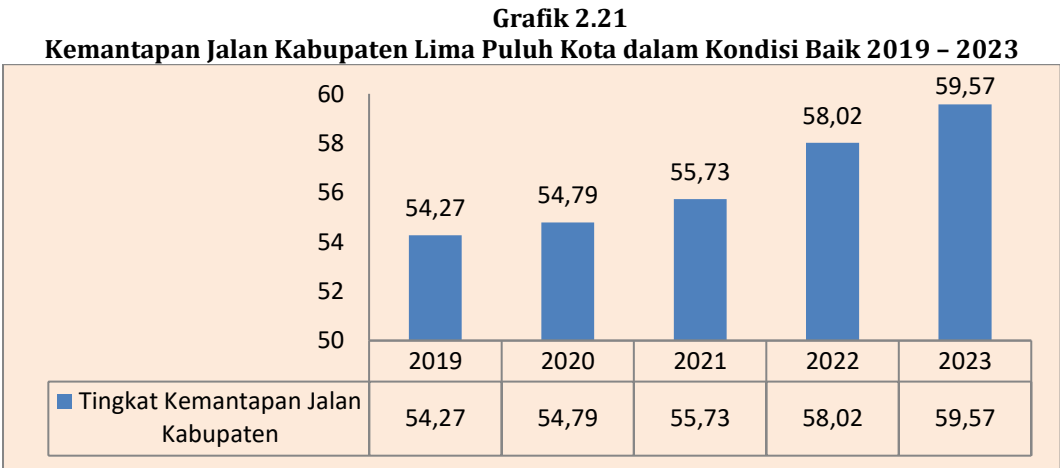
Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 55,45% dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.101,20 km. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara di daerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk.

Di samping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenahan jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah-tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional.

Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional “Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”, dimana dalam perencanaanya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut.

Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut.



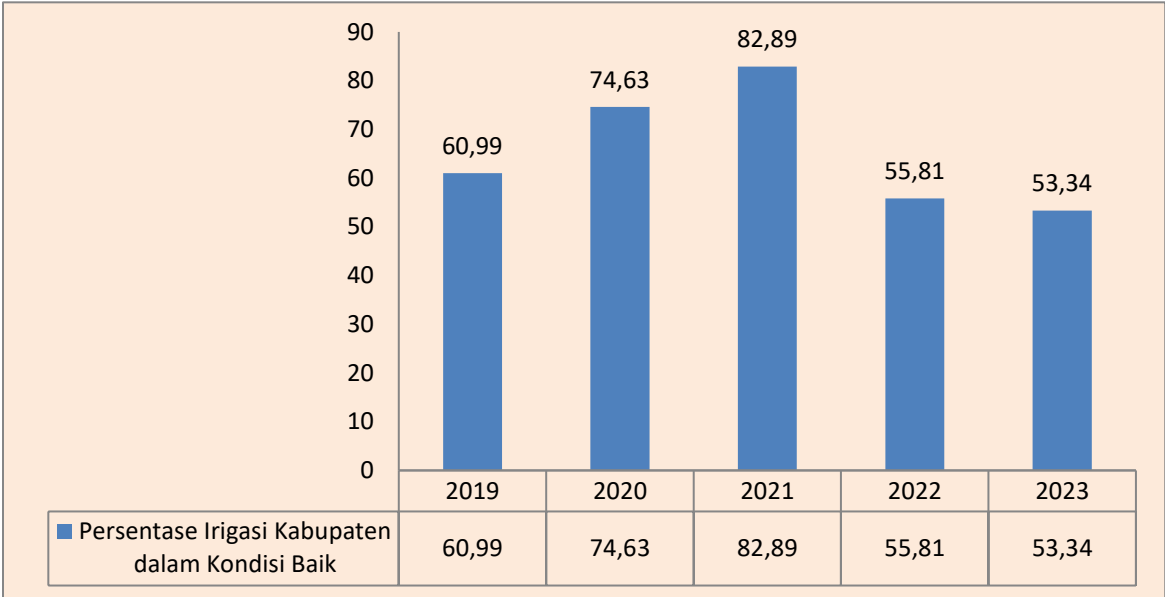
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 54,27% pada tahun 2019 meningkat menjadi 59,57% pada tahun 2023.

d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 2.22
Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2019 – 2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Grafik di atas bahwa persentase ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

e. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah

Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar. Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2023, baru 71,74% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal, seperti Islamic Centre, pasar, dan terminal.

f. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten merupakan persentase luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten terhadap luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten.

Merujuk kepada maksud dari indikator ini, maka untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota indikator ini baru mencapai angka 29,37%, artinya dari semua Kawasan permukiman yang rawan terkena banjir, baru 29,37% nya yang sudah memiliki infrastruktur pengendalian banjir.

g. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi merupakan persentase atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tidak terjadi kecelakaan konstruksi terhadap jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi untuk tahun 2023 memiliki nilai capaian 0%. Artinya, selama tahun 2023 pelaksanaan proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mengalami kecelakaan kerja.

2.1.3.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana struktur ruang salah satunya adalah rencana sistem pusat permukiman. Rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Pusat Pelayan Lingkungan (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL merupakan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau yang berfungsi sebagai pusat

pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan. PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL meliputi PPL Pakan Sabtu di Kecamatan Luak dan PPL Maek di Kecamatan Bukik Barisan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya perumahan dan permukiman menjadi salah satu sektor dari pembangunan infrastruktur dasar yang diprioritaskan pada RPJMN 2020-2024. Salah satu cakupan pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN tersebut.

Salah satu indikator penyediaan hunian layak adalah rasio rumah layak huni. Perkembangan penyediaan hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari nilai rasio rumah layak huni pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota

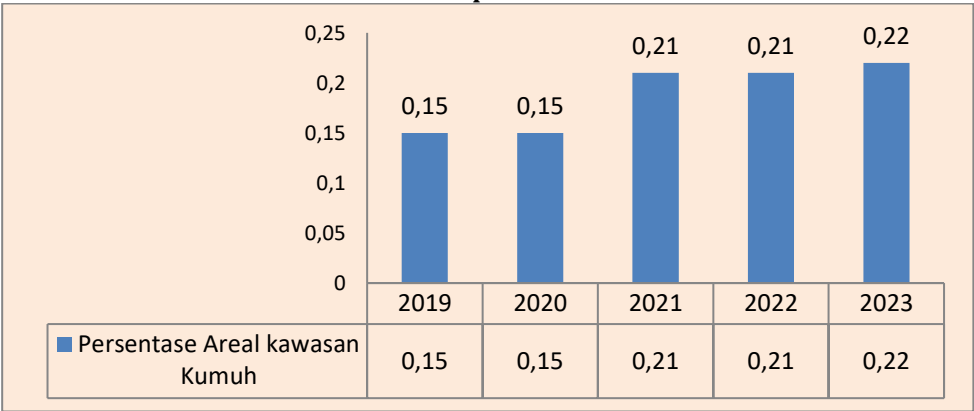
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Layak Huni	0,150	0,155	0,173	0,202	0,197

Sumber: DLHPP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,047 dari tahun 2019. Semakin tinggi rasio rumah layak huni akan menggambarkan semakin banyak rumah yang layak dihuni oleh penduduk. Secara rasio, masih belum optimalnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah ke depannya agar rumah yang layak dihuni oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin baik. Pada saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi permasalahan dengan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terjadinya imigrasi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan perumahan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan permukiman. Minimnya alokasi anggaran APBD mempengaruhi pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Di samping ketersediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan dan permukiman juga memperhatikan kondisi lingkungannya yang ditangani melalui pengurangan kawasan kumuh. Perkembangan penanganan kawasan kumuh seperti dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.23
Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Penambahan luasan ini terjadi bukan karena tumbuhnya kawasan kumuh baru, tetapi karena adanya penambahan batasan deliniasi kawasan kumuh di seluruh kecamatan.

2.1.3.1.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat : 1. Penertiban Perizinan 2. Penertiban PSK/Tunasusila 3. Penertiban Minuman beralkohol/tuak 4. Penertiban Cafe 5. Penertiban pelajar 6. Penertiban izin usaha 7. Penertiban Warung Kelambu (Ramadhan) 8. Penertiban APK/APS Kampanye 9. Sengketa lingkungan 10. Deteksi dini permasalahan kenyamanan Masyarakat	 2 1 2 - 1 - 4 1 - 3
Total Kasus Penegakan Perda		14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Adapun selama tahun 2023 ada satu Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat Selama tahun 2023, terjadi 14 kasus pelanggaran perda yang ditertibkan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di atas.

Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), walaupun tidak merupakan kewenangan langsung Daerah, perlu juga ditampilkan datanya untuk menggambarkan kondisi di Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun berdasarkan data Polres, yang melapor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembunuhan	-	4	1	-	-
2	Curas	11	17	5	1	2
3	Pemeriksaan dan pembunuhan	-	-	0	-	-
4	Curat	299	194	30	51	61
5	Pencurian biasa	63	62	20	40	37
6	Penganiayaan berat	50	58	9	16	31
7	Penganiayaan	34	128	26	40	85
8	Pengrusakan	31	32	5	11	11
9	Penghinaan ringan	15	10	1	-	1
10	Penipuan	60	53	5	21	15
11	Curanmor	142	81	27	18	29
12	Setubuhan-perbuatan cabul	11	43	5	4	9
13	Perjudian	16	9	5	12	2
14	Asusila-Bersetubuh dengan perempuan di bawah umur	-	4	12	-	12
15	Penggelapan	45	59	16	15	21
16	Pengancaman	1	12	1	4	13
17	Perbuatan tidak menyenangkan	2	1	0	-	6
18	Pemeriksaan	2	1	0	-	-
19	Kawin liar	-	-	0	-	-
20	Pengeroyokan	35	35	6	17	34
21	Narkotika	87	30	34	-	49
22	Pemalsuan	1	2	0	-	2
23	Perampasan tanah	-	4	2	3	6
24	Pencemaran nama baik	-	8	1	2	3
25	Bunuh diri	-	5	0	1	5
Jumlah		1334	905	852	211	434

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Laporan Gangguan Kamtibmas dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi.

a. Sub Bidang Kebencanaan

Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah dengan risiko sedang (119,20) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana dengan capaian sebesar 0,27 (rendah). Kinerja dan realisasi penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2023					
NO	Indikator	Target			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (73-67)	Sedang (67-61)	Sedang (61-55)	119,2
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Sedang (0,41-0,6)	Sedang (0,61-0,7)	sedang (0,71 – 0,8)	0,27

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

b. Sub Bidang kebakaran

Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tahun 2023 adalah 97,91%. Target dan Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.78 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran					
NO	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	58%	64%	70%	97,91%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *Response Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, idealnya 1 (satu) kecamatan mempunyai 1 (satu) Wilayah Managemen kebakaran (WMK) dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 7 (tujuh) Pos WMK. Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.79 Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota		
No	Nama Posko	Wilayah Kerja
1.	Induk	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru
2.	Harau	Kecamatan Harau
3.	Lareh Sago Halaban	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak
4.	Mungka	Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka
5.	Suliki	Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan
6.	Pangkalan	Kecamatan Pangkalan
7.	Kapur IX	Kecamatan Kapur IX

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Di samping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Melihat kepada kinerja Damkar, salah satu indikator yang digunakan adalah Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, dimana indikator ini merupakan rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran.

Untuk tahun 2023, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran memiliki waktu rata-rata sebesar 7 menit 28 detik.

2.1.3.1.6. **Urusan Wajib Sosial**

Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan kepada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Target dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib sosial tahun 2023, dari 8 indikator ada 7 indikator yang sudah memenuhi target tahun 2023. Ada 1 indikator yang capaian kinerjanya 0 persen, hal ini disebabkan karena untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan tanggap darurat bencana. Target dan capaian penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023

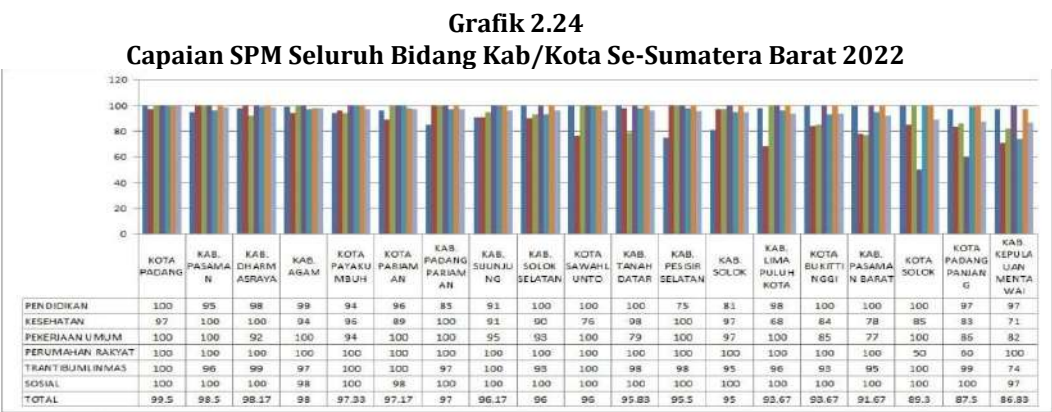
No	IndikatorS	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023	Catatan Analisis
		2023	2024	2025		
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	86,8	88,2	89,6	97,66	-
2	Persentase PPKS yang tertangani	94,5	95,2	96,2	98,11	-
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	93,64	93,8	94	97,16	-
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	98	98	98	100	-
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	98	98	98	0	-
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	64	65	66	83,5	-
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,6	7,6	7,6	20,38	-
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.1.7. **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya.

Pencapaian SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan angka capaian yang tertinggi adalah Kota Padang, Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka capaian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bidang dengan Angka Capaian 100% terbanyak adalah bidang Sosial dan Perumahan Rakyat. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, bidang SPM dengan capaian 100% pada tahun 2022 adalah bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

Untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sudah mencapai target. Terkait dengan indikator “Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD”, maka perlu ditekankan disini bahwa indikator ini berbeda jauh dengan indikator APK PAUD yang telah diuraikan sebelumnya, dimana untuk indikator APK PAUD, kelompok umur yang disasar adalah anak usia 3-6 tahun, sementara untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, jelas menyasar anak usia 5-6 tahun, sehingga untuk kondisi yang ada saat ini, bisa dipastikan bahwa capaian indikator APK PAUD akan lebih kecil dibanding capaian indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, dimana untuk tahun 2022, capaian dari masing-masing indikator adalah sebesar 43,35% dan 95,71%.

Ada 12 indikator pencapaian SPM untuk urusan kesehatan. Dari 12 indikator tersebut hanya ada 1 indikator yang mencapai target lebih dari 100 persen yaitu Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan. SPM untuk urusan ketentraman umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di laksanakan oleh 3 OPD yaitu Satpol PP, BPBD dan Damkar. Ada 6 indikator SPM yang harus dipenuhi oleh tiga OPD tersebut. Untuk pencapaiannya sudah ada 3 Indikator dengan hasil 100 persen dan 3 lagi masih belum memenuhi capaian indikator untuk tahun 2022.

Tabel 2.81
Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	7.487	7.487	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	5.093	5.093	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49.647	49.647	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.82
Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 di faskes pemerintah atau swasta	5.258	5.258	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	5.246	5.246	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	5.000	4.960	99,2
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan balita sesuai	24.000	23.549	97,5

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
		standar			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.110	13.076	99,7
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86.080	65.848	76,4
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	38.250	37.692	98,5
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21.250	19.030	88,4
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.165	1.777	82,1
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	837	837	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun satu tahun	7.646	4.880	63,8
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	6.569	5.321	81,1

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.83
Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.355	6.355	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	854	854	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.84
Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	9	0	0

2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat porgram pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	N/A	N/A	N/A
---	---	---	-----	-----	-----

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.85
Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)	OPD
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	4 jiwa	4 jiwa	100	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	36.080 jiwa	100	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	1.353	1.353	100	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	180.403	180.403	100	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96	96	100	Dinas Damkar

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.86
Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	30	30	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	80	80	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	923	923	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Di luar Panti	4	4	100
5	Perlindungan dan Jaminan	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang	173	173	100

	Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten	memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten			
--	---	---	--	--	--

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan urusan wajib. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan disajikan antara lain angka sengketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian bersama, kepesertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan. Perkembangan dari informasi ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota 2023

No.	Uraian	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	10	2
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	10	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	550	600	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	6.500	7.000	7.250	Menunggu data dari BPJS
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	180	368
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	70	-
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	90	90	90	-

Sumber: Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2023, hanya 1 indikator yang mencapai target yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Dilihat dari pencari kerja yang ditempatkan, capaian tahun 2023 masih belum memenuhi target kinerja yang diharapkan. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan, masih belum mencapai target yang ditetapkan.

2.1.3.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.88
Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,59	9,01	9,4	-
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,57	14,28	17,14	5,71
3	Rasio KDRT	0,004	0,003	0,002	0,003
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	99.750	99.800	100.000	-
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100	100	100

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100	100	100
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100	100	100
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0029	0,0029	0,0029	-
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	5,56	6,1	6,7	-

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 12 indikator urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencapai target ada 7 indikator. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT tahun 2023 adalah 0,003 artinya ada 3 KDRT yang dilaporkan per 1.000 rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator yang belum mencapai target adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD, partisipasi angkatan kerja perempuan, Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dan Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD). Hal ini perlu untuk menjadi perhatian yang lebih sehingga Lima Puluh Kota yang madani bisa dicapai.

Terkait dengan kinerja perlindungan anak, maka indikator yang biasa digunakan adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Adapun tujuan diciptakannya Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus tujuannya antara lain untuk membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten atau kota.

Kabupaten Layak Anak penting diwujudkan di daerah termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping itu anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Untuk itulah, maka sejak tahun 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomitmen dan ikut mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Ada 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu:

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus

Sejak keikutsertaan pertama kalinya pada tahun 2017, Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendapatkan penghargaan:

1. Tahun 2017 dengan predikat Pratama
2. Tahun 2019 dengan predikat Madya
3. Tahun 2021 dengan predikat Madya

Walaupun dari tahun ke tahun Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan pencapaian KLA, namun demikian pencapaian ini masih belum optimal, ada 3 tingkatan lagi yang perlu dicapai untuk akhirnya menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota Layak Anak.

2.1.3.2.3 Urusan Wajib Pangan

Urusan wajib pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ada 4 indikator. Terdapat 2 dari 4 indikator yang mencapai target pada tahun 2023. 2 indikator yang mencapai target tersebut adalah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang tercapai 100% dan persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) yang tercapai 120,73%. Target dan capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.89
Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/ka/thn)	393,15	405,45	417,75	331,42
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (Kg/ka/thn)	6.426	6.515	6.604	6.393,7
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80,00	82	84	100
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	41,14	53,14	74,15	120,73

Sumber: Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.2.4 Urusan Wajib Pertanahan

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Capaian indikator Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90
Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, selama 5 tahun terakhir tercapai 100%. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada kasus sengketa tanah garapan yang dilaporkan.

2.1.3.2.5 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Selanjutnya Lingkungan Hidup merupakan salah satu sub urusan wajib non pelayanan dasar. Kinerja penyelenggaraan sub urusan ini selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.91
Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,348	69,13	70,51	71,87	71,63
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,51	50,00	52,50	55,63	50,92
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,97	90,87	91,53	92,00	90,24
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,51	61,75	62,54	62,53	62,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Untuk urusan wajib lingkungan hidup, terdapat 4 indikator kinerja. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data

5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah cukup melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, perkembangan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.92						
Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023						
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Timbulan Sampah (ton/tahun)	55.993	56.536,00	56.295,41	55.954,79	56.964,67
2	Pengurangan (ton/tahun)	9,709	9.709,00	10.142,58	11.697,77	12.564,01
3	Penanganan (ton/tahun)	5.731	6.591,90	6.898	7.665,00	6.851,05
4	Sampah yang tertangani	15440	16300,9	17040,58	19362,77	19415,06
5	Persentase sampah yang tertangani	27,57%	28,83%	30,27%	34,60%	34,08%

Sumber: Dokumen Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan tabel diatas, persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, namun sedikit menurun di tahun 2023.

2.1.3.2.6 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.93					
Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023					
No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,60	98,65	98,70	96,10
2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	95	95	95	95,54
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100,00	100	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100,00	100	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,60	98,65	98,70	96,10
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,30	43,4	43,5	95,54
7	Perekaman KTP Elektronik	99,00	99,20	99,40	96,10
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	40,00	45	50	46,12
9	Kepemilikan akta kelahiran	7.500	7.500	7.500	8.913

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari sembilan indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, enam indikator sudah mencapai target. Keenam indikator tersebut adalah Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun), Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan akta kelahiran, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA dan Kepemilikan akta kelahiran.

2.1.3.2.7 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang

Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Tabel 2.94
Status Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023

No	Wilayah	Nilai Rata- Rata IDM	Status IDM
1	Kecamatan Gunuang Omeh	0,7306	Maju
2	Kecamatan Bukik Barisan	0,7681	Maju
3	Kecamatan Suliki	0,7746	Maju
4	Kecamatan Guguak	0,7970	Maju
5	Kecamatan Luak	0,8166	Mandiri
6	Kecamatan Mungka	0,7852	Maju
7	Kecamatan Akabiluru	0,7776	Maju
8	Kecamatan Payakumbuh	0,7640	Maju
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	0,8184	Mandiri
10	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	0,8084	Maju
11	Kecamatan Harau	0,8020	Maju
12	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	0,7995	Maju
13	Kecamatan Kapur IX	0,7348	Maju
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,7848	Maju
15	Provinsi Sumatera Barat	0,7514	Maju

Sumber: Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Peringkat IDM Tahun 2024

Dari tabel di atas, Status IDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sudah berstatus Maju dengan skor 0,7514 dan status IDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 juga berstatus maju dengan skor 0,7848. Begitupun di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 13 Kecamatan, 11 Kecamatan berstatus maju dan 2 Kecamatan berstatus mandiri.

Tabel 2.95
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2019	0	2	28	45	4	79
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2023 masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 4 nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada.

Di samping itu, IDM juga dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana potensi desa telah dioptimalkan oleh Nagari dalam pembangunan. Akan tetapi, potensi desa belum dapat dikembangkan secara optimal karena nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki profil nagari yang disebabkan juga oleh belum adanya batas nagari yang jelas.

2.1.3.2.8 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target dan capaian kinerja indikator urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Lima Puuh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,25	1,1	0,95	-
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2,20	2,18	-
3	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	55	60	65	47
4	Rasio Akseptor KB	1: 6	1 : 5	1 : 4	1 : 4
5	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	74,30	74,6	74,8	69,67
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	23	22	22	-
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,60	0,6	0,5	-
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,10%	8,63%	8,25	13,06
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,70%	27,1%	27,5	24,66
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,00	80	83	96
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	77,00	80	83	85,32
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	82,00	83	84	80,58
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	5,00	6	8	13
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	76,00	78	78	92,5
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	65,00	70	70	66,7
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	1: 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00	100	100	100
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00	100	100	100
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100,00	100	100	100
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	65,00	65	70	75
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	65,00	65	70	67
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	74,30	74,6	74,8	69,67

Sumber: BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

2.1.3.2.9 Urusan Wajib Perhubungan

Pada pencapaian target dan kinerja urusan penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2022, dari 8 indikator terdapat 2 indikator yang sudah mencapai target. Indikator-indikator yang mencapai target tersebut antara lain Rasio ijin trayek, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dan Pemasangan Rambu-rambu.

Untuk indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum, Persentase layanan angkutan darat dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, ketiganya tidak terealisasi karena tidak terlaksananya survey untuk memperoleh data terkait. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tidak terealisasi dikarenakan operasional terminal telah dihentikan berdasarkan Pemberitahuan Kepala Dinas Perhubungan tanggal 3 Januari 2022 Nomor: 551.2/003/Pras/1/2022 dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 538/SK/Pras.IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Barang Rimbo Data. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan
di Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.300.000	4.400.000	4.500.000	N/A
2	Rasio ijin trayek	2,95	2,96	2,97	4,12
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	6.069	6.162	6.237	253
4	Persentase layanan angkutan darat	2,00%	2,20%	2,40	N/A
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	91%	93%	93%	95,25%
6	Pemasangan Rambu-rambu	61%	62%	63%	55,48%
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.300.000	4.400.000	4.500.000	N/A
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	135.000	140.000	145.000	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.2.10 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan wajib komunikasi dan informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.98
Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan	18	18	20	15
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	79	80	81	80
3	Nilai Indeks SPBE pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,18	3,40	3,50	3,29
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	85	90	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 4 indikator pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, 3 diantaranya sudah mencapai target. Satu indikator yang belum mencapai target adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan yang masih tercapai 15 dari target sebanyak 18.

Dalam memenuhi Reformasi Birokrasi perlu diupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, salah satunya ditunjang oleh sistem informasi pada pemerintahan daerah. Sistem informasi ini melingkupi keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sampai saat ini sistem informasi tersebut belum mencakup keseluruhan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota

karena adanya beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan *blank spot* di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni :

Tabel 2.99
Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur
Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
1.	Aia Angek disamping monumen Bela Negara	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
2.	Bukik Tuak-Tuak	Tanjuang Bungo	Suliki
3.	Jorong Bio bio	Solok Bio-bio	Harau
4.	Jorong Harau	Harau	Harau
5.	Jorong Kanpuang Tengah	Andaleh	Luak
6.	Jorong Koto Mesjid	Gunuang Malintang	Pangkalan Koto Baru
7.	Jorong Landai	Harau	Harau
8.	Jorong Padang Panjang	Tanjung Haro Sikabu-kabu	Luak
9.	Jorong Padang Tarok	Harau	Harau
10.	Jorong Baliak	Simpang Sugiran	Guguak
11.	Jorong Batu Balabuah 1	Sungai Naniang	Bukit Barisan
12.	Jorong Botuang	Kurai	Suliki
13.	Jorong Kp Gaduang	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
14.	Jorong Kaludan	Sungai Talang	Guguak
15.	Jorong Kuranji	Guguak VIII Koto	Guguak
16.	Jorong Labuah Tunggang	Simpang Kapuak	Mungka
17.	Jorong Lokuang	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
18.	Jorong Mudiak Liki	Kurai	Suliki
19.	Jorong Nenan	Maek	Bukit Barisan
20.	Jorong Tb. Gadang	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
21.	Jorong Belubus	Sungai Talang	Guguak
22.	Jorong Koto Tinggi	Simpang Kapuak	Mungka
23.	Jorong Simpang Goduang	Simpang Kapuak	Mungka
24.	Kantor Wali Nagari Gelugur	Gelugur	Kapur IX
25.	Jorong Padang Kandi	Guguak VIII Koto	Guguak
26.	Dekat Kantor Nagari Tanjuang Bungo	Tanjuang Bungo	Suliki

No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
27.	Padang Longang Jorong Korek Hilia	Tanjung Bungo	Suliki
28.	Pasar Koto Tengah arah Barah Jorong Koto Tengah	Koto Lamo	Kapur IX
29.	Tebing Tinggi Jorong Aie Putia	Sarilamak	Harau

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengatasi daerah *blank spot* adalah :

1. Telah mengupayakan permintaan menara Telekomunikasi ke instansi pusat dalam hal ini adalah BAKTI Kemenkominfo.
2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga di sepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi.

Terkait dengan ketersediaan akses internet di perangkat daerah, diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dimana pada tahun 2023 telah mencapai angka 100%, sedangkan terkait indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota, untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencapai angka 166%.

2.1.3.2.11 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.

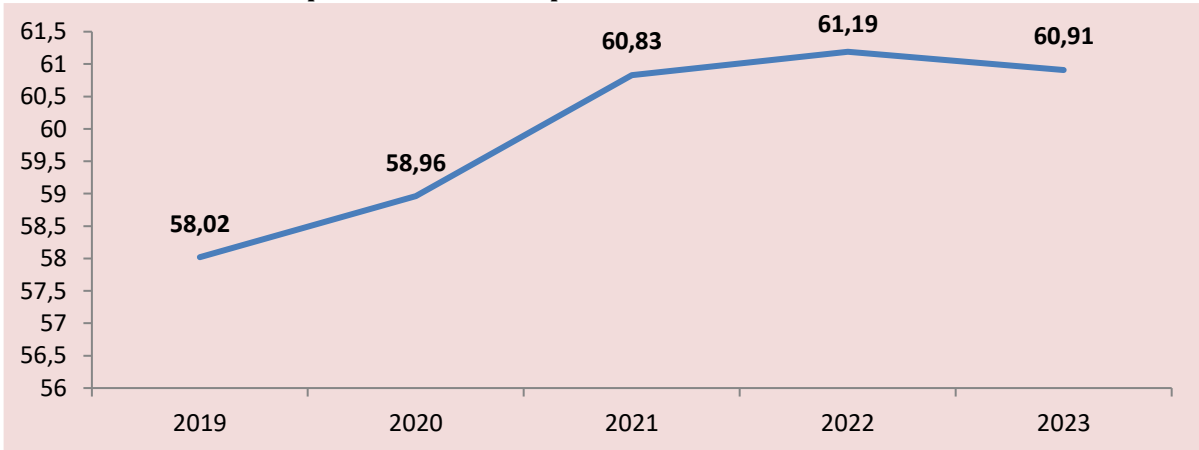
Selama lima tahun terakhir, jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah koperasi tercatat sebanyak 220 koperasi. Dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah koperasi sebanyak 8 koperasi dalam kurun tahun 2019-2023. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.100
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	212	212	217	219	220
2	Koperasi Aktif	123	125	132	134	134
3	Koperasi Tidak Aktif	89	87	85	85	86

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Grafik 2.25
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Jika dilihat dari Persentase koperasi aktif per tahunnya, terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2022, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, maka tidak terjadi peningkatan. Pada tahun 2019, persentase koperasi aktif sebesar 58,02 dan pada akhir tahun 2023 persentase koperasi aktif tercatat sebesar 60,91. Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki *bussiness plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di atas.

Tabel 2.101
Pertumbuhan Usaha Mikro
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1.	2019	2.041
2.	2020	7.308
3.	2021	8.258
4.	2022	8.302
5.	2023	8.431

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir pada tahun 2019 jumlah usaha mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2.041 usaha didominasi oleh usaha mikro dimana pada tahun 2019 sebanyak 2.041 unit, sementara pada akhir tahun 2023 menjadi 8.431 unit. Jika ditinjau jumlah usaha mikro selama rentang waktu 5 tahun terakhir, maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan penambahan jumlah usaha mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 1.597 unit usaha.

Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omzet usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omzet dan aset dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan Dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya. Pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya.

Di samping permasalahan di atas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru. Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, indikator Meningkatnya koperasi yang berkualitas mempunyai capaian 4,54% sedangkan indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha mempunyai capaian 1,47% pada tahun 2023.

2.1.3.2.12 Urusan Wajib Penanaman Modal

Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi. Kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 adalah 3.697 investor dengan nilai investasi Rp. 1.116.738.877.010,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.102
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian
		2023	2024	2025	2023
1	2	3	4	5	6

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian
		2023	2024	2025	2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	3.226	3.388	3.557	3.697
2	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA)	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	1.116.738.877.010
3	Nilai Realisasi PMDN	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	627.483.288.235
4	Nilai realisasi PMA	2.409.723.140	2.530.209.297	2.656.719.761	4.536.268.077

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Dilihat dari sebaran jumlah perizinan di tahun 2023, Kecamatan Harau merupakan kecamatan dengan jumlah izin yang paling banyak yaitu 1.147 izin untuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Jumlah perizinan dan kategori usaha penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.103
Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Perizinan	Kategori Usaha			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	Payakumbuh	607	34.589.951.805	26.755.280.000	0	15.200.000.000
2	Akabiluru	459	17.376.700.000	14.161.812.517	6.987.500.000	0
3	Luak	258	14.257.470.080	9.610.420.020	31.000.000.000	0
4	Lareh Sago Halaban	346	26.108.420.120	39.891.966.283	30.550.000.000	485.975.125.000
5	Situjuah Limo Nagari	424	14.601.630.060	0	0	0
6	Harau	1.147	72.874.544.201	50.194.413.765	7.527.200.000	42.100.000.000
7	Guguak	611	23.568.860.020	13.220.000.001	5.926.770.500	0
8	Mungka	302	13.682.000.000	12.079.000.000	0	0
9	Suliki	160	12.650.250.010	7.000.000.020	0	0
10	Bukik Barisan	239	4.374.850.030	3.179.000.000	8.600.000.000	0
11	Gunuang Omeh	88	4.023.000.000	2.200.000.000	0	0
12	Kapur IX	78	6.638.212.578	2.002.000.000	6.000.000.000	0
13	Pangkalan Koto Baru	197	9.237.500.000	12.730.000.000	20.650.000.000	20.000.000.000
Kab. Lima Puluh Kota		4.916	253.983.388.904	193.023.892606	117.241.470.500	563.275.125.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

2.1.3.2.13 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan wajib kepemudaan dan olahraga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.104
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50%	60%	65%	50%
2	Persentase wirausaha muda	0,04%	0,05%	0,06%	0,12%
3	Cakupan pembinaan olahraga	7	8	9	7

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
4	Cakupan pembinaan atlet muda	110	114	122	120
5	Jumlah atlet berprestasi	54	142	58	214
6	Jumlah prestasi olahraga	42	44	46	214

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jika dilihat dari 6 indikator urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tahun 2023 realisasi keenam indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan.

2.1.3.2.14 **Urusan Wajib Statistik**

Capaian indikator penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sudah mencapai 100 persen. Hal ini berarti keseluruhan OPD, yaitu sebanyak 42 yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Target dan capaian penyelenggaraan urusan statistik dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.105
Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	55	65	75	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	55	65	75	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.2.15 **Urusan Wajib Persandian**

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Persandian yaitu Persentase penyelenggaraan Persandian. Capaian indikator Persentase penyelenggaraan Persandian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106
Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyelenggaraan Persandian	12,50%	12,50%	66,4%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase penyelenggaraan Persandian selama 5 tahun terus meningkat dengan capaian 100% pada tahun 2023.

2.1.3.2.16 **Urusan Wajib Kebudayaan**

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 3 kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian penyelenggaraan urusan kebudayaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.107
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	5	5	3
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	105	110	110	110
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	70	70	75	70

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20	20	25	-
5	Terlestarikannya cagar budaya	80	85	90	65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.2.17 Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumber hhdaya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.108
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.473	2.510	2.548	8.046
2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	28.316	31.416	34.716	25.549
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,00	1,00	1,00	0,11
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	0,81	0,82	0,83	2,07
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	14.407	15.012	15.657	15.208
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	3	6	8	8
7	Nilai tingkat kegemaran membaca	10,25	11,00	12,25	64,19
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,50	4	4,5	85,47

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8.046 yang berarti sudah memenuhi target sebanyak 2.473 pengunjung. Akan tetapi jika ditinjau dari segi koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, capaian sebanyak 25.549 buku belum mencapai target 2023 sebanyak 28.316 buku. Di sisi lain, indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk memiliki capaian sebesar 0,11 dengan target 1,00 pada tahun 2023.

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun pada tahun 2023 sebesar 2,07 dengan target sebesar 0,81. Selanjutnya untuk indikator Jumlah koleksi judul buku perpustakaan sudah mencapai target 2023, dengan capaian sebanyak 15.208 buku. Pada tahun 2023, terdapat 8 orang pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Kemudian untuk indikator Nilai tingkat kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sudah mencapai target pada tahun 2023 dengan nilai capaian masing-masing sebesar 64,19 dan 85,47. Artinya dari sisi sumber daya yang tersedia, perpustakaan sudah cukup, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sumber daya sarana dan prasarana, hanya perlu diupayakan program-program yang ditujukan untuk menarik masyarakat dan aparaturnya untuk membiasakan diri mengunjungi perpustakaan, menambah perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah dan di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan gemar membaca.

Berkaca dari data capaian indikator tahun 2023, maka upaya yang mesti dilakukan adalah menciptakan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi terkait hal ini mutlak perlu dilakukan, karena untuk membangun 1 unit perpustakaan yang hanya mengandalkan Anggaran Pemerintah Daerah, membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diperlukan sokongan dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini.

2.1.3.2.18 **Urusan Wajib Kearsipan**

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian Tahun 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	34,54	39,54	44,54	35,25
2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	60	60	60	5
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	60,00	64,00	70,00	52,99
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	55,00	59,00	64,00	18,41

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, ada 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, Peningkatan SDM pengelola kearsipan, Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan), dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dari 4 indikator tersebut di tahun 2023, hanya 1 yang telah memenuhi target yang dicanangkan, artinya kinerja dari Urusan Kearsipan belum sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.3.3 **Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

2.1.3.3.1 **Urusan Perikanan**

Target dan capaian konsumsi ikan untuk tahun 2023 adalah 41 KG/Kapita/Tahun dengan capaian 40,11 KG/Kapita/Tahun. Hal ini berarti bahwa capaian hampir mencapai target. Realisasi capaian konsumsi ikan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.110
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Konsumsi Ikan (KG/Kapita/Tahun)	41	42	43	40,11

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHB pada tahun 2023 adalah Rp6.093.022,90 dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.953.381,79. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah sebesar 3,64%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)
Tahun 2023

No.	Uraian	Capaian 2023
1.	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta rupiah)	6.093.022,90

No.	Uraian	Capaian 2023
2.	PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta rupiah)	3.953.381,79
3.	Persentase sub kategori perikanan terhadap PDRB	3,64

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.3.2 Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pariwisata lebih dititikberatkan perkembangannnya kepada dua indikator, yaitu (a) kunjungan wisatawan mancanegara dan (b) kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 630.268 kunjungan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 749.139 kunjungan. Pada tahun 2021, tidak terdapat sama sekali kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 42 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah kunjungan wisata per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah

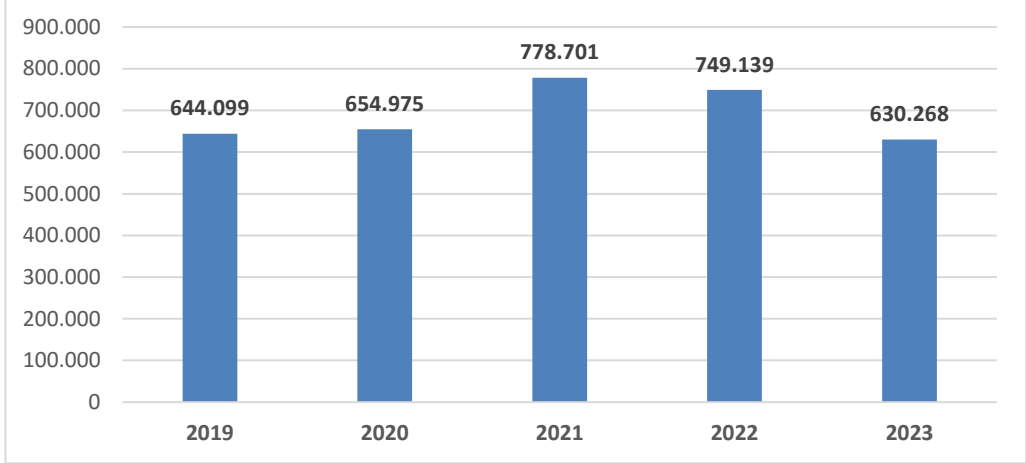
Tabel 2.112
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara	Jumlah Total
1	Januari	66.579	-	66.579
2	Februari	43.867	-	43.867
3	Maret	46.397	-	46.397
4	April	63.270	-	63.270
5	Mei	58.496	-	58.496
6	Juni	70.721	-	70.721
7	Juli	64.550	-	64.550
8	Agustus	38.280	7	38.287
9	September	44.502	8	44.510
10	Oktober	35.260	14	35.274
11	November	44.244	10	44.254
12	Desember	54.060	3	54.063
2023		630.226	42	630.268
2022		749.034	105	749.139
2021		778.701	-	778.701
2020		654.296	679	654.975
2019		636.783	7.316	644.099

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan jumlah total wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara) selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.26
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2023, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD senilai Rp1.364.241.000 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang senilai Rp1.288.322.000. Sementara itu, indikator lama kunjungan wisata pada tahun 2023 sebesar 0,7 hari yang sudah sesuai target sebesar 0,7 hari. Kemudian untuk indikator tingkat hunian akomodasi juga sudah mencapai target pada 2023 sebesar 73,34% dengan capaian sebesar 98,55%.

2.1.3.3.3 Urusan Pilihan Pertanian

Terhadap komoditi padi, luas panen untuk tingkat kecamatan pada tahun 2023, yang terluas ada di Kecamatan Harau, yaitu dengan luas panen 9.372 Ha, sedangkan luas panen terkecil berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan luas panen 887 Ha. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.113
Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.065	2.067	8.288	4,01
2	Suliki	2.366	2.372	11.216	4,73
3	Bukik Barisan	4.360	4.308	15.515	3,60
4	Guguak	5.090	5.074	21.080	4,15
5	Mungka	2.093	2.069	9.698	4,69
6	Payakumbuh	4.775	4.787	22.529	4,71
7	Akabiluru	4.128	4.177	19.624	4,70
8	Luak	3.520	3.476	16.372	4,71
9	Situjuah Limo Nagari	4.626	4.702	22.127	4,71
10	Lareh Sago Halaban	6.180	6.938	32.813	4,73
11	Harau	9.248	9.372	44.195	4,72
12	Pangkalan Koto Baru	610	610	2.135	3,50
13	Kapur IX	453	887	2.933	3,31
Jumlah	2023	49.514	50.839	228.523,90	4,50

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2023, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,50 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk, serta permodalan. Nilai produktivitas pada tahun 2023 ini juga masih berada di bawah target sebesar sebesar 4,98 ton/hektar. Realisasi penyelenggaraan urusan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2022
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,98	5,18	5,38	4,50

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2023 Persentase kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB adalah sebesar 25,02%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.115
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB Tahun 2023

No.	Uraian	Capaian 2023
1.	Persentase sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB	25,02

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023, diukur dengan indikator Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular berkenaan dengan kasus penyakit hewan menular di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan, untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki capaian sebesar 44,89%.

2.1.3.3.4 Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2023, sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi sekitar 15,61% atau sekitar 3,060 trilyun terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan tumbuh sekitar 5,50%. Sebagai daerah penghubung antara bagian barat dan timur sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 15,61% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan.

Berbicara mengenai perdagangan tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP).

Capaian persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera yang sah yang berlaku untuk tahun 2023 adalah 4,07%. Capaian ini belum mencapai target sebesar 45%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian Tahun 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku	45%	50%	55%	4,07%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2023, tidak ada data mengenai pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan). Adapun Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 81% pada tahun 2023.

2.1.3.3.5 Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2019-2023, konstribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel, kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2023 sebesar 6,51%.

Tabel 2.117
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,23	6,36	6,49	6,47	6,51

Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Kemudian memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2.118
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Pangan	2.533	937	1.270	267	917
2	Industri Sandang dan Kulit	414	100	281	80	39
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.383	5.892	6.010	38	52
4	Industri Logam dan Elektronika	9	48	77	36	38
5	Industri Kerajinan	277	203	223	15	11
Jumlah		7.616	7.180	7.861	436	1.057

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah industri formal di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari 436 unit usaha pada tahun 2022 menjadi 1.057 unit usaha pada tahun 2023. Untuk data nilai produksi menurut jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Nilai Produksi Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Industri	Produksi (Rp.000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Pangan	3.750.330.299	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450	61.916.338
2	Industri Sandang dan Kulit	75.677.364.500	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300	2.226.400
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	73.990.184.000	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552	29.287.800
4	Industri Logam dan Elektronika	1.113.400.000	7.485,515	11.545,515	1.899.500	1.829.800
5	Industri Kerajinan	166.375.951	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000	614.500
Jumlah		153.697.654.750	371.121.829,82	371.132.344,62	1.873.708.802	95.874.838

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2020-2024

Pada tahun 2022, terdapat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 0,361%. Sedangkan untuk persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebesar 1.057. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 1,90%, dimana belum mencapai target tahun 2023.

2.1.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen dalam penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.120
Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,25
2.	Pengukuran Kinerja	30%	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,24
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	11,93
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	61,71
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: KemenPANRB Tahun 2023

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,71 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Perkembangan hasil penilaian peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.121
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Peringkat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019 peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “CC” atau “Cukup” yang berarti cukup memadainya sistem dan tatanan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja daerah. Untuk itu manajemen kinerja perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mendapat predikat “B” sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yang berarti selama empat tahun terakhir akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun masih perlu perbaikan, baik terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun terkait evaluasi internal dan capaian kinerja daerah.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122
Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,76	83,99	84,09	86,55	87,26

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 dilaksanakan oleh 37 Perangkat Daerah dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari survey tersebut didapatkan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 87,26. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa IKM Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2019-2023, IKM Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat sebesar 4,5 poin.

c. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 58,5 dengan kategori “CC”. Dari nilai ini dapat diketahui bahwa Pemerinstah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks dari tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai predikat “B”. Indeks Reformasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.123

Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	58,78	69,87	48,85 (C)	51,81 (CC)	58,5 (CC)

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

d. Potensi Zakat

Berkaitan dengan potensi zakat, realisasi penerimaan selama 5 tahun terakhir jika ditinjau dari jumlah orang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, penerimaan zakat ditargetkan sebanyak 4.779 orang dan terealisasi sebanyak 4.028 orang dengan rincian sebesar Rp.4.358.000.632. Jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.283.003.079 kepada sebanyak 7.311 orang. Untuk potensi penerimaan Zakat dari ASN pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.10.500.000.000,-. Sedangkan untuk *Muzzaki-muzzaki* yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan *muzzaki* lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS, sehingga dalam hal ini *maqashid al-Syariah* zakat untuk *muzzaki* di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum terkumpulkan oleh BAZNAS. Target dan penerimaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.124

Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Jumlah Dana Yang Disalurkan		Potensi Penerimaan Zakat ASN	
		Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.
1	2018	4.000	3.505.000.000	1.144	2.964.881.746	8.101	2.797.168.721	6.000	8.379.450.000
2	2019	3.000	3.250.000.000	1.627	4.212.380.837	9.561	4.357.811.105	6.207	9.310.500.000
3	2020	4.500	4.640.000.000	1.692	3.978.733.270	8.084	3.924.103.900	6.241	10.241.550.000
4	2021	3.842	4.645.000.000	4.014	4.377.238.897	7.125	4.734.792.837	7.000	10.500.000.000
5	2022	4.779	7.008.000.000	4.028	4.358.000.632	7.311	4.283.003.079	7.000	10.500.000.000

Sumber: Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berkaitan dengan *mustahiq* yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun, belumlah disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap *muzzaki* selama ini.

e. Angka Partisipasi Kasar Surau/MDA/TPQ

Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ diperoleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDA dan Surau. Dari data tahun 2023, jumlah anak yang belajar di seluruh lembaga tersebut mencapai 47.999 murid, dengan rincian pada TPQ sebanyak 38.113 murid, pada MDTA sebanyak 8.178 murid dan pada surau 1.708 murid. Jumlah dan jumlah murid secara rinci pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125

Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2023

NO	KECAMATAN	TPQ		MDTA		SURAU	
		Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
1	Guguak	127	2.193	81	1.252	4	80

NO	KECAMATAN	TPQ		MDTA		SURAU	
		Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
2	Akabiluru	134	2.413	53	1.058	-	-
3	Harau	286	5.948	10	185	76	1.435
4	Kapur IX	180	3.106	-	-	-	-
5	Lareh Sago Halaban	282	4.850	24	389	7	170
6	Luak	155	2.907	5	91	-	-
7	Situjuah Limo Nagari	159	2.775	3	110	-	-
8	Suliki	107	1.870	68	1.064	-	-
9	Mungka	124	2.165	29	512	-	-
10	Bukik Barisan	111	2.153	87	1.907	-	-
11	Gunuang Omeh	75	1.274	41	737	1	23
12	Pangkalan Koto Baru	116	2.934	6	202	-	-
13	Payakumbuh	197	3.525	40	671	-	-
	JUMLAH	2.053	38.113	447	8.178	88	1.708

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan jumlah guru mengaji dan jumlah murid masing-masing lembaga dilihat dari masing-masing kecamatan. Jumlah terbanyak dari guru dan murid ada pada TPQ, dimana jumlah gurunya sebanyak 2.053 orang dengan jumlah murid sebanyak 38.113 orang. Jumlah guru dan murid terbanyak selanjutnya terdapat pada MDTA dengan jumlah guru sebanyak 447 orang dan jumlah murid sebanyak 8.178 murid. Sedangkan untuk surau sebanyak 88 orang guru dengan jumlah murid 1.708 orang.

Jika dilihat perbandingan jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun, ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti atau tidak mendapat akses untuk mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana upaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun ini bisa memperoleh pendidikan tersebut. Adapun perkembangan jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126
Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid	2019	2020	2021	2022	2023
1.	TPQ	805	805	870	880	879
2.	MDTA	136	136	141	126	137
3.	Surau	24	24	25	42	44
4.	Masjid	419	419	429	430	435

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jika dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018 sampai 2021 terus mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2.127
APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 Tahun	64,59	67,94	76,39	72,69	77,52

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ sebesar 77,52. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-15 tahun untuk belajar agama masih rendah, masih ada sekitar 23 dari 100 penduduk usia 7-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan agama di Surau/MDA/TPQ.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan APK murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya tetap memberikan insentif berupa honor kepada guru-guru TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin, agar mereka lebih bersemangat dan bergairah untuk tetap mengajar di lembaga tersebut, hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah pada pendidikan agama khususnya pendidikan Al Qur'an. Di samping itu juga melalui pembinaan dan penilaian Lembaga Didikan Subuh (LDS) serta melaksanakan MTQ secara berjenjang mulai di tingkat Nagari sampai Kabupaten.

Dengan peningkatan APK murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau, maka sasaran strategis ini Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yaitu “Meningkatnya Aktivitas Masjid/ Musholla/

Surau/MDA/TPQ” juga akan tercapai. Selanjutnya dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembinaan karakter generasi muda (anak nagari) melalui pendidikan yang diambil dari nilai-nilai surau dahulu yang telah melahirkan tokoh-tokoh dari Minangkabau yang berkiprah di tingkat Nasional maupun Internasional.

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Capaian indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan mencapai target di tahun 2023 baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD juga sudah terintegrasi pada tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.128
Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.1.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dipenuhi untuk tahun 2023. Setiap dokumen perencanaan yang ada selalu ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Sedangkan untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tersedia di Dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.129
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan
(Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Walaupun semua target di tahun 2023 tercapai, bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan antara lain, yaitu: sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan.

Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain: belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi

capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.3.5.2 Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Perkembangan PAD dan persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2.127.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar (*adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.130
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	85.168.153.332,25	77.429.483.703,61	79.852.144.928,96	82.916.128.991,64	102.016.528.328,68
Pendapatan	1.336.485.510.303,25	1.209.471.396.990,61	1.260.792.546.305,96	1.142.618.819.349,64	1.262.125.884.491,68
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	6,37	6,40	6,33	7,26	8,08

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, Tahun 2024

2.1.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.131
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	21,5	53,72	52,66	52,72	59,51

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

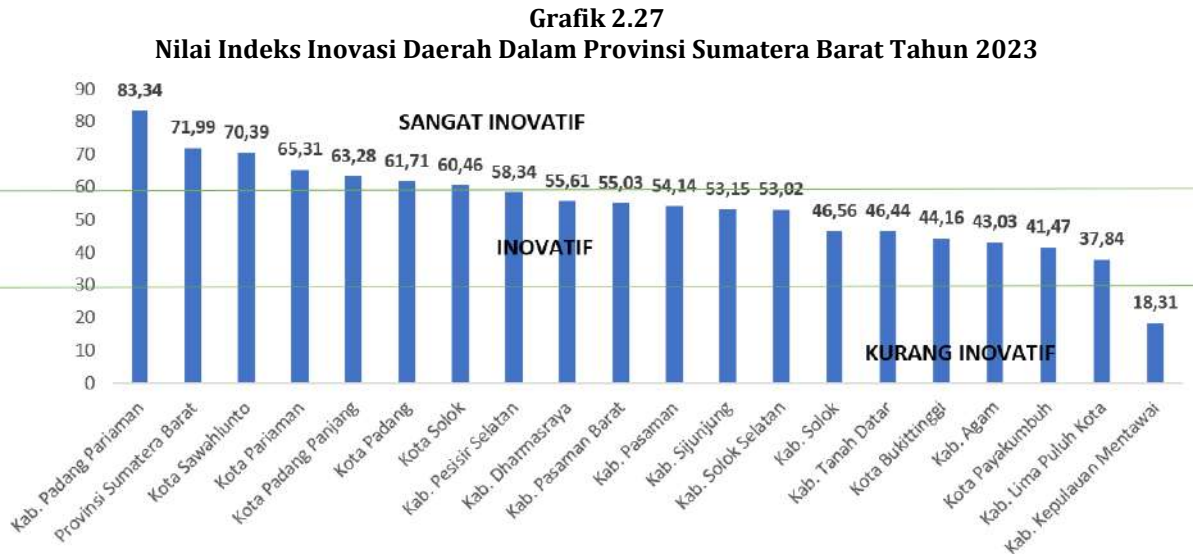
Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2019 bernilai rendah sebesar 21,5 disebabkan karena adanya transisi dari penilaian mandiri menjadi penilaian terpusat melalui aplikasi Badan Kepagawaian Negara (BKN) sehingga terdapat perbedaan metode dan indikator penilaian. Pada tahun 2020 nilai Indeks Profesionalitas ASN naik menjadi 53,72 kemudian pada tahun 2021 turun sedikit menjadi

52,66 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 52,72, lalu meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 59,51.

2.1.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan penunjang pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu sub bidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini. Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu. Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/IGA (*Innovation Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017. Adapun Nilai Indeks Inovasi lingkup pemerintah daerah se- Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mendapatkan predikat Provinsi dan Kota Sangat Inovatif. Selanjutnya 12 Kabupaten/Kota lainnya mendapat predikat Kabupaten/Kota Inovatif, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan predikat kurang inovatif. Data perolehan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.132
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Ket.
1.	2019	3.010	Sangat Inovatif
2.	2020	197	Kurang Inovatif
3.	2021	28,81	Kurang Inovatif
4.	2022	47,47	Inovatif
5.	2023	37,84	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dengan mempedomani tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan interval skor Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2019-2020 dengan tahun 2021-2023. Dengan demikian, untuk membandingkan capaian Indeks Inovasi Daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilakukan dengan cara membandingkan predikat dari indeksnya. Selama tahun 2019, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat predikat sangat inovatif dalam hal inovasi daerah. Akan tetapi capaian ini menurun pada tahun 2020 menjadi kurang inovatif. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 mendapat predikat inovatif, yang berarti meningkat dari tahun 2021 yang memiliki predikat kurang inovatif. Kemudian pada tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota kembali mendapat predikat inovatif. Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan kinerja dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten

Lima Puluh Kota. Sehingga diharapkan urusan kelitbangan ini perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan aspek daya saing daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target dan capaian indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Penelitian Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.133
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian Tahun 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20	20	20	20
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	27,91	30,23	32,56	34,88
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	23,26	23,26	23,26	38,89

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 4 indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan (penelitian dan pengembangan), seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu melakukan upaya yang lebih baik dalam hal implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.1.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Terdapat 3 indikator capaian kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Persentase tindak lanjut temuan ekstern dan intern masing-masing memiliki capaian sebesar 82,09% dan 78%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.134
Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase tindak lanjut temuan				
	- Ekstern	82,5	83,00	83,50	82,09
	- Intern	84	84,50	85,00	78
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berada pada level 3, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (*governance, risk management, and control*), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah

PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran selama 5 tahun terakhir meningkat cukup signifikan, yakni Rp. 15.625.340,42 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi Rp.

19.604.196,10 juta rupiah pada tahun 2023. Perkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2.132.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak lepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor neto atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 2.132 terlihat bahwa selama tahun 2019–2023, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, 56,01% pada tahun 2019 dan 53,48% pada tahun 2023. Pembentukan modal tetap bruto juga mempunyai kontribusi relatif besar sejak tahun 2019–2023 yakni 31,00% pada tahun 2019 dan 31,22% pada tahun 2023. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah berada dalam rentang 9,64% pada tahun 2019 dan 7,37% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Untuk net ekspor barang dan jasa berada pada rentang 2,24% pada tahun 2019 dan 6,83% pada tahun 2023.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dari tabel di bawah, selama kurun tahun 2019–2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian mulai merangkak naik kembali sampai tahun 2023 menjadi sebesar 4,55%. Perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019–2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.135
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2019 - 2023

Jenis pengeluaran (baru)	2019		2020		2021		2022		2023	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.751.049,54	56,01	8.402.203,28	54,06	8.809.387,67	54,44	9.812.910,71	54,82	10.484.749,90	53,48
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	175.689,06	1,12	170.764,75	1,10	176.435,55	1,09	183.874,45	1,03	201.350,91	1,03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.505.655,05	9,64	1.387.114,73	8,93	1.416.319,98	8,75	1.432.655,05	8,0	1.444.382,58	7,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.843.161,71	31,00	4.789.530,07	30,82	5.054.123,53	31,23	5.465.024,73	30,53	6.121.403,00	31,22
Perubahan Inventori	405,09	0,00	1.494,45	0,01	8.321,74	0,05	17.079,69	0,10	12.366,83	0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	349.379,96	2,24	790.393,53	5,09	717.884,96	4,44	989.217,16	5,53	1.339.942,87	6,83
PDRB	15.625.340,42	100	15.541.500,82	100	16.182.473,43	100	17.900.761,78	100	19.604.196,10	100

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 2.136
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2019 - 2023

Jenis pengeluaran (baru)	2019		2020		2021		2022		2023	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.804.040,11	4,72	5.513.193,69	-5,01	5.635.294,06	2,21	5.844.582,37	3,70	6.024.777,49	3,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	127.147,73	13,76	122.380,32	-3,75	124.826,07	2	124.615,07	-0,17	130.366,89	3,08
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	937.178,68	5,30	851.597,20	-9,13	857.233,35	0,66	846.123,88	- 1,97	849.023,88	0,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.289.156,59	4,77	3.215.492,87	-2,24	3.312.328,56	3,01	3.413.823,06	4,53	3.686.298,63	7,98
Perubahan Inventori	271,52	-	974,20	-	5.386,34	-	10.898,91	-	7.667,00	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.034.628,24	-	1.358.678,48	-	1.495.440,01	-	1.650.088,30	-	1.732.694,08	-
PDRB	11.192.422,88	5,06	11.062.316,76	-1,16	11.430.508,39	3,33	11.890.131,59	4,02	12.430.827,97	4,55

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Semakin besar rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, akan menggambarkan kepadatan pemakaian pengguna jalan. Tahun 2023, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 134,94 artinya dalam 1 km panjang jalan menampung 134-135 kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama kurun waktu 2019-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.137
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan	1.306,65	1.306,65	1.378,48	1.378,48	1.275,20
2	Jumlah kendaraan	101.193	85.070	50.258	121.417	172.080
3	Rasio	77,44	64,67	36,46	88,08	134,94

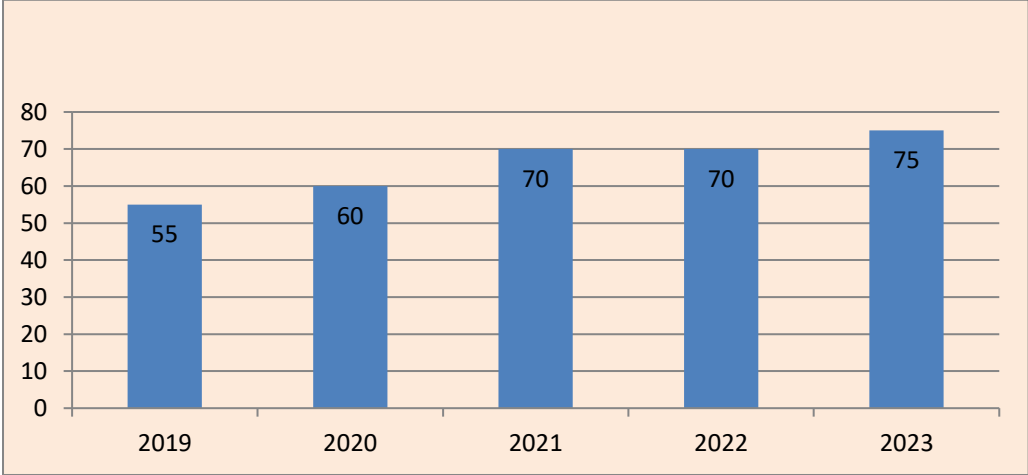
Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

b. Ketaatan terhadap RTRW

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat seperti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari: i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah:

Grafik 2.28
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023



Sumber: DPUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 tingkat ketaatan terhadap RTRW mencapai 75%, artinya masih ada 25% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala utama adalah belum selesainya proses revisi RTRW yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, serta belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

c. Jenis dan Jumlah Bank dan cabang

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank

dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024, pada tahun 2023 jumlah BPR/LPN tercatat sebanyak 6 buah yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Harau dan Suliki dengan jumlah masing-masing 1 buah. Total modal dasar BPR/LPN tersebut pada tahun 2023 tercatat sebesar 71 milyar rupiah dengan total aset sebesar 221 milyar rupiah. Aset terbesar terdapat di Kecamatan Harau, yaitu sebesar 88 milyar rupiah.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

a. Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin tidak amannya kehidupan masyarakat, sehingga berdampak kepada semua aktivitas sosial dan ekonomi. Di samping itu tingginya angka kriminalitas juga menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.138
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan			
2019	1.061	548	513	382.817	277	52
2020	968	798	229	383.525	252	82
2021	232	300	28	385.634	60	129
2022	302	144	158	388.375	78	48
2023	482	365	123	396.427	122	76

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024 Data Diolah

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 cenderung berfluktuasi dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019. Angka kriminalitas pada tahun 2023 sebesar 122, mengindikasikan bahwa setiap 122 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Jika ditinjau dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas, maka sampai tahun 2023 penyelesaian gangguan Kamtibmas belum maksimal.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 221.753 jiwa dengan rincian 212.991 jiwa bekerja dan sebesar 8.762 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2023 sebesar 83.548 jiwa dengan rincian sebanyak 26.087 jiwa sedang bersekolah, 42.962 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.499 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya. Status Pekerjaan Utama tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 paling banyak merupakan Buruh/Karyawan/Pegawai dan berusaha sendiri dengan jumlah masing masing 64.210 orang dan 60.418 orang. Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.139
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tidak/belum pernah sekolah	-	-	-	-	-
2	Tidak/belum tamat SD	-	16	-	-	-
3	Sekolah Dasar	9	11	1	19	3
4	Sekolah Menengah Pertama	103	41	28	263	15
5	Sekolah Menengah Atas	1.127	859	728	1.079	595
6	Diploma I/II/III/ Akademi	167	242	140	89	57
7	Universitas	495	306	326	246	151
Jumlah		2.529	1.475	1.223	1.696	821

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

b. Tingkat Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non produktif. BPS merepresentasikan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) dengan memunculkan Angka Beban Tanggungan (ABT). Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Semakin besar ABT, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Untuk tahun 2023, Angka Beban Tanggungan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada besaran 47,43 artinya setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) akan menanggung 47-48 orang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perkembangan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.140
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	110.014	92.272	91.295	90.496	91.893
2	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	242.219	259.325	260.893	262.824	268.894
3	Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun	30.584	31.928	33.446	35.055	35.640
4	% ABT	58,05	47,89	47,81	47,77	47,43

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020-2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi: 1) Penyusunan perencanaan, 2) Penetapan rencana, 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing - masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan :

- 1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunanDaerah.
- 2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional.
- 3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.
- 4. Konsistensi antara RKPD denganRPJMD.
- 5. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 181 ayat (3) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi :

- 1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- 2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunanDaerah.
- 3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunanDaerah.

Evaluasi dan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah merupakan hal yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, dilakukan terhadap evaluasi hasil rencana pembangunan daerah tahun 2023 yang dihubungkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 (RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026). Evaluasi dan pengendalian ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya yaitu perencanaan

pembangunan daerah tahun 2025.

Maksud dan tujuan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah tahun 2023 adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD tahun 2023 dengan RPJMD tahun 2021-2026 dilihat dari capaian pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.2.1 EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2023

Evaluasi RKPD sampai dengan akhir tahun 2023 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan sesuai Perangkat Daerah masing-masing yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 untuk mendapatkan target sasaran yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi RKPD sampai dengan akhir tahun 2023 ini dilakukan terhadap 43 Perangkat Daerah yang menjalankan urusan/bidang urusan pemerintahan daerah yang di dukung dengan program dan kegiatan.

Selain itu, evaluasi terhadap dokumen perencanaan ini juga dilihat dari tingkat konsistensi antara jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan RKPD tahun 2023 dan APBD tahun 2023 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.141
Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD dan APBD Tahun 2023

NO	OPD	RKPD 2023				APBD 2023				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	19	103	504,916,797,427	6	18	104	505,334,597,427	86%	95%	101%	100%
2	DINAS KESEHATAN	5	24	115	140,967,425,822	5	24	118	140,967,425,822	100%	100%	103%	100%
3	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	3	9	17	54,825,679,899	2	7	8	54,825,679,899	67%	78%	47%	100%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	15	55	76,656,897,668	5	12	51	76,656,897,668	63%	80%	93%	100%
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	10	38	7,655,254,247	2	10	38	7,655,254,247	100%	100%	100%	100%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	10	42	5,998,051,492	2	10	42	5,998,051,492	100%	100%	100%	100%
7	DINAS SOSIAL	6	14	51	6,737,357,519	4	12	46	6,737,357,519	67%	86%	90%	100%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9	20	65	5,439,801,781	3	18	40	5,439,801,781	33%	90%	62%	100%
9	DINAS PANGAN	5	14	60	2,455,987,171	1	7	36	2,455,987,171	20%	50%	60%	100%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	16	33	79	19,198,375,998	5	17	41	19,198,375,998	31%	52%	52%	100%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	17	42	3,672,285,183	5	17	43	3,672,285,183	125%	100%	102%	100%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	5	12	75	3,675,228,476	1	8	50	3,675,228,476	20%	67%	67%	100%
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	26	60	9,469,070,329	9	25	68	9,469,070,329	90%	96%	113%	100%
14	DINAS PERHUBUNGAN	2	24	93	12,527,578,868	2	24	93	12,527,578,868	100%	100%	100%	100%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	12	51	7,129,305,412	5	12	51	7,129,305,412	100%	100%	100%	100%
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,	10	20	41	4,120,923,358	4	12	30	4,120,923,358	40%	60%	73%	100%

NO	OPD	RKPD 2023				APBD 2023				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
	USAHA KECIL DAN MENENGAH												
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	26	42	3,595,841,746	2	9	32	3,595,841,746	33%	35%	76%	100%
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	7	21	62	20,701,760,457	7	21	63	20,701,760,457	100%	100%	102%	100%
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6	20	70	4,665,042,799	5	19	70	4,665,042,799	83%	95%	100%	100%
20	DINAS PERIKANAN	5	17	59	4,358,384,372	4	16	57	4,358,384,372	80%	94%	97%	100%
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	6	16	58	21,131,524,619	6	16	58	21,131,524,619	100%	100%	100%	100%
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6	22	73	9,342,892,544	5	20	70	9,342,892,544	83%	91%	96%	100%
23	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	68	34,666,708,631	3	18	68	34,666,708,631	100%	100%	100%	100%
24	SEKRETARIAT DPRD	2	18	77	31,334,679,291	2	18	77	31,334,679,291	100%	100%	100%	100%
25	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	17	71	5,801,249,118	4	18	79	5,801,249,118	100%	106%	111%	100%
26	BADAN KEUANGAN	4	14	98	225,284,917,701	4	14	98	224,348,390,736	100%	100%	100%	100%
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	38	6,185,721,502	3	13	38	6,185,721,502	100%	100%	100%	100%
28	INSPEKTORAT	3	11	50	9,216,015,759	3	11	50	9,216,015,759	100%	100%	100%	100%
29	KECAMATAN GUNUANG OMEH	6	15	32	1,090,973,347	4	13	29	1,090,973,347	67%	87%	91%	100%
30	KECAMATAN BUKIK BARISAN	6	16	36	1,121,711,830	4	12	27	1,121,711,830	67%	75%	75%	100%
31	KECAMATAN SULIKI	6	14	44	1,413,264,363	4	11	38	1,413,264,363	67%	79%	86%	100%
32	KECAMATAN GUGUAK	5	10	26	1,134,253,454	5	10	26	1,243,531,504	100%	100%	100%	110%
33	KECAMATAN MUNGKA	6	15	28	1,051,532,103	3	11	23	1,051,532,103	50%	73%	82%	100%

NO	OPD	RKPD 2023				APBD 2023				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
34	KECAMATAN AKABILURU	6	14	33	1,395,865,267	4	12	29	1,395,865,267	67%	86%	88%	100%
35	KECAMATAN PAYAKUMBUH	4	10	33	1,654,428,211	4	11	34	1,654,428,211	100%	110%	103%	100%
36	KECAMATAN LUAK	4	14	37	1,252,600,216	4	14	37	1,252,600,216	100%	100%	100%	100%
37	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	6	14	42	1,249,946,970	4	12	34	1,249,946,970	67%	86%	81%	100%
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	6	14	48	1,302,272,489	3	10	40	1,302,272,489	50%	71%	83%	100%
39	KECAMATAN HARAU	5	13	37	1,583,837,961	3	10	30	1,583,837,961	60%	77%	81%	100%
40	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	5	11	25	1,271,886,927	3	9	20	1,271,886,927	60%	82%	80%	100%
41	KECAMATAN KAPUR IX	6	16	48	1,475,546,935	5	14	48	1,493,595,850	83%	88%	100%	101%
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	43	20,521,336,330	6	13	43	21,330,536,330	100%	100%	100%	104%
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	11	44	4,089,163,075	2	11	44	4,089,163,075	100%	100%	100%	100%
TOTAL		233	692	2309	1,283,339,378,667	167	599	2121	1,283,757,178,667	78%	88%	91%	100%

Sumber: Bappelitbanda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data Diolah

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2023 yaitu sebanyak 233 program, 692 kegiatan dan 2309 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,283,339,378,667,-. Sedangkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 167 program, 599 kegiatan dan 2121 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.283.757.178.667,-. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD ini berdasarkan APBD pergeseran II setelah perubahan yang dilakukan pada Bulan November tahun 2023.

Dilihat dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada RKPD tahun 2023 dengan APBD tahun 2023 terdapat perbedaan atau terjadi *inkonsistensi* jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pada APBD tahun 2023.

Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2023 dan APBD tahun 2023 dilihat dari jumlah program yaitu sebesar 78%, dilihat dari jumlah kegiatan sebesar 88%, dilihat dari jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 91% dan dilihat dari pagu anggaran yaitu sebesar 100%. Terdapat perbedaan terhadap jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dengan selisih sebanyak 66 untuk program, 93 untuk kegiatan, 188 untuk sub kegiatan. Tingkat *inkonsistensi* pagu anggaran terdapat selisih sebesar Rp. 417,800,000,-. Dengan adanya *inkonsistensi* ini perlu dilakukan penyesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2024.

Rincian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dilihat dari tingkat konsistensi nya yaitu:

- a. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2023 dengan APBD tahun 2023 yang paling tinggi untuk jumlah program yaitu 125% terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan tingkat konsistensi yang paling rendah yaitu sebesar 20% terdapat pada Dinas Pangan. Program yang sudah konsisten 100% antara RKPD tahun 2023 dengan APBD 2023 terdapat sebanyak 18 Perangkat Daerah.
- b. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2023 dengan APBD tahun 2023 yang paling tinggi untuk jumlah kegiatan yaitu sebesar 110% terdapat pada Kecamatan Payakumbuh, sedangkan tingkat konsistensi yang paling rendah yaitu sebesar 35% terdapat pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan yang konsisten 100% antara RKPD 2023 tahun dengan APBD tahun 2023 terdapat sebanyak 17 Perangkat Daerah.
- c. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2023 dengan APBD tahun 2023 yang paling tinggi untuk jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 113% terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan tingkat konsistensi paling rendah sebesar 47% terdapat pada RSUD Ahmad Darwis. Sub Kegiatan yang konsisten 100% antara RKPD tahun 2023 dan APBD tahun 2023 terdapat sebanyak 16 Perangkat Daerah.
- d. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2023 dengan APBD tahun 2023 yang paling tinggi untuk jumlah pagu anggaran yaitu sebesar 104% terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Realisasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan RKPD untuk seluruh OPD dengan 40 urusan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,217,751,419,480,-. Dilihat dari angka capaian baik itu secara kinerja maupun secara keuangan tergolong sangat tinggi,

Metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.142
Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1.	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2.	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3.	Sedang	S	66% ≤ 75%
4.	Rendah	R	51% ≤ 65%
5.	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

Untuk rekap capaian per masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.142
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
Bidang Urusan pada Perubahan RKPD 2023

NO	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp.	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2	11	89	501,343,893,802	98%	489,728,739,651	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	24	117	195,793,105,721	92%	181,033,495,893	Dinas Kesehatan RSUD Achmad Darwis
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	16	71	76,656,897,668	99%	75,543,342,036	DPUPR
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	9	17	5,210,808,070	92%	4,817,394,014	DLHPP
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	19	88	17,742,468,814	99%	17,570,170,896	1. Dinas Damkar 2. Satpol PP 3. BPBD
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	14	55	6,737,357,519	95%	6,420,276,477	Dinas Sosial
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	9	19	2,159,481,700	87%	1,870,392,471	Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Dan Trans
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	12	18	1,404,213,000	79%	1,111,146,034	DPPKB P3A
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	14	60	2,455,987,171	99%	2,425,316,028	Dinas Pangan
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2	2	3	0	0%	0	DPUPR
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	23	59	13,987,567,928	100%	13,920,503,154	DLHPP
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	17	42	3,672,285,183	96%	3,527,759,913	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	12	75	3,675,228,476	99%	3,639,425,158	DPMD/N
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	14	42	8,064,857,329	90%	7,253,982,239	DPPKB P3A
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	24	93	12,527,578,868	96%	12,059,797,838	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	9	41	6,650,636,286	98%	6,496,209,967	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	8	16	33	3,812,761,508	99%	3,781,125,871	Dinas DagKop dan UKM
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	13	42	3,595,841,746	97%	3,490,339,105	DPMPTSP
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	16	51	10,996,575,835	97%	10,663,887,722	Dinas Parpora
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	5	53,052,916	94%	49,908,342	Dinas Komunikasi Dan

NO	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp.	
								Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	2	5	425,616,210	100%	423,631,008	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5	8	14	3,990,703,625	91%	3,619,817,089	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	11	55	4,542,619,299	100%	4,520,057,580	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	9	15	122,423,500	97%	118,890,414	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	5	17	59	4,358,384,372	99%	4,325,537,872	Dinas Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	5	11	9,705,184,622	100%	9,691,342,000	Dinas Parpora
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	27	96	30,474,417,163	98%	29,748,670,933	1.Dinas Tanhorbun 2. Disnakeswan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	8	16	308,161,850	93%	287,783,064	Dinas DagKop dan UKM
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4	10	44	2,979,289,081	99%	2,960,021,961	Dinas Perinaker Dan Trans
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	2	301,031,000	92%	277,182,121	Dinas Perinaker Dan Trans
31	Sekretariat Daerah	3	18	68	34,666,708,631	97%	33,750,307,702	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	2	18	77	31,334,679,291	96%	30,211,624,776	Sekretariat Dprd
33	Perencanaan	3	14	67	4,950,214,718	97%	4,784,754,469	Bapelitbang
34	Keuangan	4	14	98	224,348,390,736	86%	193,977,011,248	Badan Keuangan
35	Kepegawaian	2	12	37	5,928,746,502	94%	5,600,114,042	BKPSDM
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	256,975,000	100%	255,700,000	BKPSDM
37	Penelitian Dan Pengembangan	1	3	4	851,034,400	91%	669,967,425	Bapelitbang
38	Inspektorat Daerah	3	11	50	9,216,015,759	96%	8,883,122,972.00	Inspektorat
39	Kecamatan	6	19	73	17,125,447,038	99%	16,955,022,734	13 Kecamatan
40	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	13	43	21,330,536,330	100%	21,287,647,261	Badan Kesbangpol
JUMLAH		166	496	1855	1,283,757,178,667	93%	1,217,751,419,480	

Sumber: Bappelitbanda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data Diolah

Untuk evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 2 program, 11 kegiatan dan 89 sub kegiatan dengan pagu APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.501,343,893,802,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan sampai triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.489,728,739,651,-.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan RSUD Achmad Darwis dimana pada RKPD tahun 2022 terdapat 5 program, 22 kegiatan dan 107 sub kegiatan dengan pagu APBD pergeseran 2

setelah perubahan sebesar Rp.195,793,105,721,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan sampai triwulan IV sebesar 92% dan realisasi keuangan sebesar Rp.181,033,495,893,-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 terdapat 9 program, 16 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan pagu APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.76,656,897,668,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.75,543,342,036,-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2023 terdapat 5 program, 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.5,210,808,070,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sampai triwulan IV sebesar 92% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,817,394,014,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2023 terdapat 4 program, 19 kegiatan dan 88 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.17,742,468,814,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.17,570,170,896,-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2023 terdapat 6 program, 14 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.6,737,357,519,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang sosial sampai triwulan IV sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.6,420,276,477,-.

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada tahun 2023 terdapat sebanyak 4 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.2,159,481,700,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sampai triwulan IV sebesar 87% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1,870,392,471,-.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 terdapat sebanyak 6 program, 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.1,404,213,000,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 79% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1,111,146,034,-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.2,455,987,171,-. Realisasi kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Pangan sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2,425,316,028,-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun 2023 terdapat sebanyak 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.0,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang pertanahan sampai triwulan IV adalah 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp.0,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman pada tahun 2023 terdapat sebanyak 11 program, 23 kegiatan dan 59 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.13,987,567,928,-. Realisasi capaian

kinerja pada urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup sampai triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.13,920,503,154,-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.3,672,285,183,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang sipil sampai triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,527,759,913,-.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.3,675,228,476,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,639,425,158,-.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 terdapat sebanyak 4 program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.8,064,857,329,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana sampai triwulan IV sebesar 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7,253,982,239,-.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2023 sebanyak 2 program, 24 kegiatan dan 93 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.12,527,578,868,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perhubungan sampai triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.12,059,797,838,-.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023 terdapat sebanyak 3 program, 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.6,650,636,286,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sampai triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.6,496,209,967,-.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dpada tahun 2023 terdapat program sebanyak 8, kegiatan 16 dan sub kegiatan 33 dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.3,812,761,508,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,781,125,871,-.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 terdapat sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.3,595,841,746,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sampai triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,490,339,105,-.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga dimana pada tahun 2023 terdapat sebanyak 4 program, 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.10,996,575,835,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.10,663,887,722,-.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.53,052,916,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Statistik sampai triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.49,908,342,-.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1 program, 2 kegiatan, 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.425,616,210,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Persandian sampai triwulan IV 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.423,631,008,-.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 program, 8 kegiatan, dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.3,990,703,625,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sampai triwulan IV 91% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.619,817,089,-.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan pada tahun 2023 terdapat 3 program, 11 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.4,542,619,299,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perpustakaan sampai triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,520,057,580,-.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan pada tahun 2023 sebanyak 3 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.122,423,500,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kearsipan sampai triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.118,890,414,-.

III. URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada tahun 2023 terdapat 5 program, 17 kegiatan dan 59 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.4,358,384,372,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perikanan sampai triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,325,537,872,-.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga pada tahun 2023 terdapat 3 program, 5 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.9,705,184,622,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pariwisata sampai triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.9,691,342,000,-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dimana berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2023 terdapat 7 program, 27 kegiatan dan 96 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.30,474,417,163,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pertanian sampai triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.29,748,670,933,-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dimana berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2023 terdapat 6 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.308,161,850,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perdagangan sampai triwulan IV sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar Rp.287,783,064,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dimana berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2023 terdapat 4 program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.2,979,289,081,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perindustrian sampai triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2,960,021,961,-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada tahun 2023 terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.301,031,000,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Transmigrasi sampai triwulan IV sebesar 92% dan realisasi keuangan sebesar Rp.277,182,121,-.

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2023 terdapat 3 program, 18 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.34,666,708,631,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah sampai triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.33,750,307,702,-.

B. SEKRETARIAT DPRD

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2023 terdapat sebanyak 2 program, 18 kegiatan dan 77 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.31,334,679,291,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah sampai triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.30,211,624,776,-.

V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. PERENCANAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2023 terdapat 3 program, 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.4,950,214,718,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perencanaan sampai triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,784,754,469,-.

B. KEUANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keuangan dpada 2023 terdapat 4 program, 14 kegiatan dan 98 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.224,348,390,736,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Keuangan sampai triwulan IV sebesar 86% dan realisasi keuangan sebesar Rp.193,977,011,248,-.

C. KEPEGAWAIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023 terdapat 2 program, 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.5,928,746,502,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kepegawaian sampai triwulan IV sebesar 94% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5,600,114,042,-.

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023 terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.256,975,000,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan sampai triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.255,700,000,-.

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan pada tahun 2023 terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.851,034,400,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan sampai triwulan IV sebesar 91% dan realisasi keuangan sebesar Rp.669,967,425,-.

VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. INSPEKTORAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2023 terdapat 3 program, 11 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.9,216,015,759,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Inspektorat sampai triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.8,883,122,972,-.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

A. KECAMATAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati, di Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata cara kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas diantaranya:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota: dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. " Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria :
 - 1) Proses Sederhana;
 - 2) Objek perizinan berskala kecil;
 - 3) Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - 4) Tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Camat menyelenggarakan tugas meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu: urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Kecamatan;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan Kecamatan yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Kecamatan menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Tabel 2.144
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	64,58	65	65	65	65	70	70	77,5
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	50	60	65	65	70	70	75	80,00
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,47	90	90	90	90	95	95	91,67

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

Urusan ini dilaksanakan oleh 13 Kecamatan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 6 program, 19 kegiatan dan 73 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.17,125,447,038,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kecamatan sampai triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.16,955,022,734,-.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019, urusan Pemerintahan Umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama,ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamananlokal, regional dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragamanDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan umum tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi vertikal. Sehubungan dengan belum disahkannya peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, sehingga tugas dan fungsi Badan Kesbangpol diatur pada ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seluruh instansi Kesbangpol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan segala dukungan yang diperlukan sampai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Umum disahkan.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan peraturan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Selanjutnya, secara kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami penyesuaian tugas dan fungsi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengukur sejauh mana kinerja urusan pemerintahan umum khususnya kesatuan bangsa dan politik, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut memuat2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, dan 3 (tiga) Sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.145
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Tahun 2021 - 2024

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi di KabupatenLima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kada	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	
2.	Menurunnya tingkat konflik socialditengan masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di KabupatenLima Puluh Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	66	66	66	66	66	66	66	66	66	

		Nilai IRB	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		Nilai IKM	86	86	86	86	86	86	86	86	86	

Sumber: Renstra Bakesbangpol Tahun 2024

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tahun 2023 terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan pagu anggaran APBD pergeseran 2 setelah perubahan sebesar Rp.21,330,536,330,-. Realisasi capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sampai triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.21,287,647,261,-.

2.2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target-target pada Indiktor kinerja utama Kepala daerah yang sudah ditetapkan untuk melihat kendala dan yang dihadapi sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 terdapat 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada 5 Misi Kepala daerah yang ada, terdapat 8 Tujuan dan 24 Sasaran dimana masing-masing tujuan dan sasaran tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah. Untuk capaian kinerja apabila dilihat dari Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sampai dengan akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.146
Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						SUMBER
				2020	2021		2022		2023		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	Tujuan :									
		1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47	69,85	71,03	70,23	71,64	70.61	72,65	BPS
		Sasaran :									
		1.1. Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,07	8,23	8,08	8.3	8.12	BPS
			Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,30	13,76	13,41	13.35	13.41	BPS
		1.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	72,74	69,86	72,79	69,93	73,03	70	73.25	BPS
			Angka prevalensi stunting	8,29	7,29	8,36	6,29	8,64	5.29	8.72	Dinas Kesehatan
		2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	Indeks ABS-SBK	NA	NA	NA	1,5	1,76	1.7	1.84	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)
		Sasaran :									
1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	NA	NA	NA	1,5	1,76	1.7	1.84	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)		
2.	Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas	Tujuan :									
		Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	-1,16	2,39	3,33	2,99	4,04	4.28	4.55	BPS
			PDRB per-kapita ADHK (Rp. juta)	28,84	29,67	29,64	30,49	30,62	31.32	31,36	BPS
			PDRB per-kapita ADHB	40,53	42,36	41,99	44,19	46.09	46.02	49,45	BPS

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						SUMBER
				2020	2021		2022		2023		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
	sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional		(Rp. juta)								
		Sasaran :									
		1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	36,67	40,49	47.74	47.24	56.71	DISPARPORA
		1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	26,81	27,64	26,14	28,47	25,43	29.31	25,02	BPS
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,61	3,67	3,65	3,72	3,67	3.78	3,64	BPS
		1.3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,36	6,49	6,49	6,62	6,47	6.75	6.51	BPS
		1.4. Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,4	7,78	6,33	8,53	6,77	8.53	7.47	BK
3.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Tujuan :									
		1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7398	0,7562	0,7627	0.772	0.7848	Kemendes
		Sasaran :									
		1.1 Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7398	0,7562	0,7627	0.772	0.7848	Kemendes
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Tujuan :									
		1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	47,92 (C)	48,85 (C)	53,33 (CC)	51,81 (CC)	58,75 (CC)	58,5 (CC)	Setda (Bag.Organisasi)
		Sasaran :									
		1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23 (B)	61,71 (B)	61,14 (B)	64,37 (B)	61,02 (B)	67,02 (B)	61,71 (B)	Inspektorat
			Indeks inovasi daerah	197	510	480	700	791.17	1.000	631	Bappelitbangda

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						SUMBER
				2020	2021		2022		2023		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
										(Inovatif)	
		1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	85,98	84,09	87,98	86,55	89.97	87.26	Bappelitbangda
5.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik	Tujuan 1 :									
		Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,4	73,93	66,21	75,88	76.68	77.78	73.508	DPUPR
		Sasaran :									
		1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74	76,09	71,74	80,43	71,74	84.78	71.74	DPUPR
		1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	54.79	55.81	55,73	57.05	58,02	58.65	59.57	DPUPR
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,53	Data belum tersedia	0,53	0,23	0.52	0.42	DISHUB
		1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,4	81,62	80,7	83,12	81,70	84.72	81.7	DPUPR
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	78,45	76,65	80,5	83,75	81.65	66.44	DPUPR
		1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewengan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,63	77,52	11,77	78,32	88,19	79.12	88.09	DPUPR

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						SUMBER
				2020	2021		2022		2023		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
		1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,153	0,157	0,173	0,16	0,202	0.163	0.197	DLHPP
		Tujuan 2 :									
		Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	70,51	71,46	71,87	71.86	71.63	DLHPP
		Sasaran :									
		2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	70,51	71,46	71,87	71.86	71.63	DLHPP
		2.2. Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65	70	70	70	75	75	DPUPR
		2.3. Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	85-79	80,45	79-73	93,2	73-67	119.2	BPBD

Keterangan :

Realisasi = Target

Realisasi < target

Realisasi > Target



Dari hasil evaluasi terhadap IKU pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 1 yaitu sebesar 71,42%. Indikator yang mendukung Misi 1 tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Rata-rata lama sekolah; Harapan lama sekolah; Angka Harapan Hidup; Angka prevalensi stunting; dan Indeks ABS-SBK. Pada 6 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang realisasinya belum mencapai target yaitu Rata-rata lama sekolah dan Angka prevalensi stunting.
- b. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 2 yaitu sebesar 50%. Pada misi II terdiri dari 3 indikator yang mendukung tujuan dan 5 indikator yang mendukung sasaran. Indikator yang capaiannya sudah melebihi target yaitu Pertumbuhan ekonomi; dan Presentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB; PDRB per-kapita ADHK (Rp.Juta); PDRB per-kapita ADHB (Rp.Juta); dan Tingkat capaian kunjungan wisata. Sedangkan indikator yang capaian nya belum mencapai target yaitu Presentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB; Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB; Presentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB; dan Persentase PAD terhadap Pendapatan.
- c. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 3 yaitu sebesar 100% untuk 1 indikator kinerja utama berdasarkan tujuan dan sasaran. Indikator yang mendukung capaian kinerja epala daerah pada Misi 3 yaitu Indeks desa membangun yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021.
- d. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 4 belum ada satupun indikator yang mencapai target. Terdapat 4 indikator yang mendukung misi 4 yaitu Indeks reformasi birokrasi dengan tingkat capaian 58,5, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian 61,71, Indeks inovasi daerah capaiannya sebesar 631 (inovatif) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian sebesar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). untuk capaian dari masing-masing indikator tersebut sudah mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Namun, karena target untuk tahun 2023 juga mengalami peningkatan maka capaian dari setiap indikator tersebut belum mencapai target.
- e. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 5 yaitu sebesar 50% dengan 2 indikator berdasarkan tujuan dan 10 indikator berdasarkan sasaran. Indikator berdasarkan tujuan tersebut yaitu Indeks pembangunan infrastruktur dan Indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator berdasarkan sasaran yaitu Persentase gedung strategis yang terbangun; Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten; Indeks Kelancaran Lalu Lintas; Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten; Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi; Rasio rumah layak huni; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Persentase ketaatan terhadap RTRW; dan Indeks Risiko Bencana Daerah. Dari 12 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang mencapai target yaitu indeks tingkat kemantapan jalan Kabupaten, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Rasio rumah layak huni, Persentase ketaatan terhadap RTRW, Indeks Risiko Bencana Daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Permasalahan ini dirumuskan ke dalam 2 (dua) komponen besar sebagaimana diuraikan berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 berada pada angka 72,05, meningkat dari tahun 2022 sebesar 1,77 poin. Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah IPM Propinsi Sumatera Barat dan berada di peringkat 15 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2022 IPM Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 13 dari 19 Kabupaten/Kota.

- Lambatnya peningkatan Rata Rata Lama Sekolah. Walaupun rata rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat nilainya dari 8,08 tahun 2022 menjadi 8,12 pada tahun 2023, namun nilai ini belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 8,3. Hal ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang terkait dengan tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas masih menjadi masalah.
- Masih kecilnya peningkatan Angka Harapan lama Sekolah. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,01 dari 13,40 menjadi 13,41. Angka tersebut sudah melewati target tahun 2023 namun peningkatan dari tahun sebelumnya masih rendah. Kecilnya peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Masih belum tertanganinya biaya penunjang pendidikan anak usia pendidikan dasar, sehingga perlu ditangani dengan pemberian beasiswa untuk tingkat pendidikan dasar.
- Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga perlu upaya serius dalam menekan angka Drop Out atau putus sekolah serta pemberian beasiswa bagi siswa menengah yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, maka perlu ditingkatkan kerjasama dengan BAZNAS, PT swasta serta perantau.
- Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan sudah melewati target yang ada. Capaian usia harapan hidup pada tahun 2023 sebesar 73,25 meningkat sebesar 3,17 dari tahun sebelumnya.
Dari 5 komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup, ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan, antara lain:
 - Masih banyaknya kasus kematian ibu. Terjadi peningkatan terhadap angka kematian ibu, dimana pada tahun 2021 sebesar 171,00 naik menjadi 205,61 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup tinggi menjadi 95,3. Penyebab utama kematian Ibu ini antara lain tekanan darah tinggi, gagal ginjal serta penyakit penyerta lainnya pada ibu hamil seperti darah tinggi. Kedepan perlu ditingkatkan kebijakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Meningkatkan akses persalinan.
 - Masih adanya kasus kematian bayi. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan kasus kematian bayi yaitu sebesar 3,5 dari 8,50 pada tahun 2021. pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 12,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan kesehatan terhadap bayi belum baik dan perlu ditingkatkan.
 - Masih adanya kasus kematian balita. Pada tahun 2021 kematian balita sebanyak 8,5 kemudian naik tahun 2022 menjadi 13,60 dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 13,7. Hal ini mengindikasikan bahwa, pemantauan tumbuh kembang anak serta pelayanan terhadap kesehatan Balita belum baik dan perlu ditingkatkan.
 - Tingginya angka prevalensi stunting. Permasalahan stunting tidak saja menjadi permasalahan di Kabupaten Lima Puluh Kota saja, tetapi juga menjadi permasalahan nasional. Dari hasil pengukuran pada Tahun 2022, prevalensi stunting belum dapat diturunkan, masih sedikit naik yaitu sebesar 0,28 persen dari 8,36 pada tahun 2021, sehingga menjadi 8,64 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 angka prevelensi stunting kembali mengalami peningkatan menjadi 8,72%. Bila dibandingkan dengan target, maka angka ini jauh dari yang diharapkan yaitu sebesar 5,29 persen. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya kepemilikan JKN, masih banyaknya yang belum memiliki Jamban sehat, perilaku merokok orang tua yang masih tinggi dan juga rendahnya akses air bersih. Disamping itu, melalui program SADARI Stunting dan pemenuhan Tenaga Pengelola Gizi di setiap puskesmas, dalam upaya perbaikan data juga berdampak dihasilkannya data yang lebih akurat, sehingga memperbaiki data-data yang sebelumnya tidak terpublikasi dengan baik.
 - Masih banyak terdapat penyakit, tidak saja penyakit menular tetapi juga penyakit tidak menular. Untuk itu kedepan perlu dilaksanakan kebijakan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular, Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan, peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, Peningkatan sanitasi lingkungan, Meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam upaya deteksi dini hipertensi, Peningkatan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Meningkatkan sistem informasi pengelolaan obat dan vaksin berbasis data kependudukan.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Saat ini keberadaan RSUD di Kecamatan Suliki dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam RPJMD ditargetkan adanya upaya realokasi RSUD ke lokasi yang lebih representative dan potensial untuk dikembangkan. Selain itu, tenaga kesehatan belum merata jumlah dan ketepatan penempatannya. Sehingga kedepan perlu dilaksanakan kebijakan Pembangunan rintisan rumah sakit daerah, Peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan, Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman, Pemenuhan sarana dan prasana kesehatan serta Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan.

Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat

Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat yang diukur melalui penerapan ABS-SBK di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2022 Nilai dari Indeks ABS-SBK adalah 1,76 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,08 atau nilainya menjadi 1,84, namun dengan memperhatikan komponen pembentuk Indeks ABS-SBK, masih terdapat permasalahan antara lain:

- Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 Tahun. Pada Tahun 2022 APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 tahun turun dari 76,39 pada tahun 2021 menjadi 72,69 pada tahun 2022, akan tetapi hal ini masih jauh dari target yang diharapkan, dimana masih ada 23 persen anak usia 7-15 tahun yang belum mendapatkan pendidikan Agama, sebagai generasi muda tentu saja hal ini akan berakibat kepada pembentukan karakternya. Pada tahun 2023 kembali meningkatkan menjadi 77,52. Diharapkan setiap tahunnya APK murid belajar agama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, hal ini tergambar dari masih banyaknya kasus- kasus gangguan kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yaitu 256 kasus dan tahun 2023 meningkat menjadi 482 kasus yang terlapor. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma agama, hukum dan adat serta belum seimbangnya kapasitas penegak hukum dalam mengatasi masalah kamtibmas, baik dari sisi kuantitas, maupun kualitas.
- Rendahnya pengelolaan kesenian di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilihat dari tidak adanya peningkatan jumlah sanggar seni dan jumlah gedung kesenian dari tahun ke tahun. Belum adanya gedung seni yang representatif menghambat ruang apresiasi masyarakat terhadap seni.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz, TPQ/MDTA/Surau/Masjid. Salah satu icon pelaksanaan ABS-SBK adalah tumbuhnya rumah tahfidz di setiap nagari, sehingga sampai akhir periode 2026 diharapkan setiap nagari sudah memiliki rumah tahfidz yang dilengkapi dengan guru tahfidz yang dibiayai honoraria oleh pemerintah. Sampai tahun 2022 baru terbentuk 20 rumah tahfidz dan ada sekitar 3.400 guru tahfidz, guru TPQ, MDTA, Imam dan gharin yang perlu dibiayai operasionalnya.
- Belum optimalnya pengumpulan zakat. Sampai tahun 2022, dari potensi zakat yang terdata, tingkat penerimaan zakat belum maksimal, dengan angka capaian 62,19%, sehingga ke depan peningkatan penerimaan dan pendistribusian zakat perlu ditingkatkan.

Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagai Lokus Stunting Nasional

Percepatan penurunan stunting merupakan kegiatan prioritas nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 di 100 Kabupaten/Kota di Indonesia. Selanjutnya diperluas menjadi 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan 260 Kabupaten/Kota pada tahun 2020. Salah satu dari 260 Kabupaten/kota sebagai lokus stunting ini adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dimuat dalam surat dari Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020. Dari surat tersebut, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Nagari Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 pada tanggal 21 Januari 2020. Dari SK tersebut disebutkan Nagari dan Kecamatan Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik, namun masalah stunting belum usai di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga penanganan Stunting tetap menjadi Prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan stunting adalah Dinas Kesehatan.

d. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal

Dari laporan capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, masih banyak indikator yang belum bisa terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyelenggaraan SPM ini meliputi 6 urusan yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Urusan Sosial. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya aparatur yang melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan SPM. Disamping itu, masih belum terpenuhinya SPM ini juga terindikasi disebabkan oleh masih kurangnya pendataan tentang penuntasan SPM. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan masih belum tercapainya SPM adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Inovasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022, **Kabupaten Lima Puluh Kota** pada Tahun 2022 mendapatkan **nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 47,47** (hasil konversi terhadap target IKU = 791,17) dengan kategori **Daerah Inovatif**. Dalam Keputusan Mendagri tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 173 dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 nilai inovasi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 631 (inovatif). Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penilaian ini, tentu belum hasil terbaik, maka kedepannya Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan inovasinya, sehingga predikatnya naik menjadi sangat inovatif. Perangkat Daerah

yang terkait dengan permasalahan inovasi adalah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

a. Cakupan pelayanan infrastruktur daerah belum memadai

Cakupan pelayanan infrastruktur daerah belum memadai, hal ini dilihat dari beberapa hal seperti:

- Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah, Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2022 adalah 58,02 persen dari total 1.101,2 km jalan Kabupaten. Pada tahun 2023 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 59,57. Untuk target tahun 2024 adalah 59,95 persen, masih kurang sekitar 0,38 persen dengan asumsi kondisi jalan yang sudah mantap sekarang tidak turun tingkat kemantapannya.

Akar permasalahannya adalah:

- 1). Belum tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan jalan kabupaten;
 - 2). Belum tertibnya administrasi penyelenggaraan pembangunan jalan;
 - 3). Penanganan jalan masih mengutamakan aspek pemerataan;
 - 4). Belum tegaknya aturan tonase kendaraan sesuai design perencanaan jalan; dan
 - 5). Masih terbatasnya alokasi anggaran.
- Cakupan layanan air minum belum optimal.
Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 89,21. Pada tahun 2023 nilainya turun menjadi 81,70. Hal ini perlu ditingkatkan agar semua penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan layanan air bersih karena merupakan salah satu SPM.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1). Belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada;
 - 2). Sistem jaringan air minum yang ada belum mampu melayani pendistribusian air bersih ke seluruh masyarakat; dan
 - 3). Rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana program air minum.
- Cakupan layanan sanitasi belum optimal
Cakupan layanan sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 66,66 persen, tahun 2023 sebesar 66,44 persen. Target capaian layanan sanitasi 2024 adalah 83,35 persen, masih kurang 16,91 persen lagi. Jika dikaitkan dengan target SPM yang 100 persen tentu akan semakin banyak penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum mendapatkan layanan sanitasi yang layak.

Akar permasalahannya antara lain:

- 1). Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2). Tingginya persentase saluran pembuangan air limbah masyarakat yang tidak sesuai standar;
 - 3). Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat; dan
 - 4). Rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana program sanitasi.
- Kinerja irigasi pertanian belum optimal
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 88,19 tahun 2023 adalah 88,09. Target untuk tahun 2024 adalah 79,92. Walaupun sudah melewati target ditahun 2024, tetapi irigasi tetap menjadi permasalahan karena salah satu faktor turunnya produktivitas pertanian adalah dari saluran irigasi.

Adapun akar permasalahannya adalah antara lain:

- 1). Kualitas sistem dan jaringan irigasi masih rendah;
 - 2). Kuantitas dan kualitas sumber air baku belum memadai;
 - 3). Keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas lapangan Operasi Pemeliharaan (OP) Irigasi, terutama Juru dan Pengamat;
 - 4). Tidak aktifnya sebagian besar P3A dan rendahnya peran serta petani dalam pengelolaan irigasi; dan
 - 5). Pengaturan distribusi pemakaian air yang belum optimal.
- Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal
Rasio rumah layak huni Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 0,202, tahun 2023 adalah 0,197 . Target capaian rasio rumah layak huni tahun 2024 adalah 0,166. Walaupun sudah mencapai target, namun kebutuhan akan rumah layak merupakan sesuatu yang sangat penting. Untuk itu perlu ditingkatkan rasio rumah layak huni untuk kedepannya.

Adapun akar permasalahan terhadap ketersediaan rumah yang layak huni adalah antara lain:

- 1). Rendahnya progress penanganan rumah tidak layak huni;
- 2). Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 3). Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai;
- 4). Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai;
- 5). Sistem proteksi kebakaran belum memadai;
- 6). Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman masih rendah; dan

- 7). Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai
Untuk tahun 2023, pengadaan tanah untuk pembangunan beberapa gedung strategis di IKK Sarilamak belum dapat diwujudkan. Dan juga pembangunan gedung strategis di IKK Sarilamak belum dapat dilaksanakan (rumah dinas Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Camat Harau).
Adapun akar permasalahannya antara lain:
 - 1). Tidak sesuai pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - 2). Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
 - 3). Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
 - Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 adalah 71,87 dengan realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 55,63. Pada tahun 2023 indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan indeks kualitas Air (IKA) mengalami penurunan menjadi 71,63 dan 50,92. Target IKLH tahun 2024 adalah 72,27 dan target IKA adalah 56,06. Terdapat Gap sebesar 0,64 untuk IKLH dan 5/14 untuk IKA.
 - Masih rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Realisasi ketaatan terhadap RTRW tahun 2022 adalah 70 persen, tahun 2023 75 persen. Target persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2024 adalah 80 persen, artinya masih ada GAP 5 persen.
Adapun akar permasalahannya adalah antara lain:
 - 1). Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan dalam aktivitas pembangunan;
 - 2). Belum terpenuhinya norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang yang dibutuhkan;
 - 3). Belum optimalnya penataan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan; dan
 - 4). Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan infrastruktur daerah yang belum memadai adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat.

b. Belum optimalnya pengelolaan potensi Nagari

Diukur melalui Indeks Desa Membangun, status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 9 nagari mandiri, 57 nagari maju, 12 nagari berkembang dan 1 nagari tertinggal. Artinya pengelolaan nagari masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Untuk realisasi indeks desa membangun pada tahun 2023 sebesar 0,7848 sudah melewati dari target yaitu 0,772. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan belum optimalnya pengelolaan potensi Nagari adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

c. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif

Hal utama yang mempengaruhi belum optimalnya penyusunan profil nagari adalah belum adanya batas nagari di semua nagari, saat ini masih dalam proses pengukuran dan penetapan batas nagari. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

d. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan

Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing. Selanjutnya ketersediaan air pada jaringan irigasi juga belum mencukupi untuk mengaliri luas areal pertanian dan perikanan. Di samping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi, masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi. Terhadap bidang perikanan dan peternakan masih kurangnya benih dan induk ikan unggul, belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan, belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan, dan masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan serta kurangnya SDM pengelola alsintan. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan.

e. Belum optimalnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Belum optimalnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh pembangunan kawasan wisata Geopark Harau belum optimal, pembenahan dan pembukaan objek wisata baru antara lain Nagari Wisata belum optimal, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek pariwisata belum optimal, kerjasama dan kemitraan dalam investasi pariwisata belum optimal, belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat, masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata dan kapasitas SDM pariwisata masih rendah. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan belum optimalnya kunjungan wisatawan adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

f. Masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan,

pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi. Selanjutnya terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha. Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan masih rendahnya pengembangan IKM adalah Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.4 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesenjangan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar-negara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.4.1 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk

pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

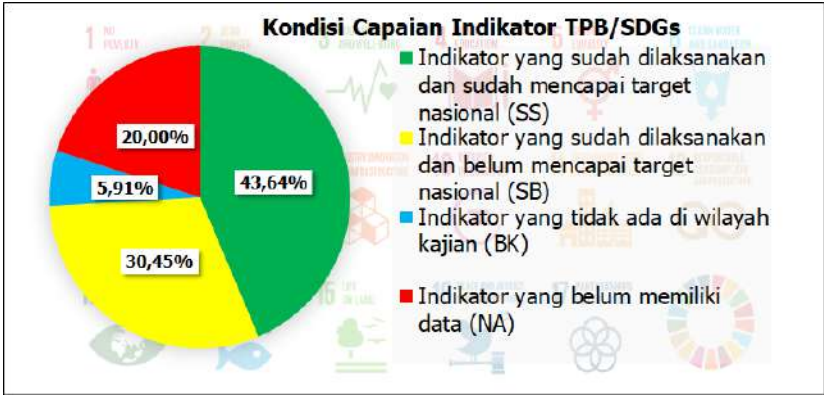
Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang bukan kewenangan/BK

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 15 TPB kecuali TPB 7 (Energi bersih dan terjangkau) dan TPB 14 (Ekosistem Lautan). Jumlah indikator dari 15 TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 96 indikator (43,64%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 67 indikator (30,45%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 44 indikator (20,00%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 2.5
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Sumber: KLHS Tahun 2024

Ketercapaian indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147
Ketercapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator	Ketidaktercapaian
1	Tanpa Kemiskinan	11	10	2	1	24	41,67
2	Tanpa Kelaparan	4	4	3	0	11	36,36
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	19	11	4	0	34	32,35
4	Pendidikan Berkualitas	5	6	2	0	13	46,15
5	Kesetaraan Gender	5	7	2	0	14	50,00
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	8	8	1	1	18	44,44
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2	0,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	4	11	0	19	21,05
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	3	2	4	13	23,08
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	0	3	0	11	0,00
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	3	1	5	13	23,08
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	1	0	5	60,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0,00
15	Ekosistem Daratan	0	1	3	0	4	25,00

No.	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator	Ketidaktercapaian
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	8	5	8	0	21	23,81
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	13	2	1	0	16	12,50
		96	67	44	13	220	
	Ketercapaian			43,64			

Sumber : Pengolahan Data Indikator TPB, 2023

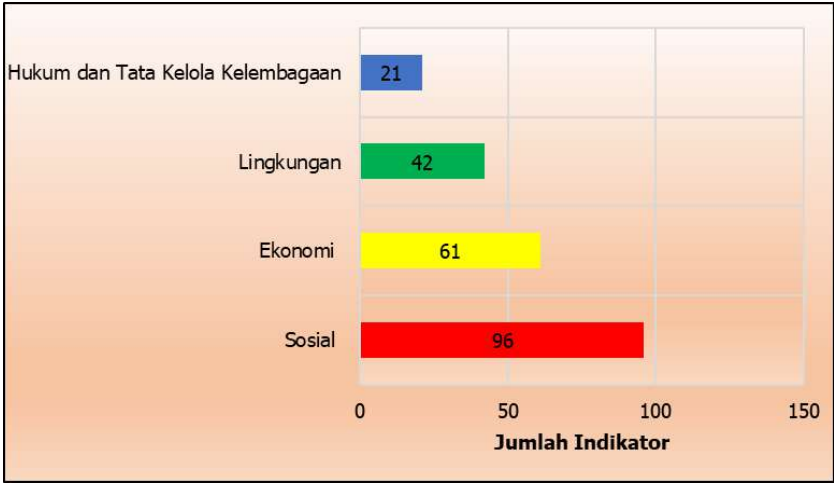
2.4.2 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PILAR

Indikator TPB/SDGs dibedakan dalam 4 (empat) pilar, yakni :

1. Pilar pembangunan sosial
2. Pilar pembangunan ekonomi
3. Pilar pembangunan lingkungan
4. Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan

Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah indikator kewenangan kabupaten berdasarkan pilar pembangunan.

Gambar 2.6
Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar Pembangunan



Sumber: KLHS Tahun 2024

2.4.2.1 Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4 dan Tujuan 5. Jumlah indikator pilar sosial yakni 96 indikator dan 1 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.148
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial

Nomor TPB	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
1.	Tanpa Kemiskinan	13	7	3	1	24
2.	Tanpa Kelaparan	4	3	4	0	11
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	10	6	0	34
4.	Pendidikan Berkualitas	3	8	2	0	13
5.	Kesetaraan Gender	3	7	4	0	14
	Jumlah	41	35	19	1	96

Sumber: KLHS Tahun 2024

2.4.2.2 Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10 dan Tujuan 17. Jumlah indikator pilar ekonomi yakni 61 indikator dan 10 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.149
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi

Nomor TPB	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
7.	7. Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2

8.	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	12	0	19
9.	9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	3	3	3	13
10.	10. Berkurangnya Kesenjangan	8	0	3	0	11
17.	17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	13	2	1	0	16
	Jumlah	29	8	19	5	61

Sumber: KLHS Tahun 2024

2.4.2.3 Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Jumlah indikator pilar sosial yakni 42 indikator dan 6 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.150
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan

Nomor TPB	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
6.	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	11	2	1	18
11.	11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	2	2	5	13
12.	12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	1	0	5
13.	13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
14.	14. Ekosistem Lautan					
15.	15. Ekosistem Daratan	0	0	4	0	4
	Jumlah	11	16	9	6	42

Sumber: KLHS Tahun 2024

2.4.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator yang merupakan pilar hukum dan tata Kelola adalah Tujuan 16, yakni Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Capaian indikator untuk TPB/SDGs 16 ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.151
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Nomor TPB	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
16.	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	6	8	0	21

Sumber: KLHS Tahun 2024

2.4.3 CAPAIAN INDIKATOR BERDASARKAN STANDAR PELAYAAAN MINIMAL (SPM)

Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 61 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

- SPM Kesehatan
SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 42,62 % dari indikator SPM
- SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,39 % dari indikator SPM
- SPM Pekerjaan Umum
SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,48 % dari indikator SPM
- SPM Pendidikan
SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,31 % dari indikator SPM
- SPM Perumahan Rakyat
SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,64 % dari indikator SPM
- SPM Sosial
SPM Sosial sebanyak 4 indikator atau 1,82 % dari seluruh indikator TPB dan 6,56 % dari indikator SPM.

Tabel 2.152
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM

No	SPM	SS		SB		NA		Total
1	Kesehatan	14	54%	9	35%	3	12%	26

2	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	70%	1	10%	1	10%	9
3	Pekerjaan Umum	0	0%	5	71%	2	29%	7
4	Pendidikan	0	0%	8	62%	5	38%	13
5	Perumahan Rakyat	0	0%	0	0%	1	100%	1
6	Sosial	3	75%	1	25%	0	0%	4
	Total	24		24		12		

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota , 2023

2.4.4 PERAN PARA PIHAK DALAM PENCAPAIAN TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “No one left behind” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan focus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153

Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs

No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
1	BADAN KEUANGAN	Tujuan 1, 16, 17
2	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB	Tujuan 17
3	BAGIAN HUKUM SETDAKAB	Tujuan 10, 16
4	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	Tujuan 16
5	BAPELITBANG	Tujuan 1, 8, 9, 10, 17
6	BKPSDM	Tujuan 5, 16
7	BPBD	Tujuan 1, 11, 13
8	BPS	Tujuan 17
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tujuan 1, 16, 17
10	DINAS KESEHATAN	Tujuan 1, 2, 3, 6
11	DINAS KOMINFO	Tujuan 4, 5, 9, 16, 17
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	Tujuan 1, 6, 11, 12, 15
13	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tujuan 8
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tujuan 1, 3, 5
15	DINAS PENDIDIKAN	Tujuan 1, 4, 8
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM	Tujuan 8, 9
17	DINAS PERHUBUNGAN	Tujuan 9
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Tujuan 1, 8, 9, 10
19	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Tujuan 2

No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
20	DINAS PMN	Tujuan 10
21	DINAS PMPTSP	Tujuan 8
22	DINAS PUPR	Tujuan 6, 11
23	DINAS SOSIAL	Tujuan 1, 5, 10, 16
24	DINAS PANGAN	Tujuan 2
25	INSPEKTORAT	Tujuan 16
26	KESBANGPOL	Tujuan 3, 10, 16
27	PBJ SETDAKAB	Tujuan 16
<i>Sumber : Analisis TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023</i>		

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan peran dalam pelaksanaan TPB/SDGs baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendisemiasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.

2.5. Isu Strategis

2.5.1 Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan IPM untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 72,05 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan olah masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

3. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan dengan menyusun profil nagari dan penetapan batas nagari serta meningkatkan status Nagari Mandiri

Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan oleh belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum selesainya pengukuran dan penetapan batas nagari.

Dengan menata hal ini, kedepannya akan dapat tergali dan dikembangkan secara komprehensif potensi yang ada di masing-masing nagari.

4. Optimalisasi pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat dioptimalkan pelayanan publik di daerah.

5. Optimalisasi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022 adalah 4,04%, tahun 2023 meningkat menjadi 4,55%. nilai pertumbuhan ekonomi ini sudah meningkat dari tahun 2021. Menaiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota perlu terus didukung dan dioptimalkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada dari seluruh sektor ekonomi. Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi kita akan terus membaik sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

6. Pembangunan IKK Sarilamak.

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah Minangkabau “ABS-SBK”, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan dan perkantoran.

Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan sesuai amanat RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dapat diwujudkan.

Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada Sub bab 2.3, maka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada 2025 adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
- b. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
- c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan dan berdampak pada kehidupan biota air. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 2 (dua) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampai dengan Ibukota Kecamatan.

Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, penyempurnaan RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau.

8. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurangan Risiko Bencana.

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah-Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko

bencana, penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan resiko bencana akan mampu nantinya menurunkan resiko bencana daerah.

2.5.2 Isu Strategis Nasional

1. Percepatan penanganan stunting
2. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
3. Infrastruktur Pelayanan Dasar
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

2.5.3 Isu Strategis Propinsi

1. Pembangunan Manusia
2. Pembangunan Kebudayaan
3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
4. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda
5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menguraikan kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025. Beberapa indikator pembangunan ekonomi yang ditelaah meliputi indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah ini, selanjutnya diuraikan ke dalam 2 (dua) garis besar yaitu terkait Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan penyelesaian permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 2 Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah : “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tika Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan serta Intensitas Emisi Gas Rymah Kaca. Selanjutnya akan dijelaskan capaian indikator makro tahun 2023 dan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan 2025.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 sebesar 5,05%, dimana pada RKP Tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,3%-5,5%. Sedangkan pada RPJMN Tahun 2020-2024, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berada pada angka rata-rata sebesar 5,9%. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 berada dibawah target RPJMN maupun target RKP tahun 2023.

Sementara untuk Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan RKP tahun 2024, ditargetkan sebesar 5,3%-5,5%, dimana target RKP 2024 ini masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar 5,5%-6,5%. Sedangkan untuk tahun 2025 pemerintah menargetakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,6%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 adalah 5,32% sedangkan target dalam RKP tahun 2023 adalah sebesar 5,3%-6,0%. Capaian dari target RKP menunjukkan angka yang sangat baik.

Untuk tahun 2024, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,6%-4,3%, sedangkan dalam RKP tahun 2024 ditargetkan sedikit lebih tinggi sebesar 5,0%-5,7%. Target TPT dalam RKP tahun 2024 sedikit lebih rendah dari target TPT pada RKP 2023.

Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan akan diarahkan pada program penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui pertumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang bersifat padat karya dan penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Ini yang melatarbelakangi target TPT yang lebih rendah pada RKP 2025 dibandingkan tahun 2025, yaitu sebesar 5,3%-5,6%.

c. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2023 adalah 9,36%, lebih tinggi dari target pada RKP 2023 yaitu 7,5%-8,5,0%. Ini berarti angka kemiskinan tetap harus menjadi perhatian penting pemerintah. Namun untuk tahun 2024 pemerintah optimis dengan menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi sebesar 6,5%-7,5% pada RKP 2024.

Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di kisaran 7-8%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan.

Beberapa upaya akan tetap dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah

rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi.

d. Gini Rasio

Rasio Gini yang ditargetkan oleh pemerintah di Tahun 2023 pada RKP Tahun 2023 adalah 0,375-0,378. Adapun capaian dari Gini Rasio untuk Tahun 2023 adalah sebesar 0,388. Capaian tahun 2023 ini sedikit berada di bawah target. Pada tahun 2024 pemerintah menargetkan rasio gini sebesar 0,374-0,377. Target ini lebih optimis dibanding capaian tahun 2023.

Target rasio gini tahun 2025 pada RKP Tahun 2025 adalah 0,375-0,378. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antara kelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi empat strategi utama yaitu, (i) mempermudah kepemilikan asset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan ; (ii) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (iii) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (iv) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2023, capaian dari Indeks Pembangunan Manusia adalah 74,39. Pemerintah menargetkan IPM sebesar 73,31-73,49 pada RKP tahun 2023, artinya capaian lebih tinggi daripada target pada RKP tahun 2023.

Pada tahun RKP tahun 2024, IPM Indonesia ditargetkan 73,99-74,02, sedikit lebih rendah dari capaian 2023. Melihat perkembangannya, pemerintah memperkirakan pada tahun 2024 IPM sebesar 75,09.

Pada tahun 2025 target IPM akan dicapai melalui :

- peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;
- peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan
- upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian PSN, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif seperti UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang

utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bank Indonesia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 4,51%-5,31%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2025 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 5,05%.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,62%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 4,36% Ini merupakan fakta yang cukup menggembirakan dimana perekonomian Sumatera Barat mampu menghadapi tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi termasuk erupsi gunung marapi pada bulan Desember 2023.

Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2025 sebesar 5,05 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

	INDIKATOR MAKRO DAN PEMBANGUNAN	Realisasi	Target	
		2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	5,00	5,05
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	54,33	57,94	62,29
3	TPT (%)	5,94	5,75	5,55
4	IPM	75,64	76,67	77,41
5	Kemiskinan (%)	5,95	5,83	5,65
6	Gini Rasio	0,280	0,291	0,290

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat 2025

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum dan jasa-jasa.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 5,75% pada Tahun 2024 dan di tahun 2025 ditargetkan turun menjadi 5,55%. Sementara itu tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,83% di tahun 2024 dan secara bertahap turun ke angka 5,65% di tahun 2025.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2025 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktifitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

Untuk mewujudkan target-target makro ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas, maka Provinsi Sumatera Barat mengangkat Tema Pembangunan pada RKPD Tahun 2025: “Akselerasi Produktifitas sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasar kan falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

- 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital;
- 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Tahun 2025 merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026, dimana visi RPJMD 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**.

Madani adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak azazi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku, sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.

Untuk mewujudkan visi daerah di atas, maka ditetapkanlah 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
- 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- 3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
- 4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
- 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari rumusan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa muatan yang sangat penting adalah kualitas sumber daya manusia dan perbaikan perekonomian daerah. Dalam rumusan tersebut sangat jelas bahwa untuk lima tahun ke depan, diupayakan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Dengan demikian komoditi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu bersaing baik di pasar lokal maupun regional.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Mencermati kondisi terkini dari perekonomian Lima Puluh Kota, pertumbuhan ekonomi Lima Puluh Kota telah dapat kembali menguat dan menuju ke jalur yang sesungguhnya sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mengetahui gambaran target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, berikut disampaikan grafik target pertumbuhan ekonomi Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana grafik berikut:



Sumber: RPJMD Lima Puluh Kota, Tahun 2021-2026

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dalah sebesar 4,55%. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu 4,28%. Mengingat beberapa tahun sebelumnya perekonomian sempat terpuruk karena pandemi Covid-19, pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ini cukup menggembirakan. Melihat perkembangan perekonomian

tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 sesuai target dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 4,62%.

Untuk tahun 2025, sesuai RPJMD 2021-2026, Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,72%. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2025 akan didasarkan kepada Optimalisasi potensi yang ada, dimana dalam hal ini, berdasarkan data yang ada, maka sektor pertanian dan pariwisata akan dijadikan basis dan didukung dengan penyediaan SDM yang kompeten serta infrastruktur yang memadai. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang angka pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data dari BPS, untuk tahun 2023, Sektor Pertanian menyumbang 31,08% dari total PDRB, sementara itu Sektor Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, sangat potensial untuk dikembangkan mengingat begitu banyaknya objek-objek wisata yang dimiliki oleh Lima Puluh Kota, jika hal ini bisa dikelola dengan baik, akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata ini perlu didukung dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur yang memadai.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,95 persen. Dibandingkan tahun 2022 dimana TPT sebesar 3,72, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,23 persen pada tahun 2023. Disamping pengangguran terbuka, juga dapat digambarkan Penduduk Usia Kerja (PUK) yang berusia 15 tahun ke atas. Dimana untuk tahun 2023 PUK perempuan lebih besar dari PUK laki-laki, dari data yang ada PUK Perempuan sebanyak 153.405 orang dan PUK laki-laki sebanyak 151.896 orang.

Dari sisi Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Untuk tahun 2023, AK Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh laki-laki, dimana AK laki-laki sebanyak 127.486 orang dan AK perempuan sebanyak 94.267 orang.

c. Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebesar 6,80%. Dibandingkan tahun 2022, dimana angka kemiskinan sebesar 6,59, angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,21% pada tahun 2023. Untuk Tahun 2023 Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada angka 6,77% dalam RPJMD 2021-2026. Angka ini belum dapat dicapai pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2025 dalam RPJMD 2016-2021 target angka kemiskinan adalah 6,52%. Diharapkan pada tahun 2024 dan 2025 angka kemiskinan berada di bawah target RPJMD 2016-2021.

Disamping jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1.07, lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang P1 nya 0,82. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi, sehingga diperlukan usaha yang lebih banyak agar masyarakat miskin bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan.

Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,24, lebih tinggi dari Provinsi sebesar 0,16. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat.

d. Rasio Gini

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Rasio gini mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebesar 0,194. Jika dibandingkan dengan Nilai Gini Ratio tahun 2022, dimana Gini Ratio sebesar 0,208, terjadi penurunan sebesar 0,014 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,014 persen dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2023, nilai Indeks Gini Ratio telah melebihi target, dimana pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 0,234.

Untuk Tahun 2025 target Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,225. Melihat pencapaian tahun 2023 yang jauh melebihi target RPJMD 2021-2026, Kabupaten Lima Puluh Kota optimis untuk mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 72,05, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 71,64 dengan kenaikannya 0,41 poin. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah: rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan dari dimensi kesehatan adalah angka harapan hidup, serta dimensi ekonomi adalah pengeluaran perkapita.

Untuk Tahun 2025, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah 71,36. Bila dibandingkan dengan realisasi pencapaian IPM di tahun 2023, maka perlu peningkatan IPM sebesar 0,66 untuk dua tahun ke depan.

Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebesar 73,25 tahun lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 73,03. Untuk mewujudkan target IPM Tahun 2024, maka angka harapan hidup ditargetkan sebesar 70,07 pada tahun ini. Sedangkan tahun 2025 angka harapan hidup ditargetkan 70,14 tahun. Melihat pencapaian tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota optimis dapat mencapai target tersebut.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Dilihat dari target RPJMD tahun 2021-2026, pencapaian rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 tidak mencapai target, dimana Target tahun 2023 adalah 8,30 tahun sedangkan realisasi capaiannya hanya 8,12 tahun, masih kurang sebesar 0,18 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas.

Untuk mewujudkan target IPM Tahun 2025, maka rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,44 tahun tentunya harus dicapai dengan melaksanakan program-program untuk mengintervensi faktor penyebab didapatkannya angka rata-rata lama sekolah sebagaimana diuraikan di atas.

3. Harapan Lama sekolah

Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada tingkat diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, Target Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13,85 tahun, sedangkan realisasi capaiannya adalah 13,41, sehingga tidak tercapai dan masih kurang sebesar 0,44 tahun. Untuk mewujudkan target IPM Tahun 2025, maka harapan lama sekolah ditargetkan sebesar 14,32 untuk Tahun 2025 tersebut.

Untuk mewujudkan target-target ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, maka ditetapkanlah tema pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung SDM, Pelayanan Publik dan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas” dengan merumuskan arah kebijakan Ekonomi sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan peternakan.
2. Peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan peternakan.
3. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif.
4. Mendorong investasi dan akses permodalan bagi pelaku usaha.
5. Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM dan produk unggulan daerah.
6. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru.
7. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

Disamping merumuskan arah kebijakan khusus ekonomi, Kabupaten Lima Puluh Kota juga merumuskan kebijakan lain yang mendukung terlaksananya kebijakan ekonomi makro yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Menjamin stabilitas politik dengan mewujudkan pelaksanaan pilkada Tahun 2024 yang aman dan kondusif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023			
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)
2019	85.168.153.332,25	1.336.485.510.303,25	6,37
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
2022	82.986.337.456,64	1.225.539.476.814,64	6,77
2023	102.021.562.494,68	1.262.130.918.657,68	8.08

Sumber: Badan Keuangan kabupaten Lima Puluh Kota

Dari Tabel 3.2 di atas tampak bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 masih di bawah 10 persen. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

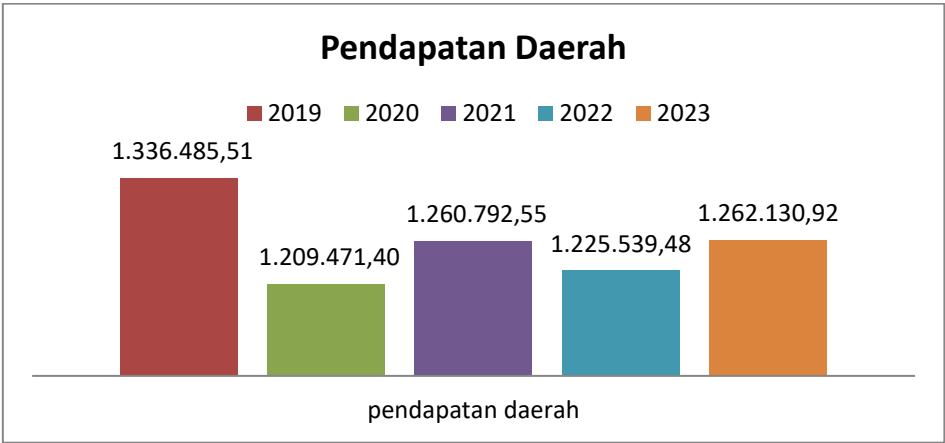
A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2. Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; dan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah.

Untuk kondisi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, perkembangan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)



Sumber: LRA Lima Puluh Kota, Tahun 2019-2023

Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2019 dimana pendapatan daerah sebesar Rp 1.336.485,51 juta. Pada tahun 2020 capaian pendapatan daerah berada di titik terendah sebagai dampak pandemi Covid-19. Pendapatan daerah meningkat pada tahun 2021, seiring mulai membaiknya perekonomian daerah. Namun pada tahun 2022 realisasi pendapatan kembali turun menjadi Rp 1.225.539,48 juta. Pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah kembali naik menjadi Rp 1.262.130,92 juta.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

- a. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.
- b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber PAD yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang Sah merupakan jenis PAD yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Sumber utama PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Lain-lain PAD yang Sah, dengan jumlah pendapatan cenderung berfluktuasi. Jika tahun 2019 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp.53.777,19 juta dan turun menjadi Rp. 46.954,16 juta tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 Lain-lain PAD yang sah naik kembali menjadi Rp. 51.749,34 juta, untuk kemudian sedikit turun di tahun 2022 menjadi Rp.49.881.33 juta. Pada tahun 2023 Lain-lain PAD yang Sah naik signifikan menjadi sebesar Rp 61.231,90 juta.

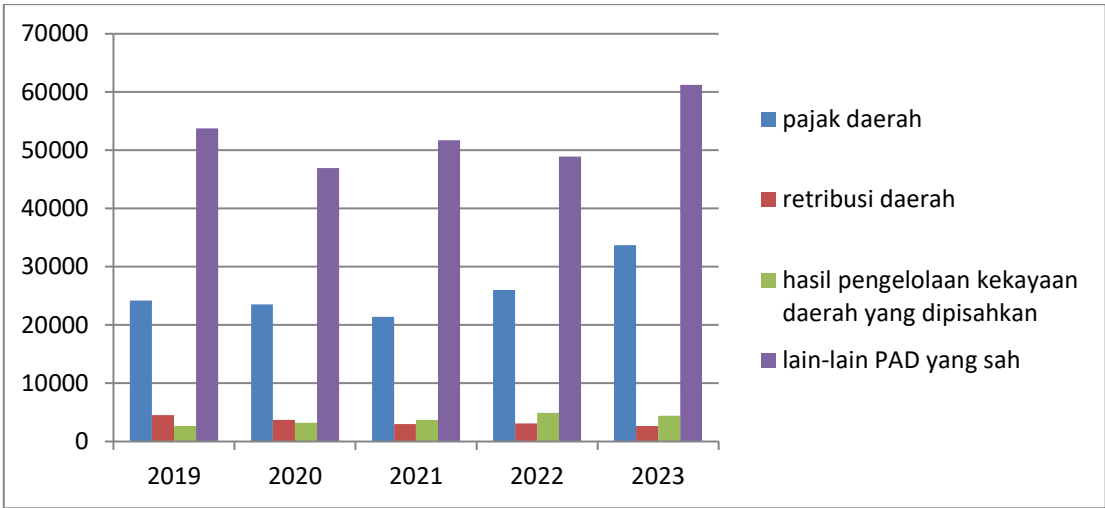
Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah tahun 2019 sampai dengan 2023 juga menunjukkan fluktuasi. Pendapatan daerah dari sumber ini sebesar Rp. 24.181,10 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 33.726.80 pada tahun 2023. Dengan demikian, dalam periode 2019-2023 terjadi pertumbuhan rata-rata 8,67% per tahun.

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung turun setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 yang sedikit naik dibandingkan tahun 2021. Retribusi Daerah tahun 2019 berjumlah Rp. 4.534,60 juta dan tahun 2020 menjadi Rp 3.691,60 juta. Tahun berikutnya, yaitu Tahun 2021 turun menjadi, Rp 2.975,1 juta. Pada tahun 2022 penerimaan retribusi naik menjadi Rp.3.124,55 juta, untuk kemudian turun lagi menjadi Rp.2.653,76 pada tahun 2023. Dengan demikian, dalam periode 2019-2023 terjadi pertumbuhan rata-rata minus 12,54% per tahun.

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif kecil namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp.2.675,30 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp.4.409,01 juta tahun 2023. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,30%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (Rp Juta)

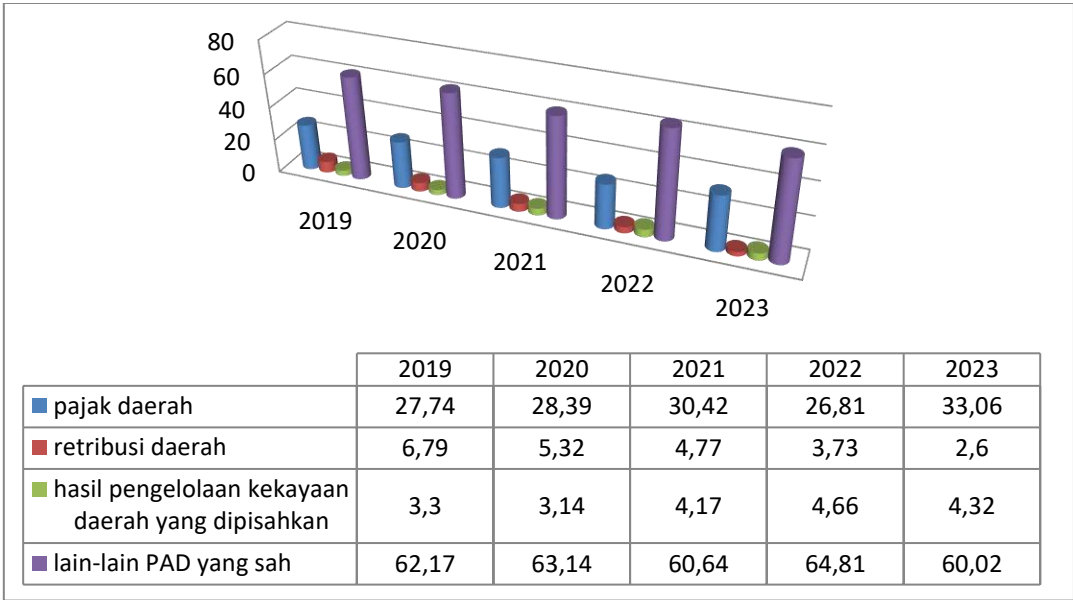


Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Ditinjau dari kontribusi dari masing-masing sumber PAD terhadap PAD, diuraikan sebagaimana berikut. Kontribusi terbesar dari komponen Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah, dimana dalam lima tahun terakhir sumber penerimaan ini menyumbang lebih dari 60 persen dari total PAD. Di urutan kedua adalah pendapatan dari Pajak Daerah yang menyumbang 26,81 persen sampai dengan 33,06 persen dari total PAD. Berikutnya Retribusi daerah menyumbang sebesar 2,60 sampai dengan 6,79 persen, dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,79 persen. Terakhir pendapatan yang bersumber dari Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbang sebesar 3,14 persen sampai dengan 4,66 persen.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektifitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kurang efektif, karena dalam periode tahun 2019-2023 dibawah 90%. Dalam kurun waktu empat tahun tersebut, efektifitas tertinggi pada tahun 2020 sebesar 89,34 persen. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan efektifitas menjadi sebesar 101,74 persen, Artinya, secara total penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan. Efektifitan penerimaan terbesar adalah Lain-lain PAD yang Sah dengan efektifitas penerimaan mencapai 118,05 persen. Sedangkan efektifitas penerimaan terendah pada tahun 2023 adalah efektifitas penerimaan

retribusi daerah sebesar 42,91 persen. Perkembangan efektifitas penerimaan PAD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019-2023 (%)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,74	89,34	71,32	71,80	101,74
Pendapatan Pajak Daerah	84,85	77,90	52,32	56,01	89,27
Pendapatan Retribusi Daerah	70,99	77,02	39,72	40,74	42,91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90,45	96,21	93,66	88,20	99,33
Lain-lain PAD Yang Sah	90,81	97,26	86,84	87,57	118,05

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah, dimana masing-masingnya diuraikan sebagaimana berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa, masing-masing diuraikan sebagaimana berikut:

1) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). Termasuk dalam DTU adalah dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana alokasi khusus (DAK) yang dibagi atas DAK fisik dan non fisik.

DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto dan ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarnya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Perkembangan realisasi dana perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata pertumbuhan
Dana Perimbangan	1.016.024,13	948.966,94	942.371,89	980.520,26	1.010.133,59	-0,15
Dana Transfer Umum	781.507,77	712.027,72	706.681,46	700.950,81	755.215,49	-0,85

Bagi hasil	12.671,76	15.160,74	20.012,59	18.194,63	35.066,01	28,98
Dana Alokasi Umum (DAU)	768.836,01	696.866,98	686.668,87	682.756,18	720.149,48	-1,62
Dana Transfer Khusus	234.516,36	236.939,22	235.690,43	279.569,45	254.918,10	2,11
Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.516,36	236.939,22	235.690,43	279.569,45	254.918,10	2,11

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Dari Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa realisasi dana perimbangan lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar minus 0,15%. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh alokasi Dana Transfer Umum yang dalam lima tahun terakhir mempunyai pertumbuhan negatif 0,85 persen. Meskipun Dana Transfer Khusus mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,11 persen, namun karena proporsi Dana Transfer Umum lebih besar terhadap total Dana Perimbangan, maka secara total Dana perimbangan tetap mengalami pertumbuhan negatif.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima DID sejak tahun 2017 dengan jumlah berfluktuasi. Perkembangan DID dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5. Fluktuasi penerimaan DID sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa penerimaan DID merupakan dana pusat yang sulit diprediksi. Ini disebabkan karena alokasi sumber dana ini bergantung kepada kinerja daerah yang bersangkutan dan kinerja daerah lain karena alokasi menggunakan total kinerja daerah sebagai pembagi.

3) Dana Desa

Dana desa merupakan dana diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5
Perkembangan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan
DID	45.357,65	250,00	30.442,55	-	-	
Dana desa	75.446,60	77.575,70	81.722,35	74.850,45	83.887,36	2,69

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Berdasarkan data sebagaimana Tabel di atas, dana desa menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus dengan angka pertumbuhan rata-rata 2,69% per tahun.

b) Transfer Antar Daerah

Transfer antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Bagi hasil tumbuh rata-rata 1,88 persen dalam lima tahun terakhir. Secara total Transfer Antar Daerah tumbuh sebesar 2,62 persen per tahun dalam kurun waktu 2019-2023 dari Rp.51.554,99 juta tahun 2019 menjadi Rp. 57.181,14 juta tahun 2023. Perkembangan realisasi pendapatan yang berasal dari transfer antar daerah tergambar pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan
Transfer antar daerah	51.554,99	45.117,45	56.165,91	72.667,91	57.181,14	2,62
Pendapatan bagi hasil	51.554,99	45.117,45	56.165,91	64.667,91	55.552,29	1,88

Bantuan Keuangan				8.000,00	1.628,85	
------------------	--	--	--	----------	----------	--

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Hibah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	62.933,98	60.131,83	70.237,69	14.514,51	3.080,01	-52,97
Hibah	9.642,27	10.334,00	13.091,61	14.474,51	3.080,01	-24,82
BOS	53.291,71	49.797,83	53.475,19			
Pendapatan atas pengembalian hibah			3.670,89	40,00	40,00	

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Lain-lain Pendapatan yang Sah yang bersumber dari hibah menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar minus 24,82 persen dari Rp.9.642,27 juta tahun 2019 menjadi Rp.3.080,01 juta tahun 2023 atau turun dengan rata-rata pertumbuhan minus 24,82% per tahun. Penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara total antara lain disebabkan dana BOS yang pencatatannya sebelumnya pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018-2021, sejak tahun 2022 pencatatan BOS pada DAK Non Fisik sehingga masuk kategori Dana Perimbangan.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan belanja didasarkan kepada klasifikasi tersebut. Untuk memahami kinerja Belanja Daerah dan kontribusinya perlu disajikan perkembangan, pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing jenis Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tersebut.

Realisasi Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir berfluktuasi. Belanja Operasi tahun 2019 sebesar Rp.950.349,06, turun menjadi Rp.874.999,82 juta pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021 angka Belanja Operasi ini naik menjadi Rp.918.683,99 juta. Tahun 2022 belanja operasi naik lagi menjadi Rp.921.225,90 juta. Pada tahun 2023 belanja operasi turun menjadi Rp. 885.101,85. Penurunan belanja operasi ini disebabkan berkurangnya anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa karena kondisi keuangan daerah.

Belanja modal menunjukkan besaran yang terus berkurang dengan nilai Rp. 252.910,52 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 124.599,67 juta pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan minus 16,22 persen. Belanja Tak Terduga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 47,98 persen dengan nilai Rp.659,86 juta tahun 2019 menjadi Rp.1.697,29 juta pada tahun 2023. Sedangkan Belanja Transfer menunjukkan besaran per tahun yang berfluktuasi. Namun dalam lima tahun terakhir belanja transfer mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 0,61 persen dengan nilai Rp. 158.196,91 juta pada tahun 2019 menjadi Rp.162.095,52 pada tahun 2023.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah Sesuai PP 12 Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 (Rp. juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan
Belanja						
Belanja Operasi	950.349,06	874.999,82	918.683,99	921.225,90	885.101,85	-1,76
Belanja Pegawai	648.122,34	614.520,24	648.801,43	643.786,70	625.076,11	-0,90
Belanja Barang dan Jasa	287.976,62	209.732,77	265.227,16	239.491,48	210.101,44	-7,58
Belanja Hibah	10.369,06	47.055,18	34.067,82	31.416,71	45.239,12	44,53
Belanja Bantuan Sosial	3.881,04	3.691,63	8.605,10	6.531,01	4.685,18	4,82
Belanja Modal	252.910,52	152.712,09	141.199,55	149.956,37	124.599,67	-16,22
Belanja Tak Terduga	659,86	36.111,74	776,54	708,97	1.697,29	26,64
Belanja Transfer	158.196,91	153.293,93	161.270,96	158.703,49	162.095,52	0,61

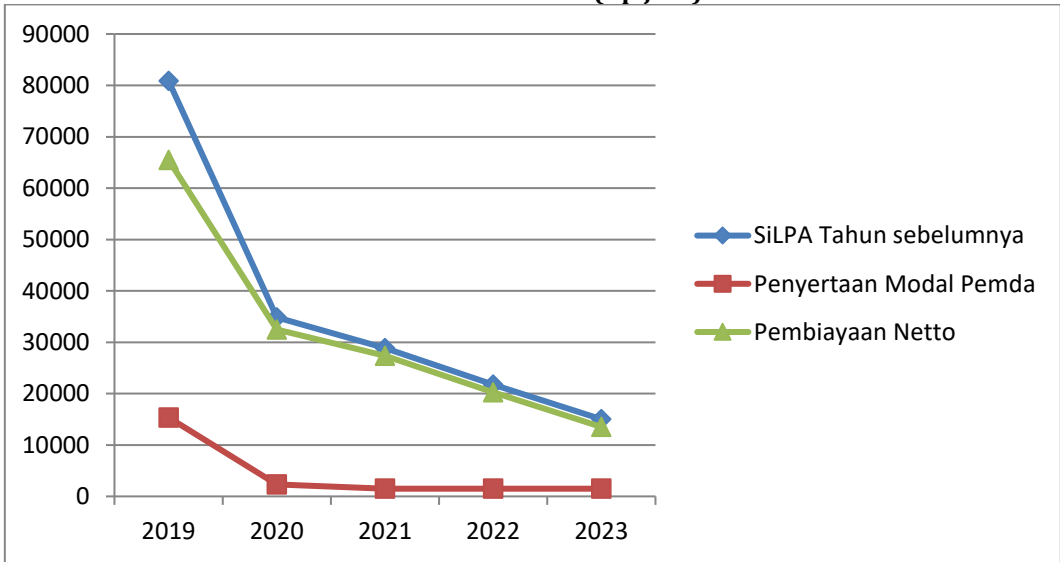
Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari Rp.69.518,50 juta tahun 2018 menjadi Rp.20.268,71 juta tahun 2022.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan terjadi setiap tahun untuk Penyertaan Modal pada BUMD. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.5
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019-2023 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Sejak tahun 2022 pengeluaran pembiayaan Kabupaten Lima Piluh Kota tetap di angka Rp 1.500 juta, namun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitunagan Anggaran Tahun Sebelumnya mempunyai trend menurun, sehingga jumlah pembiayaan netto juga mennurun setiap tahun.

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Secara keseluruhan Total Aset atau Total Kewajiban dan Ekuitas Dana mengalami peningkatan dari Rp.1.724.913,17 juta tahun 2019 menjadi Rp.1.833.602,76 juta tahun 2023, sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,54%. Semua jenis aset menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir.

Dari 4 kelompok aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, pertumbuhan jumlah aset lancar lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun aset lancar adalah 11,45%, yaitu dari Rp.69.989 juta tahun 2019 menjadi Rp.107.992,95 juta tahun 2023. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah Investasi Jangka Panjang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,00%, yaitu dari Rp.48.050,61 juta tahun 2019 menjadi Rp.54.088,79 juta tahun 2023. Aset Tetap dan aset Lainnya tumbuh tidak signifikan sebesar berturut-turut 0,99% dan 0,74%.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3.9
Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2019-2023 (Rp juta)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
A	ASET						
a.	ASET LANCAR	69.989	68.021	58.285,85	48.485,24	107.992,95	11,45
b.	Investasi Jangka Panjang	48.050,61	50.252	55.190,86	54.964,27	54.088,79	3,00
c.	ASET TETAP	1.595.265,75	1.611.713,00	1.641.412,96	1.675.294,44	1.659.564,99	0,99
c.	ASET LAINNYA	11.607,55	13.583,00	13.077,08	11.750,58	11.956,02	0,74
	JUMLAH ASET DAERAH	1.724.913,17	1.743.570,00	1.767.966,76	1.790.494,54	1.833.602,76	1,54
B	KEWAJIBAN	5.616,39	1.666,00	12.691,34	40.546,42	10.364,00	16,55
a.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.616,39	1.666,00	12.691,34	40.546,42	10.364,00	16,55
b.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-			
C	EKUITAS DANA	1.719.296,78	1.741.904,00	1.755.275,42	1.749.948,11	1.823.238,75	1,48
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.724.913,17	1.743.570,00	1.767.966,76	1.790.494,54	1.833.602,76	1,54

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Ada 2 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas

Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi utangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar dan rasio quick. Kedua rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang lancarnya pada saat jatuh tempo.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauh mana organisasi menggunakan dana pinjaman (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total utang dengan total aset, dan atau total utang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
-----	--------	------	------	------	------	------

	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>) = <i>Aset lancar/Hutang lancar (jk Pendek)</i>	12,46	40,82	4,59	1,19	10,42
2	Rasio cepat (<i>Quick Ratio</i>) = <i>(Aset lancar-persediaan)/hutang lancar</i>	10,43	33,56	3,41	0,86	8.92
	RASIO SOLVABILITAS					
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,003	0,001	0,007	0,023	0,005
4	Rasio hutang terhadap modal	0,003	0,001	0,007	0,023	0,005

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Tabel 3.10 memperlihatkan beberapa rasio kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*Current Ratio*) dan rasio cepat (*Quick Ratio*) memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar pada tahun 2019 sebesar 12,46 turun menjadi 10,42 pada tahun 2023. Ini berarti pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sebanyak 10,42 kali. Hal yang sama juga terjadi pada Rasio cepat (*Quick ratio*). Rasio ini turun dari 10,43 pada tahun 2019 menjadi 8,92 pada tahun 2023. Jika nilai rasio likuiditas lebih dari satu, menunjukkan daerah mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset likuid. Dapat dilihat pada tahun 2023 rasio likuiditas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat baik.

Rasio solvabilitas yang diukur dengan rasio total hutang terhadap total aset memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban baik itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan total aset yang dimiliki. Dapat dilihat, rasio total utang terhadap ekuitas dan atau total aset sampai tahun 2023 kurang dari 1% kecuali pada tahun 2022 sebesar 2,3%. Angka tersebut menunjukkan persentase utang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap jumlah aset atau ekuitas. Nilai rasio ini masih cukup aman, ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang cukup baik dalam melunasi seluruh utangnya.

3.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer pada tahun 2024 diproyeksi sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka rincian atas Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 s/d Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.11. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

Strategi

- 1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meminimalisir kebocoran
- 2. Peningkatan basis data perpajakan
- 3. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
- 4. Melakukan efisiensi pemungutan
- 5. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan

6. Meningkatkan pengawasan dan sinergisitas dengan instansi terkait
7. Melakukan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang terbaru

Kebijakan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan system dan prosedur antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online.
2. Melakukan pengembangan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Tapping Box/CCTV/Cash Register Online/e-money), kalau memungkinkan melibatkan pihak kepolisian/TNI untuk pengawasan retribusi tempat rekreasi dan pariwisata.
3. Melakukan Pemantauan wajib pajak secara silent operation.
4. Melakukan Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama OPD terkait dan Aparat Penegak Hukum.
5. Memberikan reward dan punishment kepada petugas pajak dan wajib pajak.
6. Melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Provinsi Sumbar dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan BBNKB serta optimalisasi penerimaan pajak MBLB.
7. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah.
8. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.

Tabel 3.11
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022-2026

Uraian	Realisasi		Target 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
	2022	2023			
PENDAPATAN	1.225.469.268.349,64	1.262.125.884.491,68	1.312.457.232.299,00	1.313.480.544.797,00	1.318.410.342.810,00
Pendapatan Asli Daerah	82.916.128.991,64	102.016.528.328,68	110.317.189.490,00	131.372.644.642,00	136.302.442.655,00
a. Pajak Daerah	26.017.229.440,00	33.726.801.369,44	40.733.817.613,00	60.560.960.267,00	63.589.008.280,00
b. Retribusi Daerah	3.100.697.678,00	2.653.763.935,50	33.159.068.682,00	33.616.684.375,00	35.288.434.375,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	4.439.285.064,00	4.409.098.147,00	4.659.098.147,00	4.600.000.000,00	4.830.000.000,00
d. Lain-lain PAD	49.358.916.809,64	61.226.864.876,74	31.765.205.048,00	32.595.000.000,00	32.595.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.128.038.625.588,00	1.157.029.256.763,00	1.202.140.042.809,00	1.182.107.900.155,00	1.182.107.900.155,00
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.055.370.711.812,00	1.099.848.116.525,00	1.138.216.635.000,00	1.138.216.635.000,00	1.138.216.635.000,00
1. Dana Perimbangan	980.520.262.812,00	1.010.133.587.525,00	1.048.450.321.000,00	1.048.450.321.000,00	1.048.450.321.000,00
a) Dana Transfer Umum	700.950.811.428,00	700.950.811.428,00	783.678.127.000,00	783.678.127.000,00	783.678.127.000,00
1) DBH	18.194.628.354,00	35.066.007.971,00	26.381.948.000,00	26.381.948.000,00	26.381.948.000,00
2) DAU	682.756.183.074,00	720.149.476.100,00	757.296.179.000,00	757.296.179.000,00	757.296.179.000,00

Uraian	Realisasi		Target 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
	2022	2023			
b) Dana Transfer Khusus	279.569.451.384,00	279.569.451.384,00	264.772.194.000,00	264.772.194.000,00	264.772.194.000,00
2. Dana Desa	74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	82.642.660.000,00	82.642.660.000,00	82.642.660.000,00
3. Insentif fiskal			7.123.654.000,00	7.123.654.000,00	7.123.654.000,00
b.Transfer Antar Daerah	72.667.913.776,00	72.667.913.776,00	63.923.407.809,00	43.891.265.155,00	43.891.265.155,00
Pendapatan Bagi Hasil	64.667.913.776,00	64.667.913.776,00	63.923.407.809,00	43.891.265.155,00	43.891.265.155,00
Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.514.513.770,00	14.514.513.770,00	-	-	-
Hibah	14.474.513.770,00	14.474.513.770,00	-	-	-
Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-	-
Pendapatan atas pengembalian hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	-		

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2023

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dimana semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, untuk melihat gambaran dari belanja Daerah dari Tahun 2021 sampai dengan proyeksi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan serta dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan fasilitas penunjang di sektor pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
4. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK diluar Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
 - b. anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
 - c. belanja pada urusan kesehatan 10% dari Total belanja setelah dikurangi belanja pegawai.
 - d. pemenuhan alokasi belanja pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengalokasikan belanja pemenuhan target Standar Pelayanan Minimum.
7. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyandang masalah sosial.
8. Mengalokasikan belanja hibah dan diutamakan untuk organisasi yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan dengan mempedomani Permendagri Nomr 77 Tahun 2020.
9. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintahan nagari. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintahan nagari dalam melaksanakan otonomi daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

Tabel 3.12
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022-2026

Uraian	Realisasi		Target 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
	2022	2023		2025	2026
BELANJA	1.266.360.580.960,92	1.217.754.255.709,37	1.335.163.791.758,00	1.335.163.791.758,00	1.340.798.102.306,00
a. Belanja Operasi	885.537.270.100,76	924.052.206.322,37	1.038.914.606.290,00	1.034.072.044.616,00	1.042.329.570.541,00
1. Belanja Pegawai	635.262.790.694,40	629.197.295.328,90	765.108.640.776,00	775.072.044.616,00	782.329.570.541,00
2. Belanja Barang dan Jasa	212.191.514.536,36	235.485.410.876,47	219.019.235.796,00	219.000.000.000,00	219.000.000.000,00
3. Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4. Belanja Hibah	31.551.950.930,00	54.684.322.635,00	47.936.159.718,00	34.000.000.000,00	36.000.000.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	6.531.013.940,00	4.685.177.482,00	6.850.570.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00
b. Belanja Modal	144.354.247.911,00	129.909.236.428,00	129.071.180.306,00	132.093.195.178,00	129.000.000.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	708.965.000,00	1.697.290.835,00	1.573.180.401,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
d. Belanja Transfer	158.703.493.317,00	162.095.522.124,00	165.604.824.761,00	167.498.551.964,00	167.968.531.766,00
1. Belanja Bagi Hasil	1.930.308.868,00	4.218.163.061,00	4.624.037.261,00	6.517.764.464,00	6.517.764.464,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	156.773.184.449,00	157.877.359.063,00	160.980.787.500,00	160.980.787.500,00	160.980.787.500,00

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan itu terdiri dari 2 komponen yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah juga ditinjau dari dua komponen pembiayaan tersebut.

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain: kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kepentingan penyusunan RKPD tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menggambarkan perencanaan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2023 untuk penyertaan Modal sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dari kepemilikan saham di Bank Nagari Sumatera Barat.

Untuk melihat realisasi dan target pembiayaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan daerah tahun 2022-2026

Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Proyeksi
	2022	2023	2024	2025	2026
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.768.707.385,70	15.213.452.902,00	22.706.559.459,00	21.683.246.961,00	21.379.870.587,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.768.707.385,70	15.213.452.902,00	22.706.559.459,00	21.683.246.961,00	21.379.870.587,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan modal (investasi) daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-
Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-
Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Netto	20.268.707.385,70	13.713.452.902,00	22.706.559.459,00	21.683.246.961,00-	21.379.870.587,00

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lagi memberikan Penyertaan modal (investasi) daerah kepada PDAM dan Bank Nagari sehingga proyeksi untuk tahun 2025-2026 juga tidak ada.

3.2.4. Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta kapasitas Fiskal Daerah, yang dimaksud dengan Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, perhitungan kapasitas Fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.14

Tabel 3.14
Kapasitas Fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Uraian	2025
I	Proyeksi Capaian Pendapatan Daerah	1.313.480.544.797
II	Penerimaan pembiayaan tertentu	21.683.246.961
	SILPA tahun sebelumnya	21.683.246.961
	Total Pendapatan + Pembiayaan Tertentu	1.335.163.791.758
III	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya	0
	Belanja Otonomi Khusus	0,00
IV	Belanja Tertentu	942.570.596.580
a	Belanja Pegawai	775.072.044.616
b	Belanja bunga	0
g	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa	6.517.764.464
h	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	160.980.787.500
V	Pengeluaran pembiayaan tertentu	0
	Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah	0
	Kapasitas Fiskal Daerah	392.593.195.178

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Selanjutnya berdasarkan pasal 7 PMK Nomor 84 tahun 2023, dapat dihitung Rasio Kapasital Fiskal Daerah (RKFD) dengan formula sebagai berikut :

RKFD = $\frac{\text{KFD}}{\text{Belanja Pegawai}}$

= $\frac{389.500.000.000}{775.072.044.616}$

= **0,507**

Nilai RKFD Kabupaten Lima Puluh Kota lebih rendah dari 0,947, artinya Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan dalam kategori Sangat Rendah.

Secara umum gambaran pendapatan, pembiayaan dan belanja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025

Kode	Uraian	Tahun 2025
4	PENDAPATAN	1.313.480.544.797
4.1	Pendapatan Asli Daerah	131.372.644.642
4.1.1	Pajak Daerah	60.560.960.267
4.1.2	Retribusi Daerah	33.616.684.375
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.600.000.000

4.1.4	Lain-lain PAD	32.595.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	1.182.107.900.155
4.2.1	I. Transfer Pemerintah Pusat	1.138.216.635.000
	1. Dana Perimbangan	1.048.450.321.000
	a) Dana Transfer Umum	783.678.127.000
	DBH	26.381.948.000
	DAU	757.296.179.000
	b). Dana Transfer Khusus	264.772.194.000
	DAK Fisik	43.708.799.000
	DAK Non Fisik	221.063.395.000
	2. Dana Desa	82.642.660.000
	3. Insentif Fiskal	7.123.654.000
4.2.2	Transfer Antar daerah	43.891.265.155
	Pendapatan bagi hasil	43.891.265.155
5	BELANJA	1.335.163.791.758
5.1	Belanja Operasi	1.034.072.044.616
5.1.1	a. Belanja Pegawai	775.072.044.616
5.1.2	b. Belanja Barang dan Jasa	219.000.000.000
5.1.3	c. Belanja Bunga	
5.1.4	d. Belanja Hibah	34.000.000.000
5.1.5	e. Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000
5.2	Belanja Modal	132.093.195.178
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	167.498.551.964
5.4.1	a. Belanja Bagi Hasil	6.517.764.464
5.4.2	b. Belanja Bantuan Keuangan	160.980.787.500
	surplus(defisit)	(21.683.246.961))
6	PEMBIAYAAN	21.683.246.961
6.1	Penerimaan pembiayaan	21.683.246.961
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.683.246.961
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.683.246.961
6.2	Pengeluaran pembiayaan	-
Kode	Uraian	Tahun 2025
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	-
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-

Sumber: Badan Keuangan Lima Puluh Kota, Tahun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. RKPD tahun 2025 merupakan bagian dari RPJMD tahun 2021-2026, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”** serta untuk kesinambungan program-program pembangunan, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 juga berpedoman kepada visi misi dan arah pembangunan RPJPD 2005-2025. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah
VISI: Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		9	10	11	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,05	70,98	71,36	71,74	
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,12	8,37	8,44	8,52	
			Harapan lama sekolah	13,41	14,13	14,32	14,50	
		1.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	73,25	70,07	70,14	70,20	
			Angka prevalensi stunting	28,8	4,29	3,29	2,29	
		2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	Indeks ABS-SBK	1,84	1,9	2,1	2,3	
Sasaran : 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	1,84	1,9	2,1	2,3			
2.	Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	4,55	4,62	4,72	4,86	
			PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	31,36	32,14	32,97	33,80	
			PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	49,45	47,85	49,68	51,51	
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	56,71	53,98	60,73	67,48	
			1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas	Persentase kontribusi sektor				

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		9	10	11
		Pertanian dan Perikanan	Pertanian terhadap PDRB	25,02	30,14	30,97	31,80
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,64	3,83	3,89	3,94
		1.3. Meningkatnya pengembangan industri Kecil dan Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,51	6,88	7,01	7,14
		1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	8,08	9,67	10,35	11,04
3.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Tujuan : 1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Indeks desa membangun	0,7848	0,7878	0,8036	0,8149
		Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,7848	0,7878	0,8036	0,8149
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Tujuan : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	58,5 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	61,71 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks inovasi daerah	631	1.200	1.500	1.700
			1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,26	91,97	93,96
5.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,51	79,75	81,78	83,82

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		9	10	11
	secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik	Sasaran :					
		1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74	89,13	93,48	97,83
		1.2 Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	59,57	59,95	61,43	62,78
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,42	0,51	0,50	0,50
		1.3 Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,70	86,42	88,22	90,12
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,44	83,35	85,05	86,85
		1.4 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	88,09	79,92	80,72	81,52
		1.5 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,197	0,166	0,169	0,173
		Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,63	72,27	72,68	73,09
		Sasaran :					
		2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,63	72,27	72,68	73,09
		2.2 Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	75	80	85	90
		2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	67-61	61-55	55-49

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tema pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan , Didukung SDM, Pelayanan Publik dan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas”

Prioritas pembangunan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
1	Pengembangan Masyarakat Madani	Pengembangan Masyarakat Madani
2	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agrobisnis
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Tabel 4.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Pengembangan Masyarakat Madani	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,44	Tahun
			Harapan lama sekolah	14,32	Tahun
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	70,14	Tahun
			Angka prevelensi stunting	3,29	%
		Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	2,1	Indeks
		Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,8036	Indeks
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72,34 (BB)	
			Indeks inovasi daerah	1.500	Indeks
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,96	Indeks
2	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	93,48	%
		Meningkatkan kinerja Penataan	Persentase ketaatan	85	%

NO	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
		ruang wilayah	terhadap RTRW		
3	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan Wisatawan	60,73	%
		Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	7,01	%
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	10,35	%
4	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	30,97	%
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,89	%
		Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,72	Rasio
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	61,43	%
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	Indeks
		Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	88,22	%
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,05	%
		Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,169	Rasio
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,68	Indeks
		Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	61-55	Indeks

Sesuai dengan regulasi yang ada, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 harus disinkronkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi prioritas pembangunan dapat dilihat sebagaimana matrik berikut:

Tabel 4. 4
Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, konomi hijau, dan ekonomi biru	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomiber basis digital 3. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 4. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 4. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
		serta ekonomi berbasis digital	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengembangan Masyarakat Madani
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani

*Prioritas pembangunan nasional sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 2 Tahun 2024

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan kedalam program-program prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan langsung disinkronkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada berikut :

4.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI ANGGARAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Agenda prioritas daerah adalah program utama pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan setiap tahun selama periode tersebut. Penjabaran program pembangunan daerah pendukung agenda prioritas daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah.

Tabel 4.5
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				Agenda Prioritas 1 : Pengembangan Masyarakat Madani							
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan							
1	1			Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
1	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat							
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar (%)	80	95	39.474,46	100	40.658,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (%)	75	98	487,44	100	502,07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2		Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat (%)	10	50	39.760,71	60	40.953,53	DINAS KESEHATAN
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana(%)	60	71	812,79	73	832,18	DINAS KESEHATAN
1	2			Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah							
1	2	1		Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya							

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan (%)	56	79	655,54	86	675,31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksanananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%)	100	100	10.454,41	100	10.768,05	SETDA (BAGIAN KESRA)
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat (%)	50	70	764,91	75	787,86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya							
4	1			Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
4	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	80	3.427,86	85	2.575,72	BAPELITBANG
4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	90	94	1.320,42	95	1.360,03	BADAN KEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	81	85	1.092,73	86	1.125,51	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	95	983,45	105	1.012,96	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah (%)	100	100		100		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
				Agenda Prioritas 2 : Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak							
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis							
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	-	20	327,82	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	80	33.677,85	85	34.688,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah							
5	2	2	1	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	85	1.300,35	90	1.339,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Agenda Prioritas 3 : Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat							
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional							
2	1			Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat							
2	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota							
2	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak (%)	10	30	4.480,18	35	4.614,59	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas (%)	10	20	2.513,27	25	2.588,67	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) (%)	29,73	45,95	1.311,27	50,00	1.350,61	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact/Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	1	3		Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
2	1	3	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	3,65	13,32	5.900,73	16,68	6.077,75	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1	3	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	84,05	129,75	100	133,64	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1	3	3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan (%)	5	30	1.453,28	35	1.496,88	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan (%)	5	30	830,43	35	855,36	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	4		Sasaran 4 : Meningkatnya pendapatan asli daerah							
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	6,5	10,35	2.129,07	11,04	2.192,94	BADAN KEUANGAN
				Agenda Prioritas 4 : Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agribisnis							
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional							
2	1			Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat							
2	1	2		Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan							
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas (%)	48	62	16.390,91	65	16.882,63	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan sarana	2	10	2.950,36	12	3.038,87	DINAS PETERNAKAN

Kode					Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025		2026		
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
						peternakan Yang Berkualitas (%)						DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas (%)	68	78	7.029,75	80	7.240,65		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas (%)	2	10	382,45	12	393,93		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas (%)	80	85	615,57	90	634,03		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani (%)	3	10%	1.449,88	12%	1.493,38		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan (%)	2	10	382,45	12	393,93		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner (%)	2	10	710,27	12	731,58		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	6	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap (%)	5% / tahun	5% / tahun	1.243,34	5% / tahun	1.280,64		DINAS PERIKANAN
2	1	2	7	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya (%)	6% / tahun	6% / tahun	13.112,72	6% / tahun	13.506,11		DINAS PERIKANAN
2	1	2	8	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38 KG/ Kapita/ Tahun,	43 KG/ Kapita/ Tahun,	806,15	44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5%	830,33		DINAS PERIKANAN

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
						dan5 % /tahun	dan 5% / tahun		/ tahun		
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada							
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	80,72	57.859,89	81,52	59.595,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Agenda Prioritas 5 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah							
3				Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah							
3	1			Tujuan 1: Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan							
3	1	1		Sasaran 1: Meningkatnya status nagari							
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	3.278,18	100	3.376,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							
5	1	1		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan							
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	61,43	169.033,9	62,78	174.104,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,50	546,36	0,50	562,75	DINAS PERHUBUNGAN
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat							

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	88,22	9.834,54	90,12	10.129,58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	85,05	11.746,82	86,85	12.099,22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat							
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	62,5	72,5	8.305,61	75	8.554,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	25,60	48	3.505,36	48	3.610,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
5	2	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	56,19	9.401,89	56,29	9.683,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) (%)	18	30	530,45	35	546,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
**5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah. (%)	22	30	4.152,36	30	4.276,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
					Persentase penanganan	20	70		70		

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2025		2026			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
					sampah (%)						PERMUKIMAN	
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	5,13	2.498,83	5,15	2.573,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
5	2	3		Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah								
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	85-79	61-55	11.681,56	55-49	12.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Hubungan strategi, arah kebijakan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH		
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan tata Kelola Pendidikan 2. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi pendidikan kesetaraan
	2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Menurunkan angka kematian ibu 2. Menurunkan angka kematian bayi/balita 3. Menurunkan prevalensi penyakit 4. Meningkatkan sarana dan parasana Kesehatan 5. Menurunkan angka prevalensi stunting
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan 2. Meningkatkan fasilitasi dan pengelolaan mesjid/surau/TPQ 3. Meningkatkan peran dan pengeloaan keuangan sosial mesjid/surau dan lembaga keagamaan 4. Meningkatkan penghayatan dan penerapan adat dan budaya 5. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya
Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata. 2. Meningkatkan upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan. 3. Meningkatkan upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata. 4. Meningkatkan upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah. 5. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi wisata baru.

	2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	<div>1. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</div> <div>2. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</div> <div>3. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</div> <div>4. Meningkatkan upaya-upaya penyuluhan pertanian</div> <div>5. Meningkatkan upaya pengendalian Kesehatan hewan</div> <div>6. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan tangkap</div> <div>7. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan budidaya</div> <div>8. Melaksanakan upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</div>
	3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<div>1. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri</div> <div>2. Mengoptimalkan pengembangan industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pangan, industri pengolahan non pangan dan industri aneka kerajinan</div>
	4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatkan tata kelola PAD
Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	1. Meningkatnya status nagari	<div>1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan</div> <div>2. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari</div> <div>3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari</div> <div>4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari</div>
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan insfrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	<div>1. Percepatan pembangunan gedung strategis</div> <div>2. Penataan dan pembangunan Kawasan IKK Sarilamak</div>
	2. Meningkatnya Kualitas Jalan	<div>1. Pembangunan Jalan yang berkualitas secara merata dengan memperhatikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.</div> <div>2. Peningkatan pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi : management keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.</div>
	5. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	<div>1. Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman.</div> <div>2. Percepatan pembangunan sanitasi perumahan dan pemukiman.</div>

	6. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.
	5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan permukiman yang layak dan aman
2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatkan upaya pengurangan volume timbunan sampah 3. Optimalisasi perwujudan RTH sesuai peraturan perundang undangan
	2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	1. Mewujudkan kesesuaian rancana tata ruang dan pemanfaatan ruang
	3. Menurunnya resiko bencana daerah	Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan risiko bencana

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan tahunan untuk 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Arah Kebijakan Pembangunan

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

No	Arah Kebijakan
1	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
2	Pengembangan kurikulum kesetaraan dan kurikulum muatan lokal
3	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan
4	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
5	Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan
6	Penerimaan Tenaga PPPK Guru Agama, SD dan SMP
7	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis IT untuk mendukung Wajib Belajar Sembilan Tahun
8	Peningkatan Kualitas Pendidikan PAUD
9	Pengadaan speaker Murotal
10	Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang siaga bencana
11	Meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar
12	Memperluas jangkauan dan akses PKBM
13	Menekan angka putus sekolah (drop out)
14	Memperluas jangkauan dan akses PAUD
15	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
16	Meningkatkan Kompetensi guru
17	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung proses belajar tingkat Pendidikan dasar
18	Mengembangkan sistem pendidikan layanan khusus
19	Peningkatan kapasitas guru agama tingkat Pendidikan dasar
20	Mendorong tumbuh kembangnya PKBM di masing-masing nagari
21	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan pendidikan
22	Pemberian beasiswa untuk tingkat Pendidikan dasar berupa bantuan perlengkapan sekolah dan pemberian makanan tambahan
23	Pemberian beasiswa berupa bantuan biaya Pendidikan untuk tingkat Pendidikan menengah/kejuruan dan Pendidikan tinggi
24	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
25	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
26	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
27	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
28	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular
29	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular
30	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan

No	Arah Kebijakan
31	Peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan
32	Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman
33	peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
34	Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting
35	Pembangunan rintisan rumah sakit daerah
36	Pemenuhan sarana dan prasana kesehatan
37	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap sampai usia 23 bulan
38	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kampanye gizi seimbang
39	Meningkatkan partisipasi publik dalam penyediaan bahan makanan gizi seimbang
40	Meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak
41	Meningkatkan pola asuh keluarga
42	Meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan penanggulangan stunting
43	Meningkatkan sanitasi lingkungan
44	Membudayakan asupan Gizi seimbang untuk ibu dan bayi
45	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas dan kreatifitas anak
46	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menanggulangi masalah malnutrizi
47	Meningkatkan pola hidup sehat pada remaja putri dan ibu hamil
48	Meningkatkan apresiasi publik terhadap ibu menyusui
49	Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi
50	Meningkatkan akses persalinan
51	Meningkatkan sistem informasi imunisasi
52	Meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam upaya deteksi dini hipertensi
53	Meningkatkan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
54	Meningkatkan sistem informasi pengelolaan obat dan vaksin berbasis data kependudukan
55	Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan
56	Peningkatan pendidikan penghafal Al-Quran
57	Peningkatan pendidikan TPQ, MDA, TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid
58	Peningkatan kelembagaan masjid/ surau /TPQ
59	Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
60	Peningkatan optimalisasi perantau dan anak nagari dalam partisipasi kegiatan keagamaan, lembaga budaya, pelestarian adat.
61	Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama
62	Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK
63	Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat
64	Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda
65	Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit Masyarakat
66	Memaksimalkan penghimpunan zakat ASN yang telah wajib zakat

Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

No	Arah Kebijakan
1	Melaksanakan pengadaan/ pemeliharaan/rehabilitasi sapras di lokasi utama wisata dan di Nagari Wisata
2	Mengelola investasi pariwisata
3	Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata
4	Melakukan pemasaran pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri untuk mempromosikan destinasi utama wisata dan nagari Wisata
5	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
6	Meningkatkan kapaisitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreaif
7	Mengawasi penggunaan sarana pertanian
8	Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
9	Mengelola Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Mikro Organisme
10	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
11	Membuka 20.000 Ha lahan terlantar untuk peningkatan produksi jagung dan holtikultura
12	Pengendalian OPT tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan
13	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan Teknologi Tepat Guna
14	Hilirisasi gambir dan jeruk
15	Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan
16	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis

No	Arah Kebijakan
17	Meningkatkan kualitas pemberian pakan
18	Meningkatkan populasi sapi dari 45.000 menjadi 100.000 ekor
19	Meningkatkan populasi kambing menjadi 1 juta ekor
20	Pengembangan kapasitas usaha perikanan tangkap
21	Pemberdayaan pembudidaya ikan
22	Pengelolaan pembudidaya ikan
23	Membuka 1.000 ha kawasan pembesaran ikan
24	Menghasilkan 20 juta bibit ikan per bulan
25	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan untuk usaha pengolahan
26	Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM
27	Memfasilitasi akses permodalan
28	Pemanfaatan penggunaan teknologi
29	Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah
30	Membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah
31	Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru
32	Memberikan bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi bagi usaha mikro dan kecil, pertanian dan peternakan
33	Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
34	Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk usaha mikro dan kecil
35	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan produk usaha mikro dan kecil untuk masuk ke pasar nasional dan internasional
36	Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru

Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

No	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari
2	Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
3	Meningkatkan alokasi dana nagari sesuai dengan ketentuan yang ada
4	Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari
5	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik
6	Memberikan reward kepada nagari berprestasi
7	Meningkatan fasilitasi kerjasama antar nagari
8	Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari
9	Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
10	Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

No	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2	Peningkatan penerapan e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintah
3	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
4	Peningkatan inovasi daerah
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
6	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
7	Meningkatkan penataan dan kualitas kepegawaian daerah

No	Arah Kebijakan
8	Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan pelaporan AKIP
9	Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas.
10	Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja
11	Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah
12	Peningkatan advokasi hukum dalam menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah
13	Peningkatan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional
14	Mengembangkan inklusivitas layanan sosial terhadap penyandang disabilitas rumah tangga miskin
15	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pendamping korban bencana Sosial
17	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan
18	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat
19	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

No	Arah Kebijakan
1	Pembangunan gedung kantor perangkat daerah
2	Penyediaan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
3	Pembukaan akses jalan di daerah pinggiran dan terisolir
4	Peningkatan akses jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi
5	Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol
6	Memperkuat koordinasi antar unit kerja para pemangku kepentingan
7	Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan
8	Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan air minum
9	Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum
10	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM
11	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan
12	Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasarana air minum
13	Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan sanitasi
14	Meningkatkan kapasitas penyelenggara sanitasi
15	Menyusunan Perencanaan infrastruktur pengairan dengan protokol berkelanjutan
16	Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu
17	Peningkatan dan pemulihan kondisi jaringan irigasi
18	Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi
19	Peningkatan efektifitas air irigasi
20	Meningkatkan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi
21	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
22	Meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau, terpadu dan sesuai tata ruang dengan layanan prasarana sarana dan utilitas permukiman
23	Melaksanakan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
24	Penyusunan dokumen rinci tata ruang

No	Arah Kebijakan
25	Penerapan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
26	Meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan upaya penegakkan hukum lingkungan secara konsisten
27	Meningkatkan pemulihan media lingkungan tercemar
28	Memperketat implementasi kebijakan pengelolalan sumber daya alam dan lingkungan hidup
29	Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
30	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pengangkutan dan pengelohan sampah
31	Mengurangi sampah semaksimal mungkin dari sumbernya
32	Meningkatkan koordinasi pengelolaan sampah lintas sektoral
33	Menyediakan data dan informasi yang valid terkait penyediaan RTH
34	Mendorong percepatan penyelesaian dokumen penataan ruang
35	Melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap terutama di kota Sarilamak
36	Mengoptimalkan pelayanan informasi rawan bencana
37	Mengoptimalkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
38	Menguatkan kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha
39	Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
40	Meningkatkan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana
41	Menyediakan sarana dari akses untuk kemudahan penanggulangan bencana
42	Meningkatkan system mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana
43	Meningkatkan upaya mitigasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana
44	Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah daerah
45	Membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten dan antar propinsi, serta jalan-jalan untuk membuka keterisoliran dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (jalan ke destinasi wisata, jalan ke sentra-sentra produksi unggulan dan lain sebagainya)
46	Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana
47	Peningkatan jaringan dan kualitas air minum
48	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan
49	Mengembangkan pemetaan rumah tangga yang belum terjangkau akses sanitasi layak dan berkelanjutan
50	Meningkatkan jangkauan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
51	Meningkatkan pengelolaan terhadap sumber air baku yang ada
52	Mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber air baku
53	Mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal
54	Meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
55	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam siaga bencana
56	Mengembangkan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
57	Mengembangkan kebijakan pengurangan resiko bencana
58	Meningkatkan sarana dan prasana tanggap darurat bencana bagi korban bencana
59	Optimalisasi infrastruktur siaga bencana
60	Mengembangkan pola pencegahan bencana yang sistematis dan terencana
61	Meningkatkan kajian kelayakan infrastruktur publik
62	Meningkatkan perencanaan berbasis daya dukung dan daya tampung (kerawanan bencana)

4.5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing yang nantinya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sehingga SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM harus tercapai karena merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah, dan merupakan urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaannya. SPM mempunyai 6 (enam) urusan pelayanan dasar, yaitu :

- 1. Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- 2. Trantibumlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP, BPBD, Damkar
- 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- 4. Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
- 5. Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
- 6. Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diprioritaskan dalam pelaksanaannya di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Pasal 8 Permendagri 59 tahun 2021), Laporan SPM digunakan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara (Pasal 9 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021), Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi serta penerapan SPM dipantau terus dalam tahun berjalan oleh pemerintah pusat dan hasil capaian per triwulannya disampaikan ke daerah (Pasal 24 Permendagri 59 Tahun 2021).

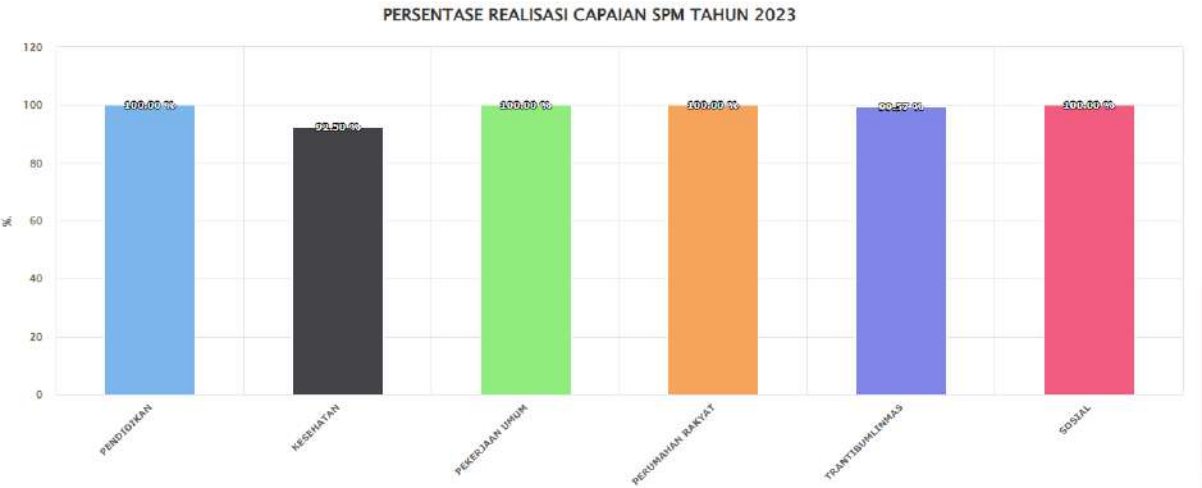
Menurut data olahan e-SPM Ditjen Bina Bangda per taggal 14 Januari 2024 bahwa dalam IP SPM Nasional seluruh Indonesia Pra TW IV tahun 2023 Sumatera Barat menempati urutan pertama se-Indonesia dengan total IP 97%.



Namun dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota menduduki urutan ke 14 dari 20 kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan predikat tuntas utama.



Sedangkan tabel di bawah ini merupakan capaian SPM di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Triwulan IV



Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa pencapaian SPM bidang pendidikan 100%, bidang kesehatan 92,50% ,bidang pekerjaan umum 100%, bidang perumahan rakyat 100%, bidang transhumlinmas 99,57 , dan yang terakhir bidang sosial 100% . Dengan capaian total nilai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota semua bidang adalah sebesar 98,68%.

Terkait dengan tingkat ketercapaian penerapan SPM terdapat hambatan dan kendala yang kerap ditemui , antara lain :

1. PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh : warga yang benar-benar miskin).
2. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan.
3. Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
4. Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk.
5. Kondisi Geografis yang 85% pegunungan mengakibatkan yang sulit dijangkau dalam pengumpulan data.
6. Target yang ditetapkan dalam e-SPM belum mengacu pada 4 (empat) tahapan penerapan e-SPM yaitu pada tahapan pendataan.

- 7. Penginputan capaian dan realisasi belum menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
- 8. Masih terdapat perubahan target pada layanan sekaligus melakukan pemutahiran data di akhir triwulan.
- 9. Anggaran dalam kegiatan dan sub kegiatan belum spesifik terkait dengan SPM.

Berikut ini daftar Sub Kegiatan pendukung pencapaian SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025:

Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program : Pengelolaan Pendidikan 1. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 3. Pembangunan ruang Kelas Baru 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan: 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru 2. Pengadaan perlengkapan Peserta Didik

Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia lanjut
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan diabetes melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat porgram pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Sub Kegiatan 1. Pembangunan rumah bagi korban bencana

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan 2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 5. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiap-siagaan Terhadap bencana Sub Kegiatan 1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 6. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Program Penanggulangan Bencana 1. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 7. Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran 8. Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga 2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi 4. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Sub Kegiatan 1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran 2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran

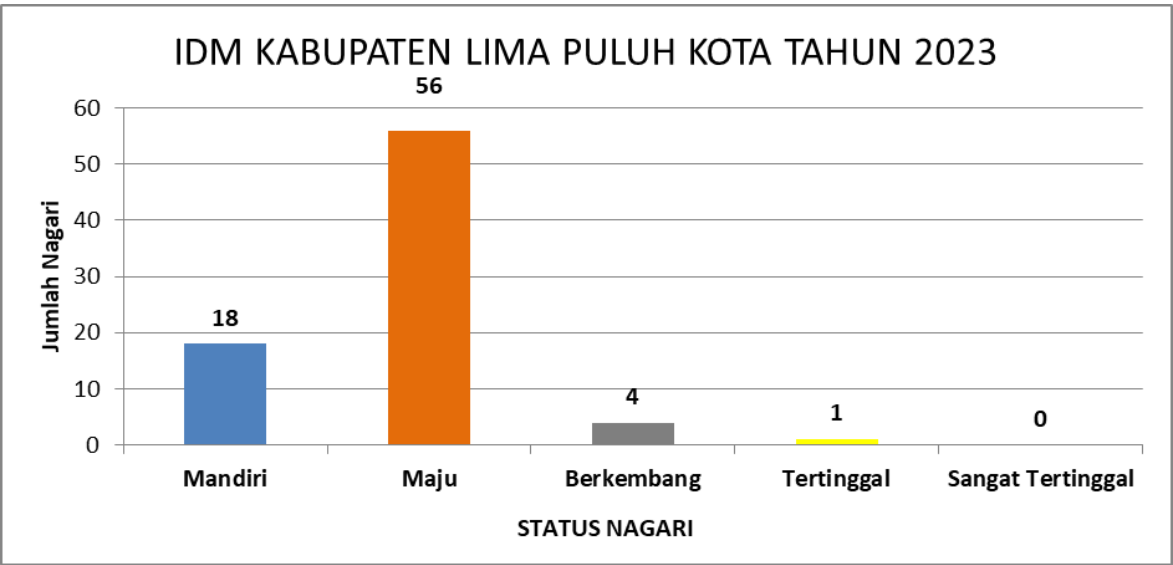
Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlintar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlintar, Anak Terlintar, Lanjut Usia Terlintar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian layanan rujukan
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlintar diluar panti	Jumlah anak terlintar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 2. Penyediaan sandang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlintar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlintar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Penyediaan makanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan alat bantu
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Program : Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Penyediaan permakanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan alat bantu 4. Pemberian pelayanan reunifikasi Keluarga 5. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlintar, anak terlintar, lanjut usia terlintar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat 6. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 7. Pemberian layanan rujukan 2.Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penyediaan makanan 2. Penyediaan sandang 3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 4. Pelayanan dukungan Psikososial
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Perlindungan dan Jaminan korban Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Program : Penanganan Bencana Kegiatan : Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota Sub Kegiatan : Penyediaan makanan

4.6 Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai Perencanaan Pembangunan Berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial)

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, IDM diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut ini grafik IDM Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 4.1. IDM Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota



Berdasarkan Grafik 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) nagari dengan rincian yaitu: terdapat 9 (sembilan) nagari berstatus mandiri, 57 (lima puluh tujuh) nagari berstatus maju, 12 (dua belas) nagari berstatus berkembang, dan 1 (satu) nagari masih berstatus tertinggal. Dengan demikian secara keseluruhan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan perdesaan sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Akan tetapi masih dibutuhkan upaya untuk pemerataan kondisi seluruh nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satunya dengan menetapkan suatu Kawasan Perdesaan.

Kawasan Perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 83 menyatakan bahwa kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Nagari dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai aturan peraturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan kawasan perdesaan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Nagari.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) oleh Bupati dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah nagari, maupun rencana dan program pembangunan Kabupaten/Nagari di masa mendatang (RPJM Daerah dan RPJM Nagari) dan RTRW Kabupaten. Proses tersebut merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari yang perannya mengawal implementasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap Nagari dan Kawasan Perdesaan.

Penyusunan rancangan RPKP tersebut dilakukan melalui pendekatan rencana yang disusun menjadi menyeluruh, terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh stakeholders. Selanjutnya rancangan RPKP tersebut diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten sebagai bahan pengusulan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi RPKP. RPKP ini akan menjadi acuan dalam menyusun program aksi tahunan berikutnya bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail (*Detail Engineering Design/DED*) maupun bisnis plan sesuai komoditi yang akan dikembangkan. Dalam menentukan lokus kawasan perdesaan, diarahkan pada kawasan yang sudah ditetapkan menjadi lokus prioritas yang bersumber dari:

- a. Kawasan Perdesaan yang telah diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga (P2KPB, PKPBM, KTM, Agropolitan, Minapolitan, dll) atau Kawasan Perdesaan Tertentu;
- b. Kawasan Perdesaan yang diusulkan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten pada hari Senin tanggal 24 Mei 2022 yang dihadiri oleh TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan) Kabupaten Lima Puluh Kota, Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Tenaga Pendamping Desa. Dari hasil rapat diusulkan bahwa 3 (tiga) Kecamatan sebagai Kawasan Perdesaan yaitu Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Selain kesepakatan penetapan Kawasan Perdesaan, pada rapat tersebut juga disepakati penetapan usulan tema kawasan yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan.

Beberapa kebijakan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun kedepan seperti yang telah diatur dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, sejalan dengan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain pada misi ke-2 yaitu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada misi ke-3 yaitu mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah salah satunya melalui strategi pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari. Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini, mempedomani 3 (tiga) usulan Kecamatan yang telah disepakati. Dalam hal pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapelitbang sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) berupaya memfasilitasi Tim TKPKP untuk:

- a. Melakukan supervisi, sosialisasi dan motivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Perangkat Daerah, Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN), Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Memfasilitasi usulan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Melakukan penilaian usulan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. Mengkoordinasikan dan melakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
- f. Menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati Lima Puluh Kota;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan atas laporan TKPKP Kawasan yang telah diverifikasi kepada TKPKP Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan TKPKP Pusat.

Pada tahun 2022, pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyelesaikan proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh. Pada tahun 2023, pengembangan kawasan perdesaan telah memasuki tahap penyusunan peraturan bupati untuk Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh, dan telah menyelesaikan proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

untuk Kawasan Perdesaan Wisata Terintegrasi Harau. Kawasan perdesaan tersebut diharapkan dapat menjadi kawasan perdesaan berbasis keunggulan sumberdaya yang berkelanjutan meliputi :

- b. Potensi sumber daya alam (lahan pertanian, hutan, air);
- c. Potensi sosial kebudayaan (sosial, budaya, regulasi);
- d. Potensi ekonomi (barang dan jasa, sarpras ekonomi).

Proses pembangunan Kawasan Perdesaan melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD), termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas PMD, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas PUPR, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Permukiman. Harapannya, pembangunan Kawasan Perdesaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dukungan investasi fisik dalam pengembangan kawasan tersebut. Pendanaan proyek ini diharapkan akan berasal dari tiga sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk lokal, kawasan ini diharapkan juga memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya dan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kontribusi utama Kawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. Dengan investasi yang signifikan, diharapkan proyek ini akan memberikan dampak positif yang substansial.

Pada tahun 2024 akan dilaksanakan proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Penyusunan dokumen RP3KP merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan dan pihak terkait. Proses ini bertujuan untuk merancang serta mengarahkan pertumbuhan dan penataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Tahapan awal dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman. Ini mencakup pemetaan lahan, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta evaluasi potensi dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, hasil analisis ini menjadi dasar penyusunan visi dan misi untuk perumahan dan kawasan permukiman yang akan dikembangkan.

Dokumen rencana pembangunan juga mencakup penetapan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Hal ini melibatkan pemilihan model pengembangan perumahan, perencanaan tata ruang, serta upaya untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung lainnya. Aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, inklusivitas, dan mitigasi risiko bencana juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan dokumen ini.

Selain itu, pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, instansi teknis terkait, pengembang properti, dan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam proses konsultasi dan partisipasi. Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Setelah dokumen rencana pembangunan disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi rencana tersebut. Ini melibatkan alokasi sumber daya, koordinasi antarstakeholder, dan pengawasan pelaksanaan proyek. Selama proses implementasi, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menyesuaikan rencana dengan dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pentingnya penyusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk menciptakan lingkungan hunian yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak serta memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang yang baik, diharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi penghuninya dan sekitarnya.

4.7 Pelaksanaan Inovasi

Inovasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi kreatifitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Salah satu misi daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah “MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA”. Adapun salah satu sasaran dari misi tersebut di atas adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang salah satu indikatornya adalah Indeks Inovasi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, serta birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yaitu dari pimpinan tertinggi sampai kepada lapisan bawah birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, dalam mencapai indikator indeks inovasi daerah yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, sangat diperlukan adanya penekanan Inovasi dari Kepala daerah kepada setiap Kepala Perangkat Daerah sehingga tercapai Kualitas Pelayanan Publik yang Prima melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.

Salah satu perwujudan komitmen ini adalah melalui gerakan “Satu Perangkat Daerah Lima Inovasi” yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan hal tersebut masih dilanjutkan sampai saat ini. Dalam kurun waktu 5 tahun (2019 – 2023) sejak pencanangan gerakan tersebut telah membuat peningkatan jumlah inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota masuk sebagai daerah dengan kategori Inovatif dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan nilai 37,84 dan berada pada peringkat 266 dari 415 Kabupaten di seluruh Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 47,47 (peringkat 173 dari 415 Kabupaten di Indonesia). Akan tetapi, hal ini tetaplah merupakan sebuah prestasi bagi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bapelitbang khususnya unit kelitbangan yang berada pada kondisi yang terbatas baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan yang belum mumpuni (belum memiliki fungsional kelitbangan, yaitu fungsional peneliti dan fungsional analisis kebijakan), sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi maupun lembaga litbang lainnya baik instansi litbang vertikal maupun horizontal. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses transfer knowledge, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah melakukan inventarisasi terhadap inovasi yang ada di Perangkat Daerah, baik yang telah dilaksanakan di tahun 2023 maupun yang hanya pengusulan di tahun 2023 dan akan diterapkan di tahun 2024. Adapun jumlah inovasi tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) inovasi, yang meliputi inovasi pelayanan publik sampai kepada inovasi tata kelola pemerintahan. Diharapkan kedepannya, inovasi ini diharapkan dapat terus tumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai kategori daerah sangat inovatif dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah di Indonesia.

Secara umum, untuk tahun 2024 pengembangan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menitikberatkan kepada inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat kabupaten lima puluh kota. Inovasi pelayanan publik ini misalnya terkait dengan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, pendidikan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelayanan publik. Pengembangan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 diharapkan adalah inovasi yang berkaitan dengan program unggulan dan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

4.8 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pada tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merilis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu masyarakat miskin yang

berada pada tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1) di Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 7.207 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 34.653 jiwa. Data yang telah diverifikasi dengan melibatkan Pemerintah Nagari ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 400.9.14/253/BUP-LK/IX/2023 tentang Penetapan Data Sasaran Prioritas Utama Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024. Jumlah masyarakat miskin hasil verifikasi tersebut sebesar 6.387 KK atau 30.570 jiwa. Kecamatan Lareh Sago Halaban menduduki peringkat terbanyak dalam jumlah masyarakat miskin yaitu sebesar 806 KK atau 3.846 jiwa dan Kecamatan Gunuang Omeh dengan peringkat terendah sebanyak 206 KK atau 1.010 jiwa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kembali merilis penambahan data P3KE Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Januari 2024 dan terdapat kenaikan jumlah KK yang berada di desil 1 menjadi 7.780 KK atau 37.164 jiwa. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum melakukan verifikasi terhadap data yang baru saja dikeluarkan tersebut.

Hasil identifikasi dan pemetaan data P3KE Desil 1 Kabupaten Lima Puluh Kota maka dapat digambarkan karakteristiknya sebagai berikut :

- Mayoritas pekerjaan kepala keluarga adalah petani.
- Mayoritas kepala keluarga memiliki latar belakang pendidikan tidak tamat SD/ sederajat.
- Mayoritas rumah keluarga desil 1 berstatus milik sendiri.
- Mayoritas keluarga menggunakan jamban umum/bersama.
- Mayoritas rumah menggunakan listrik pribadi s/d 900 Watt sebagai sumber penerangan..
- Mayoritas sumber air minum keluarga berasal dari sumur terlindung.
- Mayoritas keluarga tidak memiliki simpanan, seperti uang/perhiasan/ternak dan simpanan lainnya.

Berpedoman kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ada beberapa Strategi yang dilaksanakan dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diantaranya:
 - a. Pemberian bantuan pangan pokok berupa beras cadangan pemerintah kabupaten 10 kg/KK.
 - b. Pendistribusian bantuan pemerintah pusat terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
 - c. Stabilisasi pasokan harga pangan dan menjamin keterjangkauan harga pangan di masyarakat.
 - d. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah di Nagari-nagari.
 - e. Bantuan Non Tunai dari Pemerintahan Nagari.
 - f. Pemberian BLT Dana Desa.
 - g. Pemberian bantuan permakanan lansia miskin.
 - h. Pemberian bantuan jaminan kesehatan masyarakat berupa pembayaran premi BPJS.
 - i. Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik SD, SMP, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat, yang dilakukan diantaranya:
 - a. Bantuan peralatan produksi seperti oven, spinel, pengolahan pupuk serta mesin jahit.
 - b. Pemberian pelatihan keterampilan seperti las, otomotif, *Handphone*, menjahit, elektronika, komputer dan pelatihan untuk UMKM serta dikirimkan beberapa peserta pelatihan ke Balai Besar Latihan Kerja Medan.
 - c. Pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga dan pemerdayaan masyarakat di kampung KB.
 - d. Penyediaan benih sayuran, rumah benih serta peralatan benih.
 - e. Bantuan peralatan usaha seperti etalase, kompor gas lengkap, lemari, blender, mixer, dan anglo.
 - f. Pemberian bantuan ternak sapi, kambing, ayam, benih ikan, alat penangkap ikan, pakan serta obat-obatan.
3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan, yang dilakukan diantaranya:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil dan terluar serta menuju kawasan potensi pertanian/jalan usaha tani/jalan produksi, perikanan dan pariwisata.
 - b. Penyediaan air minum berupa pembangunan sambungan rumah.

- c. Pembangunan jamban Rumah Tangga Miskin.
- d. Pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan evaluasi dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 yaitu:

1. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dengan SK Bupati.
2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023.
3. Melaksanakan verifikasi dan validasi Data P3KE bersama dengan Pemerintah Nagari.
4. Melaksanakan rapat dengan Perangkat Daerah terkait guna pemanfaatan Data P3KE dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
5. Menetapkan data sasaran prioritas utama percepatan pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dengan SK Bupati.
6. Mengarahkan penggunaan data P3KE dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada RAPBD tahun 2024 dengan Surat Edaran Bupati.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PPKE) setiap triwulan ke Gubernur Sumatera Barat melalui website resmi P3KE.

Berikut pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung beserta Perangkat Daerah penanggung jawab dalam upaya penanganan kemiskinan seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Penanganan Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Pengelolaan Dana Bop Paud	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Dinas Kesehatan
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (Odmk)	Dinas Kesehatan
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Dinas Kesehatan
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Dinas Kesehatan
32	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
33	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
34	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
35	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
36	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial
37	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
38	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
39	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Dinas Sosial
40	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza	Dinas Sosial
41	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
42	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
43	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
44	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial
45	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
46	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
47	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
48	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
49	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
51	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pangan
52	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Dinas Pangan
53	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan
54	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
55	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
56	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm
57	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Ukm Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Ukm Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm
58	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
60	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
61	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Dinas Perikanan
62	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
63	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
64	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
65	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
66	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
67	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
68	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
69	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
70	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
71	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
72	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
73	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
74	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
75	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
76	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
77	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
78	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
79	Program Kawasan Permukiman	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DLHPP
80	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi Dan Informatika

4.9. Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan kepada seluruh Menteri/ Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan serta mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Kerja PD dan juga tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-PD.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan melalui analisis gender dan penyusunan GBS. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis gender dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari rencana jangka menengah dan tahunan yang tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Renja PD, dokumen penganggaran KUA-PPAS dan RKA PD.

Dalam hal kaitannya dengan pencapaian Visi Misi Kepala daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, maka salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 -2026 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dukur dengan indikator Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD), dimana pada tahun 2023, realisasi capaiannya sebesar 6,75%. Target ARG pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 6,7%.

Berdasarkan hasil analisis gender dan GBS yang telah dilakukan dan telah direview oleh Inspektorat, telah dipetakan 71 sub kegiatan dari 43 Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sebagaimana daftar berikut:

Tabel 4.9
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Inspektorat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Kab/Kota	Pemerintah Daerah	dan Fungsi	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD
3	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM
5	Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM
6	Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM
7	Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM
8	Pengembangan sumber daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM
9	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota	Badan Keuangan
10	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Keuangan
11	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
14	Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Bapelitbang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	
15	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
16	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
17	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
18	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (paud)	Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Program Pengelolaan pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Sekolah dasar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas PUPR
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
23	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
24	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kab/Kota	Dinas Sosial
25	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
26	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disduk Capil
27	Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Disduk Capil

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
27	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP2KBP3A
28	Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP2KBP3A
29	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP
30	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
31	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
33	Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
34	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi
35	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Center</i>)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran , dan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopr Kabupaten/Kota , Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
36	Administrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMDN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Desa		
37	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
38	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengolahan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
39	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
40	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
40	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
41	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
42	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan
43	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
44	Pengelolaan Kearsipan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah/Kabupaten	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
45	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Ahmad Darwis
46	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Ahmad Darwis
47	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
48	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Harau
49	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Harau
50	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mungka
51	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mungka
52	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Luak
53	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Luak
54	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lareh Sago Halaban
55	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lareh Sago Halaban
56	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
57	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
58	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
59	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
60	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Payakumbuh
61	Pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan	Peningkatan Partisipasi	Kecamatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan desa	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Payakumbuh
62	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Guguak
63	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Kecamatan Guguak
63	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukik Barisan
64	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bukik Barisan
65	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Suliki
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bukik Barisan
66	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kecamatan Gunuang Omeh
67	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunuang Omeh
68	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
69	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
70	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kecamatan Kapur IX
71	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kapur IX

4.10 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonssia: Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Penyelenggaraan PKK dilakukan melalui Gerakan PKK secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan bahkan sampai ke tingkat Desa. Gerakan PKK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dan pelaporan.

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang meliputi:

1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. gotong royong;
3. pangan;
4. sandang;
5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. pendidikan dan keterampilan;
7. kesehatan;
8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. kelestarian lingkungan hidup; dan
10. perencanaan sehat.

Pelaksanaan Gerakan PKK secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Pada pasal 39 ayat 2 disampaikan bahwa dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan dukungan dan berperan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi dengan Menteri.

Selain itu pada pasal 62 disampaikan bahwa Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat. Terkait dengan hal diatas, maka berdasarkan Peraturan menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya seperti mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten.

Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan, yaitu TP PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera, melalui;

- a. penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
- b. dukungan penguatan kelembagaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pada 10 Program Pokok PKK sampai di tingkat Desa khususnya penuntasan dan penyelesaian stunting dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan, dan nifas;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- d. melakukan program penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui TP PPK, Kader PKK, dan Posyandu dalam rangka mendukung Pemerintah terhadap pemberantasan bahaya Narkotika;

- e. mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
- f. mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan; dan
- g. memajukan dan mendorong perekonomian melalui desa wisata dan usaha yang dikelola oleh keluarga.

Mempedomani arah kebijakan diatas, maka untuk tahun 2025 telah dipetakan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung PKK yang dilaksanakan oleh 10 Perangkat daerah terkait serta kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10

Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK pada Perangkat Daerah

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang keluarga	Unsur Pemerintahan Umum/ Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kesbangpol	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
					Kesbangpol	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pembinaan wawasan kebangsaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Gotong Royong	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa	Menumbuhkan sikap kesetiawanan sosial, memberdayakan kelompok lanjut usia, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayan Masyarakat dan Desa	DPMDN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat
3	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal	Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman, Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, berigizi, seimbang dan aman, Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
4	Sandang	Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia	Membudayakan perilaku berusaha sesuai moral budaya Indonesia, Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri
5	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna, Pembinaan rumah sehat layak huni, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DLHPP	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah
6	Pendidikan dan Keterampilan	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun, menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan, Memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar pakat A, B dan C melalui kerjasama dengan instansi terkait, Meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMDN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kab/kota	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7	Kesehatan	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, Pembinaan keluarga yang sadar gizi, Mendukung Program pencegahan dan deteksi dini kanker dan perempuan, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8	Pengembangan kehidupan berkerjasama	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkerjasama dan pengembangan ekonomi lainnya	Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Disdagkop UMK	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkerjasama dan pengembangan ekonomi lainnya
9	Kelestarian Lingkungan Hidup		Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, Melestarikan lingkungan hidup	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	DLHPP	Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tidak daerah kabupaten / kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	Penanggulangan Bencana	Pencegahan pengendalian dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Damkar	Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
10	Perencanaan Sehat	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas, Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKBP3A	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

Tabel 4.11

Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK pada Kecamatan

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang keluarga	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
2	Gotong Royong	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa	Menumbuhkan sikap kesetiawanan sosial, memberdayakan kelompok lanjut usia, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal	Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman, Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4	Sandang	Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia	Membudayakan perilaku berusaha sesuai moral budaya Indonesia, Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
5	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna, Pembinaan rumah sehat layak huni, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			kehidupan keluarga					
6	Pendidikan dan Keterampilan	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pembinaan kelaurga tentang wajib belajar dua belas tahun, menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan, Menfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar pakat A, B dan C melalui kerjasama dengan instansi terkait, Meingkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7	Kesehatan	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, Pembinaan keluarga yang sadar gizi, Mendukung Program pencegahan dan deteksi dini kanker dan perempuan, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri keluarga	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8	Pengembangan kehidupan berkeoperasi	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkeoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
9	Kelestarian Lingkungan Hidup		Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, Melestarikan lingkungan hidup	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
								Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
								Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	Perencanaan Sehat	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas, Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4.11 Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota

Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 (ayat 4), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak.

KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) merupakan salah satu indikator tolok ukur secara Nasional keberhasilan pembangunan suatu Pemerintahan benar-beran berorientasi pada kepentingan SDM-dini yang difokuskan pada 6 (enam) Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu : 1. Indikator Umum : Kebijakan dan Anggaran ; 2. Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan; 3. Klaster 2 : Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ; 4. Klaster 3 : Hak Kesehatan & Kesejahteraan Dasar ; 5. Klaster 4 : Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya ; 6. Klaster 5 : Hak Perlindungan Khusus

Dalam hal kaitannya dengan pencapaian Visi Misi Kepala daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, maka salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 -2026 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu, dimana pada tahun 2025 target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 100 persen atau tertangani secara keseluruhan.

Berdasarkan Perbup No. 61 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026, maka terdapat program kegiatan pendukung KLA yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator pada evaluasi KLA, sebagaimana daftar berikut:

Tabel 4.12
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bapelitbang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bapelitbang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bapelitbang
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan PHA Kewenangan Kab/Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil
Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil
Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil
Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil
Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	Diskominfo
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	Diskominfo
Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	Diskominfo
Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Disdikbud
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Disdikbud
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Disdikbud
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos
Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kab/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLHPP
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dishub
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan	DPUPR
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM TK Daerah/Kab	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	Dinkes
Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dinkes

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DPUPR
Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan , Pengumpulan, Pengangkutan ,Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLHPP
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
Pendidikan Non Formal	Pendidikan Kesetaraan	Pakaet A, Paket B, Paket C	Disdikbud
Pendidikan Non Formal	Pendidikan Kesetaraan	Pakaet A, Paket B, Paket C	Disdikbud
Pendidikan Non Formal	Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Disdikbud
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal atau Kesetaraan	Disdikbud
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Disdikbud
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan SD dan SMP	Disdikbud
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan SD dan SMP	Disdikbud
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan SD dan SMP	Disdikbud
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Dispusip
Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispusip
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesra
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesra
Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Disdikbud

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pekan Budaya, Penampilan Paket Seni, Silang Budaya,	Disdikbud
Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Disdikbud
Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Disdikbud
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan anak usia Dini	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Disdikbud/DP2 KBP3A/GT KLA
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan anak usia Dini	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Disdikbud/DP2 KBP3A/GT KLA
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan anak usia Dini	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Disdikbud/DP2 KBP3A/GT KLA
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispusip
Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispusip
Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispusip
Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispusip
Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispusip
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga Layanan Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga Layanan Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga Layanan Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A
Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Damkar
Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Damkar
Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DP2KBP3A

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Damkar
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Dinsos
Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispusip
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Dispusip
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A

4.12. Pelaksanaan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 444/101/Bup-LK/III/2023 tentang Penetapan Nagari Prioritas Penurunan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, dimana terdapat 6 Kecamatan pada Wilayah Prioritas I dengan 12 Nagari antara lain Kecamatan Kapur IX (Galugua dan Sialang), Kecamatan Bukik Barisan (Maek dan Baruah Gunuang), Kecamatan Suliki (Kurai, Suliki, Limbanang, Sungai Rimbang), Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Pangkalan dan Manggilang), Kecamatan Lareh Sago Halaban (Sitanang), Kecamatan Situjuah Limo Nagari (Situjuah Ladang Laweh). Sebagian dari nagari ini juga sudah menjadi lokus pada Tahun 2023, namun dikarenakan prevalensi stuntingnya masih belum mengalami penurunan yang cukup signifikan maka nagari-nagari tersebut tetap menjadi lokus. Namun demikian tidak sedikit juga nagari yang sudah keluar dari lokus prioritas I dan berada pada zona oranye, kuning maupun hijau.

Peraturan Bupati diatas tidak saja menetapkan lokus untuk wilayah Prioritas I, tetapi juga lokus pada prioritas II sebanyak 24 Nagari, hal ini juga bermaksud untuk memperluas jangkauan intervensi dan pengawasan terhadap penurunan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020, pelaksanaan upaya penurunan stunting tidak terlepas dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dan hal ini telah dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak ditetapkannya sebagai lokus penurunan Stunting tahun 2020.

Bulan	Jadwal Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi				Penanggung Jawab
Tahun n					
Januari	Aksi 1 Analisis Situasi				Aksi 1 Bappeda (PIC) dan OPD
Februari		Aksi 2 Rencana Kegiatan	Aksi 3 Rembuk Stunting		Aksi 2 Bappeda (PIC) dan OPD
Maret	Aksi 4 Perbup tentang Peran	Aksi 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Aksi 6 Sistem Manajemen Data	Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi 3 Sekda dan/atau Bappeda (PIC) dan OPD
April					Aksi 4 DPMD/N
Mei					Aksi 5 DPMD/N
Juni					Aksi 6 Bappeda (PIC) dan OPD
Juli					Aksi 7 Dinas Kesehatan
Agustus					Aksi 8 Sekda dan/atau Bappeda (PIC) dan OPD
September					
Oktober					
November					
Desember					
Tahun n+1					
Januari	Aksi 8 Review Kinerja Tahunan				
Februari					

- Aksi I (Analisis Situasi)
Analisis Situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penurunan Stunting/ TPPS Kabupaten yang beranggotakan 14 Perangkat daerah terkait, instansi vertikal, perguruan tinggi/akademisi, PKK, Tenaga Ahli dan ormas lainnya yang terkait. Dalam aksi ini setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyiapkan data 29 cakupan layanan, data sasaran serta data pada master ansit per nagari yang nantinya menghasilkan rekomendasi nagari lokus baik yang berada di zona merah, oranye, kuning maupun hijau. Hasil rekomendasi ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang nagari lokus.
- Aksi II (Pemetaan Program dan Kegiatan)
Penyusunan Rencana Kegiatan/Memetakan Program Kegiatan Penanganan dan Upaya Pencegahan Stunting adalah tindak lanjut pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan PD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten dan nagari pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten selanjutnya mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja PD.

Perangkat Daerah	Jenis Intervensi
Dinas Kesehatan	Intervensi 1000 HPK (Spesifik), Penyediaan akses Jaminan Kesehatan (JKN), edukasi kesehatan
Dinas PUPR	Penyediaan akses air bersih, air minum dan sanitasi yang layak
DLHPP	Penyediaan akses sanitasi yang layak
Dinas Sosial	Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pemutakhiran Data BDT, Integrasi Data
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua (Parenting), PAUD
DPPKBP3A	Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga Balita, Penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Dinas Pangan	Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga, seperti program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan minyak goreng, Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.
DPMDN	Koordinator Pemanfaatan Dana Nagari, Fasilitator Pembinaan KPM, Posyandu, PKK, Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Dukcapil	Pelayanan Akte Kelahiran, NIK, Integrasi Data
Dinas Kominfo	Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media
BAPELTBANG	Koordinator Teknis
Dinas Perikanan	Pengembangan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga melalui program kegiatan seperti FORIKAN
Distanhorbun	Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga
Disnakeswan	Pengembangan Peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga

3. Aksi III (Rembuk Stunting)
- Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara PD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari PD penanggung jawab layanan di kabupaten dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.



4. Aksi IV (Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa)
- Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Setiap tahunnya alokasi dana desa yang dimanfaatkan untuk penurunanStunting cenderung meningkat, yang dialokasikan pada 2 bidang kegiatan sebagaimana tabel berikut:

BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEG KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAP TK DESA	% LAP TK DESA		ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	79	79	100.00 %	41,255,953,993	8,708,141,978	21.11 %
2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	79	79	100.00 %	13,272,616,981	696,932,312	5.25 %

5. Aksi V (Pembinaan Kader Pembangunan Manusia)
Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di desa. Bupati mendelegasikan kewenangan kepada DPMDN untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.
6. Aksi VII (Sistem Manajemen Data)
Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting adalah tatanan pengelolaan data di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nagari yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program/ atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.
Sistem manajemen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan di kabupaten sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.
Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan.
 1. Di tingkat Nagari, data digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja (score card);
 2. Di tingkat Kecamatan, data digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan.
 3. Di tingkat Kabupaten, masing-masing PD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk Stunting, melihat dan melakukan reviu capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program.
7. Aksi VII (Pengukuran dan Publikasi Data Stunting)
Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting. Tata cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.
Salah satu inovasi pelaksanaan Aksi VII adalah dengan penetapan Satu Data Nagari Stunting (SADARI Stunting) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.



8. Aksi VIII (Review Kinerja Tahunan)

Review Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Reviu dilakukan untuk:

1. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian,
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome, dan
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Kinerja dinyatakan dalam indikator hasil tiap Aksi Integrasi. Hasil reviu kinerja menjadi masukan dalam pelaksanaan Analisis Situasi (Aksi #1) untuk penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi #2) tahun berikutnya.

4.13 Pelaksanaan Kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dan berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 005/124/I/Pem-PM/Bappeda-2023 perihal penyusunan RAD Kepemudaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tetap memperhatikan karakteristik kewilayahan dan kearifan lokal.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Kepemudaan; sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Pusat melakukan strategi salah satunya adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan di daerah. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026 berisi tentang strategi kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu RAD Pelayanan Kepemudaan dan RAD Kabupaten Lima Puluh Kota dan dikoordinasikan oleh Badan, Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.13
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Utama	Target	Instansi Penanggung Jawab
Pengelolaan Pendidikan	Pengeloaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Keseta raan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keseta raan	Rata-rata lama sekolah	8.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan	Pengeloaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Keseta raan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Rata-rata lama sekolah	8.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan	Pengeloaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Keseta	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Rata-rata lama sekolah	8.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Utama	Target	Instansi Penanggung Jawab
	raan	di Bidang Pendidikan			
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Angka Kesakitan Pemuda	75%	Dinas Kesehatan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Persentase Korban Kejahatan	25 orang	Dinas Kesehatan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	20 orang	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Korban Kejahatan	25 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	30 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Oengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase pemuda yang Aktif dalam Organisasi	40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Utama	Target	Instansi Penanggung Jawab
Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Korban Kejahatan	51.6	Dinas Sosial
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang Aktif dalam Organisasi	65%	Dinas Sosial
Pengembangan Kopetensi dan daya Saing kepemudaan	Pemberdayaan dan pengembangan daya saing kepemudaan	Koordinasi dan sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemula Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	30 orang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Kopetensi dan daya Saing kepemudaan	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinasi dan sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemula Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tulisan hijau = kegiatan berbeda tetapi sub kegiatan sama
Pengembangan Kopetensi dan daya Saing kepemudaan	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha	Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	30 orang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Utama	Target	Instansi Penanggung Jawab
	muda pemula dan pemuda kader Kabupaten Lima Puluh Kota				
Pengembangan Kopetensi dan daya Saing kepemudaan	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Persentase pemuda yang Aktif dalam Organisasi	40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Utama	Target	Instansi Penanggung Jawab
	Humum Adat yang sama Daerah Kabupaten/Kot a				
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka Perkawinan Usia Anak	2.10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka Perkawinan Usia Anak	2.10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.14. INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS

Tabel 4.14
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup
		Angka prevelensi stunting
3	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK
4	Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Indeks inovasi daerah
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun

NO	SASARAN	INDIKATOR
8	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW
9	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan Wisatawan
10	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
11	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
12	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
		Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
13	Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
14	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas
15	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
16	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni
17	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
18	Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka masing-masing OPD menjabarkannya kedalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk matrik rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026. Dalam matriks ini juga digambarkan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target kinerja, lokasi, kebutuhan dana / pagu indikatif dan sumber dana serta catatan penting untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Sedangkan untuk prakiraan maju, rencana tahun 2026 hanya menampilkan target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing OPD diperoleh dari usulan rencana kerja melalui Rancangan Awal Renja OPD yang bersumber dari Renstra OPD, kemudian usulan tersebut dibahas dan dimatangkan oleh tim penyusun yang melibatkan *stakeholders* terkait dalam beberapa tahapan antara lain pada Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Forum Lintas OPD serta Musrenbang RKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan telah sinkron antara usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 yang dirumuskan. Penyusunan Renja OPD juga disempurnakan dengan menelaah usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dikirimkan kepada Bupati melalui Bapelitbang dan telah diinput melalui aplikasi SIPD RI Kemendagri.

Disamping mempertimbangkan aspek sinkronisasi antara Renja OPD dengan hasil-hasil musrenbang serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah, pematangan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan juga mempertimbangkan perkembangan kemampuan fiskal daerah. Dalam hal ini, kemampuan fiskal daerah dilihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir dari proporsi belanja pegawai, serta belanja wajib dan mengikat pada setiap OPD beserta berbagai jenis pendanaan, seperti DAU, DAK, Bansos, Hibah dan seterusnya. Untuk memprediksi kemampuan fiskal pada tahun 2025, maka dilakukan proyeksi terhadap kondisi *existing* yang diperoleh dari data perkembangan kemampuan fiskal tersebut.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing OPD yang nantinya akan bermuara kepada program dan kegiatan prioritas daerah, juga mempertimbangkan perkembangan proporsi Belanja pada setiap OPD. Perkembangan alokasi belanja untuk setiap jenis OPD selama 5 (lima) tahun terakhir secara persentase menunjukkan adanya peningkatan pada jenis OPD tertentu dan penurunan pada jenis OPD lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan prioritas daerah sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian visi misi dan berubahnya RPJMD.

Rekapitulasi kebutuhan dana/pagu indikatif untuk RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.2. Sedangkan matrik program masing-masing OPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 serta kebutuhan pendanaannya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 5.3 tentang Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Matrik program, kegiatan dan sub kegiatan ditampilkan menurut masing-masing OPD, dimana pada setiap OPD program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terjabar pula menurut urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Tabel 5.1
Perkembangan Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD Tahun 2020 - 2024

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD	
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12
A.	Sekretariat Daerah	25.629.230.578	4,34	37.772.897.212	2,79	40.491.909.966	3,06	31.438.323.533	2,45	38,145,533,070	2,86
B.	Sekretariat DPRD	24.129.637.285	4,09	37.237.320.850	2,75	34.223.935.370	2,58	33.420.197.622	2,60	31,658,320,835	2,37
C.	Inspektorat	6.245.547.904	1,06	10.161.876.259	0,75	9.933.629.120	0,75	10.000.002.932	0,78	10,884,823,797	0,82
D.	Dinas Daerah	459.367.111.681	77,8 3	935.737.216.657	69,0 7	917.415.755.192	69,29	869.886.880.288	67,70		71,18
1.	Dinas Kesehatan	80.024.592.501	13,5 6	126.467.888.764	9,34	126.378.421.576	9,55	133.984.047.977	10,43	195,551,117,853	14,65
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.041.163.738	19,1 5	493.470.318.773	36,43	488.599.095.287	36,90	504.467.103.112	39,26	547,598,189,173	41,01
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.306.717.618	24,2 8	120.151.034.489	8,87	141.057.692.165	10,65	76.619.462.148	5,96	71,985,187,702	5,39
4.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	5.514.819.709	0,93	8.392.734.948	0,62	6.081.881.595	0,46	6.134.797.320	0,48	7,471,652,937	0,56
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	6.603.316.248	1,12	11.796.835.538	0,87	8.898.695.468	0,67	8.313.481.721	0,65	8,038,138,392	0,60
6.	Dinas Sosial	6.407.158.059	1,09	9.572.833.790	0,71	5.119.773.848	0,39	7.203.419.945	0,56	6,802,627,812	0,51
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.674.459.800	0,62	6.782.013.004	0,50	4.501.831.602	0,34	4.284.168.447	0,33	4,180,455,700	0,31
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.270.465.036	1,23	11.397.101.778	0,84	7.998.522.652	0,60	9.324.958.401	0,73	10,159,396,130	0,76
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.272.666.294	0,22	4.879.049.988	0,36	4.355.859.028	0,33	4.782.343.813	0,37	4,617,444,605	0,35

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD	
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12
	Satu Pintu										
10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.254.128.880	0,72	8.620.994.312	0,64	5.295.444.914	0,40	5.657.872.865	0,44	4,443,046,320	0,33
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.533.231.600	0,43	6.845.054.657	0,51	4.976.565.411	0,38	5.160.476.927	0,40	4,431,291,959	0,33
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.790.704.256	1,15	9.497.845.798	0,70	7.980.383.792	0,60	8.003.851.488	0,62	7,964,774,688	0,60
13.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	17.149.282.291	2,91	17.085.551.605	1,26	12.421.195.129	0,94	18.826.623.221	1,47	8,408,910,088	0,63
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	2.472.372.274	0,42	5.730.186.285	0,42	6.177.168.811	0,47	3.588.437.140	0,28	5,081,903,031	0,38
15.	Dinas Perhubungan	19.521.895.400	3,31	18.299.945.276	1,35	14.965.212.495	1,13	13.359.293.958	1,04	12,802,998,617	0,96
16.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	14.633.552.395	2,48	17.270.310.328	1,27	22.286.650.119	1,68	20.812.375.297	1,62	10,745,051,038	0,80
17.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.193.573.820	2,07	22.635.565.130	1,67	23.937.913.118	1,81	18.438.736.689	1,43	17,703,548,442	1,33
18.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.718.628.050	0,46	9.505.591.868	0,70	10.655.917.439	0,80	9.649.467.869	0,75	9,952,397,777	0,75
19.	Dinas Perikanan	5.346.901.600	0,91	8.279.199.363	0,61	6.448.913.621	0,49	4.137.481.158	0,32	5,158,255,817	0,39
20.	Dinas Pangan	2.188.660.000	0,37	4.989.249.028	0,37	5.775.827.753	0,44	2.822.528.175	0,22	3,307,224,768	0,25
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.448.822.112	0,41	14.067.911.935	1,04	3.502.789.369	0,26	4.315.952.617	0,34	4,014,781,749	0,30
E.	Badan Daerah	30.837.920.841	5,22	253.515.743.940	18,71	256.125.024.307	19,35	275.439.720.808	21,43		18,95

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD	
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12
1.	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	4.472.376.800	0,76	7.799.034.418	0,58	5.846.460.938	0,44	5.780.727.351	0,45	7,782,733,820	0,58
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.418.455.921	1,26	12.102.349.140	0,89	8.260.386.804	0,62	8.120.676.386	0,63	5,851,024,079	0,44
3.	Badan Keuangan	10.853.688.148	1,84	221.074.537.073	16,32	230.641.223.511	17,42	249.166.610.010	19,39	202,444,602,623	15,16
4.	Badan Kesbangpol	4.550.239.831	0,77	6.494.604.789	0,48	6.407.820.432	0,48	7.988.167.889	0,62	31,933,701,689	2,39
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.543.160.141	0,60	6.045.218.520	0,45	4.969.132.622	0,38	4.383.539.172	0,34	5,053,474,683	0,38
F.	Kecamatan	8.004.040.485	1,36	26.662.286.822	1,97	21.422.345.732	1,62	21.938.876.382	1,71		1,66
1.	Kecamatan Gunuang Omeh	457.251.380	0,08	1.672.777.436	0,12	1.328.681.620	0,10	1.472.053.120	0,11	1,559,484,061	0,12
2.	Kecamatan Bukik Barisan	611.958.700	0,10	1.903.532.915	0,14	1.409.035.508	0,11	1.560.108.846	0,12	1,425,513,944	0,11
3.	Kecamatan Suliki	502.930.230	0,09	1.963.599.395	0,14	1.659.372.666	0,13	1.661.677.610	0,13	1,842,606,288	0,14
4.	Kecamatan Guguk	645.740.800	0,11	2.044.296.543	0,15	1.559.256.319	0,12	1.604.494.631	0,12	1,704,538,750	0,13
5.	Kecamatan Mungka	1.003.055.000	0,17	1.760.514.492	0,13	1.447.637.340	0,11	1.495.459.342	0,12	1,382,183,876	0,10
6.	Kecamatan Akabiluru	449.941.000	0,08	1.998.744.557	0,15	1.738.668.446	0,13	1.781.352.667	0,14	1,861,413,085	0,14
7.	Kecamatan Payakumbuh	652.523.118	0,11	2.211.936.246	0,16	1.775.140.353	0,13	2.044.373.683	0,16	2,068,447,798	0,15
8.	Kecamatan Luak	513.894.400	0,09	1.831.480.823	0,14	1.542.729.134	0,12	1.561.406.272	0,12	1,636,648,823	0,12
9.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	754.169.376	0,13	2.357.462.683	0,17	1.832.651.590	0,14	1.645.234.931	0,13	1,533,722,547	0,11

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD		Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD	
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12
10.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	506.220.500	0,09	2.146.641.602	0,16	1.637.294.102	0,12	1.675.576.437	0,13	1,576,741,000	0,12
11.	Kecamatan Harau	691.098.600	0,12	2.400.940.167	0,18	2.001.784.757	0,15	1.977.231.541	0,15	2,021,253,812	0,15
12.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	599.995.300	0,10	1.845.097.300	0,14	1.441.446.561	0,11	1.575.845.657	0,12	1,623,001,540	0,12
13.	Kecamatan Kapur IX	615.262.081	0,10	2.525.262.663	0,19	2.048.647.336	0,15	1.884.061.645	0,15	1,866,054,542	0,14
G.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	35.990.483.650	6,10	53.628.046.484	3,96	44.336.699.259	3,35	42.883.473.254	3,34	28,889,572,498	2,16
1.	RSUD Ahmad Darwis	35.990.483.650	6,10	53.628.046.484	3,96	44.336.699.259	3,35	42.883.473.254	3,34	28,889,572,498	2,16
	JUMLAH	590.203.972.424	100	1.354.715.388.224	100	1.323.949.298.946	100	1.285.007.474.819	100	1.335.163.791.758	

*Pagu Alokasi Anggaran diatas merupakan pagu dari APBD

Tabel 5.2
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Indikatif			
		Tahun 2025		Tahun 2026*	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	547.598189.173	41,01	521.028.274.686	36,24
2.	DINAS KESEHATAN	195.551.117.853	14,65	135.864.000.000	9,45
3.	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	40.000.000.000	3,00	85.500.631.200	5,95
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	70.282.341.302	5,26	88.966.000.000	6,19
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	8.386.383.279	0,63	11.415.143.814	0,79
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.752.598.722	0,58	17.577.323.179	1,22
7.	DINAS SOSIAL	7.078.401.437	0,53	11.869.374.000	0,83
8.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.605.209.740	0,34	5.069.000.000	0,35
9.	DINAS PANGAN	3.441.755.676	0,26	4.691.263.245	0,33
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	11.218.280.145	0,84	14.242.461.899	0,99
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.500.000.000	0,34	5.117.000.000	0,36
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	5.285.849.751	0,40	4.873.500.000	0,34
13.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.610.634.140	0,79	11.159.292.448	0,78
14.	DINAS PERHUBUNGAN	13.372.257.468	1,00	15.986.291.293	1,11
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.300.290.350	0,62	8.885.121.320	0,62
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.606.323.371	0,35	6.358.696.137	0,44
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.796.287.242	0,36	7.614.600.000	0,53
18.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.493.774.929	0,71	11.320.600.000	0,79
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.169.728.853	0,31	13.015.389.200	0,91
20.	DINAS PERIKANAN	5.355.432.898	0,40	5.890.976.188	0,41
21.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	18.211.989.426	1,36	18.921.901.846	1,32
22.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.301.743.426	0,77	34.778.120.848	2,42
23.	SEKRETARIAT DAERAH	39.854.395.000	2,98	41.785.277.435	2,91
24.	SEKRETARIAT DPRD	33.196.599.185	2,49	55.895.767.405	3,89
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.406.793.960	0,63	7.460.011.379	0,52
26.	BADAN KEUANGAN	204.444.602.623	15,31	195.752.518.000	13,61
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.084.753.483	0,46	20.721.000.000	1,44
28.	INSPEKTORAT	11.320.739.724	0,85	22.293.216.014	1,55
29.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	1.620.849.468	0,12	1.940.127.336	0,13
30.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	1.473.670.905	0,11	1.442.830.905	0,10
31.	KECAMATAN SULIKI	1.909.632.038	0,14	2.352.765.123	0,16

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Indikatif			
		Tahun 2025		Tahun 2026*	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
32.	KECAMATAN GUGUAK	1.764.325.067	0,13	4.898.200.000	0,34
33.	KECAMATAN MUNGKA	1.434.058.354	0,11	1.927.650.000	0,13
34.	KECAMATAN AKABILURU	1.928.031.419	0,14	3.376.107.382	0,23
35.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	2.134.710.943	0,16	9.584.318.506	0,67
36.	KECAMATAN LUAK	1.690.897.137	0,13	2.174.688.876	0,15
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	1.586.580.542	0,12	1.753.073.982	0,12
38.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	1.634.472.076	0,12	1.976.800.000	0,14
39.	KECAMATAN HRAU	2.090.025.511	0,16	3.937.511.174	0,27
40.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1.681.321.007	0,13	1.815.737.375	0,13
41.	KECAMATAN KAPUR IX	1.928.933.715	0,14	1.965.636.826	0,14
42.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.000.000.000	0,67	9.515.976.803	0,66
43.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,059.810.420	0,38	5.059.810.420	0,35
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Seluruh OPD)				
	JUMLAH	1.335.163.791.758	100	1.437.773.986.244	100

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.602.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.762.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	10.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.078.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	7.367.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		8.103.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.496.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.496.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.496.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1.496.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD</i>	-			2 dokumen	16.350.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	17.990.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	16.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		17.990.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan Pendidikan dan pelatihan pegawaian berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-			22 orang 22 orang 60 stel	135.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	149.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	72.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		79.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	199.473.480,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	219.424.828,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.815.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		9.696.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	130.658.460,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		143.728.328,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.020,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	102.118.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		112.329.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	172.699.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	189.971.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.190.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.109.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	84.058.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		92.466.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	39.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		43.098.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.271.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		11.298.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Persentase Pengelolaan pendidikan dasar</i>	-			95 %	113.284.845.772,00						-	124.453.250.283,00			
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan rumah dinas</i>	-			9 ruang 7 ruang 31 ruang 1 paket 12 paket 4 kegiatan NA	69.983.451.275,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta	-	-	77.021.796.403,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebel sekolah Pengadaan perlengkapan siswa Pengelolaan dana BOS sekolah dasar Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabiltasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah				5 paket 18 paket 21 paket 31 paket 370 SD 366 SD 2 kegiatan 1 kegiatan NA 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 8 paket NA 14 paket NA 6 paket					huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani				
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	1.319.628.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.451.590.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	1.100.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.210.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				30 Unit	2.856.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.142.348.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	549.949.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		604.943.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	957.420.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.053.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				373 Peserta Didik	262.835.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		289.118.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	520.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		572.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				373 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				373 Satuan Pendidikan	37.971.401.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		41.768.541.320,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				5 Ruang	4.673.436.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.140.779.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				373 Orang	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	359.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		395.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	1.482.364.075,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.630.600.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Ruang	11.109.978.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		12.220.975.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	5.060.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.566.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan fasilitas parkir Pembangunan laboratorium Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penambahan ruang kelas sekolah baru Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebel sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan perlengkapan siswa Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar Perlengkapan dasar buku teks peserta didik Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	-			1 paket 12 paket 9 ruang 7 ruang NA 31 ruang 1 paket 6 paket 4 kegiatan 18 ruang NA paket 21 paket NA paket NA paket 366 SMP 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 57 SMP 4 ruang 1 ruang 3 ruang	28.905.482.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	31.898.087.133,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	520.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI, DAU YANG DITENTUKAN PENERAPAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		572.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.908.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI, DAU YANG DITENTUKAN PENERAPAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.098.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	750.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	3.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	967.084.997,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI-GULER-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.063.812.747,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	189.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		207.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				90 Orang	161.052.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		177.157.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				328 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	483.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULER-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		531.366.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				1 Ruang	147.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		162.305.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	504.111.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				328 Satuan Pendidikan	322.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		355.058.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	171.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		188.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan Penyediaan biaya personil peserta didik non formal / kesetaraan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	-			21 lembaga 21 lembaga 2252 WB 21 lembaga 2252 WB 1 kegiatan 21 lembaga 2252 WB 3 ruang	7.000.673.800,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	7.650.607.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				900 Peserta Didik	1.380.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.518.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>				2 Objek	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	<i>Persentase Pengelolaan Permuseuman</i>	-			90 %	105.000.000,00						-	115.500.000,00			
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	<i>Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman</i>	-			NA kegiatan	105.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	115.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				40 Orang	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		115.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		DINAS KESEHATAN						151.774.001.853,00										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						151.774.001.853,00							146.540.000.000,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						151.774.001.853,00							146.540.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1000 Orang/bulan	97.259.367.553,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		92.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		68.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	295.240.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	231.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		11.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	285.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	727.950.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	193.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	534.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	292.840.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	211.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	32.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	50.359.308.300,00						-	51.154.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.328.156.800,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	24.843.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	838.609.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	4.198.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	9.712.963.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		9.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	1.892.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	1.226.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				2 Paket	4.345.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																
			<i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i>				63000 Keluarga	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		88.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																
			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				22 Paket	301.644.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		325.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.644.151.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	26.059.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	210.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7136 Orang	178.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		68.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	335.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	335.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	52.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	57.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																
			<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		37.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>				22 Unit	17.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	1.674.000.000,00						-	1.471.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		58.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				1225 Orang	602.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		365.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	178.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				1 Dokumen	63.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	137.387.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	140.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>				1 Dokumen	137.387.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		22.200.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit</i>	-			100 %	350.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	350.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS		
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				130 Orang	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		350.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.640.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		13.823.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	-			100 %	174.350.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	125.110.300,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	174.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		125.110.300,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.929.948.000,00							1.829.948.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.304.000.000,00						-	1.204.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.304.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.204.000.000,00	PUSKESMAS TARAM		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.304.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI JASA UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.204.000.000,00	PUSKESMAS TARAM		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	625.948.000,00						-	625.948.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	625.948.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	625.948.000,00	PUSKESMAS TARAM		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.128.397.000,00							2.028.397.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.450.000.000,00						-	1.350.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.450.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.350.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI JASA UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.350.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	678.397.000,00						-	678.397.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	678.397.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	678.397.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	678.397.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		678.397.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
		PUSKESMAS RIMBO DATA						1.069.765.000,00							919.765.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.069.765.000,00							919.765.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.069.765.000,00							919.765.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	354.000.000,00						-	354.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	354.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	354.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.324.226.000,00							1.264.226.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	545.000.000,00						-	585.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	545.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	585.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	545.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		585.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	779.226.000,00						-	679.226.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	779.226.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	679.226.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	779.226.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		679.226.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
		PUSKESMAS PANGKALAN						2.319.600.000,00							2.061.600.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.319.600.000,00							2.061.600.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.319.600.000,00							2.061.600.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.578.000.000,00						-	1.320.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.578.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.320.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.368.055.000,00							1.278.055.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	586.000.000,00						-	596.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	586.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	596.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	586.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		596.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	782.055.000,00						-	682.055.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	782.055.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	682.055.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	782.055.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		682.055.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
		PUSKESMAS TANJUNG PATI						3.094.009.000,00							3.394.009.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.094.009.000,00							3.394.009.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.094.009.000,00							3.394.009.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.172.000.000,00						-	2.472.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.172.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.472.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.728.412.000,00							2.919.412.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.043.000.000,00						-	2.234.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.043.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.234.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.043.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.234.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	685.412.000,00						-	685.412.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	685.412.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	685.412.000,00	PUSKESMAS MUNGO		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	685.412.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		685.412.000,00	PUSKESMAS MUNGO
		PUSKESMAS PAKAN RABAA						2.394.914.000,00							2.199.914.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.394.914.000,00							2.199.914.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.394.914.000,00							2.199.914.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.655.000.000,00						-	1.460.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.655.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.460.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.185.597.000,00							1.194.597.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	601.000.000,00						-	660.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	601.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	660.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	601.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		660.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	584.597.000,00						-	534.597.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	584.597.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	534.597.000,00	PUSKESMAS PILADANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	584.597.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		534.597.000,00	PUSKESMAS PILADANG
		PUSKESMAS BATU HAMPAR						2.155.700.000,00							2.055.700.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.155.700.000,00							2.055.700.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.155.700.000,00							2.055.700.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.558.000.000,00						-	1.458.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.558.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.458.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.614.780.000,00							1.614.780.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	967.000.000,00						-	967.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	967.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	967.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	967.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		967.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	647.780.000,00						-	647.780.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	647.780.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	647.780.000,00	PUSKESMAS HALABAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	647.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		647.780.000,00	PUSKESMAS HALABAN
		PUSKESMAS MUARO PAITI						2.317.645.000,00							2.317.645.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.317.645.000,00							2.317.645.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.317.645.000,00							2.317.645.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.383.000.000,00						-	1.383.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.383.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.383.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.866.068.000,00							1.726.068.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	852.000.000,00						-	862.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	852.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	862.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	852.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		862.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.014.068.000,00						-	864.068.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.014.068.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	864.068.000,00	PUSKESMAS SIALANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.014.068.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		864.068.000,00	PUSKESMAS SIALANG
		PUSKESMAS KOTO BARU SMLG						3.068.003.000,00							3.468.003.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.068.003.000,00							3.468.003.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.068.003.000,00							3.468.003.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.257.000.000,00						-	2.657.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.257.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.657.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.607.424.000,00							2.607.424.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.885.000.000,00						-	1.885.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.885.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.885.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.885.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gugukak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.885.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	722.424.000,00						-	722.424.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	722.424.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	722.424.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	722.424.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		722.424.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
		PUSKESMAS MUNGKA						2.571.843.000,00							2.371.843.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.571.843.000,00							2.371.843.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.571.843.000,00							2.371.843.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.885.000.000,00						-	1.685.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.885.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.685.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.174.144.000,00							1.081.144.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	568.000.000,00						-	575.000.000,00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	568.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	575.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	568.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gugukak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		575.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	606.144.000,00						-	506.144.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	606.144.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	506.144.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	606.144.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		506.144.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
		PUSKESMAS KOTO TINGGI						1.866.825.000,00							1.781.825.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.866.825.000,00							1.781.825.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.866.825.000,00							1.781.825.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	970.000.000,00						-	985.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	970.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	985.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.743.624.000,00							1.593.624.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	893.000.000,00						-	893.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	893.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	893.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	893.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		893.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	850.624.000,00						-	700.624.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	850.624.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	700.624.000,00	PUSKESMAS MAEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	850.624.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		700.624.000,00	PUSKESMAS MAEK
		PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG						1.436.767.000,00							1.357.767.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.436.767.000,00							1.357.767.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.436.767.000,00							1.357.767.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	584.000.000,00						-	605.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	584.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	605.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			80 %	1.080.000.000,00			-	-	-	-	2.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1 Unit	1.080.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	106.000.000,00			-	-	-	-	187.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			72 %	540.000.000,00			-	-	-	-	870.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				11 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				50 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				11 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik</i>	-			80,72 %	8.900.000.000,00						-	6.390.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Sumber Daya Air yang dikelola/ terpelihara</i>	-			83,49 %	431.000.000,00			-	-	-	-	775.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				0 KM	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				2 Dokumen	178.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>				1 Unit	253.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jaringan irigasi yang dikelola</i>	-			82,46 %	8.469.000.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	5.615.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				0.833 KM	1.192.555.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				2.20 KM	4.969.725.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0.900 KM	1.847.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>				22.5 M³/Hari	3.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																
			<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun</i>				0 M³/Hari	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik</i>	-			50 %	2.700.000.000,00						-	1.700.000.000,00			
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang saluran drainase primer yg terbangun</i>	-			6436 m	2.700.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat	-	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				25 Sistem Drainase Perkotaan	2.700.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase Bangunan Gedung yang layak</i>	-			80 %	3.200.000.000,00						-	5.310.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan</i>	-			39 Unit	3.200.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	5.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		5.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>				250 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap</i>	-			61,43 %	36.649.719.100,00						-	51.100.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap</i>	-			676,47 Km	36.649.719.100,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	51.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				6 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																
			<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>				1 Jembatan	4.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				2.5 KM	5.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				4 KM	12.049.719.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				3 KM	6.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				5 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				1 Jembatan	4.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				9 Paket Pekerjaan	66.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				2 Lembaga	72.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				9 Badan Usaha	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	-			85 %	1.900.000.000,00						-	480.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	-			1 dokumen	1.600.000.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada	-			11 Dokumen	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai	-			20 Lokasi	250.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				8 Layanan	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan</i>	-			2 Lokasi	50.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																
			<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						400.000.000,00							465.000.000,00			
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						400.000.000,00							465.000.000,00			
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan</i>	-			100 %	300.000.000,00						-	210.000.000,00			
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi</i>	-			3 Kasus	300.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	-			20 %	100.000.000,00						-	255.000.000,00			
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi</i>	-			2 Kasus	100.000.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2.038.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	masyarakat		2.009.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	240.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	masyarakat		65.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	103.142.771,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	masyarakat		950.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				500 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	masyarakat		60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				13 Desa/Kelu rahan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	masyarakat		75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	masyarakat		850.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	masyarakat		255.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				50 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	masyarakat		166.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<i>Terlaksananya kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran</i>	-			100 Persen	55.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-	-	130.975.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		68.975.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		62.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya kegiatan investigasi kejadian kebakaran	-			100 Persen	15.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-	-	75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	-			100 Persen	47.490.444,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-	-	337.162.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				500 Orang	47.490.444,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		135.210.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				13 Desa/Kelu rahan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		125.932.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		76.020.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pambang unan IKK Sarilamak	-	-	402.132.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pambang unan IKK Sarilamak	-		75.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pambang unan IKK Sarilamak	-		326.632.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X	NON URUSAN						5.663.660.064,00							5.782.874.814,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.663.660.064,00							5.782.874.814,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota	-			100 Persen	5.663.660.064,00						-	5.782.874.814,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	5.238.874.814,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-	-	5.294.874.814,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	5.238.874.814,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		5.238.874.814,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		31.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	192.736.250,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-	-	241.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	53.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		53.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	34.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	35.736.250,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		37.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	4.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	-		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	402.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		40.227.144,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	-			4 dokumen 136 stel	490.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	-	1.825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				136 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		8.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	11.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		71.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	19.476.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		462.612.153,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			15 Unit 15 Unit	78.586.858,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	-	328.617.541,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	77.086.858,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		308.845.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		19.771.641,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	-			77 %	1.900.945.000,00						-	4.532.187.856,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30 Dokumen	16.665.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		612.152.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				136 Orang	1.720.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	7.675.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		54.219.194,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				22 laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		437.251.563,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				31 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-		104.940.375,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				30 Laporan	16.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-		115.714.254,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	996.933.563,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				27 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		349.801.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				24 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		367.291.313,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				20 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-		279.841.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>tersedianya dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah</i>	-			36 dokumen	18.025.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	332.331.063,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah</i>				7 Dokumen	9.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-		297.331.063,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.651.222.937,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3.646.222.937,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.980.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-	-	19.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.763.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	109.563.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12.359.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	8.079.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.063.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	9.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	59.865.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	393.959.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		950.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	593.368.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	32.004.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	407.028.600,00						-	780.576.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	61.233.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	33.368.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				120 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	10.000.000,00						-	67.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	67.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				200 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	10.000.000,00						-	50.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				1000 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.395.209.740,00							4.702.000.000,00			
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.335.209.740,00							4.662.000.000,00			
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.885.209.740,00						-	4.062.000.000,00			
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.999.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	79.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		27.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.210.119.940,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	-	3.331.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.200.000.340,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		3.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.119.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	74.960.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	9.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	64.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	280.000.000,00						-	380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						60.000.000,00							40.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	30.000.000,00						-	0,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				40 Kepala Keluarga	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		DINAS PANGAN							3.441.755.676,00						4.885.995.795,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.441.755.676,00							4.885.995.795,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.441.755.676,00							4.885.995.795,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.821.605.757,00						-	3.710.716.045,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.500.000,00			-	-	-	-	77.600.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.300.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.300.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.300.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.300.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.300.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.100.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>				200 Unit Rumah	4.400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	-		4.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</i>	-			48 %	0,00						-	2.000.000.000,00			
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian</i>	-			33 Lokasi	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				5 Lokasi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.514.530.145,00							9.373.662.900,00			
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						6.514.530.145,00							9.373.662.900,00			
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	4.529.723.945,00						-	4.876.500.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)</i>	-			65 dokumen	8.600.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD</i>	-			100 %	4.332.785.795,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	4.555.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Indeks Kualitas Air (IKA)</i>	-			65 Indeks	176.550.000,00						-	355.720.000,00			
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)</i>	-			24 Lokasi	176.550.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				1 Dokumen	37.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	19.520.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		159.720.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase kawasan kehati yang terkelola</i>	-			5,13 %	0,00						-	61.092.900,00			
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-				0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	61.092.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		61.092.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
			-				-	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				5 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota		266.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				35 Badan Usaha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</i>	-			83 %	34.051.000,00						-	25.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)</i>	-			28 Kelompok	34.051.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	22.006.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				2 Orang	12.045.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-			100 %	0,00						-	139.150.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumalh pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	-			16 Laporan	0,00			-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	-	139.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Pengaduan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota		139.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah. Persentase penanganan sampah	-			30 % 70 %	1.664.205.200,00						-	3.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase penanganan sampah</i>	-			70 %	1.664.205.200,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	3.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>				insinerator 1 Unit	8.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				10000 Ton	1.655.495.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.500.000.000,00							5.134.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.500.000.000,00							5.134.500.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.500.000.000,00							5.134.500.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.014.347.100,00						-	4.024.500.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.098.000,00			-	-	-	-	32.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.067.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	5.031.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.300.032.501,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.300.032.501,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	303.880.699,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	204.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	162.478.999,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	56.995.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	774.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	80.061.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	87.636.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	87.636.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.126.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	268.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	51.876.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	97.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	152.573.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	113.420.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	6.709.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	32.444.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	182.348.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	182.348.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				50000 Dokumen	182.348.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	230.999.900,00						-	420.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	105.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				2550 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	20.999.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				6 Laporan	20.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	105.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	34.002.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.285.849.751,00							5.157.000.000,00			
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5.285.849.751,00							5.157.000.000,00			
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.664.341.751,00						-	3.307.000.000,00			
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.352.856.751,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.352.856.751,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.235.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	14.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	52.350.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	42.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	214.900.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	174.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	<i>Persentase Nagari yang difasilitasi dalam penataan Nagari</i>	-			10 %	0,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	-			10 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				79 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	-			100 %	0,00						-	1.190.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			66 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>				320 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																
			<i>Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa</i>				79 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</i>				79 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat</i>	-			70 %	1.621.508.000,00						-	510.000.000,00			

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Indeks Pembangunan gender (IPG)</i>	-			95,95 %	212.222.600,00						-	213.222.850,00			
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah</i>	-			90,00 %	33.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				43 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG</i>				12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				10 Lembaga	19.629.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		19.613.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				100 Orang	10.535.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		10.551.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				10 Dokumen	61.263.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		28.263.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu</i>	-			100	173.180.000,00						-	150.480.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	-			0,0029 %	103.980.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Dokumen	49.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Perangkat Daerah	54.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	-			100 %	35.480.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	35.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	35.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		35.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	-			100 %	33.720.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				200 Orang	33.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga</i>	-			70 %	56.333.000,00						-	56.333.250,00			
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan kualitas keluarga dakam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak</i>	-			70 %	29.503.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	29.503.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	29.503.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		29.503.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	-			70 %	26.830.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	26.830.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	26.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		26.830.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Informasi Layak Anak	-			100 %	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi	-			3 Buah	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA)	-			Utama	67.074.000,00						-	73.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	-			90 %	54.076.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				20 Organisasi	44.076.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan</i>	-			100 %	12.998.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	12.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu</i>	-			100 %	341.735.000,00						-	453.435.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penurunan kekerasan terhadap anak</i>	-			0,033 %	82.435.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	153.435.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
			<i>Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu</i>				2 Kegiatan	4.425.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>				150 Orang	68.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		73.435.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</i>				24 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyediaan lembaga layanan</i>	-			100 %	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>				90 Layanan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	-			100 %	59.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				200 Orang	36.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				15 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						9.750.089.540,00							10.162.821.348,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-			95 %	3.751.943.640,00						-	4.182.286.848,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			95 %	5.371.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	31.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.555.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	2.816.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			95 %	3.472.642.140,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	3.472.786.848,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	3.470.787.140,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.470.786.848,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	1.855.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			95 %	71.520.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	71.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.678.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.522.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			50 %	18.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	380.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	97.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	36.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		36.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			95 %	86.810.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	77.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-			0,95	189.480.500,00						-	206.481.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk</i>	-			100 %	48.862.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	65.862.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			<i>Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				4 Kegiatan	15.862.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.862.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	-			70 %	140.618.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	140.618.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				26 Laporan	48.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		48.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				156 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOKB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				50 Laporan	32.018.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		32.018.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	-			74,8 %	3.710.896.400,00						-	3.709.284.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	-			64 %	1.458.307.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.458.307.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				52 Laporan	118.807.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		118.807.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				130 Laporan	800.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		800.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				130 Laporan	195.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		195.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				60 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				40 Organisasi	193.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		193.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	-			37,97 %	694.063.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	710.977.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				740 Orang	623.977.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		623.977.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				65 Organisasi	33.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				26 Laporan	37.086.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		37.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	-			27,5 %	983.934.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	990.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				130 laporan	741.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		741.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				130 laporan	815.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		815.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERHUBUNGAN						13.372.257.468,00							15.986.291.293,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.372.257.468,00							15.986.291.293,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						13.372.257.468,00							15.986.291.293,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	8.702.242.468,00						-	15.240.291.293,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.001.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	80.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	48.487.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	1.650.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	7.570.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.212.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan IKK Sarilamak	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	1.707.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	38.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	110.430.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjut an Peningkatan Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjut an Peningkatan Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				12 Laporan	96.975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjut an Peningkatan Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	-			100 %	542.295.000,00			-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjut an Peningkatan Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				6 Orang	189.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>				4 Laporan	110.015.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	63.522.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	63.522.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)</i>	-			100 %	133.470.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	133.470.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100	139.839.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	139.839.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	142.134.755,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	157.021.704,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.989.535,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	127.546.535,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12.768.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				1 0	17.675.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan Desiminasi informasi dan komunikasi publik	-			75 %	824.806.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				12 Rekomen dasi	34.220.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				5 Media	92.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)</i>	-			90 %	2.048.221.041,00						-	0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten /kota</i>	-			72 %	12.455.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>				5 Dokumen	12.455.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pengelolaan e-governmet di lingkungan pemerintah kabupaten lima puluh kota	-			74 %	2.035.766.041,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	128.073.041,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	14.335.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	12.786.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	7.038.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	26.455.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				43 Perangkat Daerah	1.847.079.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						88.161.000,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	-			87 %	88.161.000,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten/kota	-			87 %	88.161.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				30 Orang	31.526.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	5.265.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	24.435.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadada				30 Dokumen	20.755.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				43 Perangkat Daerah	250.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			75 %	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	0,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						4.606.323.371,00							7.107.766.137,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.448.838.471,00							6.433.316.137,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4.448.838.471,00							6.433.316.137,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	4.096.807.771,00						-	4.959.436.137,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan adminstrasi keuangan dinas	-			100 %	3.665.713.375,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	3.125.869.828,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				574 Orang/bulan	3.665.713.375,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		3.125.869.828,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	-			12 Bulan	86.449.396,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	565.560.783,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.003.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		60.666.963,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	17.732.296,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		129.703.732,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.601.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		97.418.894,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	9.126.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		120.818.531,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	49.987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		156.952.663,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administratur dinas</i>	-			100 %	268.300.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	859.031.975,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		106.059.375,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	74.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		240.537.600,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	192.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		512.435.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas</i>	-			100 %	76.345.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	408.973.551,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				29 Unit	71.085.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		220.572.613,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	5.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		188.400.938,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase peningkatan Koperasi yang telah diawasi</i>	-			10 %	50.000.000,00						-	45.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	-			70 Koperasi	50.000.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	45.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		45.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan KSP/USP yang sehat	-			10 %	30.000.000,00						-	73.310.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	-			90 KSP/USP	30.000.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	73.310.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				10 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		73.310.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase peningkatan skala usahanya</i>	-			20 %	51.960.700,00						-	60.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</i>	-			15 koperasi	51.960.700,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				60 Keluarga	51.960.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan</i>	-			30 %	220.070.000,00						-	545.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	-			4 kegiatan	220.070.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	545.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				35 Unit Usaha	84.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		520.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				50 Orang	136.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	-			30 %	0,00						-	749.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		98.310.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	-			20 %	61.745.900,00						-	217.860.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</i>	-			9 Jenis Sembako	29.996.100,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	137.860.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				240 Laporan	29.996.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		137.860.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.003.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	1.765.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	159.277.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.123.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.209.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.091.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.196.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.640.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	106.017.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	582.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	179.465.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	901.168.634,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				20 Unit	116.649.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	2.070.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	782.449.634,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	19.983.000,00						-	225.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.992.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	5.867.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	2.207.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	2.917.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	8.990.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.917.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	4.145.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				3 Dokumen	1.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	20.000.000,00						-	90.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1100 Pelaku Usaha	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	500.800.000,00						-	1.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.800.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.050.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	72.675.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				500 Pelaku Usaha	257.425.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.024.000,00						-	30.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.024.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	5.024.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA						9.493.774.929,00							10.145.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.217.474.929,00							8.415.100.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						7.217.474.929,00							8.415.100.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 % 20 %	4.897.153.029,00						-	4.685.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	-			20 %	295.519.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	220.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				`1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	225.019.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	54.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		144.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				30 Kegiatan	87.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				200 Orang	146.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	126.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				150 Orang	67.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah Atlit yang berprestasi	-			20 %	211.241.750,00			-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	186.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				30 Pelatda	74.377.750,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		86.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				120 Orang	136.864.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase peningkatan aktifnya Induk Organisasi Keolahragaan	-			20 %	50.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak</i>	-			30 %	1.070.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata</i>	-			20 %	950.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	950.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata</i>	-			20 %	120.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>				3 Lokasi	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	330.000.000,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>				200 Orang	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	130.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				30 Orang	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	X	NON URUSAN						96.300.000,00							80.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						96.300.000,00							80.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 % 20 %	96.300.000,00						-	80.000.000,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			25 %	96.300.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.663.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administarsi Keuangan	-			100 %	2.979.057.153,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	3.218.928.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/bulan	2.969.448.153,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		8.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.495.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		1.940.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		1.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	4.812.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	5.363.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.145.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45.785.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		640.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	243.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	342.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	162.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		251.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	48.980.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	1.021.860.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	45.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.330.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.860.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	-			7,49 %	673.500.000,00						-	4.834.444.200,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah13 Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten Jumlah Pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat	-			10876/25909 judul/eksemplar 26 Perpustakaan 11 orang	315.055.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota	-	422.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				26 Perpustakaan	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				26 Perpustakaan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				30 Layanan	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				360 Eksemplar	47.255.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Eksemplar	2.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-			11000 orang 64.19 %	358.444.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah AdaiKBAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nagari, Perpustakaan dan Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota	-	4.412.444.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				2 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah AdaiKBAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nagari, Perpustakaan dan Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				13 Perpustakaan	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nagari, Perpustakaan dan Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Perpustakaan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nagari, Perpustakaan dan Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota		4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno</i>				1 Orang	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Kab. Lima Puluh Kota		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>				2 Eksemplar	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Kab. Lima Puluh Kota		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						35.983.500,00							287.136.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku</i>	-			40.16 %	26.315.500,00						-	125.996.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Laporan	1.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola</i>	-			0 unit	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota	-	6.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				0 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		6.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Penerapan e-Arsip Terintegrasi</i>	-			1 Instansi	12.380.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	66.846.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				10 Pengguna	10.380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		21.846.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Pesentase OPD/ Nagari dan Instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip</i>	-			100 %	9.668.000,00						-	147.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah</i>	-			3 Unit	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota	-	9.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>				0 Berkas	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		3.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				228 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		5.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip</i>	-			8 Instansi	9.668.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota	-	81.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				0 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				45 Arsip	9.668.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		6.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan</i>				0 SOP	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		13.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						5.355.432.898,00							5.890.976.188,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.355.432.898,00							5.890.976.188,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.355.432.898,00							5.890.976.188,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	4.179.669.162,00						-	4.597.636.078,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	-			100 %	36.078.900,00			-	-	Administrasi Kantor	-	39.686.790,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	7.573.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Kantor		8.331.290,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Administrasi Kantor		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Administrasi Kantor		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Administrasi Kantor		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Administrasi Kantor		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Administrasi Kantor		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Administrasi Kantor		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	-			12 Bulan	108.668.500,00			-	-	-	-	119.535.350,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.271.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.398.100,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	302.860.000,00			-	-	-	-	333.146.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.746.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	252.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		277.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	143.660.000,00			-	-	-	-	158.026.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	142.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		156.365.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	1.510.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.661.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Persentase Peningkatan Produksi Tangkap</i>	-			5 %	165.145.000,00						-	181.659.500,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Terlaksananya Pembinaan Bagi KUB</i>	-			13 Unit 4300 Ton 16 Dokumentasi	66.400.000,00			-	-	Kelompok Usaha Perikanan	-	73.040.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</i>				13 Unit	66.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		73.040.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk Pokmaswas Terlaksananya Pemberian Bantuan Benih dan Pakan untuk Lubuk Larangan Terlaksananya Pembinaan bagi Pokmaswas dan KUB</i>	-			4300 Ton 3 Dokumen 3 Paket 24 Dokumentasi	98.745.000,00			-	-	Kelompok Usaha Perikanan	-	108.619.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				70 Orang	98.745.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		108.619.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>				0 Kelompok	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</i>				0 Unit Usaha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	875.763.736,00						-	963.340.110,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				0 Rekomendasi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Bimbingan Teknis Temu Usaha Kemitraan dan Akses Permodalan Jumlah Demplot Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) untuk KK Miskin Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Mendapatkan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar Jumlah Obat-obatan Ikan Jumlah Pelatihan/Training Petugas dan Penyuluh Perikanan Jumlah Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Perikanan Jumlah Penambahan Lahan Menggunakan Excavator Jumlah Penilaian Kelas Kelompok dan Lomba Kelembagaan Kelompok Perikanan Jumlah Rapat Koordinasi Petugas dan Penyuluh Perikanan Jumlah Sampel Ikan dan Air yang Diuji Jumlah Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan yang tersedia Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber)	-			1 Angkatan 95 KK 10 Kelompok 1 Paket 4 Kali 35 Kelompok 20 Ha 180 Kelompok 8 Kali 12 Sampel 4 Paket 150 KK	875.763.736,00			-	-	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	963.340.110,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				83 Kelompok	555.763.736,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Kelompok Pembudidaya Ikan		611.340.110,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				30 Kelompok	176.864.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA INSENTIF DAERAH	-	-	Kelompok Pembudidaya Ikan		194.550.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				200 Kelompok	143.136.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Kelompok Pembudidaya Ikan		157.449.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Rekomend asi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Rekomend asi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat															
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat															
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat															
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN	
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	-			40 Kg/Kapit a/Tahun 5 %	134.855.000,00						-	148.340.500,00		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Lomba Forikan Tk Provinsi Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten dan Provinsi Terlaksananya Lomba Mewarnai dan Jiggle Gemarikan untuk Anak PAUD/TK Terlaksananya Pembinaan bagi Pokhlasar dan Terdatanya Harga Ikan Konsumsi Terlaksananya Rehab Billboard Gemarikan Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Forikan	-			2 Paket 2 Paket 1 Paket 12 Dokuemntasi 280 Meter 2 Dokumen	134.855.000,00			-	-	Kelompok Usaha Perikanan	-	148.340.500,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko															
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	134.855.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		148.340.500,00	DINAS PERIKANAN	
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						18.211.989.426,00							19.624.766.946,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						18.211.989.426,00							19.624.766.946,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						18.211.989.426,00							19.624.766.946,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	14.682.792.975,00						-	15.075.124.895,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Singkronisasi Perencanaan	-			85 %	122.154.300,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Dinas	-	140.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.594.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Dinas		16.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.777.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Dinas		9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.647.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Dinas		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.481.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Dinas		3.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.781.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Dinas		4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	129.999.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		130.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	24.000.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	411.400.000,00			-	-	-	-	411.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				19 Laporan	146.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				47 Laporan	260.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik</i>	-			100 %	198.850.000,00			-	-	-	-	198.850.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				154 Unit	104.445.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	536.427.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), INSENTIF FISKAL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani		540.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani		85.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemumian				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani, Penangkar Benih		60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	-			78 %	1.870.903.851,00						-	2.572.966.951,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Masterplan/ ActionPlan Pengembangan Prasarana Pertanian Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	-			1 dokumen 1 dokumen	1.216.873.100,00			Melanjutka n Pengemb an Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani	-	1.922.966.951,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	916.873.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani		1.622.966.951,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	-			2 Jenis	654.030.751,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	kelompok tani	-	650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				4 Unit	454.030.751,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	kelompok tani		450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	kelompok tani		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani		314.810.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	Kelompok Tani		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	-			3 %	866.865.100,00						-	866.865.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.818.220,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.918.045,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		4.900.077,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.209.933,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	12.149.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		11.779.350,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		12.910.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	8.344.502.326,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	13.874.143.475,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	8.344.502.326,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		13.854.873.902,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.996.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.008.060,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.542.210,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.753.593,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		4.658.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.655.345,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.655.365,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	9.942.570,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.222.770,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.395.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.464.100,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.036.430,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.823.470,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	117.313.009,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		66.550.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.814.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		31.962.634,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.986.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.200.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		37.094.970,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.194.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		9.982.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45.014.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		471.811.549,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	484.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.229.371.495,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	484.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		523.941.495,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		173.030.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		532.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.767.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	238.774.745,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.658.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.067.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		97.715.365,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		136.400.880,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		468.653.086,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	-			10 %	374.994.000,00						-	4.408.532.876,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Peternakan	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	509.108.831,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.907.767,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		489.201.064,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya persentase populasi dan produksi ternak yang berkualitas</i>	-			10 %	59.994.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.260.721.869,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>				12 Laporan	59.994.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.208.397.597,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		52.324.272,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	42.485.520,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		31.864.140,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak				0 Kasus	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.621.380,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendali dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	468.746.256,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak														
			Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.826.576,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		104.099.640,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		344.820.040,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Persentase Populasi dan Produksi Ternak yang Berkualitas	-			10 %	315.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.127.470.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0 Ton	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		10.621.380,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1100 Ekor	315.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Dosis	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.116.849.020,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas	-			10 %	0,00						-	9.188.315.593,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pembangunan sarana pertanian/Pertanian	-			10 %	0,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	8.681.569.287,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		399.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		7.483.669.287,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		798.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase pelaksanaan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	506.746.306,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum														
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				0 Ha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		266.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				0 Ha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		240.546.306,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	-			10 %	64.150.000,00						-	2.207.913.378,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dan Tersedianya bahan pangan dan olahan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	-			10 %	18.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	255.686.431,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		255.686.431,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kader zoonosis				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				0 Wilayah	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				30 Kasus	5.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	12.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan dan Deteksi Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dan Peredaran Hewan dan bahan pangan asal hewan	-			10 %	46.150.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	46.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.938.091.727,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		55.342.980,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.882.748.747,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Hasil Peternakan bagi Pelaku Usaha</i>	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	14.135.220,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.135.220,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik</i>				9 Unit Usaha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian</i>	-			10 %	30.059.200,00						-	292.087.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-			10 %	30.059.200,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	260.931.902,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		127.922.410,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				12 Laporan	30.059.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		120.263.836,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.745.656,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	<i>Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor)</i>	-			10 %	0,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	31.156.048,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan														
			<i>Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		31.156.048,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan</i>	-			10 %	700.000.000,00						-	1.130.247.933,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Peternakan	-			10 %	700.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.130.247.933,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		303.558.508,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		399.948.197,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		219.534.475,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				20 Unit	700.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		207.206.753,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		SEKRETARIAT DAERAH						39.854.395.000,00							41.785.277.435,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						37.535.313.242,00							38.692.737.677,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						37.535.313.242,00							38.692.737.677,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	-			100 %	27.163.248.442,00						-	27.804.570.669,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	248.630.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		613.840.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				72 Unit	896.175.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.011.260.250,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				18 Unit	16.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.514.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	32.640.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.841.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	198.170.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		208.078.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																
			<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>				10 Ha	9.525.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.304.750,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH</i>	-			100 %	484.553.194,00			-	-	-	-	454.765.194,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	181.389.194,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		181.389.194,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				20 Paket	165.120.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		173.376.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	138.044.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	73.772.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.461.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	63.568.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.746.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				52 Orang	113.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		118.965.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	-			100 %	114.926.500,00			-	-	-	-	120.672.825,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	81.652.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.734.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	11.879.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.473.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	21.395.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.464.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X	NON URUSAN						2.319.081.758,00							3.092.539.758,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.319.081.758,00							3.092.539.758,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	-			100 %	2.319.081.758,00						-	3.092.539.758,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4.818.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		12.499.754,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	95.477.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	825.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	70.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		245.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	12.774.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	12.022.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		380.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	797.726.700,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.655.766.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	241.675.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		426.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	124.039.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan</i>	-			100 %	2.078.151.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		41.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	191.199.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	215.130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	-			100 %	2.531.445.438,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	3.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	405.017.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	109.395.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.972.553.438,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	44.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	12.045.953.341,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	12.044.448.341,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	11.765.708.341,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.765.708.341,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	227.745.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		226.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	52.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	63.141.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	44.810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			100 %	130.647.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	263.574.458,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		48.271.377,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		48.154.249,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	27.147.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		48.406.659,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		48.406.513,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	23.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		47.835.660,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	4.569.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		133.575.433,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	4.177.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.929.334,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3.837.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.929.334,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				3 Dokumen	4.718.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		68.300.797,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	6.609.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		68.259.004,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				3 Dokumen	3.809.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.929.334,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			100 %	1.189.045.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	6.001.666.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	513.463.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.501.755.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		137.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	423.133.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			100 %	790.020.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.783.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	30.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		483.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				12 Dokumen	21.625.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	738.385.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	-			100 %	11.372.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	4.997.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	6.375.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	-			100 %	18.727.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	315.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	9.077.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	9.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	-			100 %	7.320.532.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	13.981.460.208,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	6.430.738.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		12.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	4.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		131.460.208,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	6.825.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.703.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.568.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	47.434.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administarsi Keuangan	-			100 %	4.303.555.952,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang	-	4.413.402.328,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	4.263.403.952,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		4.263.403.952,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22.746.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		37.550.438,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		43.033.093,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		43.538.208,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		25.876.637,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	32.871.190,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang	-	39.744.140,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	32.871.190,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		39.744.140,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	65.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang	-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	436.776.048,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang	-	1.000.574.734,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		29.976.782,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	127.610.448,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		438.750.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	58.169.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		9.732.820,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.971.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		78.092.432,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		28.182.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		52.840.700,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	185.965.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		363.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		52.068.720,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	252.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		340.869.100,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-			100 %	644.626.675,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang	-	889.446.825,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	239.890.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		484.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	23.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		176.357.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	330.986.675,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Bapelitbang		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	25.122.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		66.561.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>				2370 Usulan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	420.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Nilai Indeks Inovasi Daerah & Terfasilitasinya Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah	-			1500	25.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	420.475.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14.969.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	16.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	16.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		18.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		21.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22 Laporan	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	19.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	12.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	9.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	84.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	90.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		63.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				105 Orang	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				95 Orang	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		13.500.000,00	BADAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	383.334.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	397.736.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.516.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.516.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		8.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	51.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		52.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		29.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	1.218.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.220.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	76.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		78.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	202.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		204.000.000,00	BADAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	686.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	686.200.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	580.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.700.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	81.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		83.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	624.996.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	630.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		8.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	154.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		156.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	464.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		466.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	313.064.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	319.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	266.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		268.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		29.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.064.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	-			undefined undefined	174.690.336.509,00						-	164.886.082.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	-			WTP .	1.126.993.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.169.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	167.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		170.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	170.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		175.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		28.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		42.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				18 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		21.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				9 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		21.000.000,00	BADAN KEUANGAN		
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				86 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		63.000.000,00	BADAN KEUANGAN		
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				8 Dokumen	107.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	379.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		31.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				0 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		37.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				65 Laporan	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		43.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		78.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		49.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		140.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	172.497.643.509,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	162.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				79 Laporan	165.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		155.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	1.497.643.509,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				79 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	323.700.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	325.582.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	187.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		188.617.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				129 Orang	136.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		136.965.000,00	BADAN KEUANGAN
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	620.603.000,00						-	659.500.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	620.603.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	659.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	70.161.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		72.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		47.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	10.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	260.029.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		280.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				12 Laporan	10.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	24.504.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		26.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	10.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	62.011.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		64.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	108.380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	1.459.016.391,00						-	1.657.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.459.016.391,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.657.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Unit	300.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		420.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	80.018.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		82.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				9 Laporan	45.257.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		47.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	16.083.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.916.210.383,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	4.916.210.383,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				140 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	224.300.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	601.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	8.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	53.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	54.216.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10000 Dokumen	34.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				200 Dokumen	20.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				6500 Dokumen	6.653.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	3.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	272.091.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.060.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 Dokumen	18.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1500 Dokumen	44.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				400 Dokumen	209.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	75.496.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	8.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				250 Orang	75.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				430 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				60 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	70.477.700,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	7.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6500 Dokumen	16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	9.737.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				24 Orang	17.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				50 Laporan	8.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	7.492.825.724,00						-	16.580.262.801,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 %	61.179.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	-	319.383.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		76.043.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		45.626.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		38.021.875,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.392.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		45.626.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		30.417.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1800 Laporan	1.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		15.208.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	34.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		121.670.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	199.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		273.757.500,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				40 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		793.500.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	-			Level 3	381.013.000,00						-	1.399.204.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	-			95 %	106.108.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	-	380.218.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomend asi	60.322.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		197.713.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomend asi	45.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		182.505.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	-			95 %	274.905.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.018.985.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				43 perangkat daerah	50.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		190.108.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				43 perangkat daerah	50.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		349.801.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				1 Kegiatan	124.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		205.318.125,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				1 perangkat daerah	50.439.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		273.757.500,00	INSPEKTORAT
	X	NON URUSAN						25.285.000,00							98.856.875,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						25.285.000,00							98.856.875,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	25.285.000,00						-	98.856.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administarsi Umum Perangkat Daerah	-			95 %	25.285.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	98.856.875,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		98.856.875,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN GUNUANG OMEH						1.620.849.468,00							1.940.127.336,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.558.904.468,00							1.837.075.336,00	
	7.01	KECAMATAN						1.558.904.468,00							1.837.075.336,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.522.354.468,00						-	1.767.810.336,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.230.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	23.046.300,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.788.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.500.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.375.427.468,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.552.910.936,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.375.427.468,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.552.910.936,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	29.016.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	23.500.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	12.426.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	4.590.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		9.500.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.251.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	48.753.100,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.251.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		41.753.100,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	86.430.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	119.600.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	72.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		72.600.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	30.765.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	18.765.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		18.765.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	9.550.000,00						-	8.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	9.550.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	8.500.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	61.945.000,00						-	103.052.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	61.945.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	103.052.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	61.945.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		103.052.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
		KECAMATAN BUKIK BARISAN						1.473.670.905,00							1.442.830.905,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.425.348.581,00							1.372.563.605,00	
	7.01	KECAMATAN						1.425.348.581,00							1.372.563.605,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.329.362.581,00						-	1.279.396.581,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.536.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukik Barisan	-	13.265.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.388.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukik Barisan		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukik Barisan		3.672.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukik Barisan		1.456.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukik Barisan		2.280.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.940.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukik Barisan		1.570.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN di Kecamatan Bukik Barisan		3.764.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.040.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah di Kecamatan Bukik Barisan	-	8.040.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	8.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah di Kecamatan Bukik Barisan		8.040.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26.973.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah di Kecamatan Bukik Barisan	-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Barang Milik Daerah di Kecamatan Bukik Barisan		2.920.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			78 %	48.000.000,00						-	37.036.800,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Masyarakat	-			12 dokumen	48.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	pelayanan masyarakat di 5 nagari	-	37.036.800,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	pelayanan masyarakat di 5 nagari		37.036.800,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	-			78 %	15.406.000,00						-	20.973.224,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persetase Rata-Rata Nilai Swadaya Masyarakat Rata-Rata Nilai Swadaya Kepuasan Masyarakat	-			20 % 20 %	11.756.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	unsur-unsur kemasyarakatan di Kecamatan Bukik Barisan	-	16.867.100,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakat an	5.036.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	unsur-unsur kemasyarakatan di Kecamatan Bukik Barisan		7.907.100,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	unsur-unsur kemasyarakatan di Kecamatan Bukik Barisan		8.960.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	3.650.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	PKK 5 Nagari di Kecamatan	-	4.106.124,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				12 Keluarga	3.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	PKK 5 Nagari di Kecamatan		4.106.124,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	27.580.000,00						-	27.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.580.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan Bukik Barisan	-	27.580.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	27.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan Bukik Barisan		27.580.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5.000.000,00						-	7.577.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	5 Nagari di Kecamatan Bukik Barisan	-	7.577.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	5 Nagari di Kecamatan Bukik Barisan		7.577.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	X	NON URUSAN						48.322.324,00							70.267.300,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						48.322.324,00							70.267.300,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	48.322.324,00						-	70.267.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Alat Tulis dan Logistik Administrasi Perangkat Daerah		4.160.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	41.625.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Alat Tulis dan Logistik Administrasi Perangkat Daerah		60.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	380.000,00			-	-	-	-	1.977.300,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.977.300,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
		KECAMATAN SULIKI						1.909.632.038,00							2.352.765.123,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.909.632.038,00							2.352.765.123,00	
	7.01	KECAMATAN						1.909.632.038,00							2.352.765.123,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.857.632.038,00						-	2.183.765.123,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	KECAMATAN SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.240.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	KECAMATAN SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	41.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	49.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	14.000.000,00						-	69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	12.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga K emasyarakat an	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.000.000,00	KECAMATAN SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	-			undefined undefined	1.445.502.967,00			-	-	-	-	1.956.100.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.445.002.967,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.950.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	34.575.600,00			-	-	-	-	75.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.088.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	5.657.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.100.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.500.000,00			-	-	-	-	2.010.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	68.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				12 Keluarga	3.025.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				25 Keluarga	4.399.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				25 Keluarga	5.648.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				12 Keluarga	1.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				25 Keluarga	8.564.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	3.500.000,00						-	32.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	3.500.000,00			-	-	-	-	32.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	27.100.000,00						-	80.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.100.000,00			-	-	-	-	80.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				150 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				5 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	27.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	7.920.000,00						-	131.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	7.920.000,00			-	-	-	-	131.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.300.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	12.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
		KECAMATAN MUNGKA						1.434.058.354,00							1.927.650.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.432.745.354,00							1.925.650.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.432.745.354,00							1.925.650.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			0 %	1.356.418.354,00						-	1.648.650.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan laporan RPD</i>	-			20 %	12.142.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	3.477.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				4 Dokumen	3.236.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	2.076.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	8.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	350.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			78 %	14.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	-			20 %	7.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	-			20 %	7.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	-			78 %	21.000.000,00						-	31.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyusunan Laporan OPD	-			20 %	14.000.000,00			-	-	-	-	21.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga K emasyarakat an	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan Pemberdayaan TP-PKK Nagari	-			7 Nagari	7.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				145 Keluarga	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	-			78 %	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	-			20 %	0,00			-	-	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terjaganya Hubungan Baik dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	-			20 %	0,00			-	-	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	-			78 %	54.500.000,00						-	76.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum	-			20 %	54.500.000,00			-	-	-	-	76.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1 Orang	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				60 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	-			78 %	21.000.000,00						-	45.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	-			20 %	21.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
		KECAMATAN PAYAKUMBUH						2.134.710.943,00							9.584.318.506,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.044.694.943,00							9.399.549.506,00	
	7.01	KECAMATAN						2.044.694.943,00							9.399.549.506,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.866.554.543,00						-	9.113.153.806,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD	-			20 persen	20.005.000,00			-	-	-	-	23.600.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.505.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.600.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	-			20 persen	1.692.999.743,00			-	-	-	-	8.595.806.346,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1.688.609.743,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.590.606.346,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.390.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.200.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah	-			20 persen	3.546.000,00			-	-	-	-	4.200.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.591.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.955.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Daerah	-			20 persen	64.861.300,00			-	-	-	-	231.169.860,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.350.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	17.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.212.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.146.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.394.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.485.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	8.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.650.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.538.260,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 persen	60.600.000,00			-	-	-	-	65.410.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	25.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.410.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	-			20 persen	21.542.500,00			-	-	-	-	119.597.100,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.442.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.697.100,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum undefined	-			20 persen undefined undefined	3.000.000,00			-	-	-	-	73.370.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.370.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			78 %	22.725.000,00						-	42.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	-			12 bulan	2.750.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	-			12 bulan	19.975.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	19.975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		22.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	-			78 %	27.931.000,00						-	70.456.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Rata rata nilai swadaya masyarakat</i>	-			20 persen	24.561.000,00			-	-	-	-	48.456.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				1 Lembaga K emasyarakat an	4.901.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.456.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	19.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.995.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				2 Lembaga K emasyarakat an	1.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	1.375.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				50 Keluarga	1.375.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada</i>	-			78 %	9.943.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	9.943.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				5 Laporan	9.943.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca</i>	-			78 %	28.450.000,00						-	28.485.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya urusan pemerintahan umum</i>	-			4 nagari	28.450.000,00			-	-	-	-	28.485.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	28.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.485.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	89.091.400,00						-	134.454.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	89.091.400,00			-	-	-	-	134.454.100,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				7 Dokumen	6.097.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.714.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				7 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.789.300,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				7 Dokumen	14.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.280.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				7 Dokumen	24.994.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.420.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>				7 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.750.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.050.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	-			20 persen	5.860.000,00			-	-	-	-	13.213.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.213.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 persen undefined	63.200.000,00			-	-	-	-	141.506.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	57.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.506.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
		KECAMATAN LUAK						1.690.897.137,00							2.174.688.876,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.667.681.137,00							2.147.663.876,00	
	7.01	KECAMATAN						1.667.681.137,00							2.147.663.876,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.599.471.137,00						-	2.051.663.876,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.016.000,00			-	-	-	-	3.075.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	672.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.025.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	672.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.025.000,00	KECAMATAN LUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.586.580.542,00							1.818.073.982,00	
	7.01	KECAMATAN						1.586.580.542,00							1.818.073.982,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.542.165.542,00						-	1.731.073.982,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	8.100.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi	-	8.300.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.200.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.400.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.600.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			20 Persen	1.382.520.542,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi	-	1.429.873.982,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.380.720.542,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.427.173.982,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		800.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			1 Dokumen	500.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi	-	1.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		1.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			13 orang	9.500.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi	-	11.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	9.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Penye laraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		11.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	45.380.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	58.400.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		4.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		16.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		1.700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		7.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	2.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		3.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		1.700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	16.880.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		25.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	0,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi	-	10.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Instansi		10.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	45.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	-	54.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		4.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	50.865.000,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi	-	158.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	48.015.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		50.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	2.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		3.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Instansi		50.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Instansi		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Instansi		50.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	-			78 %	0,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM	-			80 %	0,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat	-	3.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat		3.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai IKM	-			12 bulan	0,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat	-	2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	-			78 %	7.415.000,00						-	26.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus maju	-			20 %	4.415.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat	-	5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				8 Lembaga K emasyarakatat an	4.415.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				8 Lembaga K emasyarakatat an	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat	-	16.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing				50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	-			78 %	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai IKM	-			1 Kegiatan	0,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	-			78 %	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai IKM	-			8 Nagari	35.000.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	Masyarakat	-	40.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Pengemba ngan Masyarakat Madani	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	-			78 %	2.000.000,00						-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.562.382.076,00						-	1.837.600.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.620.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	8.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	820.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 bulan Dokumen	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.414.612.076,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.566.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1.413.518.076,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.550.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.094.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-		12.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.800.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	7.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	87.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.800.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	51.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		6.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.050.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	61.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		70.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		25.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	1.996.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.996.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Gadang Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	11.890.000,00						-	42.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.890.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	34.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 bulan Lembaga Ke masyarakata n	4.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		19.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		15.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				35 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				35 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	4.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	26.000.000,00						-	32.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	26.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	32.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		7.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	32.204.000,00						-	50.200.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.385.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.285.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	26.819.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	29.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.200.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.745.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		8.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	19.574.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
		KECAMATAN HARAU						2.090.025.511,00							3.937.511.174,42	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.090.025.511,00							3.937.511.174,42	
	7.01	KECAMATAN						2.090.025.511,00							3.937.511.174,42	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.026.492.311,00						-	3.715.311.174,42	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.133.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	31.911.670,01	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.114.306,81	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.123.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.114.306,81	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.029.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.268.037,31	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.594.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.244.611,71	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.201.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		2.344.609,74	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	1.061.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		20.825.797,63	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.823.863.811,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	3.144.069.504,41	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.819.823.811,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.096.769.504,41	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	977.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.186.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.950.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				24 Laporan	944.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		33.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	933.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.850.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.104.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	1.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.516.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	18.700.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	11.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		13.200.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.016.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		5.500.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	59.425.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	228.250.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		8.250.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		55.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.884.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		22.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.506.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.125.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		110.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	38.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.500.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.100.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	116.380.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		2.200.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.180.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		99.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	63.850.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	121.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	61.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		104.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	2.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	KECAMATAN HARAU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	1.861.000,00						-	51.700.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	621.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	621.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.240.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	40.700.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		40.700.000,00	KECAMATAN HARAU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	11.746.200,00						-	55.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	10.457.200,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga K emasyarakat an	8.767.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	1.690.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	1.289.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	0,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3 Keluarga	1.289.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	KECAMATAN HARAU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	2.122.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	965.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	965.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	1.157.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	1.157.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	40.620.000,00						-	27.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	40.620.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	27.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	875.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		16.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	39.745.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	7.184.000,00						-	66.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	7.184.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	66.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				33 Dokumen	1.219.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	1.115.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	1.237.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>				11 Dokumen	1.237.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				6 Laporan	1.279.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				11 Laporan	1.097.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU						1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	
	7.01	KECAMATAN						1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</i>	-			100 %	1.633.811.007,00						-	1.763.737.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	5.209.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.734.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun	-			1 Dokumen	2.735.000,00			-	-	-	-	3.080.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.735.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.080.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	-			20 %	12.360.000,00			-	-	-	-	15.570.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	4.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.570.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	75.373.000,00			-	-	-	-	92.300.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.746.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.300.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.421.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	58.306.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	10.500.000,00			-	-	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	25.340.000,00			-	-	-	-	27.750.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	59.930.000,00			-	-	-	-	58.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	57.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	-			78 %	12.860.000,00						-	14.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	-			20 %	4.410.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakat an	4.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	8.450.000,00			-	-	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	8.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	-			78 %	34.650.000,00						-	38.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	-			6 Nagari	34.650.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	34.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
		KECAMATAN KAPUR IX							1.928.933.715,00							1.965.636.826,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.821.988.715,00							1.852.186.826,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	83.085.000,00			-	-	-	-	58.550.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	41.085.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.550.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tiingkat Kecamatan	-			80 %	14.500.000,00						-	6.200.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-			undefined undefined	2.000.000,00			-	-	-	-	4.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	12.500.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di Tingkat Kecamatan	-			80 %	8.300.000,00						-	11.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	8.300.000,00			-	-	-	-	8.900.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.700.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	27.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	6.000.000,00						-	10.350.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	10.350.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.750.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X	NON URUSAN						106.945.000,00							113.450.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						106.945.000,00							113.450.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	106.945.000,00						-	113.450.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.800.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.100.000,00			-	-	-	-	6.400.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.600.000,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	2.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	60.445.000,00			-	-	-	-	63.150.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.100.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.145.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.250.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.600.000,00			-	-	-	-	39.700.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	12.220.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		12.833.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.160.798.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	3.318.838.523,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.129.757.750,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		3.286.245.473,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	19.191.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.150.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	11.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.442.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.143.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	23.250.994,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	22.143.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		23.250.994,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	28.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	29.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	28.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		29.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	268.095.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	281.498.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.341.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		9.808.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	45.002.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		47.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		37.527.914,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13.500.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		14.175.630,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	143.511.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		150.686.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	184.839.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	194.043.864,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	71.527.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		75.102.489,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	40.524.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		42.546.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	72.788.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		76.395.375,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.610.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	165.690.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.250.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.412.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	27.360.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		28.278.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	108.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		134.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.463.440,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	207.811.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	158.980.160,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		166.929.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	21.100.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.155.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	17.383.080,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		18.727.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	1.390.196.500,00						-	1.955.313.929,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.390.196.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.955.313.929,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250 Orang	130.774.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		231.000.231,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				350 Orang	215.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.313.449,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				158 Keluarga	42.185.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				6 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		340.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				54 Orang	740.237.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.008.000.249,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				6 Dokumen	127.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		176.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	-			85 %	2.272.577.910,00						-	1.998.157.964,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	-			85 %	2.272.577.910,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.998.157.964,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				390 Orang	542.413.520,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		130.693.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	1.147.556.190,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		1.193.196.464,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				12 Laporan	582.608.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		674.268.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	164.713.400,00						-	110.775.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	164.713.400,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	110.775.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				100 Orang	164.713.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		110.775.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	499.781.000,00						-	524.770.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	499.781.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	524.770.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				360 Orang	179.616.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		188.596.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				360 Orang	320.165.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		336.173.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	647.407.000,00						-	679.777.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	647.407.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	679.777.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				360 Orang	203.028.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		213.179.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				360 Orang	223.179.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		234.337.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				14 Dokumen	221.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	-		232.260.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						5.059.810.420,00							5.059.810.420,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.898.146.420,00							4.934.867.023,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.898.146.420,00							4.934.867.023,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.182.146.420,00						-	4.119.613.523,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	14.506.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		14.506.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.783.045.820,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	3.760.582.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.783.045.820,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		3.760.582.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	72.100.600,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	72.561.023,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	38.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		38.460.423,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				60 Paket	31.470.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		31.470.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				20 Laporan	2.630.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		2.630.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.000.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	96.704.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				50 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		59.704.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-	-	175.260.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		157.410.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		17.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	716.000.000,00						-	815.253.500,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	12.000.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				5 Orang	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	594.000.000,00			-	Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	-	-	673.471.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				2 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				50 Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			0				10	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				29 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				60 laporan	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		90.013.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			0				10	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				13 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		554.458.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	10.000.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	124.782.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		124.782.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	NON URUSAN						161.664.000,00							124.943.397,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						161.664.000,00							124.943.397,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	161.664.000,00						-	124.943.397,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.320.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	22.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	28.320.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		22.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	133.344.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	102.663.397,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	133.344.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	-		102.663.397,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	J U M L A H							1.335.163.791.756,00							1.578.196.728.872,42		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta indikator terkait IPM antara lain Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan didaerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026 sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET KINERJA			
		2024	2025		2026
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,98	71,36	73,25	71,74
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,07	70,14	73,59	70,20
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	14,32	13,61	14,50
	c. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,37	8,44	9,47	8,52
	d. Pengeluaran Per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	10.140	10.364	10.364	10.606
2.	Angka Kemiskinan (%)	6,65	6,52	6,52	6,39
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,44	2,27	3,71	2,07
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	4,72	4,72	4,86
5.	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,14	32,97	32,97	33,80
6.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	47,85	49,68	51,23	51,51
7.	Rasio Gini	0,230	0,225	0,207	0,220

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2024

Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2023 dan memperhatikan target Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, sehingga dalam penetapan target indikator kinerja makro tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian jika salah satunya diakibatkan realisasi tahun 2023 telah melampaui target Tahun 2024 dan 2025 yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Daerah menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2024-2026 dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024 – 2026

No	Misi/Indikator Tujuan	Target			
		2024	2025		2026
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,98	71,36	73,25	71,74
2	Indeks ABS-SBK	1,9	2,1	2,5	2,3
	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional				
1	Pertumbuhan ekonomi	4,62	4,72	4,72	4,86
2	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	32,14	32,97	32,97	33,80
3	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	47,85	49,68	51,23	51,51
	Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah				
1	Indeks desa membangun	0,7878	0,8036	0,8036	0,8149
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya				
1	Indeks reformasi birokrasi	64,17 (CC)	69,58 (B)	69,58 (B)	75,00 (B)
	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	79,75	81,78	81,78	83,82
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,27	72,68	72,68	73,09

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2024

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024 - 2026

No	Misi/Indikator Sasaran	Target			
		2024	2025		2026
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan				
1	Rata-rata lama sekolah	8,37	8,44	9,47	8,52
2	Harapan lama sekolah	14,13	14,32	13,61	14,50
3	Angka harapan hidup	70,07	70,14	73,59	70,20
4	Angka Prevalensi stunting	4,29	3,29	15	2,29
5	Indeks ABS SBK	1,9	2,1	2,5	2,3
	Misi 2 : Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional				
1	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	53,98	60,73	60,73	67,48
2	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	30,14	30,97	30,97	31,80
3	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,83	3,89	3,89	3,94
4	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,88	7,01	7,01	7,14
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan	9,67	10,35	10,35	11,04
	Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah				
1	Indeks desa membangun	0,7878	0,8036	0,8036	0,8149
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya				

No	Misi/Indikator Sasaran	Target			
		2024	2025		2026
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	69,68 (B)	72,34 (BB)	72,34 (BB)	75,00 (BB)
2	Indeks inovasi daerah	1.200	1.500	49,91	1.700
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,97	93,96	93,96	95,96
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”					
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	89,13	93,48	93,48	97,83
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	59.95	61.43	61.43	62.78
3	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,51	0,50	0,50	0,50
4	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	86,42	88,22	88,22	90,12
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	83,35	85,05	85,05	86,85
6	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92	80,72	89	81,52
7	Rasio rumah layak huni	0,166	0,169	0,205	0,173
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,27	72,68	72,68	73,09
9	Persentase ketaatan terhadap RTRW	80	85	85	90
10	Indeks Risiko Bencana Daerah	67-61	61-55	120	55-49

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2024

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target Indikator Kinerja Daerah untuk tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024-2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) / Pertumbuhan ekonomi	%	4,62	4,72	4,86
2	Angka kemiskinan	%	6,65	6,52	6,39
3	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	26,44	26,16	25,86
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta rupiah	32,14	32,97	33,80

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
5	PDRB per kapita (ADHB)	Juta rupiah	47,85	49,68	51,51
6	Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah	10.140	10.364	10.606
7	Rasio Gini	Indeks	0,230	0,225	0,220
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,35	93,48	93,61
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,98	71,36	71,74
10	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,37	8,44	8,52
11	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,13	14,32	14,50
12	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,07	70,14	70,20
13	Persentase balita gizi buruk	%	3,7	3,4	3,1
14	Prevalensi balita gizi kurang	%	7,32	7,20	7,08
15	Pravalensi Stunting	%	4,29	3,29	2.29
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	3,6	3,5	3,5
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,97	93,96	95,96
18	Cakupan desa/nagari siaga aktif	%	80	85	90
19	Angka partisipasi angkatan kerja	%	55,75	56,24	56,73
20	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,13	73,23	73,33
21	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,44	2,27	2,07
22	Rasio penduduk yang bekerja	%	98,90	98,93	98,95
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	76,4	77,4	78,4
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	79,13	79,23	79,33
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,97	93,96	95,96
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,67	10,35	11,04
27	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	81,94	82,00	82,06
29	Penguatan cadangan pangan	%	755,94	855,94	1.005,94
30	Penanganan daerah rawan pangan	jumlah	5	3	0
31	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,79	3,85	3,91
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
I	PENDIDIKAN				
1	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	301	315	320
2	Angka partisipasi kasar (APK)				
a.	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	52,69	53,19	53,69
b.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	110,68	111,56	112,44
c.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	90,8	92,43	94,06
3	Angka partisipasi murni (APM)				
a.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,80	99,97	99,97
b.	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,97	87,40	88,83
4	Angka partisipasi sekolah (APS)				
a.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,48	99,57	99,66
b.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%s	97,67	97,88	98,09

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
5	Angka Putus Sekolah :				
a.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,001	0,001	0,001
b.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01
6	Angka kelulusan (AL) :				
a.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100
b.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100
7	Angka melanjutkan (AM) :				
a.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100
8	Fasilitas Pendidikan:				
a.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Ruang	1756	2006	2509
b.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Ruang	482	507	642
9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	89,00	89,05	89,10
10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	25,90	25,91	25,92
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	10,86	10,90	10,85
12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	8,80	8,82	8,84
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,48	0,49	0,50
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	1,81	1,82	1,84
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	44,75	45,25	45,75
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	89,91	90,66	91,41
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	46,32	46,42	46,52
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,90	2,95	3,00
II	KESEHATAN				
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	9,55	9,54	9,53
2	Angka Kematian Balita	/ 1000 KH	10,52	10,51	10,5
3	Angka Kematian Neonatal	/ 1000 KH	8,74	8,73	8,72
4	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	97,2	97,1	97,0
5	Rasio posyandu per satuan balita	1000 penduduk	18	19	20
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	30.000 penduduk	8,8	8,8	8,8
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1.000 penduduk	0.003	0.003	0.003
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	78,3	78,5	79
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	79,1	79,3	79,6
10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80	80	80
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat	%	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	perawatan				
12	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95	95	95
13	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	90	90
15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100.000 Penduduk	284	284	284
16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100.000 Penduduk	< 10	< 10	< 10
17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100
18	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	90	90
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
20	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100
21	Angka kejadian Malaria	1.000 Penduduk	< 1	< 1	< 1
22	Tingkat kematian akibat malaria	1.000 Penduduk	0	0	0
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	1.000 Penduduk	< 0,1	< 0,1	< 0,1
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100
25	Cakupan kunjungan bayi	%	77,1	77,2	77,3
26	Cakupan puskesmas	/ 30.000 pddk	1,7	1,7	1,7
27	Cakupan puskesmas pembantu	/17.000 pddk	3,9	3,9	3,9
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	77.1	77.2	77.3
29	Cakupan pelayanan nifas	%	76.4	76.5	76.6
30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	56,8	56,6	56,4
31	Cakupan pelayanan anak balita	%	63	63,3	63,5
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Orang	490	495	500
33	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100
35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100
36	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	90	90	90
37	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0.036	0.035	0.034
38	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
39	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100
40	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
41	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100
42	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
43	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	%	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	standar				
44	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
45	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
46	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
47	Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar	%	100	100	100
48	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
49	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
a.	Pekerjaan Umum:				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	79,75	81,78	83,82
2	Persentase gedung strategis yang terbangun	%	89,17	93,48	97,83
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	59,95	61,43	62,78
4	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,0033	0,0033	0,0033
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	72,56	74,35	75,98
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	83,35	85,05	86,85
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	79,92	80,72	81,52
8	Persentase penduduk berakses air minum	%	83,35	85,05	86,85
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	83,35	85,05	86,85
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,16	0,14	0,13
b.	Penataan Ruang:				
1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80	85	90
IV	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.166	0.169	0.173
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,6985	0,6996	0,7008
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(%)	31,37	32,94	34,58
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(%)	84,78	89,01	93,46
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	(%)	0,69	0,72	0,76
6	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	(%)	31,90	33,20	34,50
7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	(%)	31,65	32,95	34,25
8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	264	264	264
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana	%	20%	20%	100%
2	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	20%	20%	100%
3	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	20%	20%	100%
4	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	%	64	70	76
5	Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran	%	67	74	81
VI	SOSIAL				
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	88,2	89,6	91,3
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	95,2	96,2	97,1
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	93,8	94,0	94,3
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	98	98	98
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	98	98	98
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65	66	67
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	7,6	7,6	7,6
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
I	TENAGA KERJA				
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	10	10	10
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	10	10	10
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	550	600	650
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	7000	7250	7500
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	180	180	180
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	70	70	70
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	90	90	90
II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	9,01	9,4	9,8
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	14,28	17,14	17,14
3	Rasio KDRT	%	0,003	0,002	0,001
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	99800	100000	102000
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0029	0,0029	0,0029
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	%	6,1	6,7	7,3
III	PANGAN				
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	405,45	417,75	430,06
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kg/ka/thn	6.515	6.604	6.693
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	82	84	86
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	53,14	74,15	100
IV	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	ada	ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	ada	ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	ada	ada	Ada
4	Indeks kualitas Air (IKA)	Indeks	56,06	56,15	56,24
5	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	89,77	89,88	89,98
6	Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	67,67	69,15	70,63
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	(%)	89	92,5	96

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD	2	2	2
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	47	71	100
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	objek	17	17	18
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	objek	9	14	19
12	Penetapan hak MHA	MHA	1	2	2
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	(%)	23,33	24,05	24,05
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	(%)	23,33	24,05	24,05
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	persen	67	83	100
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	31,65	37,97	44,30
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	(%)	100	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani	(%)	60	70	70
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	(%)	28	30	30
20	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(%)	71	70	70
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai operasional TPA	>=71	>=71	>=71
22	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	(%)	2	2	2
V	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	(%)	98,65	98,70	98,75
2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	(%)	95	95	95
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	(%)	100	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	(%)	100	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	(%)	98,65	98,70	98,75
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	(%)	43,4	43,5	43,6
7	Perekaman KTP Elektronik	(%)	99,20	99,40	99,50
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	(%)	45	50	55
9	Kepemilikan akta kelahiran	Dokumen	7500	7500	7500
VI	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	84	85	86
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	1,25	0	0
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	8	10	12
VII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,1	0,95	0,95
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,20	2,18	2,16
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	60	65	70
4	Ratio Akseptor KB	%	1 : 5	1 : 4	1 : 4
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	74,6	74,8	75,0
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 ² 19 tahun (ASFR 15-19)	angka	22	22	22
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,6	0,5	0,5
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,63%	8,25%	7,8%
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27,1%	27,5%	28,2%
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80	83	85
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	80	83	85
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	83	84	85
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	6	8	9
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	78	78	79
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	70	70	70
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	rasio	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	65	70	70
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	65	70	70
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	74,6	74,8	75,0
VIII	PERHUBUNGAN				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	4.400.000	4.500.000	4.500.000
2	Rasio ijin trayek	per 100.000 penduduk	2,96	2,97	2,98

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	6162	6237	6313
4	Persentase layanan angkutan darat	persen	2,20%	2,40%	2,60%
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	93%	93%	95%
6	Pemasangan Ramburambu	persen	62%	63%	65%
7	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang	4.400.000	4.500.000	4.500.000
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	kendaraan	140.000	145.000	150.000
IX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	kelompok	18	20	22
2	Indek keterbukaan Informasi Publik	Indeks	80	81	82
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks	3,40	3,50	3,60
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	85	90	95
X	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase koperasi aktif	%	69,12	72,02	74,89
2	Jumlah koperasi aktif	Unit	150	157	164
3	Persentase Usaha Mikro	UMKM	911.402,25	911.402,25	911.402,25
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	4,94	5,94	6,94
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	29,25	29,35	29,40
XI	PENANAMAN MODAL				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	3.388	3.557	3.735
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	Rupiah	442.141.672.715	464.248.756.350	487.461.194.168
3	Nilai Realisasi PMDN	Rupiah	419.132.887.011	440.089.531.361	462.094.007.929
4	Nilai realisasi PMA	Rupiah	2.530.209.297	2.656.719.761	2.789.555.749
XII	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	60%	65%	70%
2	Persentase wirausaha muda	%	0,05%	0,06%	0,07%
3	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	8	9	10
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	114	122	134
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	142	58	150
6	Jumlah prestasi olahraga	Orang	44	46	50
XIII	STATISTIK				
1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	65	75	80
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	OPD	65	75	80
XIV	PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	41,88	47,47	47,60

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
XV	KEBUDAYAAN				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	5	5	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	110	110	115
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	70	75	75
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	20	25	25
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	85	90	95
XVI	PERPUSTAKAAN				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	2.510	2.548	2.586
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	31.416	34.716	38.316
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,00	1,00	1,00
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	%	0.82	0.83	0.83
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	15.012	15.657	16.362
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	6	8	9
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	11,00	12,25	13,25
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	4	4,5	5
XVII	KEARSIPAN				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	39,54	44,54	49,54
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	60	60	60
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	64,00	70,00	75,00
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	59,00	64,00	70.00
C.	URUSAN PILIHAN				
I	PARIWISATA				
1	Kunjungan wisata	orang	1.362.420	1.637.312	1.858.136
2	Lama kunjungan Wisata	hari	0,8	0,9	1
3	PAD sektor pariwisata	Rp	18.000.000.000	24.000.000.000	30.000.000.000
4	Tingkat hunian akomodasi	%	75,06	79,02	83,28
II	PERTANIAN				
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	5,18	5,38	5,58
III	PERDAGANGAN				
1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	50	55	60
IV	PERINDUSTRIAN				
1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,0807	0,0887	0,0986

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
V	PERIKANAN				
1	Produksi perikanan	Ton	45.454,91	45.691,76	45.928,60
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita /Tahun	42	43	44
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	85	87	90
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	4.100	4.300	4.500
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Ton	Data tangkap: 4.100 Data budidaya: 45.454,91	Data tangkap: 4.300 Data budidaya: 45.691,76	Data tangkap: 4.500 Data budidaya: 45.928,60
D.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
I	SEKRETARIAT DEWAN				
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		Ada	Ada	Ada
II	KEUANGAN				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,75	3,75	3,75
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	35,98	36,08	36,15
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	13,56	13,69	13,79
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp.	15.451.653 .549	15.760.68 6.620	16.075.90 0.352
6	Penetapan APBD	Perda	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
III	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang/JP	10	13	15
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	13	13,50	13,75
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	55	60	65
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	350	400	500
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	73	75	78
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30	40	50
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100
8	Merit System	Indeks	Baik	Sangat baik	Sangat baik
9	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks	75	80	85
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	20	20	20
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	30,23	32,56	34,88
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkandi daerah.	Persen	23,26	23,26	23,26
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Persentase tindak lanjut temuan				
	Ekstern	Persen	83,00	83,50	85,00
	Intern	Persen	84,50	85,00	86,00
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah rencana kerja tahunan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, dimana program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD merupakan penggalan dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2025. Program dan Kegiatan ini tidak saja merupakan rencana teknokratik dari masing-masing Perangkat Daerah tetapi juga diperkaya dengan usulan dan masukan dari masyarakat melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta reses DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diharapkan dapat memenuhi amanat RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025, pedoman bagi perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta pedoman bagi *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2025.

Berkaitan dengan hal di atas serta untuk menjamin terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun 2025 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati (Kepala Daerah) dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi terhadap penjabaran RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2025.
5. Seluruh Perangkat Daerah dan *stakeholders* dan/atau pelaku pembangunan lainnya berkewajiban melaksanakan program-program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 secara terintegrasi dan dengan mewujudkan sinergitas antar *stakeholder* terkait.
6. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
7. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dilakukan secara berkala setiap triwulan dan pada akhir tahun pelaksanaan RKPD terhadap indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah dan lembaga resmi lainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Evaluasi RKPD juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan dilaporkan sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan perundangan.

Di samping beberapa kaidah yang dirumuskan di atas, maka untuk kesuksesan pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2025, maka diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya, termasuk dukungan dari DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Nagari dan masyarakat, serta seluruh *stakeholders* yang merasa berkepentingan dan memiliki Kabupaten Lima Puluh Kota.





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

Jl. Drs. Aziz Haily, MA - Sarilamak

Kode Pos 26271

Telp (0752) 7470700 - Fax (0752) 7470774

bapelitbang50kota@gmail.com